



RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Mojokerto
Tahun 2022

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I – 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I – 3
1.4. Maksud dan Tujuan	I – 5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I – 5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II – 1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II – 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II – 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II – 17
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II – 36
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II – 94
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II – 97
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II – 133
2.2.1 Permasalahan Pembangunan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II – 133
2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	II – 133
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III – 12
3.2.1 Pendapatan.....	III – 13
3.2.2 Belanja.....	III – 16
3.2.3 Pembiayaan.....	III – 18
3.2.4 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah.....	III – 20
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV – 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	IV – 10
4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.....	IV – 12
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V – 1
5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022.....	V – 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI – 1
BAB VII PENUTUP	VII – 1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Relevansi Tema Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2021.....	I - 5
Tabel 2.1	Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Mojokerto Tahun 2020...	II - 1
Tabel 2.2	Kondisi Geologi Kota Mojokerto 2020.....	II - 3
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Mojokerto.....	II - 4
Tabel 2.4	Potensi Genangan Air di Kota Mojokerto.....	II - 14
Tabel 2.5	Jumlah Bencana Kebakaran di Kota Mojokerto 2016-2020.....	II - 15
Tabel 2.6	Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto 2016-2020.....	II - 16
Tabel 2.7	Komposisi Penduduk Kota Mojokerto menurut Kelompok Umur Tahun 2016-2020.....	II - 16
Tabel 2.8	Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Tingkat Pendidikan 2016-2020.....	II - 17
Tabel 2.9	Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Agama 2016-2020.....	II - 17
Tabel 2.10	Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 18
Tabel 2.11	Pertumbuhan PDRB per Sektor Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 19
Tabel 2.12	Distribusi PDRB per Sektor Kota Mojokerto 2016-2020.....	II - 20
Tabel 2.13	PDRB Atas Dasar Berlaku Kota Mojokerto Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020.....	II - 21
Tabel 2.14	PDRB Per Kapita Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 21
Tabel 2.15	Laju Inflasi Kota Kediri Tahun 2016-2020.....	II - 22
Tabel 2.16	Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 22
Tabel 2.17	Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto Tahun 2016-2020	II - 23
Tabel 2.18	IPM Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 23
Tabel 2.19	IPG Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 24
Tabel 2.20	TPT Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 25
Tabel 2.21	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2016-2020...	II - 25
Tabel 2.22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 26
Tabel 2.23	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 26

Tabel 2.24	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 27
Tabel 2.25	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 27
Tabel 2.26	Angka Partisipasi Kasar Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 28
Tabel 2.27	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 29
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 29
Tabel 2.29	Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 30
Tabel 2.30	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 30
Tabel 2.31	Angka Harapan Hidup Kota di Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 30
Tabel 2.32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 31
Tabel 2.33	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 31
Tabel 2.34	Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 32
Tabel 2.35	Jumlah Club Olahraga, Gedung Olahraga dan Organisasi Olahraga Kota Mojokerto dan Jawa TImur Tahun 2016-2020.....	II – 32
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 32
Tabel 2.37	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II – 33
Tabel 2.38	Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 34
Tabel 2.39	Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 34
Tabel 2.40	Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 35
Tabel 2.41	Guru Pendidikan Dasar Berkualifikasi Min D4/S1 di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 35
Tabel 2.42	Angka Kematian Ibu di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 36
Tabel 2.43	Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 37
Tabel 2.44	Persentase Balita Stunting di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020	II - 37

Tabel 2.45	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 38
Tabel 2.46	Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 38
Tabel 2.47	Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 m) di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 38
Tabel 2.48	Persentase Penanganan genangan/banjir di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 39
Tabel 2.49	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 39
Tabel 2.50	Rasio Jaringan Irigasi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 39
Tabel 2.51	Rasio Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020..	II - 40
Tabel 2.52	Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 40
Tabel 2.53	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 40
Tabel 2.54	Persentase Permukiman yang Tertata di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 41
Tabel 2.55	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 41
Tabel 2.56	Persentase Cakupan Petugas Linmas 2016-2020.....	II - 41
Tabel 2.57	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman Keindahan) 2016-2020.....	II - 42
Tabel 2.58	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota 2016-2020.....	II - 42
Tabel 2.59	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 2016-2020.....	II - 43
Tabel 2.60	Persentase Penegakan PERDA.....	II - 44
Tabel 2.61	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman di Kota Mojokerto 2016-2020.....	II - 44
Tabel 2.62	Persentase Menurunnya Gangguan KAMTIBMAS di Kota Mojokerto 2016-2020.....	II - 44
Tabel 2.63	Persentase Menurunnya Pelanggaran PERDA dan PERWALI di Kota Mojokerto 2016-2020.....	II - 44

Tabel 2.64	Persentase Kampung Siaga Bencana/Mitigasi Bencana di Kota Mojokerto 2016-2020.....	II - 45
Tabel 2.65	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 45
Tabel 2.66	Persentase PMKS yang tertangani di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 46
Tabel 2.67	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 46
Tabel 2.68	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 47
Tabel 2.69	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 47
Tabel 2.70	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan sarana Prasarana Di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 48
Tabel 2.71	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana Prasarana tanggap darurat lengkap di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 48
Tabel 2.72	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta usia lanjut tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.....	II - 49
Tabel 2.73	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 49
Tabel 2.74	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 50
Tabel 2.75	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 50
Tabel 2.76	IDG Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 50
Tabel 2.77	Ketersediaan Pangan Utama Kota Mojokerto Tahun 2016-2020	II - 51
Tabel 2.78	Ketersediaan Energi dan Protein Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 51
Tabel 2.79	Skor PPH Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 51

Tabel 2.80	Persentase Permasalahan Pertanahan yang diselesaikan di Kota Mojokerto 2016-2020.....	II - 52
Tabel 2.81	Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 52
Tabel 2.82	Indeks Kualitas Udara di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 53
Tabel 2.83	Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 53
Tabel 2.84	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 53
Tabel 2.85	Cakupan Penerbitan KTP elektronik di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 54
Tabel 2.86	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 54
Tabel 2.87	Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 55
Tabel 2.88	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 56
Tabel 2.89	Rasio Bayi ber Akta Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 56
Tabel 2.90	Rasio Pasangan ber Akta Nikah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 57
Tabel 2.91	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 57
Tabel 2.92	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 58
Tabel 2.93	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 58
Tabel 2.94	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 59
Tabel 2.95	Persentase LPM Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 59
Tabel 2.96	Persentase LPM Berprestasi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 59
Tabel 2.97	Persentase PKK Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 60
Tabel 2.98	Persentase Posyandu Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 60
Tabel 2.99	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 60

Tabel 2.100	Pemeliharaan Pasca program pemberdayaan masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 61
Tabel 2.101	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2015-2019	II - 61
Tabel 2.102	TFR di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 61
Tabel 2.103	Rata-rata Anak per Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 62
Tabel 2.104	Rasio Akseptor KB di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 62
Tabel 2.105	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 62
Tabel 2.106	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 63
Tabel 2.107	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 63
Tabel 2.108	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 63
Tabel 2.109	Rasio ijin Trayek di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 64
Tabel 2.110	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 64
Tabel 2.111	Persentase Layanan Angkutan Darat Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 64
Tabel 2.112	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 65
Tabel 2.113	Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 65
Tabel 2.114	Rasio Panjang jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 66
Tabel 2.115	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 66
Tabel 2.116	Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/Terminal/Bandara per Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 67
Tabel 2.117	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 67
Tabel 2.118	Jaringan Komunikasi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 68
Tabel 2.119	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler dalam 3 bulan terakhir di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 69

Tabel 2.120	Jumlah Internet/Hotspot Masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 69
Tabel 2.121	Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 70
Tabel 2.122	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop, Laptop dan Notebook) di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 70
Tabel 2.123	Persentase Koperasi Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020..	II - 71
Tabel 2.124	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 72
Tabel 2.125	Realisasi Investasi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 72
Tabel 2.126	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 73
Tabel 2.127	Persentase Wirausaha Muda di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 74
Tabel 2.128	Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 74
Tabel 2.129	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 74
Tabel 2.130	Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 75
Tabel 2.131	Penyelenggaraan Festival di Kota Mojokerto Tahun 2015-2019...	II - 77
Tabel 2.132	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 77
Tabel 2.133	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 77
Tabel 2.134	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 78
Tabel 2.135	Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 78
Tabel 2.136	Produksi Perikanan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 78
Tabel 2.137	Jumlah Konsumsi Ikan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 79
Tabel 2.138	Persentase Kunjungan Wisatawan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 79
Tabel 2.139	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 79

Tabel 2.140	Produktivitas pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 80
Tabel 2.141	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Ketersediaan Listrik di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 80
Tabel 2.142	Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Gas Bumi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 81
Tabel 2.143	Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 82
Tabel 2.144	Pedagang Informal mendapat Pembinaan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 82
Tabel 2.145	IKM di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 83
Tabel 2.146	Tersedianya dokumen perencanaan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 84
Tabel 2.147	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 85
Tabel 2.148	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 85
Tabel 2.149	Persentase SiLPA terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 85
Tabel 2.150	Realisasi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 86
Tabel 2.151	Proporsi Pendapatan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 86
Tabel 2.152	Realisasi Belanja Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020...	II - 86
Tabel 2.153	Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 87
Tabel 2.154	Temuan dan rekomendasi BPK dan APIP di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 87
Tabel 2.155	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 88
Tabel 2.156	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 89
Tabel 2.157	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 89
Tabel 2.158	Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 90
Tabel 2.159	Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 90

Tabel 2.160	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 91
Tabel 2.161	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 91
Tabel 2.162	Persentase Pelayanan Keprotokolan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 92
Tabel 2.163	Nilai SAKIP Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 92
Tabel 2.164	Peringkat LPPD Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 93
Tabel 2.165	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 93
Tabel 2.166	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020.....	II - 93
Tabel 2.167	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 94
Tabel 2.168	Tersusun dan terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2016-2020.....	II - 94
Tabel 2.169	Terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2016-2020.....	II - 95
Tabel 2.170	Penyelenggaraan LITBANG Tahun 2016-2020.....	II - 95
Tabel 2.171	SPM Urusan LITBANG Tahun 2016-2020.....	II - 96
Tabel 2.172	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II - 96
Tabel 2.173	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II - 97
Tabel 2.174	Nilai Tukar Petani di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II - 98
Tabel 2.175	Angka Kriminalitas Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 98
Tabel 2.176	Jumlah Demonstrasi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 99
Tabel 2.177	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 99
Tabel 2.178	Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II - 100
Tabel 2.179	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah..	II - 101

Tabel 3.1	Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	III - 5
Tabel 3.2	Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).....	III - 6
Tabel 3.3	Distribusi Persentase PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Persen).....	III - 6
Tabel 3.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	III - 8
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2019-2023.....	III - 14
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Mojokerto Tahun 2019-2023.....	III - 16
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Mojokerto Tahun 2019-2023.....	III - 18
Tabel 3.8	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022.....	III - 19
Tabel 4.1	Penjabaran Visi.....	IV - 2
Tabel 4.2	Linieritas Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama.....	IV - 7
Tabel 4.3	Keselaran Kebijakan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2022.....	IV - 12
Tabel 4.4	Keselaran Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2022.....	IV - 13
Tabel 4.5	Linieritas Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2022.....	IV - 13
Tabel 4.6	Keselaran Indikator Sasaran Pembangunan Kota Mojokerto dengan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	IV - 14
Tabel 4.7	Linieritas Program Prioritas Kota Mojokerto terhadap Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2022.....	IV - 15
Tabel 5.1	Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2022.....	V - 1
Tabel 5.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022.....	V - 3
Tabel 6.1	Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	VI - 1
Tabel 6.2	Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022.....	VI - 1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I - 4
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto.....	II - 2
Gambar 2.2 Penggunaan Lahan Kota Mojokerto.....	II - 5
Gambar 2.3 Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Mojokerto.....	II - 15
Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2016-2018.....	III - 9
Gambar 3.2 Laju Inflasi Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.....	III - 10
Gambar 3.3 Inflasi di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020.....	III - 11



WALIKOTA MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2022 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Dearah Kota Mojokerto Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun 2022.

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan rancangan RENJA-PD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022.

- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota berkewajiban menyusun RENJA-PD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang disusun berpedoman pada RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Juli 2021



Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



Abd. Rachman Tuwo Mn.

ABD. RACHMAN TUWO MN., S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19730520 199303 1 007

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 231/E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2022

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2022**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022 merupakan periode ketiga dalam dokumen RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya maupun dengan dokumen anggaran, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD

adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam RPJMD akan dijabarkan secara operasional per tahun selama lima tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah yang dituangkan ke dalam RPKD yang berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada RENSTRA Perangkat Daerah.

Sedangkan keterkaitan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran, bahwa seluruh dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang sebelumnya melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang masih perlu dirumuskan secara bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nonom 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen

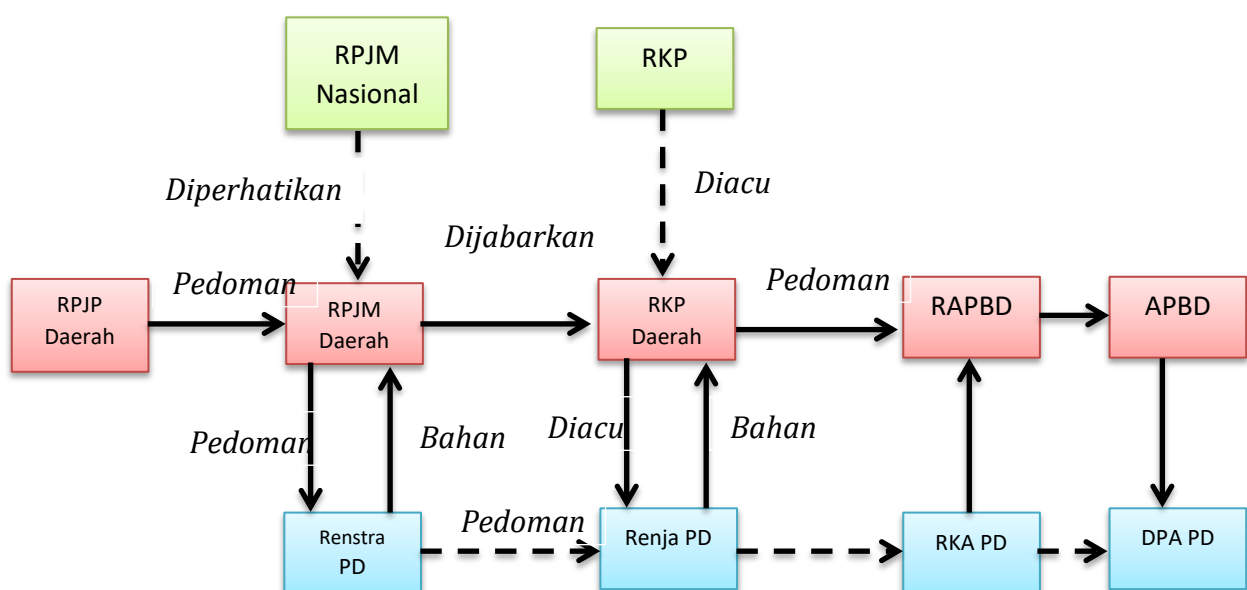
perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1. 1: Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN

Untuk dokumen perencanaan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2022, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Mojokerto tahun 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022.

RKPD Tahun 2022 merupakan periode ke-5 dalam RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 dan tahun ke-4 dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Berdasarkan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, arah kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Pelayanan Dasar didukung Penguatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

Tabel 1.1. Relevansi Tema Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2022

NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Pelayanan Dasar didukung Penguatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi dan pemerintah pusat; dan
- c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Mojokerto serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Mojokerto.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan dan kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode penyusunan RPJMD, keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra PD , Renja PD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menyebutkan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tatacara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sub bab ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengurutan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bagian ini merupakan telaahan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Evaluasi meliputi seluruh urusan baik wajib maupun pilihan pemerintah daerah khususnya menyangkut realisasi capaian kinerja program tahun lalu.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini mengemukakan beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi baik yang berhubungan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah

maupun program-program lain yang mendapatkan perhatian dalam rangka identifikasi permasalahan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perkonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan implementasi program perekonomian untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai dasar untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2022.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Menjelaskan tentang keterkaitan prioritas pembangunan RKP 2022, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pem

angunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Untuk menggambarkan kondisi daerah Kota Mojokerto, pada bab ini menyajikan data dan menggambarkan kondisi daerah Kota Mojokerto yang berkaitan dengan aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Berikut merupakan kondisi daerah Kota Mojokerto.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kota Mojokerto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 20,217 km² atau 20.217 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah utara berbatasan dengan Sungai Brantas, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

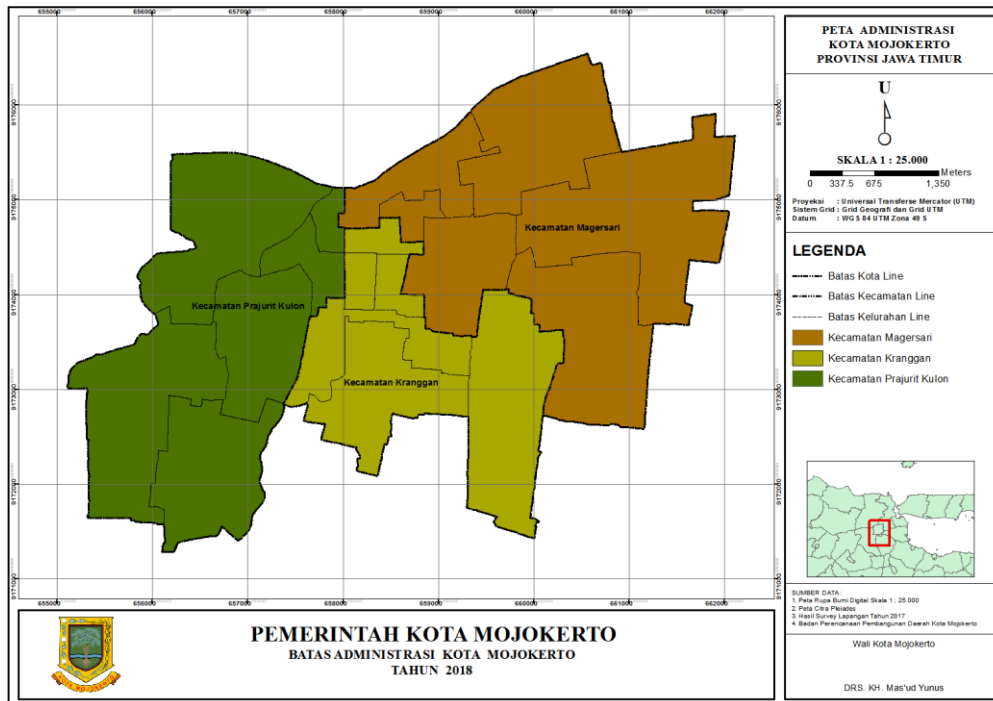
Secara geografis, Kota Mojokerto terletak antara 7° 27' 0,16" sampai dengan 7° 29' 37,11" Lintang Selatan serta 112° 24' 14,3" sampai dengan 112° 27' 24" Bujur Timur. Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata – rata 22 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Secara administratif Kota Mojokerto terbagi atas 3 kecamatan dan 18 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1: Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Mojokerto 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1.	Prajurit Kulon	7,4113	36,67
	Kelurahan:		
	Surodinawan	1,436	7,11
	Prajurit Kulon	1,377	6,81
	Blooto	2,1133	10,45
	Mentikan	0,393	1,94
	Kauman	0,257	1,27
	Pulorejo	1,835	9,08
2.	Magersari	8,083	39,98
	Kelurahan:		
	Gunung Gedangan	1,875	9,28
	Kedundung	2,614	12,79
	Balongsari	0,976	4,82
	Gedongan	0,222	1,10
	Magersari	0,690	3,42
	Wates	1,706	8,59
3.	Kranggan	4,7211	23,35
	Kelurahan:		
	Kranggan	1,2899	6,38
	Meri	1,9157	9,48
	Jagalan	0,256	1,27
	Miji	0,8265	4,09

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
	Sentanan	0,188	0,93
	Purwotengah	0,245	1,21
	Jumlah	20,217	100

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2020



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Berdasarkan besarnya tingkat kemiringan tanah (kelerengan), sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada kelerengan antara 0-20%. Oleh karena itu, beberapa wilayah Kota Mojokerto dapat digambarkan seperti *Lepek* (tatakan gelas/cekung) sehingga berpotensi menjadi wilayah genangan ketika terjadi hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Peluang untuk mengurangi genangan tersebut adalah dengan dipompa karena posisi ketinggian tanahnya cekung ke bawah sesuai dengan topografi Kota Mojokerto.

Berdasarkan peta topografinya, Kota Mojokerto berada pada ketinggian antara 18,75 - 25 mdpl. Sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada ketinggian 18,75 mdpl sedangkan sisanya di kisaran 25 mdpl.

2.1.1.3. Keadaan Geologi

Jenis tanah di wilayah Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari jenis *alluvial* seluas ± 633,93 Ha (± 38,50%) dan jenis *gromosol* seluas ± 1.012,61 Ha (± 61,50%). Jenis tanah ini cukup baik untuk usaha pertanian, namun yang menjadi persoalan adalah keterbatasan lahan pertanian. Sehingga yang menjadi prioritas adalah meningkatkan intensifikasi pengolahan tanah dari pertanian umum seiring meningkatnya alih guna lahan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi.

Kondisi geologi Kota Mojokerto dapat dikatakan tidak memiliki Sumber Daya Alam seperti sumber daya mineral yang berarti kecuali sumber daya pasir galian C, namun posisi Kota Mojokerto tidak memungkinkan dilakukan

penambangan pasir di sungai Brantas karena kondisi sungai yang sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang untuk penambangan pasir akibat tingkat erosi yang tinggi.

Potensi yang dimiliki dengan keterbatasan dan kondisi lahan yang ada justru berkembang dari pendayagunaan sektor jasa dan perdagangan karena Kota Mojokerto memiliki potensi sebagai daya tarik usaha bagi daerah sekitarnya.

Tabel 2.2: Kondisi Geologi Kota Mojokerto 2020

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jenis Geologi			Jumlah (Ha)
		Alluvium	Pleistosen, Fasies Sedimen	Alluvium, Fasies Gunung Berapi	
1.	Prajurit Kulon	294,85	-	328,51	623,36
	Surodinawan	-	-	145,88	145,88
	Prajurit Kulon	11,53	-	108,00	119,53
	Blooto	123,86	-	54,21	178,07
	Mentikan	5,67	-	13,23	18,90
	Kauman	11,44	-	7,19	18,63
	Pulorejo	142,35	-	-	142,35
2	Magersari	431,31	223,40	6,85	661,56
	Gunung Gedangan	104,62	65,83	-	170,45
	Kedundung	71,01	65,83	-	228,58
	Balongsari	82,86	-	-	82,86
	Gedongan	14,55	-	0,13	14,68
	Magersari	26,17	-	6,72	32,89
	Wates	132,10	-	-	132,10
3	Kranggan	254,20	-	107,42	361,62
	Kranggan	51,36	-	61,95	113,31
	Miji	17,74	-	21,86	39,60
	Meri	164,84	-	-	164,84
	Jagalan	13,44	-	3,11	16,55
	Sentanan	-	-	13,85	13,85
	Purwotengah	6,82	-	6,65	13,47
Jumlah		980,36	223,40	442,78	1.646,54

Sumber: Estimasi Hasil Olahan Tim Penyusun RPJMD

2.1.1.4. Hidrologi

Kota Mojokerto secara keseluruhan masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional. Wilayah Sungai Brantas terdiri dari 4 (empat) DAS yaitu DAS Brantas, DAS Tengah, DAS Ringin Bandulan dan DAS Kondang Merak, dan memiliki 9 Sub DAS yaitu Sub DAS Brantas Hulu, Sub DAS Brantas Tengah, Sub DAS Ngrowo/Ngasinan, Sub DAS Konto, Sub DAS Widas, Sub DAS Brantas Hilir, Sub DAS Kali Tengah, Sub DAS Ringin Bandulan dan Sub DAS Kondang Merak.

Kota Mojokerto masuk dalam Sub DAS Brantas Hilir meliputi wilayah sebagian Kelurahan Gunung Gedangan, sebagian Kelurahan Meri, sebagian Kelurahan Miji, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, sebagian Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedundung.

Konsekuensi dari wilayah yang dilewati beberapa sungai ini adalah genangan di Kota Mojokerto yang tidak hanya disebabkan oleh frekuensi hujan lokal namun juga hujan yang terjadi di wilayah *upstream* DAS yang ada.

Tabel 2. 3: Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Mojokerto

NO	NAMA SUNGAI	PANJANG SUNGAI (M)	LUAS (M ²)	KARAKTER
1	Sungai Brantas	11.088,661	733.247,014	Bertanggung
2	Sungai Brangkal	7.616,542	103.337,774	Bertanggung
3	Sungai Sadar	7.860,713	70.842,839	Bertanggung
4	Sungai Cemporat	1.874,852	8.533,763	Bertanggung
5	Sungai Ngrayung	3.818,769	17.779,728	Bertanggung
6	Watu Dakon	4.211,452	31.708,677	Bertanggung
7	Ngotok/Pulo	4.902,914	119.103,526	Bertanggung

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto

2.1.1.5. Klimatologi

Kota Mojokerto memiliki 2 jenis perubahan iklim setiap tahunnya, yakni musim kemarau (April – September) dan musim hujan (Oktober – Maret) dengan curah hujan rata-rata sebesar 209,11 mm. Kota Mojokerto memiliki ketinggian rata-rata 22 mdpl.

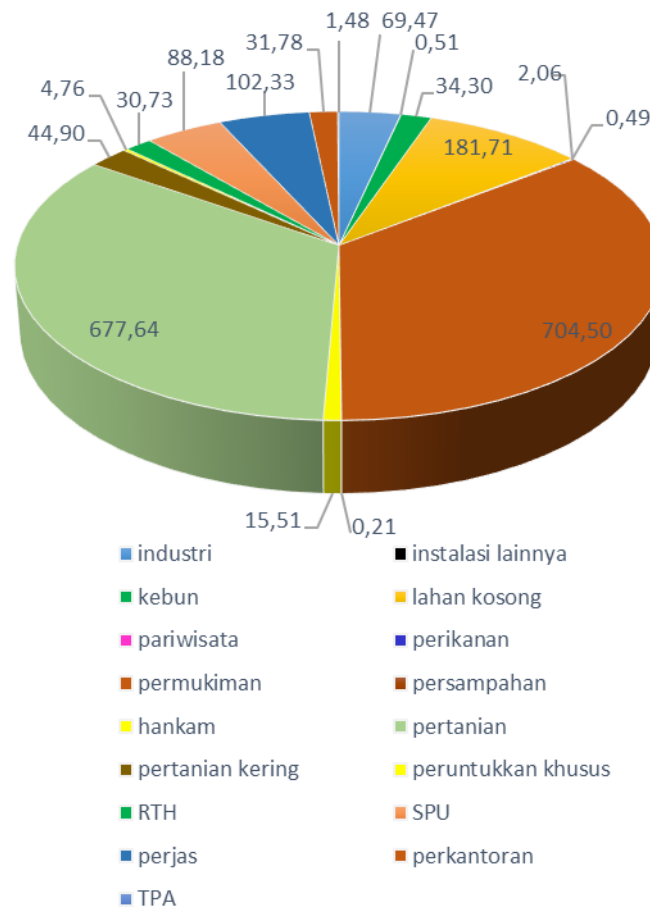
1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2019 mencapai 209,11 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juni, Agustus, dan September sebesar 0 mm dengan kata lain tidak terjadi turun hujan di bulan tersebut. Sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret sebesar 368 mm;
2. Presentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2019 mencapai 74,75%, terendah pada Bulan Maret sebesar 44,00% dan tertinggi pada Bulan Oktober 93,00%;
3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2019 diperkirakan 79,58%. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan September dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 71%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Maret dengan besaran 87%;
4. Rata-rata suhu udara terendah pada tahun 2019 terjadi pada Bulan Juli sebesar 21,70° celcius. Sedangkan tertinggi pada Bulan November sebesar 25,40° celcius.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Mojokerto cukup mendominasi dengan persentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak terbangun didominasi oleh lahan sawah sebesar 26,79%, kebun sebesar 11,70%, semak belukar 6,19%, tanah kosong sebesar 3,74%, hutan kota sebesar 0,02%, taman sebesar 1,18%, taman pemakaman umum (TPU) sebesar 1,24%, lapangan sebesar 0,33%, kolam 0,07%, tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) sebesar 0,16%, rawa sebesar 0,11%, perikanan 0,07%, jalan seluas 6,4% dan sungai sebesar 2,67%.

Luas lahan terbangun Kota Mojokerto sebesar 39,36%. Penggunaan lahan terbangun didominasi untuk permukiman yaitu sebesar 704,50 Ha, kemudian perdagangan dan jasa sebesar 102,33 Ha, industri sebesar 69,47 Ha, perkantoran

sebesar 31,78 Ha, pertanian dan keamanan sebesar 15,51 Ha, pariwisata 0,49 Ha dan instalasi lainnya sebesar 0,51 Ha.



Gambar 2. 1 Penggunaan Lahan Kota Mojokerto

Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032

Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan yang ada, Kota Mojokerto mengembangkan wilayahnya dalam tiga bagian, yaitu: Barat, Timur, dan Tengah.

1. Bagian Barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian serta masih bersifat relatif rural. Pengembangan daerah ini berpusat di Kelurahan Prajuritkulon.
2. Di sebelah Timur yang berkarakteristik urban, pengembangannya terpusat di Kelurahan Kedundung.
3. Di wilayah Tengah yang merupakan jantung kota, pengembangannya dipusatkan di Kelurahan Mentikan.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah, ditentukan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada RTRW. Kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya di Kota Mojokerto antara lain adalah: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum (meliputi:

kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan), dan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

1. Kawasan Perumahan

A. Potensi

- a. Perkembangan pembangunan rumah oleh individu/perorangan sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk.
- b. Perkembangan pemukiman oleh pihak swasta atau *developer* berkembang pesat.

B. Prospek Pengembangan

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan diupayakan pada lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan/kebun dll).
- b. Peringatan kepada masyarakat yang bermukim di kawasan sempadan/ squater.
- c. Pengembangan permukiman secara vertikal seperti rumah tingkat, apartemen maupun Rusunawa guna memenuhi kebutuhan rumah.

2. Kawasan Perdagangan Dan Jasa

A. Potensi

- a. Memiliki banyak kawasan peta wilayah perdagangan dan jasa seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan pariwisata modern.
- b. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan kabupaten Jombang.
- c. Memiliki banyak kawasan perdagangan dan jasa seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan pariwisata modern, Diantaranya Perdagangan dan Jasa Modern dan Tradisional skala regional diantaranya Perdagangan Modern berupa Swalayan, Perdagangan Modern berupa Pertokoan di sepanjang Jalan Mojopahit, Jl. Gajah Mada, Jl. PB. Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Bayangkara, Jl. Empu Nala dan Jl. By Pass. Pasar Tradisional berupa Pasar Tanjung Anyar di Kelurahan Jagalan.
- d. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri sedang, karena letaknya strategis di Jl. By Pass Kelurahan Kedundung yang merupakan jalan nasional arteri primer. Selain itu juga ditunjang dengan sudah berkembangnya beberapa industri besar/ sedang yang ada di Kota Mojokerto.
- e. Selain industri sedang, di Kota Mojokerto juga terdapat beberapa industri kecil yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto.

- B. Prospek Pengembangan
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa.
 - b. Adanya alokasi lahan untuk kegiatan sektor informal.
 - c. Penertiban para pedagang yang masih berjualan di ruas jalan.
 - d. Diperlukan pengawasan dan pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.
 - e. Pengembangan perdagangan dan jasa diarahkan untuk mendukung konsep kegiatan pariwisata Kota Mojokerto sebagai wisata belanja dan kuliner.

3. Kawasan Perkantoran

- A. Potensi
 - a. Kantor pemerintahan Kota Mojokerto tersebar di wilayah Kota Mojokerto dan sebagian terdapat di Jl. Gajah Mada, Jl. Bayangkara, Jalan Raden Wijaya, Jalan Jawa Jl. Pahlawan, Jl. By Pass Jl. Benteng Pancasila, dan di Kelurahan Surodinawan.
 - b. Perkantoran Swasta tersebar di Kota Mojokerto dan sebagian mengumpul di Jalan Mojopahit, Jalan A. Yani dan Jalan Empu Nala.
- B. Prospek Pengembangan

Pengembangan kawasan perkantoran dalam satu kawasan yang terintegrasi, sehingga memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

4. Kawasan Industri

- A. Potensi
 - a. Terdapat kegiatan industri dan home industri yang potensial untuk dikembangkan diantaranya industri rokok Bokor Mas, Industri Sepatu Dragon/Pro ATT di jalan Pahlawan, industri pakan Ternak di jalan By Pass dan home industri sepatu dan sandal kulit, home industri kerajinan miniatur perahu, home industri logam cetakan kue, home industri batik, home industri makanan onde-onde, keciput, krupuk yang lokasinya tersebar di Kota Mojokerto.
 - b. Kegiatan industri dan home industri didukung oleh kebijakan pemerintah Kota Mojokerto sehingga semakin berkembang dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
 - c. Letak Kota Mojokerto yang strategis memudahkan distribusi hasil produksi.
- B. Prospek Pengembangan
 - a. Peningkatan SDM melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan.
 - b. Adanya bantuan modal untuk pengembangan usaha kecil dan home industri oleh pemerintah setempat.
 - c. Pengembangan industri besar yang sudah ada dengan memprioritaskan penduduk lokal sebagai tenaga kerjanya.

- d. Pengembangan workshop/tempat pemasaran hasil home industri sebagai usaha untuk promosi dan pemasaran.

5. Kawasan Pariwisata

A. Potensi

Memiliki potensi wisata yang belum dikelola secara optimal diantaranya wisata air jogging track dan kuliner di Sungai Brantas, Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Magersari dengan luas 0,47 Ha atau 0,03%, wisata penunjang perbelanjaan, wisata pemandian, wisata kampung sepatu di Kel. Miji, wisata religi di Kel. Kauman, wisata di kawasan alun-alun, wisata kampung bunga di Kel. Kauman, wisata kampung cor di Kel. Pulorejo, wisata batik di Kel. Surodinawan dan Kel. Gunung Gedangan, wisata religi makam KH. Achyat Chalimy di Jalan. KH. Wachid Hasyim, dan wisata cagar budaya berupa sekolah Ir. Soekarno waktu kecil yang terletak di SDN Purwotengah Jl. Taman Siswa dan SMP Negeri 2 Jl. A yani.

B. Prospek Pengembangan

Optimalisasi pengelolaan wisata di Kota Mojokerto pada kawasan wisata kuliner dan jogging track, wisata sungai dan wisata sosial budaya dan ilmu pengetahuan, wisata belanja dan kuliner pada kawasan perdagangan dan jasa modern serta wisata belanja hasil kerajinan home industri Kota Mojokerto.

6. Kawasan Peruntukan Perumahan

Perkembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto meliputi: kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari rumah yang dibangun oleh penduduk sendiri dan dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan (*developer*) dan/atau dibangun oleh pemerintah.

Kawasan perumahan yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 430,85 Ha atau sekitar 26,17% dari luas seluruh Kota Mojokerto. Adapun perumahan tersebut direncanakan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah. Adapun distribusi dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan kepadatan tinggi berlokasi di Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Gedongan, dan Kelurahan Magersari. Luas dari perumahan kepadatan tinggi tersebut adalah sebesar 110,40 Ha.

2. Perumahan Kepadatan Sedang

Rencana perumahan kepadatan sedang adalah seluas 212,24 Ha atau sekitar 12,89% dari luas total wilayah kota. Perumahan kepadatan sedang ini dialokasikan di wilayah Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates.

3. Perumahan Kepadatan Rendah

Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates. Rencana dari perumahan kepadatan rendah ini adalah sebesar 108,21 Ha.

Arahan-arahan pengembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto antara lain:

1. Pengembangan perumahan yang telah ada dan pengembangan perumahan baru.
2. Pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horizontal) dengan memanfaatkan lahan secara optimal pada kawasan di luar kawasan fungsi lindung.
3. Peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan meliputi pembenahan lingkungan dan peremajaan.

7. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional (beberapa kabupaten/Kota). Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 127,51 Ha atau sekitar 7,74%. Adapun rencana pengembangan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Pasar tradisional

Pasar tradisional di Kota Mojokerto diantaranya adalah Pasar Tanjung Anyar, Pasar Kliwon, Pasar Kranggan, Pasar Prapanca, Pasar Prajuritkulon, Pasar Hewan, dan Pasar Burung Empunala. Pasar tradisional ini direncanakan dengan luas sebesar 6,93 Ha dan diarahkan pada: Kelurahan Kranggan, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Purwotengah. Selain itu terdapat beberapa rencana dalam pengembangan pasar tradisional, antara lain:

- a. Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Timur kota yaitu di Kelurahan Kedundung atau Kelurahan Gunung Gedangan.
- b. Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Barat kota yaitu di Kelurahan Blooto atau Kelurahan Pulorejo.
- c. Adanya relokasi atau revitalisasi pasar Kranggan.

2. Pusat perbelanjaan dan toko modern

Kawasan perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai luas lebih kurang 120,58 Ha. Lokasi dari pusat perbelanjaan dan toko modern diarahkan pada Jl. Mojopahit dan Mojopahit Selatan, Jl. Bhayangkara, Jl. Gajah Mada, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. PB Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Letkol Sumarjo, Jl. Ahmad Yani, Jl. Raya Prajuritkulon, Jl. Bypass, Jl. Surodinawan, Jl. Benteng Pancasila dan Jl. Ijen.

Rencana pengembangan pada kawasan perdagangan dan jasa pada subpusat pelayanan ini adalah sebagai upaya untuk bisa melayani daerah sekitarnya. Selain itu, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan dalam hal pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, antara lain sebagai berikut:

- a. Memperhatikan pelaku sektor informal pada perdagangan dan jasa. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- b. Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- d. Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.

8. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan perkantoran dikembangkan dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan hemat. Penyatuan dalam suatu kawasan akan relatif membantu bagi para pengguna dalam mengakses jasa pelayanan. Rencana pengembangan kawasan perkantoran di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut :

1. Pusat pemerintahan tetap dipertahankan di pusat kota, dan fasilitas pemerintahan yang tersebar dipertahankan untuk efisiensi pelayanan meliputi : Jl. Pahlawan, Jl. Gajah Mada, Jl. Bhayangkara, Jl. Raden Wijaya, Jl. Bypass, Jl. Jawa, Jl. Letkol Sumarjo, dan Jl. Raya Prajuritkulon.
2. Peningkatan fisik pembangunan pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi, jika lahan terbatas dapat dikembangkan secara vertikal.
3. Kawasan perkantoran swasta diarahkan pada kawasan pusat kota dan menyatu pada pusat-pusat kawasan perdagangan dan jasa, yang direncanakan di : Jl. Bypass, Jl. Pahlawan, Jl. Gajahmada, Jl. Mojopahit, Jl. Raya Prajuritkulon, dan Jl. Surodinawan

4. Pengembangan kapasitas pemerintahan (meliputi: peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerjasama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan).

9. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal

Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal akan memberikan banyak hal positif bagi perkembangan kota baik dari segi spasial maupun ekonomi antara lain adalah:

1. Mampu sebagai wadah pengembangan dan penataan sektor informal kota, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kota.
2. Mampu sebagai salah satu daya tarik kota (wisata kota) yang dapat dijangkau semua kalangan.
3. Mampu memberikan pemasukan bagi PAD Kota Mojokerto melalui penarikan retribusi perdagangan dan parkir.
4. Mampu menyerap tenaga kerja, sehingga secara bertahap dapat mengurangi angka pengangguran kota dan diharapkan akan dapat mengurangi permasalahan sosial kota.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal PKL yang diarahkan dilokasikan pada:

1. Kawasan PKL di Jalan Benteng Pancasila
2. Kawasan PKL di Jalan Surodinawan.

10. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya ini terdiri atas: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum, dan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

1. Kawasan Pertanian

Kota Mojokerto mempunyai kawasan pertanian yang terdapat di Kelurahan Prajuritkulon, Blooto, Surodinawan, dan Pulorejo. Kawasan pertanian tersebut ialah: kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan perikanan. Adapun kawasan pertanian tersebut seluas 104,25 Ha. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Mojokerto. Kawasan peternakan lokasinya menyatu dengan perumahan. Kawasan perikanan yang terdapat di Kota Mojokerto terdiri dari waduk, perairan umum, dan kolam. Waduk ini berlokasi di Kelurahan Mentikan, Prajuritkulon, dan Pulorejo dengan luas 1,2 Ha. Pada kawasan perikanan yang terdapat di perairan umum, tepatnya terdapat di Sungai Brantas, Pulo/Kali Ngotok, Brangkal, Sadar, Cemporat, Ngrayung, dan Watu Dakon. Kawasan perikanan yang terdapat di kolam adalah seluas 6,1 Ha. Secara umum, rencana pengembangan kawasan pertanian diarahkan sebagai berikut:

- a. Penerapan pola disinsentif meliputi pengurusan perizinan, pembukaan akses jalan, pemasangan utilitas (listrik, telepon, air bersih, drainase, dan persampahan).

- b. Penerapan insentif meliputi bantuan pupuk dan obat-obatan secara berkala, kemudahan pengajuan kredit tanam, suplai air irigasi yang kontinyu, dan stabilisasi harga jual hasil panen
- c. Pengembangan prasarana pengairan.
- d. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur.
- e. Mempertahankan fungsi kawasan pertanian
- f. Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial.
- g. Mengupayakan ekstensifikasi pertanian meliputi daya dukung tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan pertanian.
- h. Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan.

2. Kawasan Pelayanan Umum

Kawasan peruntukan lainnya yang perlu dikembangkan di Kota Mojokerto adalah kawasan pelayanan umum yang meliputi kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, dan kawasan peribadatan dengan luas sebesar 43,26 Ha.

a. Fasilitas Pendidikan

Pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dapat mendukung peran dan fungsi Kota Mojokerto sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota dan regional. Rencana pembangunan fasilitas pendidikan diarahkan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas pendidikan, dan pembenahan prasarana dan sarana.
- Pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya.

b. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ada baik dalam skala kota maupun regional. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang ada meliputi rumah sakit milik Pemerintah Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan puskesmas juga pembangunan fasilitas kesehatan baru.
- Penyediaan rumah sakit skala regional untuk mengantisipasi perkembangan di Mojokerto yaitu Rumah Sakit Umum yang terdapat di Kelurahan Surodinawan dengan Tipe B.

c. Fasilitas Peribadatan

Pembangunan tempat peribadatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah bagi semua golongan masyarakat warga Kota Mojokerto baik pada skala kota maupun skala lingkungan. Rencana pengembangan fasilitas peribadatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

- Perbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada.
- Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan Negara

Kawasan pertahanan dan keamanan atau kawasan militer di Kota Mojokerto yang ada saat ini keberadaannya tetap dipertahankan dengan upaya pelestarian bangunan yang ada. Adapun kawasan pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di Kota Mojokerto, antara lain, yaitu:

- a. Komando Resort Militer (KOREM) di Jalan Veteran Kelurahan Kauman;
- b. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari;
- c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di Kecamatan seluruh wilayah Kota Mojokerto;
- d. Detasemen Polisi Militer (PM) Kota Mojokerto di Kelurahan Magersari;
- e. Perbekalan dan Angkutan Komando Distrik Militer di Jalan Pahlawan Kelurahan Miji;
- f. Kepolisian Resort Kota Mojokerto di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sentanan;
- g. Kepolisian Sektor yang terdapat di Kecamatan seluruh wilayah Kota Mojokerto.

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

a. Bencana Banjir

Sebagian besar wilayah Kota Mojokerto mempunyai tingkat resiko bencana banjir rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai/ saluran menjadi relatif lambat dan mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.

Banjir bandang pernah menenggelamkan separuh kota pada tahun 2004. Wilayah rawan banjir di Kota Mojokerto berdasarkan tingkat resikonya yaitu Kecamatan Prajuritkulon dengan tingkat resiko tinggi dan Kecamatan Magersari dengan resiko sedang. Banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman yang berasal dari Kali Kromong Pacet dan Kali Pikatan. Dua sungai tersebut bertemu di Dusun Wiyu dan menjadi satu dengan air yang berasal dari dataran tinggi Wonosalam

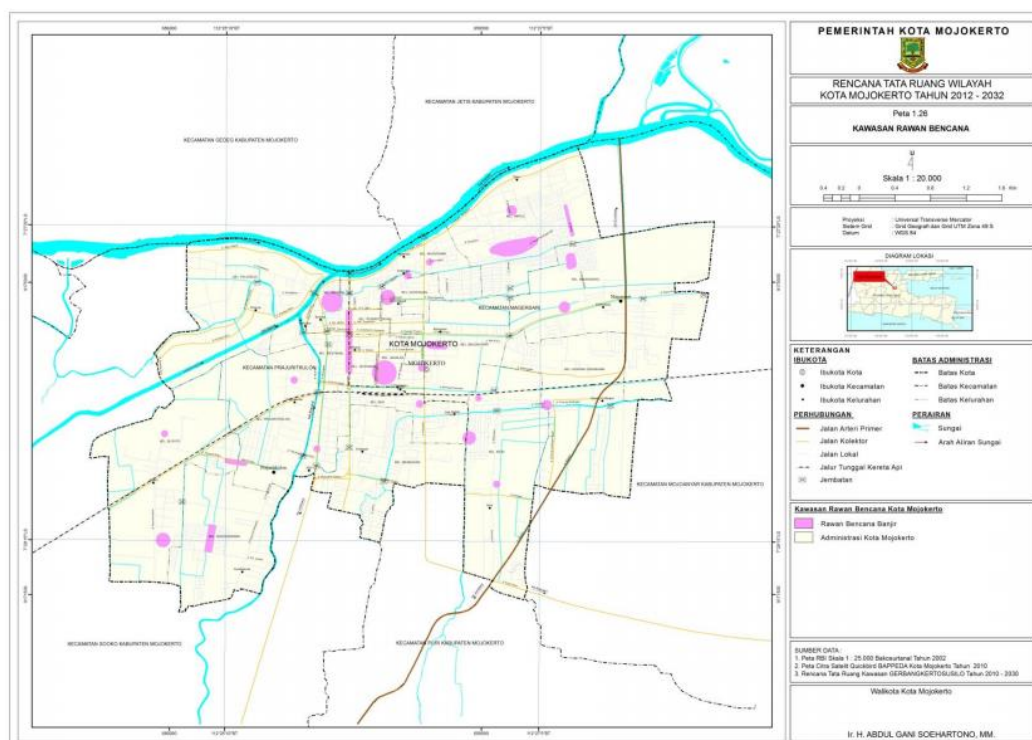
yang selanjutnya mengalir ke Kali Brangkal. Akibat kondisi tersebut, Kali Brangkal tidak mampu menampungnya sehingga menyebabkan banjir di sekitar wilayah Kota Mojokerto yang dilewatinya terutama di bagian barat. Sedangkan Kali Sadar menyebabkan banjir di wilayah Mojokerto bagian timur. Pada saat banjir, rata-rata luas genangannya adalah sebesar 66,7 Ha, setinggi rata-rata 0,5 m dan lama genangan rata-rata 12 jam.

Selain ancaman banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, Kota Mojokerto berpotensi terjadi genangan air akibat infrastuktur drainase Kota Mojokerto seperti tabel

Tabel 2. 4 : Potensi Genangan Air di Kota Mojokerto

Kecamatan/Kelurahan	Tinggi (cm)	Luas Genangan (km ²)	Lama Genangan (jam)	Luas genangan tidak memenuhi SPM (km ²)*
Kecamatan Prajuritkulon				
Surodinawan		0	0	0
Prajuritkulon		0,1	0	0
B l o o t o		0	0	0
Mentikan		0	0	0
Kauman		0	0	0
Pulorejo		0	0	0
Kecamatan Magersari				
Gunung Gedangan	10	0,1	1	0,1
Kedundung		2,155	0	0
Balongsari		0	0	0
Gedongan	-	-	-	-
Magersari	-	-	-	-
Wates	-	-	-	-
Kecamatan Kranggan				
Kranggan		0	0	0
Miji	10	0,1	3	0,1
Meri	10	0,1	1	0,1
Jagalan		2,36	0	0
Sentanan	-	-	-	-
Purwotengah	-	-	-	-

Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 – 2032



Gambar 2. 3: Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Mojokerto

b. Bencana Kebakaran

Selain banjir, Kota Mojokerto memiliki potensi resiko terjadinya bencana kebakaran. Kepadatan penduduk yang meningkat, banyaknya pembangunan gedung perkantoran, kawasan perumahan, industri yang semakin berkembang sehingga menimbulkan kerawanan dan apabila terjadi kebakaran membutuhkan penanganan secara khusus. Bencana kebakaran yang terjadi di Kota Mojokerto kebanyakan disebabkan karena kelalaian maupun korsleting listrik. Berikut jumlah bencana kebakaran di Kota Mojokerto :

Tabel 2. 5 : Jumlah bencana kebakaran di Kota Mojokerto 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bencana kebakaran	15	15	24	78	35

Sumber: Satpol PP Kota Mojokerto, 2020

2.1.1.9. Demografi

a. Jumlah, Kepadatan dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2020 mencapai 140.075 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 69.500 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 70.575 jiwa. Berikut ini tabel perkembangan jumlah penduduk Kota Mojokerto tahun 2016 – 2020:

Tabel 2. 6: Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah	Km ²	16,46	16,46	20,217	20,217	20,217
2	Penduduk Laki-Laki	Jiwa	70.879	66.374	71.271	69.063	69.500
3	Penduduk Perempuan	Jiwa	72.153	72.764	72.106	70.276	70.575
4	Jumlah penduduk	Jiwa	143.032	144.493	143.377	139.339	140.075
5	Kepadatan penduduk	Jiwa/km ²	8.690	8.778	7.092	6.892	6.929
6	Pertumbuhan penduduk	%	0,85	1,02	-0,77	-2,82	0,53
7	Sex Ratio	%	98	98	98	98	98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Jumlah penduduk di Kota Mojokerto sampai dengan Bulan Desember 2020 sebanyak 140.075, dengan kepadatan penduduk sebesar 6.929 jiwa/Km². Dari data kependudukan tersebut maka Kota Mojokerto dapat digolongkan kepada kelas kota sedang, dimana berdasarkan kriteria BPS mengenai kelas kota, kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 – 500.000 jiwa.

Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat tinggi, yaitu 6.929 penduduk per kilometer persegi (km²) di akhir tahun 2020.

b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pada Bulan Agustus Tahun 2020, penduduk usia muda (0-15 tahun) mencapai 25,27%, penduduk usia produktif (16-64 tahun) mencapai 67,74%, sedangkan dan usia tua (65 tahun ke atas) mencapai 6,99%.

Tabel 2. 7 : Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur Tahun 2016-2020

No	Kelompok Umur	2016			2017			2018			2019			2020		
		L (Jiwa)	P (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	L (Jiwa)	P (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	L (Jiwa)	P (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	L (Jiwa)	P (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	L (Jiwa)	P (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0 - 4	5.241	5.101	10.342	5.142	4.942	10.084	5.162	4.844	10.006	5.142	4.833	9.975	5.085	4.776	9.861
2	5 - 6	2.334	2.236	4.570	2.353	2.278	4.631	2.307	2.285	4.592	2.261	2.245	4.506	2.260	2.150	4.410
3	7 - 12	6.974	6.835	13.809	7.030	6.895	13.925	7.072	6.974	14.046	7.208	7.054	14.262	7.110	7.043	14.153
4	13 - 15	3.683	3.386	7.069	3.693	3.372	7.065	3.599	3.288	6.887	3.469	3.346	6.815	3.428	3.335	6.763
5	16 - 18	3.554	3.292	6.846	3.540	3.281	6.821	3.586	3.310	6.896	3.571	3.265	6.836	3.563	3.229	6.792
6	19 - 24	6.182	6.273	12.455	6.315	6.339	12.654	6.285	6.285	12.570	6.156	6.080	12.236	6.337	6.101	12.438
7	25 - 29	5.160	5.202	10.362	5.210	5.251	10.461	5.220	5.231	10.451	5.050	5.169	10.219	5.086	5.226	10.312
8	30 - 34	6.308	6.238	12.546	6.093	5.980	12.073	5.727	5.621	11.348	5.274	5.178	10.452	5.225	5.102	10.327
9	35 - 39	6.050	5.965	12.015	6.307	6.185	12.492	6.275	6.226	12.501	5.993	5.944	11.937	5.926	5.823	11.749
10	40 - 44	5.700	5.424	11.124	5.644	5.443	11.087	5.690	5.382	11.072	5.393	5.207	10.600	5.420	5.340	10.760
11	45 - 49	5.085	5.143	10.228	5.262	5.300	10.562	5.155	5.205	10.360	4.790	4.898	9.688	4.914	4.873	9.787
12	50 - 54	4.255	4.697	8.952	4.342	4.643	8.985	4.359	4.640	8.999	4.338	4.567	8.905	4.276	4.457	8.733
13	55 - 59	3.633	3.937	7.570	3.663	4.104	7.767	3.633	4.137	7.770	3.417	4.019	7.436	3.507	4.125	7.632
14	60 - 64	2.822	2.947	5.769	2.967	3.082	6.049	3.035	3.210	6.245	2.960	3.231	6.191	3.008	3.385	6.393
15	65 - 69	1.667	1.835	3.502	1.848	1.950	3.798	1.912	2.003	3.915	1.971	2.068	4.039	2.076	2.236	4.312
16	70 - 74	1.067	1.423	2.490	987	1.355	2.342	1.003	1.290	2.293	969	1.296	2.265	1.056	1.322	2.378
17	75 keatas	1.164	2.219	3.383	1.333	2.364	3.697	1.251	2.175	3.426	1.147	1.914	3.061	1.223	2.052	3.275
	JUMLAH	70.879	72.153	143.032	71.729	72.764	144.493	71.271	72.106	143.377	69.109	70.314	139.423	69.500	70.575	140.075

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Kondisi ini merupakan hal yang baik dalam pencapaian kualitas hidup khususnya kualitas kesehatan di Kota Mojokerto, namun di sisi lain kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan memihak bagi para Lansia tersebut seperti dukungan prasarana kesehatan, ruang publik yang layak lansia dan berbagai kebijakan terkait lainnya.

Data dan analisis di atas dapat menyimpulkan bahwa jumlah penduduk usia produktif Kota Mojokerto jauh lebih tinggi daripada penduduk usia non produktif, sehingga sumber daya manusia produktif di Kota Mojokerto memiliki potensi jumlah yang besar untuk peningkatan partisipasi pembangunan.

c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan catatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, penduduk Kota Mojokerto sebagian besar (32%) berpendidikan SMA sederajat.

Tabel 2.8 : Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Tingkat Pendidikan 2016-2020

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Tidak/ belum sekolah	37.484	26,21	38.488	26,64	38.721	26,21	38.488	26,64	38.721	27,01
2.	SD sederajat	23.594	16,50	23.384	16,18	22.636	16,50	23.384	16,18	22.636	15,79
3.	SMP sederajat	20.188	14,11	20.234	14,00	19.950	14,11	20.234	14,00	19.950	13,91
4.	SMA sederajat	46.460	32,48	46.727	32,34	46.273	32,48	46.727	32,34	46.273	32,27
5.	Diploma	3.327	2,33	3.361	2,33	3.307	2,33	3.361	2,33	3.307	2,31
6.	Strata 1	11.330	7,92	11.615	8,04	11.781	7,92	11.615	8,04	11.781	8,22
7.	Strata 2	635	0,44	673	0,47	696	0,44	673	0,47	696	0,49
8.	Strata 3	14	0,01	11	0,01	13	0,01	11	0,01	13	0,01
	Jumlah	143.032	100	144.493	100	143.377	100	144.493	100	143.377	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas penduduk Kota Mojokerto semakin membaik. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Strata. Hal ini berdampak pada kemampuan penduduk dalam menghadapi perkembangan zaman.

d. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2020 mayoritas penduduk Kota Mojokerto beragama Islam 92,48% diikuti oleh Kristen Protestan 5,32%, Katholik 1,30%, Budha 0,80% Hindu 0,07% dan Kong Hu Cu 0,03%.

Tabel 2.9 : Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Agama 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Islam	131.394	132.896	132.166	128.794	129.543
2.	Katholik	1.991	1.972	1.903	1.827	1.821
3.	Kristen Protestan	8.149	8.142	7.913	7.519	7.449
4.	Budha	1.328	1.307	1.232	1.131	1.114
5.	Hindu	134	134	122	110	105
6.	Kong Hu Cu	36	42	41	42	43
	Jumlah	143.032	144.493	143.377	139.423	140.075

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Mojokerto bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB Kota Mojokerto tahun 2016 sebesar Rp. 5.370.366,4 Juta, meningkat menjadi Rp. 5.828.234,7 Juta, pada tahun 2017, Rp. 6.333.226,0 Juta pada tahun 2018, dan Rp. 6.801.696,59 Juta pada tahun 2019. Sementara di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp 6.588.057,71 Juta. Apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Kota Mojokerto tahun 2016 sebesar Rp. 4.221.826,6 Juta, Rp. 4.460.444,9 Juta pada tahun 2017, Rp. 4.719.232,4 Juta pada tahun 2018, Rp. 4.985.675,85 Juta pada tahun 2019, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 4.801.464,04 Juta.

Tabel 2.10 : Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	5.370.366,4	5.828.234,7	6.333.226,0	6.801.696,59	6.588.057,71
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	4.221.826,6	4.460.444,9	4.718.943,0	4.985.675,85	4.801.464,04
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,77	5,65	5,80	5,65	-3,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto dapat dilihat dari besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2016 perekonomian Kota Mojokerto tumbuh 5,77 persen, dan dalam empat tahun berikutnya mengalami fluktuasi, masing-masing 5,65 persen (Tahun 2017), 5,80 persen (Tahun 2018), 5,65 persen (Tahun 2019), dan menurun secara signifikan di tahun 2020 menjadi -3,69 persen.

Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,75 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 5,80 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu adanya perang dagang antara China dengan Amerika Serikat yang berdampak terhadap lesunya perekonomian dunia dan nasional, yang secara tidak langsung memberikan dampak lesunya

sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan di Kota Mojokerto. Di samping itu, di tengah lesunya perekonomian nasional, perekonomian Kota Mojokerto masih tumbuh di atas 5,5 persen. Hal ini dikarenakan selama tahun 2019 di Kota Mojokerto banyak diselenggarakan event kegiatan. Selain itu pada tahun 2019 ada pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan pasar baru, pembangunan jaringan gas, serta perbaikan jalan dan saluran di semua lingkungan.

Pertumbuhan pada besaran angka PDRB Kota Mojokerto tahun 2019 sebesar 5,75 persen mencerminkan bahwa perekonomian Kota Mojokerto tumbuh positif walaupun di tengah lesunya perekonomian global dan nasional sekaligus menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Mojokerto memiliki kekuatan dan semakin kokoh.

Di tahun 2020 pandemi Covid menyerang di hampir seluruh belahan bumi, begitupun di Indonesia. Sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi korona pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, pandemi Covid-19 tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, tetapi secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional.

Keputusan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia 2020 tumbuh negative, begitupun dengan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terkhusus Kota Mojokerto. pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami -3,69%. Angka pengangguran dan kemiskinan juga turut meningkat baik secara global maupun regional.

Pertumbuhan dan Distribusi Sektoral

Perekonomian Kota Mojokerto tahun 2020 mengalami kontraksi sampai dengan -3,69 persen, mengalami perlambatan yang cukup tajam dibanding tahun 2019 sebesar 5,75, sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Semua sektor yang sebelumnya mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto antara lain kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori transportasi dan pergudangan, kategori perdagangan besar dan eceran, kategori konstruksi, kategori jasa perusahaan mengalami kontraksi yang cukup tajam di tahun 2020 menjadi negatif, sebaliknya sektor pertanian yang sebelumnya negatif, di tahun 2020 malah meningkat cukup tajam mencapai 8,16.

Tabel 2.11 : Pertumbuhan PDRB per Sektor Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,97	1,62	0,77	-1,54	8,16
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	5,70	6,16	5,79	3,03	-3,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,30	4,20	4,88	6,24	-0,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,01	4,98	4,23	4,87	4,39
F	Konstruksi	4,85	6,08	5,82	5,78	-6,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	5,51	6,16	6,21	5,88	-9,20

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
H	Transportasi dan Pergudangan	5,54	6,86	6,22	7,78	-6,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,25	7,36	7,89	7,78	-8,16
J	Informasi dan Komunikasi	7,24	6,62	6,45	7,09	7,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,12	3,14	4,64	4,45	0,02
L	Real Estate	4,99	3,74	3,97	4,04	3,27
M,N	Jasa Perusahaan	4,95	5,29	5,34	5,37	-7,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,13	3,36	4,42	4,27	-2,42
P	Jasa Pendidikan	5,71	3,81	4,19	6,15	2,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,76	5,41	5,63	5,99	8,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,56	3,91	4,36	5,84	-14,50
	Pertumbuhan Ekonomi	5,77	5,65	5,80	5,65	-3,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Pada tahun 2020, perekonomian Kota Mojokerto ditunjang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi yaitu sebesar 28,52%, diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 13,01%, sektor Industri Pengolahan sebesar 11,38% dan sektor Konstruksi sebesar 10,21%.

Tabel 2.12 : Distribusi PDRB per Sektor Kota Mojokerto 2016-2020

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	0,65	0,62	0,59	0,66
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	11,30	11,48	11,60	11,34	11,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11
F	Konstruksi	10,99	10,90	10,67	10,46	10,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	29,26	29,38	29,89	30,19	28,52
H	Transportasi dan Pergudangan	2,62	2,71	2,70	2,74	2,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,82	6,90	6,95	7,09	6,86
J	Informasi dan Komunikasi	11,81	11,88	11,64	11,65	13,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,47	8,32	8,25	8,15	8,39
L	Real Estate	2,82	2,76	2,76	2,73	2,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,78	0,79	0,8	0,8	0,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial Wajib	4,79	4,71	4,78	4,91	5,10
P	Jasa Pendidikan	4,69	4,58	4,46	4,47	4,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,19	1,16	1,16	1,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,64	3,57	3,55	3,53	3,18
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran

Nilai PDRB menurut pengeluaran Kota Mojokerto selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 – 2019 pertumbuhan struktur per komponen tidak berbeda jauh dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara di tahun 2020 terjadi penurunan PDRB akibat pandemic covid 19. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Mojokerto pada tahun 2020 dihasilkan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencapai 70,01 persen (angka ini meningkat dari 69,41 persen di

tahun 2019). Selanjutnya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 35,45 persen (turun dari 35,61 persen di tahun 2019), disusul oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 17,49 persen (naik dari 17,15 persen di tahun 2019). Pertumbuhan ekonomi Mojokerto tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -3,69 persen. Sumber kontraksi terbesar disumbang oleh komponen Net Ekspor sebesar 0,60 persen poin, komponen Perubahan Inventori sebesar 0,00 persen poin, komponen Konsumsi LNPRT sebesar -0,03 persen poin, komponen Konsumsi Pemerintah sebesar -0,52 persen poin, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar -1,24 persen poin, dan komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar -2,51 persen poin. Sumber terbesar pertumbuhan minus ini adalah komponen Net-Ekspor. Artinya terjadi penurunan luar biasa permintaan dari luar wilayah (ekspor), sementara untuk mencukupi kebutuhan barang dan jasa masyarakat harus mendatangkan dari luar wilayah (impor). Hal ini tentunya menambah “defisit” neraca perdagangan serta mempertajam penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto.

Komponen lain yang juga berperan besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran yaitu: komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Konsumsi akhir pemerintah. Untuk komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dimana semakin besar kapital yang ditanamkan akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai output yang dihasilkan. Pembentukan Modal Tetap Bruto bisa berbentuk bangunan maupun non bangunan, yang menjadi sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi pada suatu wilayah. Oleh karena itu kegiatan penanaman modal tetap (Fix Capital) atau sering disebut “Investasi” harus terus meningkat, baik oleh pemodal asing (PMA) maupun oleh pemodal dalam negeri (PMDN), supaya output barang/jasa terus bertambah.

Tabel 2.13 : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.737.877,8	4.026.370,4	4.373.946,1	4.717.124,9	4.612.535,61
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	48.196,1	50.916,7	55.750,3	59.547,9	60.735,12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	882.824,6	972.216,0	1.077.277,7	1.166.741,4	1.152.548,11
Pembentukan Modal Tetap Brute	1.923.615,1	2.038.765,4	2.237.584,6	2.418.753,8	2.335.301,97
Perubahan Inventori	733,4	606,2	660,1	675,6	248,82
Ekspor Barang dan Jasa	1.686.138,3	1.811.130,5	2.018.865,7	2.062.504,8	(1573.311,91)
Impor Barang dan Jasa	2.909.018,8	3.071.770,5	3.430.213,6	3.616.018,4	-
PDRB	5,370,366.4	5.828.234,7	6.333.870,7	6.809.330,0	6.588.057,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

2.1.2.1.2. PDRB Perkapita

Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para birokrat yang berkecimpung dalam penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat. PDRB Perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk

pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa wilayah tersebut. Berikut data PDRB Perkapita Kota Mojokerto Tahun 2016-2020.

Tabel 2.14 : PDRB Per Kapita Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	42,48	45,94	49,53	52,54	50,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

PDRB per kapita Kota Mojokerto lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita Kota Mojokerto telah mencapai sekitar 42,48 juta. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kota Mojokerto mencapai 50,54 juta mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan, bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto dari tahun ke tahun semakin membaik, walaupun di tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan oleh pandemic Covid. Hanya saja PDRB Kota Mojokerto selalu berada di bawah angka provinsi Jawa Timur dan Nasional. Adapun yang menjadi alasan mengapa PDRB Kota Mojokerto selalu lebih rendah dari Jawa Timur dan Nasional adalah Kota Mojokerto merupakan kota terkecil se-Indonesia, dan sector industry di kota ini pun terbilang sedikit dibanding dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur lainnya.

2.1.2.1.3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya merugikan golongan masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman modal/investasi diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi. Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun nasional.

Di Jawa Timur ada 8 Kabupaten / Kota yang digunakan sebagai Kota Inflasi dari 82 Kabupaten / Kota secara Nasional, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk Kota Mojokerto, penghitungan inflasi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *Sister City* dengan Kota Inflasi. Pendekatan *sister city* yang dimaksud adalah menggunakan diagram timbang dengan kota inflasi yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama serta letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rujukan Kota Mojokerto dalam penghitungan inflasi adalah Kota Kediri.

Tabel 2.15 : Laju Inflasi Kota Kediri Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kota Kediri	1,3	3,44	1,97	1,83	1,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021

2.1.2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Kota Mojokerto pada 2016 tercatat sebesar 0,37 dan meningkat menjadi 0,39 pada 2017. Selanjutnya, Gini Ratio turun terus hingga mencapai angka terendah pada 2019 yaitu sebesar 0,309. Namun pada tahun 2020 kembali naik di angka 0,355 dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.16 : Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Gini	0,37	0,39	0,341	0,309	0,355

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

2.1.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin

Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintahan Kota Mojokerto bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan, dengan tetap berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Adapun wujud nyata dari upaya tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk miskin.

Tabel 2.17 : Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin	5,73	5,73	5,50	5,15	6,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Angka kemiskinan di Kota Mojokerto selama empat tahun yakni tahun 2016 – 2019 mengalami tren penurunan. Berbeda dengan tahun 2020 yang secara regional mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 angka kemiskinan sebesar 5,73 persen kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2017, selanjutnya

mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 5,50 persen berikut di tahun 2019 kembali turun menjadi 5,15 persen. Di tahun 2020 naik menjadi 6,24 persen. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19, yang berimbas pada sektor perdagangan jasa karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga banyak usaha perdagangan baik yang besar sampai dengan mikro yang sepi bahkan sampai menutup usahanya, serta industri yang mengurangi produksi akibatnya berkurangnya permintaan pasar.

2.1.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Agak berbeda dengan Indeks Mutu Hidup (IMH) yang berfungsi sebagai indikator fisik (mengukur tingkat kemajuan), maka IPM cenderung berfungsi sebagai indikator posisi (membandingkan keberhasilan pembangunan antar waktu atau wilayah).

Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya beli (Daya Beli). Dari tahun 2016 hingga 2020 IPM Kota Mojokerto memiliki kecenderungan meningkat bahkan berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Pengeluaran Per kapita. Untuk data IPM kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.18 : IPM Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
IPM	76,38	76,77	77,14	77,96	78,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Mojokerto telah berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) daerah. Sejak tahun 2016-2020, IPM Kota Mojokerto cenderung mengalami peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan warganya. Dengan menggunakan perhitungan metode baru, IPM Kota Mojokerto tahun 2020 mencapai 78,04. Peringkat IPM Kota Mojokerto tahun 2020 sama dengan peringkat IPM Kota Mojokerto tahun 2019, yakni di posisi 7. Pemerintah Kota Mojokerto tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2.1.7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan

IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh perundang-undangan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk melihat disparitas capaian indeks kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah di *publish*. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, maka angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan atau *apple to apple*. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Kota Mojokerto mengikuti tren naik.

Tabel 2.19 : IPG Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
IPG	93,58	93,4	93,05	93,18	93,26

Sumber: Buku Dinamis Semester I 2019 Prov. Jawa Timur, 2021

IPG Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami fluktuasi. Tahun 2016 IPG Kota Mojokerto mendapatkan 93,58. Pada Tahun 2017 IPG Kota Mojokerto mendapatkan angka 93,40, sedangkan pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 93,05. Namun di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 93,18 dan 2020 meningkat lagi menjadi 93,26. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur, IPG Kota Mojokerto masih lebih tinggi dari

Jawa Timur yang sebesar 91,07 dan Nasional sebesar 91,06 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan semakin kecil.

2.1.2.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Tabel 2.20 : TPT Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
TPT	3,33	3,61	2,45	2,65	6,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Mojokerto pada Tahun 2016 sebesar 3,33 persen, kemudian Tahun 2017 naik sebesar 3,61 persen. Selanjutnya pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,45 persen dan pada Tahun 2019 naik menjadi sebesar 2,65 persen. TPT Kota Mojokerto masih lebih rendah bila dibandingkan Jawa Timur yang sebesar 3,92 persen dan Nasional sebesar 5,28 persen. Sedangkan di Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 6,74 persen yang diakibatkan pandemi Covid-19.

2.1.2.1.9. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 2.21 : Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	56,43 (CC)	62,58 (CC)	58,89 (CC)	62,31 (B)	62,45 (B)

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2021

Terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Mojokerto pada Tahun 2018 sebesar 58,89 menjadi 62,45 di Tahun 2020. Ada beberapa komponen pengungkit yang mejadi kriteria penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi di Kota Mojokerto bersih, akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

2.1.2.1.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya seperti kualitas udara dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Mojokerto. IKLH merupakan informasi kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan kualitas air, udara dan lahan sebagai indikator.

Tabel 2.22 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

indikator	2016	2017	2018	2019	2020
IKLH	61,5	63,02	63,10	65,24	57,73

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2021

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 - 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 - 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 – 58
7. Waspada : <50

Berdasarkan hasil Ekspose Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sementara tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 24 – 26 November 2020, terdapat perubahan rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perubahan perhitungan IKLH tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Klasifikasi kategori nilai IKLH 2020 – 2024:

1. 90 – 100 = Sangat baik
2. 70 – 89,9 = Baik
3. 50 – 69,9 = Sedang
4. 25 – 49,9 = Buruk
5. 0 – 24,9 = Sangat Buruk

IKLH telah menjadi indikator kinerja pembangunan lingkungan pada RPJM Nasional 2015-2019 dengan baseline tahun 2015 sebesar 49,67 (klasifikasi “waspada”) pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar 58 - 66 (klasifikasi “kurang”) dan target sampai dengan 2019 naik menjadi 65,24 (klasifikasi “kurang”). Tahun 2020 perhitungan rumus IKLH berubah berikut klasifikasi kategorinya, Kota Mojokerto mendapatkan nilai 57,73 dengan klasifikasi “Sedang”. Nilai IKLH ini sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Mojokerto untuk kedepannya. Adapun hasil IKLH Kota Mojokerto selama tahun 2016 – 2020 berada dibawah

skor Provinsi Jawa Timur. Sementara di tahun 2020 terpaut sebanyak 9, 97 dikarenakan Provinsi Jawa Timur menggunakan rumus lama, yaitu tanpa memperhitungkan adanya menggunakan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

2.1.2.1.11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tabel 2.23 : Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Mojokerto 2016-2020

indikator	2016	2017	2018	2019	2020
IKM	80,26	80,41	82,75	83,87	84,35

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2021

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Mojokerto pada tahun 2016 - 2020 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 80,26 (Tahun 2016); 80,41 (Tahun 2017); dan 82,75 (Tahun 2018); 83,87 (Tahun 2019) dan 84,35 (Tahun 2020). Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan kepada masyarakat di Kota Mojokerto semakin baik, efisien, dan efektif. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

2.1.2.1.12. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan komposit dari Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Indeks Infrastruktur Perumahan Dasar, Indeks Infrastruktur LLAJ dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks ini digunakan mengukur capaian kinerja pembangunan infrastruktur layanan dasar. Data capaian Indeks Infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 : Indeks infrastruktur Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks infrastruktur	n/a	n/a	68,81	79,63	84,52

Sumber: Bappedalitbang Kota Mojokerto, 2021

2.1.2.1.13. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas Fiskal daerah merupakan indikator baru yang digunakan Kota Mojokerto. Data capaian kapasitas fiskal daerah Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25 : Kapasitas fiskal daerah Kota Mojokerto Tahun 2019-2020

indikator	2019	2020
Kapasitas fiskal daerah	407.879.676.297,94	413.323.783.926,89

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2021

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tingkat pendidikan suatu masyarakat dapat juga digambarkan melalui indikator rata-rata lama sekolah masyarakat tersebut. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang harus dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau years of schooling adalah suatu angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulai dari masuk jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir.

Angka rata-rata lama sekolah atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Namun demikian, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

Tabel 2.26 : Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-Rata Lama Sekolah	9,93	9,98	9,99	10,24	10,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016, angka rata-rata lama sekolah di Kota Mojokerto 9,93 tahun, dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 10,25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan masyarakat Kota Mojokerto semakin baik. Dibanding dengan Jawa Timur dan Nasional, angka rata-rata lama sekolah Kota Mojokerto lebih tinggi. Hal ini menunjukkan warga Kota Mojokerto sudah peduli akan pentingnya pendidikan.

2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel 2.27 : Angka Harapan Lama Sekolah Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah	13,80	13,81	13,82	13,83	14,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, angka harapan lama sekolah di Kota Mojokerto sebesar 13,80 tahun, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 14,00 tahun. Pada tahun 2020 angka tersebut berada di atas Jawa Timur sebesar 13,19 tahun, dan juga nasional sebesar 12,98. Semakin tinggi

angka Harapan Lama Sekolah maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang akan ditempuh. Hal ini menunjukkan bahwa warga Kota Mojokerto sudah banyak yang melanjutkan tingkat pendidikannya ke perguruan tinggi.

2.1.2.2.3. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Tabel 2.28 : Angka Melek Huruf Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf	97,45	95,50	95,70	97,90	98,07

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2021

Angka Melek Huruf di Kota Mojokerto pada Tahun 2016 mencapai 97,45 persen. Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 kembali turun menjadi 95,5 dan 95,7, tahun 2019 kembali naik menjadi 97,90 persen. Dan di tahun 2020 angka tersebut kembali naik menjadi 98,07. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar di Kota Mojokerto cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan kedepannya.

2.1.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator digunakan untuk untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 2.29 : Angka Partisipasi Kasar Kota Mojokerto 2016-2020

Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
PAUD	63,29%	97,72%	79,16%	29,00%	25,55%
SD/MI/Sederajat	124,12%	123,31%	102,41%	106,52%	103,04%
SMP/MTs/Sederajat	132,20%	131,65%	91,89%	119,12%	107,05%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021

APK PAUD di Kota Mojokerto bergerak fluktuatif. Pada tahun 2016 APK PAUD Kota Mojokerto mendapatkan angka 63,29 persen, di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 97,72 persen, dan di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 79,16 persen. Sementara di tahun 2019 turun signifikan menjadi 29,00% dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 25,55 persen. Untuk APK

SD/MI terus mengalami penurunan tiap tahunnya, namun masih di atas 100 persen. Begitu pula dengan APK SMP/MTS mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. APK terendah terjadi pada tahun 2018 sementara APK tertinggi terjadi pada tahun 2016. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk Kota Mojokerto semakin meningkat.

2.1.2.2.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah dengan melihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Intelektual seseorang pada umumnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang. Demikian pula dengan kemampuan melakukan interaksi sosial. Meskipun sebetulnya pendidikan dapat ditempuh di luar jalur formal, seperti di balai pelatihan ketrampilan, forum-forum diskusi, kelompok-kelompok belajar pemberdayaan masyarakat, serta pada kegiatan swadaya masyarakat lainnya.

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya dan juga sebagai bahan analisis pasar kerja.

Sertifikat atau Ijazah sebagai tanda seseorang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang dapat diperoleh dengan mengikuti lembaga pendidikan formal. Dimana lembaga pendidikan tersebut sebelumnya harus mendapatkan legalitas/pengakuan terlebih dahulu dari lembaga pemerintah. Pendidikan non formal yang dilaksanakan di rumah dengan didampingi oleh orang tua atau guru pendamping dan model kegiatan belajar yang terstruktur tanpa perlu.

Tabel 2.30 : Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
Tidak/ belum sekolah	37.484	38.488	38.721	38.404	38.841
SD sederajat	23.594	23.384	22.636	21.725	21.422
SMP sederajat	20.188	20.234	19.950	18.981	18.815
SMA sederajat	46.460	46.727	46.273	44.718	45.030
Diploma	3.327	3.361	3.307	3.202	3.258
Strata 1	11.330	11.615	11.781	11.659	11.959
Strata 2	635	673	696	717	732
Strata 3	14	11	13	17	18

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Mojokerto pada Tahun 2016 sampai dengan pertengahan Tahun 2020 mayoritas adalah penduduk lulusan SMA sederajat dengan jumlah 44.908 jiwa. Namun lulusan Universitas (S1/S2/S3) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Kota Mojokerto semakin baik.

2.1.2.2.6. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni merupakan indikator digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM

menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Tabel 2.31 : Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/MI/Sederajat	119,64%	111,00%	112,85%	114,23%	115,00%
APM SMP/MTs/Sederajat	99,99%	100,72%	95,36%	103,2%	123,70%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021

Pada Tahun 2016 – 2020 APM SD/MI mengalami fluktuasi sekitar 119,64 – 115,00 persen. Untuk APM SMP/MTs juga mengalami fluktuasi sekitar 99,99 – 123,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, dan faktor penerimaan antara dalam Kota dan Luar Kota yang terkait dengan peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi tidak signifikan. Penduduk usia sekolah di Kota Mojokerto semua tertampung di sekolah dan sesuai dengan jenjangnya, ini merupakan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah.

2.1.2.2.7. Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator SPM Pendidikan Anak Usia Dini adalah Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD. Adapun standar pemenuhan SPM ini adalah pemberian layanan kualitas barang dan jasa, kualitas pendidik dan tenaga pendidik. Berikut adalah capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Mojokerto.

Tabel 2. 32 SPM Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator	2019			2020		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Pelayan	%	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Pelayan	%
Pendidikan Anak Usia Dini	5301	5301	65,58 %	4410	5211	100%

Sumber: SPM Bangda, 2021

Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2019 di Kota Mojokerto adalah sebesar 65,58% ada beberapa fasilitas Pendidikan yang belum terpenuhi seluruhnya. Sementara di tahun 2020 mengalami peningkatan yang optimal hingga 100%.

2.1.2.2.8. Pendidikan Dasar

Indikator SPM Pendidikan Dasar adalah Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs). Adapun standar pemenuhan SPM ini adalah pemberian layanan kualitas barang dan jasa, kualitas pendidik dan tenaga pendidik. Berikut adalah capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Mojokerto.

Tabel 2. 33 SPM Pendidikan Dasar

Indikator	2019			2020		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Pelayanan	%	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Pelayanan	%
Pendidikan Dasar	21.265	21.265	100%	20.916	30.356	100%

Sumber: SPM Bangda, 2021

Capaian SPM Pendidikan Dasar pada tahun 2019 di Kota Mojokerto adalah sebesar 100%. Sementara di tahun 2020 berhasil mempertahankan capaiannya sebesar 100% walaupun terdapat penurunan pelayanan jumlah peserta yang dilayani, tetapi didukung dengan pemenuhan fasilitas Pendidikan lain yang melebihi target capaian.

2.1.2.2.9. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga Negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Minat penduduk Kota Mojokerto terhadap layanan pendidikan kesetaraan cukup tinggi dimana peserta didik pada tahun 2019 sebanyak 192 atau 100% dari penduduk yang belum menamatkan pendidikan formal.

Tabel 2.34 : Pendidikan Kesetaraan di Kota Mojokerto 2019 -2020

Indikator	2019	2020
Jumlah Warga Negara yang berusia 7-18 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	192	154
Peserta didik pendidikan kesetaraan	100%	100%
Prosentase Kualitas pendidik yang berkualifikasi S-1/D-IV	57.14%	84.21%
Jumlah Rombongan belajar di PKMB	5	6

Sumber : SPM Bangda Kemendagri, 2021

2.1.2.2.10. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena kecelakaan. Angka kematian ibu di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 35 : Angka Kematian Ibu di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	47,3	48	0	94	189

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2021

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah kematian ibu yang terjadi menunjukkan tren fluktuatif, hal ini betul-betul telah diintervensi yaitu 47,3 (1 ibu tahun 2016), naik kembali 48 (1 ibu tahun 2017), pada tahun 2018 dapat

diintervensi kembali mengalami penurunan hingga berhasil menjadi 0 KH (tidak ada kasus atau *Zero Death*), tahun 2019 terjadi kembali angka kematian ibu yakni 94 (2 kasus kematian Ibu), dan 2020 naik lagi menjadi 189.

Meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan, penyebab utama kematian ibu ditahun terakhir disebabkan kondisi ibu hamil dengan faktor determinan lainnya berupa: *Suspec Autoimmune Disease*. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya harus terus dilakukan diantaranya pendampingan kepada ibu hamil resiko tinggi oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan gerakan senam ibu hamil dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat. Pemberian tabelt penambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan kunjungan rumah.

Penanganan pada kasus kematian ibu, harus komprehensif dan bersinergis, antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan keluarga. Aspek sosial ekonomi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, sosial budaya harus diupayakan meningkat, sehingga diharapkan akan menekan Angka Kematian Ibu (AKI). Selain itu juga melalui beberapa pendekatan program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi, yaitu melalui peningkatan pengembangan program kesehatan reproduksi terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan resiko tinggi dan penyiapan keluarga dan atau suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

2.1.2.2.11. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai dengan satu hari sebelum bayi berusia satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak dari suatu perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Angka kematian bayi di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 36 : Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mojokerto

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi per 100.000 KH	5,33	3,8	2,34	3,75	4,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2021

Dalam 5 tahun terakhir angka kematian bayi per 100.000 Kelahiran Hidup mengalami fluktuasi. Di tahun 2016 jumlah Angka Kematian Bayi mencapai 5,33. Di tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 3,8 dan tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 2,34. Namun di tahun 2019 jumlah angka kematian bayi per 100.000 KH terjadi kenaikan menjadi 3,75, berikut di tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 4,26.

Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan

eksogen. Penyebab kematian di tahun 2018 terdapat 5 kasus pada kelompok Neonatus (0 sd 28 hari) disebabkan oleh Kelainan Bawaan 1 kasus dan BBLR 2 kasus, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Hal ini merupakan tantangan ke depan untuk mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil, melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi, serta untuk usia diatas neonatal (29 hari sd 1 tahun). Penyebab utama kematian 1 kasus kelainan bawaan dan 1 kasus ada infeksi karena Pneumonia. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat Ibu dan Kondisi lingkungan setempat.

2.1.2.2.12. Persentase Balita Gizi Kurang, Balita Pendek dan Balita Kurus

Pada tahun 2020, status gizi balita usia 0 – 59 bulan ditemukan sebanyak 368 balita dengan status gizi kurang (BB/U) terhadap jumlah sasaran balita yang ditimbang (D) sebanyak 3.516 atau sebesar 10,5 persen. Balita dengan status balita pendek (TB/U) sebanyak 301 apabila dibandingkan dengan balita yang diukur tinggi badannya adalah sebanyak 7,7 persen. Serta balita dengan status balita kurus (BB/TB) sebanyak 229 anak apabila dibandingkan dengan balita yang ditimbang berat badannya adalah sebanyak 5,9 persen.

Tabel 2.37 : Status Gizi Balita Tahun 2020

Indikator	Balita usia 0-59 bulan yang ditimbang/diukur	Jumlah kasus	Persentase
Balita Gizi Kurang (BB/U)	3.516	368	9,4
Balita Pendek (TB/U)	3.516	301	7,7
Balita Kurus (BB/TB)	3.516	229	5,9

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

2.1.2.2.13. Prevalensi Gizi Buruk

Angka Prevalensi gizi buruk Kota Mojokerto selama 5 tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2016 angka Prevalensi gizi buruk sebesar 0.47 turun menjadi 0.3 pada tahun 2017. Di Tahun 2018 angka Prevalensi gizi buruk naik menjadi 0.75 dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 0.28 pada tahun 2019 dan 0,13 pada tahun 2020.

Tabel 2.38 : Prevalensi Gizi Buruk Kota Mojokerto 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi Gizi Buruk	0.47	0.3	0.75	0.28	0.13

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

2.1.2.2.14. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

Cakupan desa/kelurahan siaga aktif adalah kelurahan yang memiliki Pos Kesehatan (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilince berbasis masyarakat. Nilai cakupan kelurahan siaga aktif Kota Mojokerto dari 2016 sampai dengan 2020 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 terdapat 7 kelurahan dan meningkat

menjadi 14 kelurahan pada 2017. Pada 2018 naik menjadi 15 kelurahan dan seluruh kelurahan di Kota Mojokerto

Tabel 2.39 : Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Kota di Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	7	14	14	15	18

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

2.1.2.2.15. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.40 : Angka Harapan Hidup Kota di Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	72,78	72,86	73,01	73,21	73,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Mojokerto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 angka harapan hidup Kota Mojokerto sebesar 72,78 tahun, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 73,32 tahun pada Tahun 2020. Perkembangan angka harapan hidup ini menunjukkan pelayanan kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Mojokerto yang semakin meningkat. Kondisi ini harus diiringi dengan dukungan masyarakat dalam memberikan dukungan suasana dan akses prasarana publik yang memihak kepada para lansia agar dapat hidup bahagia di masa tuanya.

2.1.2.2.16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.41 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
TPAK	n/a	68,65	69,19	65,09	68,21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

TPAK Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, pada Tahun 2017 sebesar 68,65 persen, Tahun 2018 kembali naik menjadi 69,19 persen, pada tahun 2019 turun menjadi 65,09 persen. Dan di tahun 2020 naik

kembali menjadi 68,21 persen. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 68,21 persen penduduk Kota Mojokerto yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 31,79 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia). Adapun data di tahun 2016 belum tersedia oleh BPS Provinsi Jawa Timur.

2.1.2.2.17. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Rasio penduduk yang bekerja di Kota Mojokerto pada tahun 2017 sebesar 96,39 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 93,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid mampu meningkatkan jumlah pengangguran terbuka sehingga rasio penduduk yang bekerja di Kota Mojokerto mengalami penurunan. Angka 93,26 persen berarti angkatan kerja yang ada telah memperoleh pekerjaan, sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan. Adapun data di tahun 2016 belum tersedia oleh BPS Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.42 : Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	n/a	96,39	97,55	97,37	93,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni Budaya

Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Data jumlah grup kesenian dan gedung kesenian di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.43 : Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Grup Kesenian	13	10	58	49	51
Gedung Kesenian	2	2	2	1	1

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021

Jumlah grup kesenian di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebanyak 13 grup, jumlah tersebut terus mengalami peningkatan menjadi 51 grup pada tahun

2020. Untuk gedung kesenian jumlah di tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan yang saat ini hanya terdapat 1 gedung kesenian.

Olah Raga

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Data jumlah club olahraga, gedung olahraga dan organisasi olahraga di Kota Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.44 : Jumlah Club Olahraga, Gedung Olahraga dan Organisasi Olahraga di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Club Olahraga	37	178	181	196	196
Gedung Olahraga	8	8	9	11	9
Organisasi Olahraga	23	23	23	23	25

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021

Pada tahun 2016 jumlah club olahraga di Kota Mojokerto adalah 37 club. Pada tahun 2017 jumlah club olah raga melonjak menjadi 178, hal ini dikarenakan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata meminta data ke KONI dan jumlah tersebut terus meningkat menjadi 196 pada tahun 2020. Sedangkan untuk organisasi olahraga di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebanyak 23 organisasi, jumlah tersebut sedikit bertambah menjadi 25 pada tahun 2020.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 7-13 tahun dalam kegiatan belajar/sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 7 – 13 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (7-13 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 7-13 tahun.

Tabel 2.45 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
APS SD/MI	133,27 %	124,91 %	122,89 %	122,39%	116,16%
APS SMP/MTs	132,34%	133,02%	103,69%	101,69%	121,84%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021

Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan Dasar (7-13 Tahun) ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan ,hal ini juga tidak terlepas dari

banyaknya program pemerintah yang diluncurkan melalui program Bosko dan Bosnas serta Program Indonesia Pintar sehingga memudahkan mereka bersekolah.

Jumlah siswa Usia Pendidikan Dasar masih ada perbedaan penurunan angka partisipasi sekolah dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota dalam penerimaan Siswa dalam Kota dan Luar Kota yang diutamakan penduduk dalam Kota Mojokerto dulu sedangkan yang luar Kota Mojokerto hanya 10 % dan yang berprestasi yang diterima, sehingga angka dapat berubah-ubah, pada Tahun 2017 -2018 ada perubahan kebijakan dari pemerintah tentang Penerimaan PPDB yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Pusat yaitu Permendikbud No. 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK,SD,SMP dan SMA,SMK yang mengalami perubahan lagi pada Tahun 2018 Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Tentang PPDB yang berbasis Zonasi dan Titik Koordinat, serta jumlah SD per rombel 28 siswa, sehingga terjadilah perubahan yang cukup signifikan.

b. Angka Putus Sekolah

Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Adanya urbanisasi dari luar kota sehingga mempengaruhi siswa sekolah berpindah-pindah bahkan putus sekolah karena mengikuti orangtuanya yang belum memahami pentingnya pendidikan.

Tabel 2.46 : Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,22%	0,19%	0,09%	0,06%	0,01%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2019

Jenjang pendidikan setingkat SD/MI dan SMP/MTs, dalam lima tahun terakhir Angka Putus Sekolah (APS) secara umum mengalami penurunan. Tahun 2016 Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,02 persen kemudian Tahun 2020 sebesar 0,00 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs, pada Tahun 2016 Angka Putus Sekolah sebesar 0,22 persen kemudian pada Tahun 2020 turun secara signifikan menjadi 0,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa para orang tua sudah banyak yang memahami pentingnya pendidikan dasar.

c. Angka Kelulusan

Salah satu syarat kelulusan setiap siswa dari suatu jenjang pendidikan adalah mengikuti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) untuk jenjang

SD/MI dan UN (Ujian Nasional) untuk jenjang SMP/MTs. Namun UN bukanlah satu satunya syarat seorang siswa dinyatakan lulus. UN disyaratkan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi kelas 3 untuk SLTP sederajat, dan USBN bagi kelas 6 jenjang SD sederajat, sedangkan untuk kelas akselerasi adalah menduduki kelas akhir. Besaran angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas jenjang pendidikan, jika suatu sekolah banyak siswa yang lulus tentunya sekolah tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding dengan sekolah yang siswanya sedikit lulus.

Tabel 2.47 : Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelulusan SD/MI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Angka Kelulusan SMP/MTs	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021

Angka kelulusan sekolah jenjang SD/MI maupun jenjang SMP/MTs dalam 5 (lima) tahun yaitu 100 persen. Hal ini merupakan hal yang sangat baik dan harus dipertahankan di tahun tahun mendatang. Program pemerintah dapat dilihat keberhasilannya dari tabel diatas, yang menunjukkan ketuntasan kurikulum serta pembelajarannya.

d. Angka Melanjutkan Sekolah

Dalam suatu Kota/Kabupaten dapat diketahui kemajuan dan perkembangannya salah satunya adalah dengan melihat Angka Melanjutkan Sekolah (AM)

Tabel 2.48 : Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan SD/MI	121,54%	116,14%	97,33%	98,00%	102,00%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel diatas diketahui AM dari SD/MI ke MTs mengalami perubahan / fluktuasi. Ada kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun berikutnya. Penyebab dari hal ini adalah adanya kebijakan pemerintah yang berubag ubah yakni tentang aturan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang berbasis zonasi, berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2017 tentang PPDB TK, SD, SMA dan SMK.

e. Rasio Guru / Murid

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru pada sekolah yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Tabel 2.49 : Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	1:19	1:19	1:18	1:17	1:17
SMP/MTs	1:14	1:15	1:15	1:15	1:15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021

Dari data tabel diatas rasio guru/murid jenjang SD selama tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan, dari perbandingan 1:19 pada tahun 2016 turun menjadi 1:17 pada tahun 2020 disebabkan adanya penurunan jumlah siswa SD/MI akibat aturan PPDB yang berbasis zonasi. Hal ini menunjukkan pengawasan guru semakin intens terhadap proses belajar siswa.

Dari data tabel diatas rasio guru/murid jenjang SMP selama tahun 2016 – 2020 cenderung stabil, dari perbandingan 1:14 pada tahun 2016 naik sedikit di tahun 2020 menjadi 1:15.

f. Guru Pendidikan Dasar berkualifikasi Min D4/S1

Keberadaan guru tidak hanya diperlukan dari sisi jumlahnya saja, tetapi juga kualitasnya. Kualitas seorang guru secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar murid, semakin tinggi pendidikan maka dia akan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding yang pendidikannya rendah. Dengan tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV pendidikan menengah selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Angka tertinggi diraih pada tahun 2016 yakni sebesar 95,75 persen. Di tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup drastis di angka 86,64 persen. Hal ini disebabkan adanya guru yang memasuki batas usia pensiun (purna tugas) dan meninggal dunia. Di tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 94,02 persen tetapi mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 94,53 persen. Di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 94,22 persen. Hal ini dikarenakan adanya seleksi CPNS tahun 2018 yang membuka formasi guru yang cukup banyak.

Tabel 2.50 : Guru Pendidikan Dasar Berkualifikasi Min D4/S1 di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,75%	86,64%	94,02%	94,53%	94,22%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2019

2.1.3.1.2. Kesehatan

a. Perkembangan Balita Gizi Buruk (menurut Kecamatan)

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Adapun perkembangan gizi buruk per kecamatan di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut.

Tabel 2.51: Perkembangan Balita Gizi Buruk (menurut Kecamatan) Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR	BALITA KURUS (BB/TB)	
				JUMLAH	%		JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	Magersari	Kedundung	1.365	73	5,3	2.316	64	2,8	2.316	40	1,7
		Wates	922	64	6,9	1.484	126	8,5	1.484	34	2,3
		Gedongan	1.049	102	9,7	1.712	69	4,0	1.712	49	2,9
2	Prajurit Kulon	Blooto	1.569	189	12,0	2.640	304	11,5	2.640	81	3,1
		Mentikan	1.212	39	3,2	1.940	37	1,9	1.940	39	2,0
JUMLAH (KAB/KOTA)			6.117	467	7,6	10.092	600	9,8	10.092	243	4,0

Sumber : Buku Profil Kesehatan, 2019

b. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi. Penderita TBC di Kota Mojokerto mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Tahun 2019 jumlah kasus TB baik laki-laki maupun perempuan adalah 454 kasus, sementara pada tahun 2020 turun menjadi 356. Jumlah kasus TB pada anak-anak usia 0-14 tahun pun juga mengalami penurunan pada rentang tahun tersebut. Tahun 2019 sejumlah 151 anak, sedangkan 2020 turun menjadi 57. Penurunan ini disebabkan Karena adanya pandemi covid-19, sehingga banyak kegiatan di kelompok masyarakat yang tidak buka. Misalnya posyandu balita, posyandu lansia dan sekolah. Juga banyak masyarakat yang takut datang ke faskes. Dengan demikian skrining terhadap pasien TB tidak bisa dilaksanakan secara optimum dan mengakibatkan penemuan penderita TB menurun. Dibawah ini adalah data terkait tuberkulosis di Kota Mojokerto pada tahun 2019-2020.

Tabel 2.52 : Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kota Mojokerto Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
Jumlah terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2099	1921
Jumlah semua kasus tuberkulosis (laki-laki & perempuan)	454	356
Kasus tuberkulosis anak 0-14 tahun	151	57
% orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100,00%	100,00%
CNR semua kasus TBC per 100.000 penduduk	325	254
Perkiraan insiden tuberkulosis (dalam absolut)	521	565
Case Detection Rate (%)	87,00%	63,00%
Proporsi TB anak diantara seluruh pasien TB	33,00%	16,00%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

c. Jumlah Posyandu dan Balita

Sampai dengan tahun 2020, jumlah Posyandu yang ada di Kota Mojokerto sebanyak 170 posyandu, mengalami kenaikan 3 angka dari tahun sebelumnya. Adapun rincian dan strata posyandu yang ada di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.53 : Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Kota Mojokerto Tahun 2020

Uraian	Jumlah	Strata			
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri
Posyandu	170	0	4	125	41
Persentase	100%	0%	2%	74%	24%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

d. Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu

Sampai dengan tahun 2020, jumlah puskesmas di Kota Mojokerto beserta jaringannya terus bertambah. Terdapat 2 puskesmas rawat inap di Kota Mojokerto yang berlokasi di Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari, yakni Puskesmas Blooto dan Puskesmas Blooto. Sementara terdapat 4 puskesmas yang tidak melayani fasilitas rawat inap yaitu Puskesmas Gedongan, Kranggan, Mentikan, Wates. Kota Mojokerto juga menyediakan fasilitasi puskesmas keliling sebanyak 6 unit untuk menjemput bola dalam melayani masyarakat yang membutuhkan. Selain itu terdapat puskesmas pembantu sebanyak 11 unit. Adapun jumlah puskesmas, klinik, dan pustu terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.54 : Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kota Mojokerto Tahun 2020

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas dan Jaringannya	
	Puskesmas Rawat Inap	2
	Puskesmas Non Rawat Inap	4
	Puskesmas Keliling	6
	Puskesmas	11
2	Klinik	
	Klinik Pratama	11
	Klinik Utama	4
	Praktik Dokter Umum Perorangan	50
	Praktik Pengobatan Tradisional	103
	Bank Darah Rumah Sakit	1
	Unit Transfusi Darah	1

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

e. Jumlah Rumah Sakit

Sampai saat ini rumah sakit di Kota Mojokerto berjumlah 6 rumah sakit yang terdiri dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo , RS Gatoel, RSI Hasanah, RS Emma, RS Reksa Waluya dan RS Kamar Medika.

f. Jumlah Dokter

Jumlah dokter di Kota Mojokerto tahun 2019 sebanyak 277 dokter yang terdiri dari 96 dokter umum, 143 dokter spesialis, 29 dokter gigi dan 9 dokter gigi spesialis dengan unit kerja di puskesmas, rumah sakit serta sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Tabel 2.55 : Jumlah Dokter di Kota Mojokerto Tahun 2020

No	Unit Kerja	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis
1	Puskesmas	25	-	12	-
2	Rumah Sakit	49	140	8	6
3	Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	22	3	9	3
	Jumlah	96	143	29	9

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

g. Pelayanan Kesehatan

Kinerja pelayanan kesehatan di rumahsakit umum RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo dapat ditunjukkan dari nilai IKM dan pencapaian SPM. Nilai IKM selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, nilai IKM pada tahun 2016 sebesar 74.01 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 72.75. Pada tahun 2018 dan 2019, nilai IKM mengalami kenaikan secara berturut menjadi 74.03 dan 85.35. Pada tahun 2020, nilai IKM turun menjadi 79.03 dikarenakan pandemi covid 19. Sedangkan untuk pencapaian SPM mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, yaitu 80 pada tahun 2018 dan naik menjadi 91 pada tahun 2020. Data pencapaian SPM tahun 2016 dan 2017 tidak tersedia, dikarenakan penerapan SPM baru tahun 2018.

Tabel 2.56 : Capain IKM dan SPM RSUD Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	74.01	72.75	74.03	85.35	79.03
Capaian SPM	n/a	n/a	80	88	91

Sumber : RSUD Dr Wahidin Sudirohusodo,2021

Tabel 2.57 : Pelayanan Kesehatan di Kota Mojokerto 2019-2020

Indikator	2019			2020		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Pelayanan	%	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Pelayanan	%
Pelayanan Penderita Hipertensi	35.903	17.123	47.69	36.267	14.961	41.25
Pelayanan Penderita Diabetes Militus	4.887	4.525	92.59	4.936	7.121	144.3
Pelayanan Penderita ODGJ Berat	245	320	130.6	247	282	114.2

Indikator	2019			2020		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Pelayanan	%	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Pelayanan	%
Pelayanan terduga penderita HIV	6	6	100%	2.979	3.148	105.7

Sumber : SPM Bangda Kemendagri, 2021

Dari data diatas diperoleh informasi bahwa pelayanan kesehatan di Kota Mojokerto untuk penderita hipertensi, penderita ODGJ berat dan terduga penderita HIV di tahun 2019 dan 2020 sudah mencapai 100%. Sedangkan pelayanan penderita hipertensi perlu ditingkatkan karena nilai SPM untuk tahun 2019 dan 2020 masih dibawah 100%.

h. Persentase Desa ODF

Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Verifikasi ODF adalah proses memastikan status ODF suatu komunitas masyarakat yang menyatakan bahwa secara kolektif mereka telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Adapun persentase Desa ODF di Kota Mojokerto seperti pada table berikut:

Tabel 2.58 Persentase Desa ODF

Tahun	Kelurahan	Persentase
2016	Wates Purwotengah Jagalan	16,67%
2017	Wates Purwotengah Jagalan	16,67%
2018	Wates Purwotengah Jagalan Gedongan Surodinawan	27,78%
2019	Wates Purwotengah Jagalan Gedongan Surodinawan Sentanan Meri Kedundung Mentikan	50%
2020	Semua Kelurahan ODF	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojoke, 2021

Capaian persentase Desa ODF di tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2016 dan 2017 tidak ada peningkatan capaian persentase desa ODF yakni sebesar 16,67%. Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 27,78%, 2019 meningkat kembali menjadi 50%, dan di

tahun 2020 mencapai angka optimal sebesar 100%. Dalam arti seluruh kelurahan di Kota Mojokerto telah berlabel ODF.

i. Perkembangan Penyintas Covid di Kota Mojokerto

Kondisi pandemic covid-19 yang terjadi saat ini juga menyerang Kota Mojokerto. Kasus pertama covid di Kota Mojokerto dimulai pada bulan April dengan jumlah 1 orang. Berlanjut mengalami kenaikan di bulan-bulan berikutnya, dan titik tertinggi jumlah positif covid di Kota Mojokerto pada tahun 2020 terjadi pada Bulan Desember sebanyak 233 orang. Adapun total warga Kota Mojokerto selama tahun 2020 yang positif covid sebanyak 1026 orang. 956 orang diantaranya terkonfirmasi sembuh dari covid, sementara jumlah orang yang meninggal akibat covid di tahun 2020 mencapai 58 orang. Di akhir Desember 2020 masih terdapat 12 orang yang menjalani karantina. Adapun persebaran kasus Covid di Kota Mojokerto bisa diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.59 : Perkembangan Penyintas Covid di Kota Mojokerto Tahun 2020

Kecamatan	2020									Total
	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des	
Positif Covid	1	8	62	167	114	174	140	127	233	1026
Sembuh	0	5	40	164	109	109	175	146	208	956
Meninggal dunia	0	0	4	8	10	13	11	4	8	58
Karantina	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
Total	1	13	106	339	233	296	326	277	461	

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojoke, 2021

j. Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan

Pemerintah Kota Mojokerto sangat serius dalam menangani masalah pandemic covid. Terbukti dengan dikeluarkannya Perwali Mojokerto Nomor 55 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Mojokerto. Pemkot Mojokerto juga getol dalam melakukan operasi yustisi untuk menerapkan protocol Kesehatan dan memberikan sanksi kepada pelanggar prokes. Pada tahun 2020 operasi yustisi dimulai pada bulan Mei. Hingga akhir Desember 2020 jumlah pelanggar protocol Kesehatan di Kota Mojokerto sangat tinggi yakni sebesar 4.130 orang. Pelanggar prokes ini diberikan sanksi moril maupun materil, namun kesadaran warga Kota Mojokerto dalam menerapkan protocol Kesehatan di tahun 2020 masih rendah. Adapun jumlah pelanggar prokes di Kota Mojokerto selama tahun 2020 bisa dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.60 : Jumlah Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Tahun 2020 Kota Mojokerto

Indikator	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Tidak Memakai Masker, berkerumun	7	2	46	0	1000	895	1161	1019	4130

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap

Kriterianya adalah jalan kota yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi rusak ringan dan rusak berat.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api. Sedangkan kondisi baik kawasan yang memiliki sumber daya alam atau sumber daya manusia yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.61 : Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik/Mantap	27%	86,77%	84,60%	86,40%	91,60%

Sumber : DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

Kewenangan penyelenggaraan jalan sesuai surat Keputusan Walikota Tentang Kewenangan Status Ruas Jalan Kota Mojokerto Nomor: 188.45/449/417.111/2018 tanggal 2 Mei 2018. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik/mantap pada tahun 2018 adalah sebesar 84,60 persen dan pada tahun 2019 adalah sebesar 86,40 persen. Tahun 2020 mengalami kenaikan kemantapan menjadi 91,60 persen ini dikarenakan panjang jalan dalam kondisi baik mengalami kenaikan 5,2 persen.

b. Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 m)

Jalan yang memiliki trotoar merupakan prasarana transportasi dalam menggerakkan dan memperlancar perekonomian, pendidikan, kesehatan sosial dan kegiatan kemasyarakatan.

Tabel 2.62 : Presentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1.5 m) di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1.5 m)	48,3	48,3	48,3	32,79	32,79

Sumber : DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan minimal 1,5 m pada tahun 2018 adalah sebesar 48,3 persen dan pada tahun 2019 berkurang menjadi 32,79 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terdapat pembangunan jalan baru namun tidak disertai dengan trotoar dan/atau drainase minimal 1,5 m. Di tahun 2020 mengalami stagnansi di angka 32,79

persen akibat adanya refocusing anggaran refocusing untuk penanganan dampak covid 19.

c. Penanganan Genangan/Banjir

Banjir adalah keadaan aliran air dan atau elefasi muka air dalam sungai atau kali atau kanal yang lebih besar atau lebih tinggi dari normal. Genangan yang timbul didaerah rendah akibat ditimbulkannya juga ternasuk dalam pengertian banjir. Penanggulangan banjir harus dilakukan berbagai pihak antara pemerintah dan masarakat mulai dari tata kota dan saluran air yang baik, serta perilaku masarakat yang baik terhadap lingkungan.

Tabel 2.63 : Presentase Penanganan Genangan/Banjir di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	76	78	80	82	84

Sumber : DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun, penanganan luas daerah genangan banjir pada tahun 2017 adalah sebesar 78 persen dan pada tahun 2018 adalah sebesar 80 persen mengalami kenaikan sebesar 2 persen dikarenakan adanya kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul sungai, peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai. Di tahun 2019 terjadi peningkatan penanganan genangan/banjir yakni 82 persen. Pun di tahun 2020 juga terjadi kenaikan sebesar 84 persen.

d. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Irigasi adalah usaha penyediaan atau pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya mekliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah dan irigasi pompa. Pelayanan air irigasi ditujukan untuk produksifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.

Tabel 2.64 : Presentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	70	72	75	80	82

Sumber : DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

Persentase irigasi kota dalam kondisi baik yaitu luas irigasi yang baik dibagi luas irigasi keseluruhan. Pada tahun 2017 adalah sebesar 72 persen dan pada tahun 2018 adalah sebesar 75 persen mengalami peningkatan 3 persen dikarenakan adanya kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dan pemeliharaan pintu air. Di tahun 2019 terjadi peningkatan perbaikan irigasi kota sebesar 80 persen, dan di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 82 persen.

e. Rasio Jaringan Irigasi

Pemeliharaan Jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestariaannya.

Tabel 2.65 : Rasio Jaringan Irigasi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Jaringan Irigasi	76	78	80	82	84

Sumber : DPUPRRPKP Kota Mojokerto, 2021

Jaringan irigasi yaitu panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budi daya pertanian. Rasio jaringan irigasi pada tahun 2017 sebesar 78 persen, tahun 2018 sebesar 80, di tahun 2019 menjadi 82 persen. Dan di tahun 2020 mengalami peningkatan secara kontinyu menjadi 84 persen.

f. Pertanian

Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan adalah proporsi konflik pertanahan yang diselesaikan terhadap seluruh konflik pertanahan yang ada. Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 20%, dari 5 (lima) konflik pertanahan yang terjadi, baru 1 yang sudah diselesaikan. Di tahun 2020 tidak ada permasalahan pertanahan yang terselesaikan, hal ini dikarenakan adanya relokasi anggaran.

Tabel 2.66 : Persentase Permasalahan Pertanahan yang diselesaikan di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan	-	-	20%	-	0%

Sumber : DPUPRRPKP Kota Mojokerto, 2021

g. Persentase Pemenuhan Akses Layak Sanitasi

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Adapun persentase pemenuhan akses layak sanitasi di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut.

Tabel 2.67 : Persentase Pemenuhan Akses Layak Sanitasi Kota Mojokerto 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemenuhan Akses Layak Sanitasi	30%	94,05%	35%	95,48%	97,34%

Sumber: DPUPRRPKP Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase pemenuhan akses layak sanitasi di Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun di tahun 2019 dan 2020 capaian Pemerintah Kota Mojokerto sangat baik yakni mencapai angka 95,48 persen di tahun 2019 dan meningkat sebesar 97,34 persen di tahun 2020.

h. Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Adapun persentase pemenuhan akses layak air minum di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut.

Tabel 2.68 : Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum Kota Mojokerto 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum	63%	94,50%	63%	93,69%	94,58%

Sumber: DPUPRRPKP Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa pemenuhan akses layak air minum di Kota Mojokerto mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Data capaian dalam 2 tahun terakhir menunjukkan angka yang bagus yakni 93,69 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 94,58 persen di tahun 2020. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

i. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Penerima pelayanan dasar air minum sehari-hari yaitu Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Adapun capaian SPM persentase penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut.

Tabel 2.69 : Presentase Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kota Mojokerto 2019-2020

Indikator	2019	2020
Persentase penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	50,50%	49,91%
a. jumlah total yang Terlayani	39.816	140.136
b. jumlah total yang harus dilayani	40.573	140.136

Sumber: SPM Bangda Kepmendagri, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kota Mojokerto selama dua tahun terakhir warga sudah terlayani dengan baik. Namun capaian persentasenya kurang maksimal diakibatkan adanya tidak semua pelayanan SPAM jaringan perpipaan terlayani secara penuh di Kota Mojokerto, terlihat dengan capaiannya di tahun 2019 sebesar 50,50%, dan tahun 2020 mengalami penurunan 49,91%.

j. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. Penerima pelayanan dasar air limbah domestik yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air. Adapun capaian SPM persentase penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut.

Tabel 2.70 : Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Mojokerto 2019-2020

Indikator		2019	2020
Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik		33,33%	33,34%
a.	jumlah total yang Terlayani	40.006	13.931
b.	jumlah total yang harus dilayani	40.573	13.931

Sumber: SPM Bangda Kepmendagri, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa pelayanan penyediaan pengolahan air limbah domestik di Kota Mojokerto selama dua tahun terakhir sudah banyak warga yang terlayani. Hanya saja capaian persentasenya kecil dikarenakan indicator penunjangnya seperti Pelayanan SPALD-S dan Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T angkanya belum terpenuhi.

2.1.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan proporsi jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Capaian indeks rasio rumah layak huni selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2016 rasio rumah layak huni di Kota Mojokerto sebesar 0,40. Tahun 2017 meningkat menjadi 0,55, tahun 2018 sebesar 0,71, tahun 2019 meningkat cukup signifikan menjadi 0,99, dan tahun 2020 sudah mencapai angka optimal 1,00.

Tabel 2.71 : Rasio Rumah Layak Huni Kota Mojokerto 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Rumah Layak Huni	0,40	0,55	0,71	0,99	1,00

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2021

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni merupakan proporsi permukiman layak huni terhadap seluruh luas wilayah permukiman. Capaian rasio permukiman layak huni di Kota Mojokerto mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 rasio permukiman layak huni yakni 0,40, tahun 2017 0,55, tahun 2018 naik cukup signifikan menjadi 0,86, tahun 2019 menjadi 0,97, dan tahun 2020 menjadi 0,98.

Tabel 2.72 : Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Permukiman Layak Huni	0,40	0,55	0,86	0,97	0,98

Sumber : DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan proporsi jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh rumah di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 96,83 persen, Di tahun 2019 terjadi peningkatan kelayakan rumah layak huni menjadi 97,32 persen. Dan di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 98 seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.73 : Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Mojokerto 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	n/a	n/a	96,83	97,32	98

Sumber : DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

d. Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase permukiman yang tertata merupakan proporsi luas area permukiman yang tertata terhadap seluruh luas area permukiman. Persentase permukiman yang tertata di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 76,42 persen. Di tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 98 persen, dan tahun 2020 meningkat menjadi 99 persen. Sesuai dengan tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.74 : Presentase Permukiman yang Tertata Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Permukiman yang Tertata	n/a	n/a	76,42	98	99

Sumber : DPUPRPRKP Kota Mojokerto, 2021

e. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan merupakan proporsi luasan permukiman kumuh yang tertangani terhadap seluruh luas permukiman kumuh. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan

perkotaan di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar 50 persen. Di tahun 2017 menjadi 70 persen, Di tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 96,48 persen. Di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 97 persen, dan di tahun 2020 naik lagi menjadi 98 persen. Seperti yang tersaji dalam tabel berikut

Tabel 2.75 : Presentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	50	70	96,48	97	98

Sumber : DPUPRRKP Kota Mojokerto, 2021

f. Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman

Indeks infrastruktur dasar permukiman merupakan komposit dari Prosentase penurunan kawasan kumuh, Prosentase rumah dengan akses sanitasi yang layak, dan Prosentase rumah yang mendapat akses air minum yang layak. Capaian indeks infrastruktur dasar permukiman di Kota Mojokerto pada tahun 2016 adalah 55, meningkat di tahun 2017 menjadi 60, dan tahun 2018 meningkat menjadi 75. Sedangkan tahun 2019 meningkat cukup signifikan menjadi 94,61. Namun di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan yakni 91,33.

Tabel 2.76 : Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks infrastruktur dasar permukiman	55	60	75	94,61	91,33

Sumber : DPUPRRKP Kota Mojokerto, 2021

g. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota

Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau penataan perumahan dan Kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”. Adapun penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.77 : Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota Mojokerto 2019-2020

Indikator		2019	2020
Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		32,44%	33,33%
a.	jumlah total yang Terlayani	73	58
b.	jumlah total yang harus dilayani	78	58

Sumber: SPM Bangda Kepmendagri, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah sudah hampir maksimal bila dilihat dari total yang harus dilayani. Namun persentase capaiannya kurang begitu baik dikarenakan pemerintah Kota Mojokerto tidak melakukan Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan dan Subsidi uang sewa sehingga mampu menjadi pengungkit capaian fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada pasal 1 butir 1 yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pengertian satuan perlindungan berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 memiliki beberapa unsur kata, yaitu :

1. Warga masyarakat
2. Yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan
3. Penanganan Bencana dan mengurangi/memperkecil resiko bencana
4. Ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.

Tabel 2.78 : Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Mojokerto 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	2,16	2,42	2,67	3,11	3.15

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita pahami bahwa tugas dan kewajiban petugas LINMAS sangat beragam di antaranya mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan Perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa, menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) merupakan subyek sosial dimana selalu dinamis dan berkembang baik dari sisi positif maupun dari sisi negative, dan yang perlu diantisipasi dimana di permukaan hanya sedikit namun di dalamnya berkembang semakin besar, maka dari itu

pendekatan persuasif dan komunikasi aktif di masyarakat harus di tingkatkan agar tingkat pelanggaran K3 dapat di minimalisir dan dapat segera di selesaikan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.79 : Presentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Mojokerto 2016-2020

indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman Keindahan)	92%	82.47%	82%	83%	82.47%

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan table di atas maka dapat kita petakan subyek sosial di mana selalu dinamis dan berkembang baik dari sisi positif maupun hal negative, dan yang perlu diantisipasi yaitu fenomena gunung es di mana di permukaan hanya sedikit namun di dalamnya berkembang semakin besar, maka dari itu pendekatan dan komunikasi aktif di masyarakat di tingkatkan agar tingkat pelanggaran K3 dapat di monitor semuanya dan dapat segera di selesaikan.

c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Pelayanan kebakaran merupakan pertolongan yang diberikan akibat bencana yang disebabkan oleh api atau kebakaran tidak terkawal, membayakan nyawa manusia, bangunan atau ekologi. Ia boleh jadi sengaja atau tidak sengaja. Kebakaran lazimnya akan menyebabkan kerusakan atau kemusnahan pada binaan dan kecederaan atau kematian pada manusia . Persentase Pelayanan bencana kebakaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.80 : Presentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Mojokerto 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan table di atas maka dapat kita pahami bahwa tugas dan kewajiban petugas DAMKAR sangat beragam di antaranya mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi dari masyarakat serta pengamanan swakarsa, menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran di lingkungan masyarakat yang disebabkan kelalaian dapat segera diatasi.

d. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Waktu Tanggap (*Response Time*) merupakan waktu tanggap yang diberikan oleh antar muka /interfase mengirim permintaan pengguna yang dapat memberikan waktu tanggap yang sependek-pendeknya. Tetapi waktu tanggap yang baik memang tidak dapat ditentukan, karena ada beberapa aspek yang mempengaruhi antara lain ragam interaksi yang diinginkan dan kefasihan pengguna response time rate sebagaimana tabel berikut merupakan indikator kinerja daerah (IKD) baru.

Tabel 2.81 : Presentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Mojokerto 2016-2020

indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (MWK)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2020

Perencanaan sistem proteksi kebakaran di perkotaan didasarkan kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Perencanaan harus dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat resiko kebakaran dalam suatu WMK oleh instansi kebakaran setempat. Unsur utama yang penting dalam perencanaan ini adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran di setiap WMK. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Apabila pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakaran pun harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Daerah layanan dalam setiap WMK tidak melebihi dari radius 7,5 km.

e. Persentase Penegakan PERDA

Produk hukum daerah merupakan instrumen penegakan peraturan di daerah yang meliputi beberapa peraturan seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan daerah, peraturan desa. Produk hukum daerah dapat berupa peraturan yang bersifat regulasi maupun teknis prosedural untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Persentase penegakkan pelanggaran Perda, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.82 : Presentase Penegakan PERDA Kota Mojokerto 2016-2020

indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pelanggaran Perda Terselesaikan	91,00	94,88	88,17	82,66	87,62

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2021

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ini berarti kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah cukup luas untuk mengatur daerah secara regulasi. Adapun persentase pelanggaran Perda terselesaikan di Kota Mojokerto mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2016 persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan sebesar 91.00 persen. Namun di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 88,17, disusul dengan tahun selanjutnya juga mengalami penurunan menjadi 82,66. Di tahun 2020 terjadi sedikit kenaikan menjadi 87,62 persen. Artinya, bahwa dengan meningkatnya persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan diharapkan dapat menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

f. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman

Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum merupakan proporsi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan terhadap seluruh pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman. Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar 92% dan di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan secara berturut menjadi 82,47% dan 81.76%. Ditahun 2019 terjadi peningkatan nilai menjadi 83.11% namun ditahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 82.47%

Tabel 2.83 : Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Kota Mojokerto 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman	92	82.47	81.76	83.11	82.47

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2021

g. Persentase Menurunnya Gangguan KAMTIBMAS

Menurunnya gangguan kamtibmas menunjukkan naiknya kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Di Tahun 2016, persentase penurunan gangguan kamtibmas Kota Mojokerto sebesar 15.08% dan mengalami kenaikan menjadi 16.67% pada tahun 2017. Rentang tahun 2018 sampai dengan 2020, prosentase penurunan gangguan kamtibmas cenderung stabil, yaitu diangka sekitar 20%.

Tabel 2.84 : Presentase Menurunnya Gangguan KAMTIBMAS Kota Mojokerto 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase menurunnya gangguan KAMTIBMAS	15.08 %	16.66%	21%	20%	21%

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2021

h. Persentase Menurunnya Pelanggaran PERDA dan PERWALI

Penurunan pelanggaran Perda dan Perwali menunjukkan masyarakat sadar dan patuh terhadap peraturan pemerintah daerah. Di tahun 2016, presentase menurunnya pelanggaran Perda dan Perwali sebesar 15.08% dan mengalami kenaikan penurunan menjadi 33.83%. Pada tahun 2018 dan 2019, angka menurun menjadi 20 %. Tahun 2020, penurunan pelanggaran Perda dan Perwali minus 242% yang berarti terjadi peningkatan pelanggaran secara signifikan pada tahun tersebut. Hal itu dikarenakan penerapan Perwali No. 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid 19. Pelanggaran perwali tersebut didominasi pelanggaran tidak memakai masker dan penertiban saat pemberlakuan PPKM.

Tabel 2.85 : Presentase Menurunnya Pelanggaran PERDA dan PERWALI Kota Mojokerto 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase menurunnya pelanggaran PERDA dan PERWALI	15.08%	33.83%	21%	20%	-242%%

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2021

i. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara meliputi pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan.

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran perda dan perkara. Kerugian materil terdiri atas: rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5 persen dari biaya operasional penegakan perda dan perkara yang sedang dilakukan dan rusak sedang dan atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan atau lebih dari 2,5 persen dari biaya operasional penegakan perda dan perkara yang sedang dilakukan. Adapun capaian pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pelayanan trantibum terhadap penegakan perda sesuai mutu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.86 : Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi Kota Mojokerto 2019-2020

Indikator		2019	2020
Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		48,83%	100%
a.	jumlah total yang Terlayani	1278	1
b.	jumlah total yang harus dilayani	1546	1

Sumber: SPM Bangda, 2021

Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi Kota Mojokerto di tahun 2019 persentase capaiannya hanya sedikit diakibatkan tidak adanya ganti rugi materil maupun pengobatan dalam kasus yang ditangani, sehingga capaiannya hanya 48,83%. Sedangkan di tahun 2020 capainnya meningkat 100% karena selain terlayani terdapat ganti rugi materil dan pengobatan.

j. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana meliputi wilayah kabupaten/kota. Adapun capaian pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pelayanan informasi rawan bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.87 : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota Mojokerto 2019-2020

Indikator		2019	2020
Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana		80%	80%
a.	jumlah total yang Terlayani	42.983	112.060
b.	jumlah total yang harus dilayani	51.812	140.075

Sumber: SPM Bangda, 2021

Pelayanan informasi rawan bencana di Kota Mojokerto pada tahun 2019 dan 2020 mengalami stagnansi, walaupun terdapat perbedaan jumlah total yang terlayani dan jumlah total yang harus dilayani. Hal ini dikarenakan unsur

penunjang SPM Pelayanan informasi rawan bencana yakni Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana pada tahun 2019 masih belum terpenuhi. Sehingga membuat persentase capaiannya berkurang. Sementara di tahun 2020 unsur Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana tidak dipenuhi sementara pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana sudah terpenuhi.

k. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Adapun capaian pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.88 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota Mojokerto 2019-2020

Indikator		2019	2020
Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		79,59%	80%
a.	jumlah total yang Terlayani	41.239	112.060
b.	jumlah total yang harus dilayani	51.812	140.075

Sumber: SPM Bangda, 2021

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kota Mojokerto mengalami peningkatan pada tahun 2019 ke 2020. Capaian angka tersebut sudah cukup baik yakni 79,59% dan 80% secara berturut-turut. Tetapi perlu ada peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sehingga bisa mencapai angka optimal.

l. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Adapun capaian pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.89 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kota Mojokerto 2019-2020

Indikator		2019	2020
Capaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		0,04%	100%
a.	jumlah total yang Terlayani	137	1026
b.	jumlah total yang harus dilayani	51.812	1026

Sumber: SPM Bangda, 2021

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kota Mojokerto mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 ke 2020. Pada tahun 2019, capaiannya hanya 0,04% terlihat dari jumlah total yang terlayani hanya 137 orang dari yang harus dilayani sebesar 51.812. Sedangkan di tahun 2020 capaiannya sudah optimal 100%, ini berarti jumlah orang yang terlayani dan harus dilayani sudah terpenuhi semua.

m. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Adapun capaian pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.90 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Kota Mojokerto 2019-2020

Indikator		2019	2020
Capaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	100%
a.	jumlah total yang Terlayani	42	64
b.	jumlah total yang harus dilayani	42	64

Sumber: SPM Bangda, 2021

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kota Mojokerto pada tahun 2019 dan 2020 sudah menunjukkan angka optimal yakni 100%.

2.1.3.1.6. Sosial

a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan juga untuk meningkatkan partisipasi PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Definisi PMKS /Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan

sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial atau disebut sebagai bantuan sosial dalam kurun waktu tahun berjalan.

Tabel 2.91 : Presentase PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial	88%	90%	95%	82,11%	100%

Sumber : Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021

Adapun persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial di Kota Mojokerto cenderung mengalami peningkatan kecuali tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 82,11 persen. Namun di tahun 2020 sudah menunjukkan angka yang optimal yakni 100% artinya PMKS di Kota Mojokerto sudah mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Mojokerto.

b. Persentase PMKS yang tertangani

Persentase PMKS yang Tertangani adalah PMKS yang telah tercukupi kebutuhan sosialnya, sebagaimana table berikut:

Tabel 2.92 : Presentase PMKS yang Tertangani Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang tertangani	88%	90%	95%	95%	100%

Sumber : Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan Pemerintah Kota Mojokerto telah berhasil menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan bansos yang telah diberikan. Bahkan di tahun 2020 kinerja Pemkot Mojokerto sudah optimal mencapai 100 persen..

c. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya, wawasannya, serta spritual mentalitasnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta meningkatnya kemampuan sosialnya merupakan indikator penting dalam pemaparan tren penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebuah daerah. Terpenuhinya kebutuhan dasar disertai meningkatnya kemampuan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan indikasi meningkatnya kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial sebuah wilayah.

Tabel 2.93 : Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	88%	90%	95%	95%	100%

Sumber : Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021

d. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berasal dari pemerintah dengan harapan agar PMKS mampu mengembangkan kapasitasnya melalui kelompok usaha bersama.

Tabel 2.94 : Presentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lain Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain	1,50%	1,02%	6%	6%	3,92%

Sumber : Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan data tahun 2019, masih 6 persen PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain di Kota Mojokerto. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3,92 persen. Oleh karena itu perlu ditingkatkan program-program pemberdayaan sosial melalui KUBE.

e. Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Panti Sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak.

Tabel 2.95 : Presentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	66%	100%	100%	75%	100%

Sumber : Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021

Dari data tahun 2017 sampai 2020 tersebut diatas, diketahui bahwa Panti Sosial yang ada di Kota Mojokerto telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, walaupun sempat terjadi penurunan di tahun 2019 yang cukup signifikan menjadi 75 persen.

f. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan sarana prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sistem kerjasama antar keperangkatkan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Tabel 2.96 : Presentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKSK) Lainnya yang Menyediakan Sarana Prasarana Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	66%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021

Dari data tersebut diatas terlihat ada kenaikan tren sehingga bisa disebutkan bahwa Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya yang ada di Kota Mojokerto ini telah menyediakan sarana dan prasana pelayanan kesejahteraan sosial.

g. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Tabel 2.97 : Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021

Dari data diatas terlihat persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan dari tahun 2016 – 2020 konsisten mencapai angka optimal yakni 100 persen. Pemerintah Kota Mojokerto selalu konsisten dalam memberikan bantuan kepada para korban yang mengalami bencana.

h. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Tabel 2.98 : Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	86%	84%	71,11%	95%

Sumber : Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021

Tahun 2016 nilai presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social sebesar 10% dan mengalami kenaikan menjadi 86% pada tahun 2017. Kenaikan tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pendekatan perhitungan dimana pada tahun 2016 belum hanya berupa penyandang cacat fisik dan mental. Tahun 2018 terjadi kenaikan nilai menjadi 84 % dan turun menjadi 71,11% pada tahun 2019. Nilai persentase tersebut kembali naik menjadi 95% pada tahun 2020, dimana pada ditahun tersebut terjadi pandemic covid sehingga penerima alokasi penerima jaminan social ditingkatkan.

i. Persentase Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Penanganan diluar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial ialah jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat. Adapun capaian pelayanan tersebut di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.99 : Presentase Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Penanganan Diluar Panti Sosial Kota Mojokerto Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh penanganan diluar panti sosial	13,33%	73,33%

Sumber: SPM Bangda, 2021

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Mojokerto telah memberikan pelayanan berupa rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial sejumlah 90 orang dari total yang harus terlayani sebanyak 91 orang dengan persentase 13,33%. Capaian ini terhitung kecil dikarenakan ada banyak unsur penunjang SPM yang belum terpenuhi di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 Pemerintah Kota Mojokerto telah optimal dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi di luar panti sosial sejumlah 15 orang dengan target yang harus terlayani 15 orang dengan persentase 73,33%. Capaian ini berkurang dikarenakan unsur Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak serta Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti belum terpenuhi.

j. Persentase Rehabilitasi Tuna Sosial, terutama Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial adalah Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang direhabilitasi di Luar Panti Sosial. Adapun capaian pelayanan tersebut di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.100 : Presentase Rehabilitasi Tuna Sosial, terutama Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti Sosial Kota Mojokerto Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
Persentase Rehabilitasi Tuna Sosial, Gelandangan dan Pengemis, di luar panti social	8,73%	53,33%

Sumber: SPM Bangda, 2021

Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan pada penanganan rehabilitasi tuna social, terutama gelandangan dan pengemis, di luar panti, di tahun 2019 sebesar 8,73% naik menjadi 53,33% pada tahun 2020. Capaian ini masih terbilang rendah karena banyak unsur penunjang yang belum terpenuhi walaupun jumlah orang yang diberikan pelayanan sudah hampir terpenuhi.

k. Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana

Tabel 2.101 : Presentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kota Mojokerto Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana	8%	100%

Sumber: SPM Bangda, 2021

Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan pada presentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana yakni di tahun 2019 8% dan tahun 2020 mengalami peningkatan yang optimal yakni 100%. Capaian di tahun 2019 sangat minim dikarenakan banyak unsur pendukung SPM yang tidak terpenuhi.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

a. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

Tabel 2.102 : Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	55,28%	25,52%	36,16%	63,31%	45,61%

Sumber : DPM PTSP dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah pencari kerja tahun 2020 yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota Mojokerto sudah ditempatkan sebesar 45,61 persen. Dibandingkan tahun 2019, mengalami penurunan sebesar 17,7 persen. Hal ini dikarenakan dampak pandemi covid yang mana lowongan kerja juga turut mengalami penurunan.

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.103 : Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	53.8%	54.3%	56%	54%

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase partisipasi perempuan di DPRD	24%	32%	32%	16%	16%

Sumber : Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021

Pada tahun 2017 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah hanya mencapai 53,8% persen, meningkat menjadi 54,3% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 56% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 54%. Sedangkan persentase partisipasi perempuan di DPRD Kota Mojokerto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dikarenakan ada masa peralihan antar waktu pada tahun 2015 dan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tingkat persentase partisipasi sebesar 16 persen atau sebanyak 4 orang.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) atau *gender empowerment measurement* (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial. Persamaan dalam peran bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan.

IDG diperoleh dari rata – rata aritmatik tiga indeks yaitu; keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Data IDG Kota Mojokerto tahun 2016 tidak tersedia.

Tabel 2.104 : IDG Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
IDG	-	82,00	82,10	86,08	90,59

Sumber : Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto, 2021

IDG Kota Mojokerto selama rentang waktu 2017 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 IDG Kota Mojokerto sebesar 82,00, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 90,59. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur, IDG Kota Mojokerto masih lebih tinggi dari Jawa Timur yang sebesar 77,21 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Mojokerto semakin berperan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

2.1.3.2.3. Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat

memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten dan tingkat masyarakat. Data ketersediaan pangan utama Kota Mojokerto 2016 dan 2017 tidak tersedia berkaitan dengan SOTK dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian baru diterapkan tahun 2018.

Tabel 2.105 : Ketersediaan Pangan Utama Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Pangan Utama	-	-	49,5 Kg/Org/Th	526 Kg/Org/Th	326 Kg/Org/Th

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa data ketersediaan pangan utama di Kota Mojokerto baru dapat dihitung pada tahun 2018. Terjadi fluktuasi yang signifikan pada tahun 2018 – 2020.

b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan energi Indonesia sebagian besar berasal dari padi-padian (67,2%) diikuti umbi-umbian (8,7%), biji berminyak (8,0%) dan minyak serta lemak (6,2%). Sementara sebagian besar ketersediaan protein dihasilkan dari bahan tanaman (86,98%), dimana protein hewan hanya berkontribusi sebesar 13,1%. . Data ketersediaan energy dan protein Kota Mojokerto 2016 dan 2017 tidak tersedia berkaitan dengan SOTK dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian baru diterapkan tahun 2018

Tabel 2.106 : Ketersediaan Energi dan Protein Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Energi Perkapita	-	-	1861 kkal/kpt/hr	n/a	3.142 kkal/kpt/hr
Ketersediaan Protein Perkapita	-	-	65 kkal/kpt/hr	n/a	107 kka/kpt/hr

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa data ketersediaan energi dan protein di Kota Mojokerto baru dapat dihitung pada tahun 2018. Terjadi peningkatan ketersediaan energi per kapita dan juga protein per kapita dari tahun 2018 dan tahun 2020. Jumlah ketersediaan energi perkapita di Kota Mojokerto lebih besar dari pada ketersediaan protein perkapita.

2.1.3.2.4. Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Indeks kualitas air di Kota Mojokerto mengalami penurunan. Pada tahun 2016 Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto sebesar 54,17, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 50,95 dan di tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 50.

Tabel 2.107 : Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air	54,17	47	47,14	50,95	50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2021

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter(indikator) individual polusi udara yang berhu-bungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

Tabel 2.108 : Indeks Kualitas Udara di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Udara	55,55	86	87,64	80,57	81,46

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2021

Kondisi indeks kualitas udara di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar 55,55 dan naik menjadi 81,46 pada tahun 2020. Dengan demikian terjadi penurunan kualitas udara di Kota Mojokerto walaupun masih dalam kategori sedang.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu – satunya indikator yang mewakili isu hijau. Isu hijau adalah pembagian pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek konservasi atau pengendalian perusakan lingkungan hidup. Perhitungan IKTL di Kota Mojokerto didasarkan pada luasan komponen tutupan lahan antara lain kebun, lahan kosong, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan pertanian.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto menunjukkan peningkatan, yaitu dari 41,87 pada tahun 2016 menjadi 64,46 tahun 2019. Dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 27,11. Penurunan nilai IKTL disebabkan karena perbedaan metode perhitungan IKLH sesuai Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH Tahun 2020-2024. Melalui surat tersebut dijelaskan mengenai adanya perbedaan rumus perhitungan IKLH dan juga klasifikasi predikat yang didasarkan pada skor indeks.

Tabel 2.109 : Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Tutupan Lahan	41,87	54	56,47	64,46	27,11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang biasa disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Penerbitan kartu keluarga merupakan salah satu pelayanan paling mendasar dari administrasi Kependudukan, karena keseluruhan database kependudukan dimulai dari Kartu Keluarga.

Tabel 2.110 : Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Capaian indikator Penerbitan Kartu Keluarga telah sesuai dengan target yaitu 100 %. Hal ini dikarenakan setiap kepengurusan Kartu Keluarga akan dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Keluarga. Jika terjadi ketidaksesuaian dengan database maka akan dilakukan penyesuaian database melalui lampiran bukti pendukung.

b. Cakupan Penerbitan KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun ke atas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka kesadaran untuk melakukan perekaman KTP terus meningkat. Hal ini terlihat dari capaian penduduk memiliki KTP terus bertambah dari 2015 sebanyak 88% dan 2019 telah mencapai 99 %.

Tabel 2.111 : Cakupan Penerbitan KTP elektronik di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penerbitan KTP elektronik	89,9%	90,8%	93,4%	98,81%	98,6%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Capaian indikator Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 menjadi 98,6 persen. Walaupun terjadi penurunan tetapi Dispenduk pencapil Kota Mojokerto telah memberikan pelayanan perekaman KTP elektronik yang intensif baik melalui perekaman di Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan mobile untuk lansia dan keterbatasan fisik, perekaman di sekolah-sekolah. Akan tetapi perekaman KTP elektronik belum bisa 100 persen dikarenakan beberapa sebab antara lain:

1. Penduduk ganda dengan daerah lain;
2. Penduduk Kota Mojokerto tetapi tidak berdomisili di Kota Mojokerto;
3. Anomali database kependudukan sewaktu penunggalan data kependudukan.

c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Akte kelahiran merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kelahiran penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kelahiran menjadi prasyarat untuk keabsahan kelahiran penduduk. Setelah diterbitkan akte kelahiran dengan ditandai pemberian NIK maka penduduk baru sah sebagai penduduk. Cakupan penerbitan akte kelahiran yang dimaksudkan adalah bayi yang lahir di tahun berjalan dan memiliki akte kelahiran.

Tabel 2.112 : Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	92,8%	98%	98,68%	99,32%	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

d. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Akte Kematian merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kematian penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kematian menjadi prasyarat untuk kevalidan kematian penduduk. Setelah diterbitkan akte kematian maka database kependudukan akan di hapus, sehingga tidak akan muncul duplikasi ulang lagi. Cakupan penerbitan akte kelahiran yang dimaksudkan adalah penduduk yang meninggal dan diterbitkannya akte kematian.

Tabel 2.113 : Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Capaian indikator Penerbitan penerbitan akte kematian telah sesuai dengan target yaitu 100 %. Capaian tepat antara target dan realisasi dikarenakan setiap penduduk yang meninggal dunia akan otomatis diterbitkannya akte kematian. Hal ini seiring dengan inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dispenduk Pencapil yaitu MOJOKERTO SENDU (mojokerto senyum dibalik duka), melalui program inovasi ini setiap penduduk yang meninggal langsung akan mendapatkan akte kematian, perubahan KK, perubahan KTP bagi keluarga yang ditinggalkan serta santunan duka.

e. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Kepemilikan KTP pada era saat ini merupakan keniscayaan, karena semua pelayanan baik yang dilakukan oleh instansi swasta maupun pemerintah selalu menggunakan parameter KTP elektronik sebagai entry datanya. Sehingga kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sudah semakin meningkat.

Hal ini terlihat dari rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk terus bertambah dari 2016 sebanyak 1: 0,89 dan 2020 telah mencapai 1: 0,986.

Tabel 2.114 : Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	0,89	0,908	0,934	0,988	0,986

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Capaian indikator rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk tahun 2016 berada di angka 0,89, di tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,908. Akan tetapi, untuk tahun lainnya realisasi rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk selalu melampaui target. Bahkan untuk tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 0,026. Hal ini sebagai akibat dari Pilkada Langsung yang mewajibkan penduduk memiliki KTP elektronik, dan gencarnya Dispenduk pencapil melakukan perekaman ke rumah-rumah. Terlihat di tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 0,054 menjadi 0,988. Namun di tahun 2020 terjadi sedikit penurunan di angka 0,986.

f. Rasio Bayi ber Akta Kelahiran

Angka Natalitas selalu sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah demografi pembangunan jika tidak tertangani secara serius. Termasuk didalamnya kepastian hukum terhadap natalitas. Dengan kata lain, setiap kelahiran harus tercatat dan terdokumentasi secara baik melalui pencatatan sipil.

Akte kelahiran selain memuat identitas personal penduduk juga dikandung arti untuk memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan dan arah pembangunan. Dispenduk pencapil berupaya memberikan keabsahan penduduk yang lahir dengan sesegera mungkin menerbitkan akte kelahiran penduduk. Oleh karena, rasio bayi berakte kelahiran mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Tabel 2.115 : Rasio Bayi ber Akta Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran	0,93	0,98	0,99	0,99	1,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Semua capaian indikator rasio bayi berakte kelahiran dalam kurun waktu 5 tahun antara 2016 – 2020 telah melebihi target. Bahkan capaian rasio bayi berakte kelahiran tahun 2020 telah mencapai 1:1,00 atau semua bayi memiliki akte kelahiran. Hal ini sangat dimungkinkan karena kesadaran masyarakat yang tinggi dalam kepemilikan akte kelahiran dan juga banyak lembaga pendidikan maupun kesehatan yang mensyaratkan akte kelahiran.

g. Rasio Pasangan ber Akta Nikah

Pernikahan menjadi salah satu komponen utama identitas penduduk, karena baik dikolom KK maupun KTP dimunculkan status perkawinan. Hal inilah yang memicu Dispenduk Pencapil untuk mengajak masyarakat melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat.

Untuk penduduk muslim dapat mencatatkannya melalui Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk non muslim bisa melalui DispendukPencapil setelah adanya pemberkatan dari tempat ibadahnya.

Tabel 2.116 : Rasio Pasangan ber Akta Nikah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Pasangan ber Akta Nikah	0,79	0,81	0,83	0,88	0,90

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

Semua capaian indikator rasio pasangan berakte nikah dalam kurun waktu 5 tahun antara 2016 – 2020 telah melebihi target. Bahkan capaian rasio pasangan berakte nikah tahun 2020 mencapai 1:0,90. Hal ini dapat optimal mencapai angka 0,90 karena adanya sinkronisasi terkait pengajuan pernikahan di KUA, maupun tempat-tempat ibadah lainnya. Kedepannya akan dibuatkan forum maupun aplikasi yang memudahkan masyarakat mendaftar pernikahan secara online.

h. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Semenjak diundangkannya UU No 23 tahun 2006 kemudian diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013, maka yang diterapkan adalah Single Identity Number Atau NIK, sehingga keberadaan NIK lokal menjadi tidak berfungsi. Oleh karenanya, penerapan KTP Nasional menjadi wajib semua penduduk dan daerah. Indikatornya hanya sudah dan belum karena ini merupakan penerapan kebijakan penggunaan KTP nasional berbasis NIK. Dan semua daerah wajib menggunakan KTP elektronik.

Tabel 2.117 : Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.1.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan rata-rata penambahan penduduk pertahun pada periode/waktu tertentu dan di Kota Mojokerto angka LPP ini Fluktuatif (turun naik) karena laju pertumbuhan penduduk ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor Migrasi baik migrasi masuk atau migrasi keluar. Oleh karena itu besar kecilnya angka LPP ini tergantung dari ke 4 faktor tersebut. Pada tahun 2019, LPP di Kota Mojokerto ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan adanya rekonsiliasi data waktu perekaman KTP. Adanya penyesuaian ini mengakibatkan penurunan angka pada data jumlah penduduk, bukan berarti terjadi penurunan pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.118 : Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,56	0,69	0,72	-2,8	0,47

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2021

b. Total Fertility Rate (TFR)

TFR yang merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu selama masa reproduksi, yaitu sejak awal usia subur sampai akhir masa reproduksinya sehingga disini adanya pengaturan / pengendalian memegang peran penting melalui pelaksanaan program KB perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan dengan harapan angka TFR ini dapat dikendalikan.

Tabel 2.119 : TFR di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Total Fertility Rate	1,99	1,95	1,81	1,87	1,85

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

c. Rata-Rata Anak per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan angka rata-rata yang dimiliki oleh setiap keluarga, hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah anak yang dimiliki setiap keluarga dengan harapan terbentuknya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera serta berkualitas.

Tabel 2.120 : Rata-rata Anak per Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,9	1,61	1,6	1,9	2,01

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

k. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur yang ada. Dengan semakin besarnya jumlah peserta KB maka akan berdampak pada keberhasilan dalam program pengendalian penduduk.

Tabel 2.121 : Rasio Akseptor KB di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Akseptor KB	75,02	75,22	75,08	80,00	73,34

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

l. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 merupakan perbandingan antara perempuan yang menikah di usia 15 – 49 dengan memakai kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah perempuan yang menikah di usia 15 – 49 secara keseluruhan. Dengan semakin besarnya jumlah

perempuan menikah usia 15 – 49 memakai kontrasepsi maka akan berdampak pada keberhasilan dalam program pengendalian penduduk.

Tabel 2.122 : Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	75,02	75,22	75,08	80,00	73,34

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

m. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun)

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) adalah merupakan angka kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur 15 – 19 tahun dimana pada usia ini merupakan usia yang mempunyai resiko tinggi jika melahirkan karena secara fisik organ – organ reproduksi belum berkembang secara sempurna dan siap untuk melahirkan dan secara mentalpun juga belum siap untuk mempunyai anak. Oleh karena itu Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) harus ditekan / diturunkan dalam rangka untuk menghasilkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

Tabel 2.123 : Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	35	34	34	80	84

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

Angka Kelahiran Remaja di Kota Mojokerto mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 80 dan 84. Artinya di tahun 2019 terdapat 80 remaja yang melahirkan tiap 1000 remaja (ASFR), dan 84 remaja melahirkan di tahun 2020. Salah satu penyebab tingginya angka kelahiran remaja di tahun 2019 dan 2020 karena tidak adanya sekolah tatap muka selama pandemi covid 19. Sistem pembelajaran selama pandemi dilakukan secara daring dan intensitas pembelajaran berkurang dari sebelumnya sehingga kontrol aktifitas remaja tersebut berkurang. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Mojokerto mengingat angka tersebut sangatlah tinggi dan berdampak pada fisik dan psikis baik remaja yang melahirkan maupun bayi yang dilahirkan

n. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita merupakan rata-rata usia perkawinan yang ada pada penduduk wanita, dimana usia ideal untuk menikah pada wanita adalah usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan menghasilkan generasi yang berkualitas pula.

Tabel 2.124 : Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata usia kawin pertama wanita	22,94	21,42	21,43	21 – 25	26 – 30

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.1.9. Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum menggambarkan tingkat mobilitas masyarakat di wilayah Kota Mojokerto. Data arus penumpang angkutan umum diperoleh dari jumlah penumpang yang masuk dan jumlah penumpang yang keluar dari Terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Berikut ini data arus penumpang angkutan umum di wilayah Kota Mojokerto tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.125 : Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penumpang	2.285.729	2.043.188	1.800.647	1.437.757	1.883.995

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan data diatas jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan pribadi terutama kendaraan Roda 2.

b. Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek di Kota Mojokerto dengan dibandingkan jumlah penduduk di Kota Mojokerto sangat kecil, karena jumlah angkutan di Kota Mojokerto hanya dengan ada dua trayek angkutan yaitu Line A dan Line B, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.126 : Rasio ijin Trayek di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ijin Trayek	53	41	48	23	52
Rasio Ijin Trayek	0,00042 (1:2384)	0,00032 (1:3104)	0,00037 (1:2672)	0,00016 (1:6061)	0,00037 (1:2694)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio ijin trayek di Kota Mojokerto terbilang cukup sedikit. Hal ini berarti penggunaan moda di Kota Mojokerto masih didominasi dengan kendaraan pribadi daripada menggunakan transportasi umum seperti Line A atau B.

c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di ajlan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 2.127 : Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	809	660	1.028	1.120	1.107

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan data diatas Jumlah uji KIR angkutan umum mengalami fluktuasi hal ini dipengaruhi oleh banyaknya mutasi angkutan umum baik mutasi masuk dan mutasi keluar.

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah terminal di wilayah Kota Mojokerto sebanyak 1 lokasi, yaitu Terminal Kertajaya. Mulai Tahun 2017 pengelolaan Terminal Kertajaya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, bahwa untuk Terminal Kertajaya merupakan terminal Tipe B yang kewenangan pengelolaannya adalah Pemerintah propinsi dalam hal ini Propinsi Jawa Timur.

e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat merupakan perbandingan dari jumlah kendaraan dengan jumlah penumpang setiap tahun di Kota Mojokerto dapat ditampilkan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.128 : Persentase Layanan Angkutan darat di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Layanan Angkutan darat	3,31 %	4,69 %	5,53 %	7,10%	4,32%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021

Adapun persentase pelayanan angkutan darat di Kota Mojokerto selama 5 tahun terkahir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah angkutan umum di kota Mojokerto stagnan dari tahun sebelumnya yakni 418 unit, sedangkan jumlah penumpang yang terangkut tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 446.238 penumpang. Peningkatan penumpang yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah angkutan umum ini menjadikan persentase layanan angkutan darat menurun.

f. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum dihitung dari Jumlah angkutan yang tidak memiliki KIR pada tahun –n dibagi jumlah angkutan umum pada tahun –n dikali 100 persen. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum menggambarkan jumlah angkutan umum yang tidak laik jalan. Adapun data Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum di wilayah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.129 : Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah angkutan umum yang tidak	160	165	165	160	155

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
memiliki KIR angkutan umum					
Jumlah angkutan umum	969	825	1.193	1.289	1.352
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	16,51%	20,00%	13,83%	12,41%	11,46%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan data diatas persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Dari tabel diatas terlihat masih banyak angkutan umum yang tidak melakukan uji KIR. Semakin tinggi angka persentase kepemilikan KIR maka nilai tersebut semakin buruk, mengingat banyak sekali angkutan umum yang tidak melaksanakan kelayakan jalan.

g. Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu fasilitas perlengkapan jalan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rasio. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam menurunkan angka kecelakaan. Berikut ini tabel realisasi pemasangan rambu-rambu di Kota Mojokerto tahun 2016-2020.

Tabel 2.130 : Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rambu Terpasang	1.106	1.273	1.357	1.445	1.540
Jumlah Kebutuhan Rambu	1.807	1.807	1.807	1.785	1.785
Persentase pemasangan rambu	61,21 %	70,45 %	75,10 %	80,95 %	86,27 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pemasangan rambu-rambu di Kota Mojokerto mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 61,21 % menjadi 86,27 % pada tahun 2020. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya Kota Mojokerto ditandai dengan pembukan kawasan-kawasan perumahan, perindustrian, pendidikan, dan perdagangan sehingga menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pemasangan rambu-rambu pada kawasan tersebut.

h. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan adalah rasio antara Panjang ruas jalan Kota yang diaspal dengan jumlah kendaraan di wilayah Kota Mojokerto. Semakin tinggi rasio menunjukkan kepadatan ruas jalan Kota. Berikut merupakan data yang dimaksud :

Tabel 2.131 : Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Panjang Jalan per Jumlah	0,0018 (1:549)	0,0015 (1:669)	0,0014 (1:695)	0,0014 (1:736)	0,0017 (1:566)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Kendaraan					

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio perbandingan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan di Kota Mojokerto paling rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 1:549 atau sebesar 0,0018. Sedangkan rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 1:736 atau 0,004. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 kepadatan jalan di Kota Mojokerto mengalami kondisi paling tinggi pada lima tahun terakhir. Tingginya kepadatan jalan pada tahun 2019 tersebut disebabkan karena pesatnya pertumbuhan kendaraan, terutama kendaraan roda dua, dibandingkan pertumbuhan panjang jalan di Kota Mojokerto. Kondisi yang diharapkan adalah adanya penambahan panjang jalan di Kota Mojokerto yang dapat mengimbangi pertumbuhan kendaraan sehingga kepadatan jalan dapat berkurang. Di tahun 2020 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan oleh jumlah kepemilikan kendaraan pribadi berkurang, sehingga kepadatan jalan menjadi berkurang.

i. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang / penumpang yang berada di Terminal Kertajaya.

Tabel 2.132 : Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	2.285.729	2.043.188	1.800.647	1.437.757	1.883.995

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dari tahun ke tahun lebih dominan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan pribadi seperti kendaraan Roda 2 maupun adanya angkutan online.

j. Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/Terminal/Bandara per Tahun

Jumlah orang yang melalui terminal di Kota Mojokerto sama dengan jumlah terangkut di Terminal Kertajaya, sedangkan untuk jumlah barang belum tercatat karena belum tersedia tempat untuk fasilitas bongkar muat barang.

Tabel 2.133 : Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/Terminal/Bandara per Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/ Terminal/Bandara per Tahun	2.285.729	2.043.188	1.800.647	1.437.757	1.883.995

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2021

Memperhatikan data diatas jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/ Terminal/Bandara per Tahun lebih dominan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi serta sebagian beralih ke angkutan on line

2.1.3.1.10. Komunikasi dan Informatika

a. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Di dalam buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dari BPS Provinsi Jawa Timur, data rumah tangga dengan akses internet adalah sebagai berikut:

Tabel 2.134 : Presentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir	41,17	46,81	80,58	86,08	90,59

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah) , 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun persentase rumah tangga yang anggota rumah tangga ada yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2016 hanya berada di angka 41,17 persen sementara pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 90,59 persen.

Jika dibandingkan dengan rata – rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, persentase rumah tangga Kota Mojokerto dengan akses internet masih berada di atas rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tren pada kedua data ini selaras, dalam artian ketika data Kota Mojokerto mengalami penurunan, maka data rata – rata Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan. Demikian sebaliknya, jika data Kota Mojokerto mengalami kenaikan signifikan, maka demikian pula dengan data Provinsi Jawa Timur.

b. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan, ketersediaan sarana prasarana komputer/ desktop/ notebook di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Kebutuhan akan komputer oleh anggota rumah tangga sudah dimulai dari usia yang sangat dini, tidak hanya oleh anggota keluarga yang sudah mengenyam pendidikan menengah dan tinggi.

Indikator kinerja proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dihitung berdasarkan rumus jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dibagi dengan jumlah rumah tangga.

Tabel 2.135 : Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop, Laptop dan Notebook) di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop, Laptop dan Notebook)	31,62	36,51	33,94	36,09	35,72
Capaian rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur	18,19	17,94	18,57	18,28	17,99

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah) , 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Kota Mojokerto, persentase rumah tangga yang memiliki komputer berada di kisaran 35 %. Dari tahun ke tahun tidak ada tren khusus terkait penurunan dan kenaikan, namun persentase tertinggi terjadi di tahun 2017, yakni sebesar 36,51 %. Data proporsi rumah tangga dengan komputer pribadi pada tahun 2018 masih lebih rendah dari data tahun 2019. Hal ini bisa dikarenakan adanya kenaikan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan kenaikan jumlah kepemilikan komputer.

Jika dibandingkan dengan rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka persentase rumah tangga dengan kepemilikan komputer masih lebih tinggi. Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa untuk rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdapat kecenderungan kenaikan proporsi rumah tangga dengan akses internet.

c. Indeks SPBE

Upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, atau pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan publik, tapi juga membutuhkan reformasi sistem dan pola kerja. Reformasi birokrasi ini dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan Indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Mojokerto yang diterapkan mulai tahun 2018, sehingga ketersediaan data tahun 2016 dan 2017. Capaiannya pada tahun 2018 adalah 1,94, 2019 sebesar 3,32. 2020 tidak dilakukan perhitungan SPBE dikarenakan pandemic covid 2019. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.136 : Indesk SPBE di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks SPBE	n/a	n/a	1,94	3,32	n/a

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.1.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (rapat anggota tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2.137 : Presentase Koperasi Aktif di Kota Mojokerto tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Koperasi Aktif	71,19	76,27	80,22	80,66	81,38

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2021

Dari data diatas dapat diketahui persentase koperasi aktif di Kota Mojokerto pada tahun 2020 mencapai angka 81,38, apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 71,19% angka ini dinilai mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Hal ini perlu dilakukan pemetaan apakah persoalan kelembagaan, SDM, keuangan atau persoalan lain yang menyebabkan kenaikan tersebut. Sehingga dapat dilaksanakan kebijakan yang tepat dalam menjadikan koperasi tersebut aktif dan berkembang kembali

b. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Persentase UKM non BPR/LKM di Kota Mojokerto dari tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 – 2018 persentase UKM non BPR/LKM Aktif mengalami stagnansi di angka 82,64 persen. Sementara di tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 52,23 persen, tetapi di tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan di angka 66,67 persen.

Tabel 2.138 : Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	82,64	82,64	82,64	52,23	66,67

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.1.12. Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di

wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto. Berikut ini merupakan tabel aspek dan indikator kinerja menurut Bidang Urusan, yang dalam hal ini adalah urusan penanaman modal.

Tabel 2.139 : Realisasi Investasi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	252	304	238	43	104
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	132.314.200.000	289.261.715.000	170.029.747.050	352.908.000.997	513.978.767.777
Rasio daya serap tenaga kerja	2,74	2,08	3,81	42,07	21,29
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	76,467,151,000 (Turun 37 %)	156,947,515,000 (Naik 104 %)	119,231,967,950 (Turun 41 %)	182,878,253,947 (Naik 23,44 %)	161,070,766,780 (Naik 69,20%)

Sumber : DPM PTSP dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, 2021

Pada tahun 2016-2020 jumlah nilai investasi menunjukkan angka yang fluktuatif dari Rp. 132.314.200.000 (tahun 2016), naik menjadi Rp. 289.261.715.000 (tahun 2017) turun lagi menjadi Rp. 170.029.747.050 (tahun 2018), meningkat kembali menjadi Rp. 352.908.000.997 (tahun 2019) dan di tahun 2020 juga mengalami kenaikan Rp. 513.978.767.777. Tahun 2016 – 2018 rasio daya serap tenaga kerja cenderung naik, rasio tersebut didapatkan dari jumlah tenaga kerja yang terserap dibagi dengan jumlah nilai investasi. Sementara di tahun 2019 dan 2020, rasio daya serap tenaga kerja didapatkan dari jumlah tenaga kerja yang terserap dibagi dengan jumlah investor berskala nasional. Hal ini mengakibatkan angka rasio daya serap tenaga kerja menjadi lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 rasio daya serap tenaga kerja menjadi 42,07, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 21,29. Namun di tahun 2020 jumlah nilai investasi berhasil naik menjadi Rp 513.978.767.777.

2.1.3.1.13. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pada tahun 2014 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata belum terbentuk sedangkan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terbentuk pada bulan Mei 2015 tetapi belum mengelola anggaran, pengelolaan Anggaran pada tahun 2015 ada pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif menjadi 50% ditahun 2016 dikarenakan jumlah Organisasi Pemuda ada sebanyak 38 dan yang aktif 19 Organisasi Pemuda saja. Sedangkan di tahun 2017 Tercatat sebanyak 19 OKP yang aktif dari 40 Organisasi Kepemudaan dengan Persentase 47,50%. Organisasi Kepemudaan meningkat cukup tinggi sebanyak 54 OKP namun secara Persentase mengalami penurunan menjadi

44,4% dikarenakan Jumlah OKP yang aktif hanya 24 OKP. Di tahun 2020 terjadi stagnansi persentase organisasi pemuda yang aktif yakni 74 persen

Tabel 2.140 : Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase organisasi pemuda yang aktif	50%	47,50%	44,40%	74%	74%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021

b. Persentase Wirausaha Muda

Di era Globalisasi wirausaha menjadi pilihan banyak orang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Mojokerto. Pada tahun 2016 persentase wirausaha mandiri di Kota Mojokerto hanya 0,70% seiring berjalannya waktu hingga tahun 2018 terus mengalami pertumbuhan hingga 1,55 persen. Namun di tahun 2019 terjadi penurunan jumlah wirausaha muda menjadi 0,4 persen saja. Dan di tahun 2020 persentase wirausaha muda meningkat cukup pesat menjadi 4,32 persen. Hal ini dikarenakan masa pandemic covid 19 banyak sekali pemuda-pemuda yang mencoba membuka usaha dari segi kuliner hingga retail.

Tabel 2.141 : Persentase Wirausaha Muda di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase wirausaha muda	0,70%	1,37%	1,55%	0,4%	4,32%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari kegiatan Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajar dalam olahraga agar teridentifikasinya bakat - bakat pelajar dari setiap cabang olahraga yang akan mengikuti perlombaan tingkat provinsi.

Tabel 2.142 : Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pembinaan Olahraga	43,47%	47,82%	17,39%	26,00%	20,00%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya fluktuasi cakupan pembinaan olahraga di Kota Mojokerto. Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan pertandingan cabang-cabang Olahraga di tingkat Provinsi POPDA dan POR SD. Di tahun 2020 cakupan pembinaan olahraga mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya pandemic covid sehingga beberapa pelatihan menjadi terbatas.

d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikat

Cakupan pelatih yang bersertifikat merupakan indikator untuk melihat peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga.

Tabel 2.143 : Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	-	14%	46%	48%	48%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021

Cakupan Pelatih yang Bersertifikat pada tahun 2016 belum ada data yang bisa dilaporkan, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan antar tahun yang mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan.

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto terjadi adanya kenaikan prestasi yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Berbagai faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan pertandingan cabang-cabang Olahraga di tingkat Provinsi POPDA dan POR SD. Tahun 2018, tidak diselenggarakan POPDA dan POR SD sehingga data pembinaan atlet muda tidak tersedia.

Tabel 2.144 : Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	2,34%	1,67%	-	19,60%	22,38%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021

f. Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan

Kota Mojokerto di periode kepemimpinan Ning Ita (Hj. Ika Puspitasari, SE) telah memilih “spirit of Majapahit” sebagai agenda perubahan di bidang kebudayaan menjadi pendekatan pembangunan Kebudayaan di Wilayah Kota Mojokerto. Hal ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa Kejayaan masa lampau dan jejak-jejak keluhuran era keemasan Majapahit, sangat penting menjadi nilai strategis yang terus dirawat dan dikembangkan. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Peran kepemimpinan Walikota menghadirkan beberapa terobosan dalam kerangka apresiasi. Bahkan membuka ruang sangat besar untuk menggelorakan apresiasi budaya. Baik melalui dialog, event, maupun kebijakan. Beberapa putaran dialog formal dan informal, mengalami intensitas yang sangat tinggi sepanjang tahun 2019. Adapun berikut daftar prioritas pemajuan pembangunan budaya di Kota Mojokerto.

Tabel 2.145 : Program Prioritas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2020 – 2022

No.	PRIORITAS PEMAJUAN	DAFTAR PRIORITAS PROGRAM DAN DAFTAR KEGIATAN	PIHAK YANG TERLIBAT
1.	Program Pembangunan Kebudayaan Spirit Of Mojopahit	Pembudayaan Identitas dan Karakter Mojopahit	Bappeko Dinas PUPR BBWS DLH Disnaker Dinas Pendidikan Dispora
		1. Pembangunan Lansekap Bahari (sungai)	
		2. Pendirian Taman Bahari Rejoto	
		3. Monumen Palapa + Gajahmada	
		4. Jogging Track Sungai Kali Ngotok	
		5. Ikon Udeng Sambang menjadi karakter pegawai, murid sekolah, jukir, pasukan kuning, dll	
2.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Berbasis Multi Pihak	Hadirnya Sentra baru sebagai fasilitas seni pertunjukan	Bappeko Dinas PUPR BBWS DLH Disnaker Dinas Pendidikan Dispora CSR perusahaan
		1. Taman Berkarakter beramphi teater	
		2. Optimasi Wisata Pasar Apung (sungai)	
		3. Galeri Perupa "pasar Seni" Perupa Lokal	
		4. Dermaga berkarakter jejak Jalur sungai	
		5. Tempat pagelaran pasti untuk wayang beber yang menjadi ikon kota Mojokerto	

Sumber: Masterplan Pemajuan Kebudayaan 2020 - 2025

2.1.3.1.14. Statistik

a. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Sebelum tahun 2017 Data Statistik masih ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Hasil dari penyusunan data statistik tersebut berupa buku statistik yang di cetak dan di distribusikan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Sejak tahun 2017 data statistik diserahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, dalam mempublikasikan data statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto melakukan inovasi hasil dari penyusunan data statistik tidak hanya berupa buku tetapi juga bisa diakses melalui *website*. Buku data statistik tersebut terdiri dari :

1. Buku Statistik Daerah Dalam Angka
2. Buku Indeks Kemahalan Konstruksi
3. Buku ICOR Dan ILOR
4. Buku Indeks Gini

Buku data statistik tersebut juga bisa diakses melalui *website* mojokertokota.go.id dan ppid.mojokertokota.go.id. Pada tahun 2019 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto akan merencanakan membangun portal data atau *website* satu data yang terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia. Ini sebagai wujud mendukung *e-government* dan *e-database* sesuai Permendagri.

b. Tersedianya Buku "Statistik Daerah Dalam Angka"

Buku Statistik Daerah Dalam Angka merupakan publikasi yang cukup prestisius karena melibatkan data-data dari stakeholder terkait. Buku ini disusun oleh BPS tahun 2017, dan tahun 2018 ada pendampingan Jasa Konsultan dari RCCP FIA Universitas Brawijaya Malang, Buku Statistik Daerah Dalam Angka berisi sekitar 80 persen dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di tingkat provinsi maupun kab/kota. Ketersediaan data tergantung dari OPD tersebut hingga masing-masing daerah memiliki keberagaman data sesuai potensi wilayahnya. Meski hampir keseluruhan data dalam BSDDA menampilkan data OPD, tidak berarti bahwa proses pengumpulan data mudah dan cepat. Justru

ketepatan waktu sering menjadi masalah. Belum lagi konsistensi dan kelengkapan data yang menyebabkan waktu yang lebih lama untuk menelaah dan cross check data.

Buku Statistik Daerah Dalam Angka merupakan Potret Pemerintah Kota Mojokerto, yang mana dalam hal ini telah diulas secara statistik masing-masing OPD yang ada dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek kependudukan, kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, kepegawaian, pembangunan, perencanaan, komunikasi informatika, perhubungan, ketahanan pangan dan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah telah diatur dalam serta ketertiban, keamanan, kebangsaan dan ketentuan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto akan meningkatkan pelayanan agar data statistik yang telah disusun dan dipublikasikan mudah untuk diakses dan dipahami oleh masyarakat. Data yang dipublikasikan tidak hanya berupa angka dan narasi tetapi berupa gambar visual yang menarik untuk meningkatkan minat bagi pengguna/user.

2.1.3.1.15. Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya

Disporabudpar sebagai wadah pelestarian budaya Kota Mojokerto khususnya dalam agenda kegiatannya mempunyai target dan capaian, data yang dihimpun dari tahun 2016 – 2020 terdapat beberapa indikator budaya adapun indikator tersebut terdiri dari penyelenggaraan festival, benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

Dimana indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya terselenggaranya tiga kegiatan festival ditahun 2017, 2018, dan 2019 festival tari, festival keroncong dan festival makanan khas, dalam kegiatan tersebut berdampak pada pelestarian budaya dimana seniman dan masyarakat pada umumnya bisa menyaksikan seni dan budaya yang selama ini kurang dapat mendapatkan perhatian. Namun di tahun 2020 akibat pandemic covid, kegiatan festival seni dan budaya tidak diselenggarakan. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak ada cluster baru akibat diselenggarakannya festival yang mampu menarik perhatian wisatawan. Selain itu terimbas adanya refocusing anggaran untuk menanggulangi pandemi covid 19.

Tabel 2.146 : Penyelenggaraan Festival di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	21	16	11	27	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.1.16. Perpustakaan

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media

baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat, secara kasar sebenarnya minat baca masyarakat Jawa Timur minat bacanya cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Mojokerto sebanyak 87.258 orang, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 117.631 orang. Namun di tahun 2020 jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Mojokerto mengalami penurunan yang signifikan sebesar 34.731 pengunjung, hal ini diakibatkan karena pandemic covid sehingga penduduk terbatas untuk berkegiatan. Adapun jumlah pengunjung tertinggi berasal dari swasta diikuti pelajar dan umum.

Tabel 2.147 : Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	87.258	92.981	102.288	117.631	34.731

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2021

b. Rasio Perpustakaan per satuan penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk untuk menentukan rasio perpustakaan yaitu jumlah perpustakaan yang ada dibagi dengan jumlah penduduk setiap tahunnya juga menunjukkan kenaikan walaupun kenaikannya tidak setiap tahun. Pada tahun 2016 Rasio Perpustakaan di Kota Mojokerto sebesar 1,24 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2019 turun menjadi 1,16 per 1.000 penduduk, dan di tahun 2020 mengalami stagnansi di angka 1,16.

Tabel 2.148 : Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Perpustakaan per 1.000 penduduk	1,24	1,30	1,30	1,16	1,16

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.1.17. Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Pengelolaan arsip merupakan salah satu usaha dalam melestarikan menjaga dan memelihara Arsip mengingat pentingnya makna arsip maka segala upaya dilaksanakan untuk menyelamatkannya.

Tabel 2.149 : Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku	45.00	50.00	54,65	56,00	56,00

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan air tawar di Kota Mojokerto pada tahun 2019 sebanyak 342.979 kg/tahun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 229.518 kg/tahun. Pandemi covid 19 sedikit banyaknya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang lesu sehingga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Tabel 2.150 : Produksi Perikanan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan (kg/th)	182.958	182.958	182.958	342.979	229.518

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021

b. Konsumsi Ikan

Jumlah konsumsi ikan di Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan kecuali tahun 2020. Jumlah konsumsi ikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 20,0 kg/tahun. Tetapi konsumsi ikan di Kota Mojokerto mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 17,7 kg/tahun. Daya beli masyarakat di masa pandemic covid 19 cenderung turun termasuk dalam mengonsumsi ikan.

Tabel 2.151 : Jumlah Konsumsi Ikan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi ikan (kg/th)	17,8	17,8	19,9	20,0	17,7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.3.2. Pariwisata

a. Persentase Kunjungan Wisata

Indikator kunjungan wisata menjadi prioritas dalam pencapaian target peningkatan pariwisata Kota Mojokerto. Sumber yang didapat dalam menentukan kunjungan wisata bersumber dari data kunjungan wisatawan yang menginap di Hotel dan penginapan Kota Mojokerto, dari target yang di tentukan sebesar 300.000 wisatawan baik dalam dan luar negeri. Dari tabel yang tersajikan di tahun 2016 tercapai sebesar 41%, Tahun 2017 62%, tahun 2018 75,24 %, tahun 2019 100,02%, dan tahun 2020 mencapai angka 500%. Adapun peningkatan kunjungan pariwisata Kota Mojokerto disebabkan banyaknya tempat wisata baru yang menjadi daya tarik wisatawan masuk ke Kota Mojokerto, terlebih dengan adanya revitalisasi di Pasar Benteng dan sekitarnya, menjadi epicentrum wisata baru yang mampu menarik banyak pengunjung. Di tempat tersebut tidak hanya pariwisata yang menginap di hotel, tetapi pariwisata di sector kuliner dan ritel. Banyak sekali pedagang jajanan yang tersebar di sepanjang Jalan Benteng. Hal ini mampu menarik pengunjung dengan jumlah yang sangat signifikan.

Tabel 2.152 : Persentase Kunjungan Wisatawan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kunjungan Wisata	41%	62%	75,24%	100,02%	500%

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021

b. Lama Kunjungan Wisata

Indikator lama kunjungan wisata di kota Mojokerto untuk mengetahui berapa lama wisatawan menginap di Kota Mojokerto. Dari tabel di bawah rata-rata lama kunjungan menginap di Kota Mojokerto dari tahun 2016 sampai 2020 adalah 1 hari.

Tabel 2.153 : Rata-rata Lama Kunjungan Wisata di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Lama kunjungan wisata	1 hari	1 hari	1 hari	2 hari	1 hari

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto bukan merupakan penyumbang utama terhadap total PDRB Kota Mojokerto, hal ini dikarenakan Kota Mojokerto merupakan wilayah perkotaan dan luas wilayah Kota Mojokerto yang kecil.

Tabel 2.154 : Produktivitas pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi sektor pertanian (ton/ha)	5,61	5,49	6,6	6,4	6,5
Produksi sektor perkebunan (kw/ha)	750	790	790	775	917
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0,61	0,57	0,56	0	0
Cakupan Bina Kelompok Petani	100%	100%	100%	25%	25%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Ketersediaan Listrik

Keberhasilan pembangunan di Kota Mojokerto tentu tidak terlepas dari peran Ketersediaan pasokan daya listrik. Ketersediaan listrik bisa menjadi angin segar bagi Rumah Tangga di Kota Mojokerto, karena dengan kondisi kelistrikan yang ada saat ini, bisa memberikan ruang gerak tanpa rasa khawatir kekurangan atau defisit listrik. Kebutuhan daya listrik dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan yang pesat, sehingga diperlukan perhitungan yang matang mengenai perencanaan untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya di Kota Mojokerto. Pengelolaan kelistrikan di Kota Mojokerto dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selanjutnya PLN yang mendistribusikannya kepada masyarakat/ instansi/ perusahaan/ lembaga swasta untuk berbagai keperluan.

Tabel 2.155 : Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Ketersediaan Listrik di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga pengguna listrik	35.141	37.643	n/a	24.690	186.376
Rasio ketersediaan daya listrik	1,17	1,17	n/a	23,57	62,48

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Mojokerto, 2021

Rasio Ketersediaan listrik juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jenis dan kapasitas pembangkit listrik dapat mempengaruhi besarnya listrik yang diproduksi baik pada waktu siang maupun malam. Faktor yang berpengaruh terhadap produksi listrik per jenis pembangkit adalah faktor kapasitas pembebanan baik sebagai beban dasar maupun beban puncak, karakteristik pembebanannya sendiri termasuk daya mampu, dan waktu operasi unit pembangkit listrik. Waktu operasi adalah jam operasi maksimum dalam 1 tahun dikurangi dengan penghentian terjadwal dan perkiraan penghentian tak terjadwal. Faktor tersebut dapat menyebabkan total produksi listrik per jenis pembangkit listrik pada waktu siang dan malam hari berbeda. Besarnya produksi listrik selama kurun waktu yang telah ditentukan dapat memberi gambaran besarnya pasokan listrik dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Walaupun demikian tidak semua kebutuhan listrik dapat dipenuhi, oleh karena itu masih ada kebutuhan listrik yang tertahan dan tidak dapat dipenuhi oleh pembangkit listrik PLN. Kondisi ini merupakan gambaran umum dari Kota Mojokerto yang sedang berkembang, dimana penyediaan listrik bukan merupakan pemenuhan kebutuhan riil seluruhnya tetapi lebih merupakan kemampuan untuk membangkitkan dan mendistribusikan listrik ke masyarakat Kota Mojokerto.

b. Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto ada sejak Tahun 2004 di Daerah Jalan Raya Ijen Wates, Kelurahan Wates terdapat 200 sambungan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga namun dikarenakan banyak kendala akhirnya terhenti pengembangan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Salah Satu Kendala tersebut misalnya ketakutan masyarakat akan bahaya meledaknya Jaringan Gas Bumi. Pada Tahun 2015 Bagian Perekonomian dimana ada salah satu Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral mencari informasi kembali tentang Pengembangan Potensi Jaringan Gas Bumi di Kota Mojokerto Ke Perusahaan Gas Negara (Persero) Sidoarjo. Ternyata hasilnya sangat baik Perusahaan Gas Negara (Persero) Sidoarjo menyatakan siap memfasilitasi dan membantu untuk pengembangan kembali Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Dengan melalui Negosiasi yang sulit dilalui Bagian Perekonomian namun pada akhirnya bisa tercapai juga pengembangan Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Pada Tahun 2016 terpasang lagi di daerah Kelurahan Wates sebanyak 523 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, sehingga terdapat 723 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto atau sekitar 2,2 % dari Total Rumah sejumlah 32.999. Pada Tahun 2017 terpasang lagi di daerah Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Miji sebanyak 5.000 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, sehingga bertambah lagi menjadi 5.723 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto atau sekitar 17,34 % dari Total Rumah sejumlah 35.055. Dari tahun ke tahun jumlah pengguna jaringan gas bumi meningkat. Namun di tahun 2019 ke 2020 terjadi sedikit penurunan sebesar 0,39 persen. Data tahun 2018 tidak tersedia dikarenakan Kementerian ESDM masih melaksanakan Front End Engineering Design (FEED) % Detail Engineering Design Construction (DEDC) untuk pengembangan jaringan gas bumi untuk wilayah Kota Mojokerto. Oleh sebab itu,

di tahun 2018 tidak ada pembangunan jaringan gas bumi di wilayah Kota Mojokerto.

Tabel 2.156 : Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Gas Bumi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tangga pengguna jaringan gas bumi	2,2%	17,34%	n/a	21,74%	21,35%

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.3.5. Perdagangan

a. Nilai Ekspor

Nilai ekspor produk perdagangan yang dilakukan beberapa perusahaan di kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.871.868.975,38 naik sekitar 1,83 % pada tahun 2017 menjadi Rp. 9.635.282.159,0, dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 8,60 % nilai ekspor mencapai Rp. 9.895.282.159,01. Sementara di tahun 2019 terjadi penurunan nilai ekspor produk Kota Mojokerto sebesar 5.926.214.782,13 dan turun lagi secara signifikan pada tahun 2020 sebesar 1.456.568. Pandemi covid 19 memberikan dampak yang besar terhadap laju pertumbuhan ekspor baik secara global, regional, maupun lokal.

Tabel 2.157 : Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto	8.871.868.975,38	9.635.282.159,07	9.895.282.159,01	5.926.214.782,13	1.456.568.580,90

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2021

b. Pedagang Informal Mendapat Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap kelompok usaha pedagang informal yang ada di Jalan Benteng Pancasila pada tahun 2016 sebanyak 145 orang dari jumlah pedagang sebanyak 362 orang atau sebesar 40,06 %. Pada tahun 2017 jumlah pedagang informal yang mendapat pembinaan sebanyak 150 orang dari 362 orang total pedagang atau sebesar 41,44 %, sementara pada tahun 2018 sebanyak 155 orang dari 362 total pedagang atau sebesar 42,82 %. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 150 orang dari 977 total pedagang atau sebesar 15,35%. Dan di tahun 2020 jumlah pedagang informal yang mendapat pembinaan sebanyak 112 orang dari total pedagang sebanyak 1067 orang atau sebesar 10,50%. Apabila diamati jumlah pembinaan yang didapat oleh pedagang informal di Kota Mojokerto mengalami fluktuasi di tiap tahunnya. Jumlah pembinaan tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terjadi pada tahun 2017. Di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pedagang informal yang sangat signifikan. Sementara di tahun 2020, jumlah pedagang informal juga terus naik namun pembinaan dari Pemkot Mojokerto mengalami penurunan diakibatkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid-19.

Tabel 2.158 : Pedagang Informal mendapat Pembinaan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pedagang Informal mendapat Pembinaan	145	150	155	150	112
Jumlah pedagang informal	362	362	362	977	1067

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.3.6. Perindustrian

Kepedulian pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah melalui dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dengan memberikan Pelatihan Manajemen Produk, Pelatihan ketrampilan Proses Produksi dan Peningkatan Penggunaan Teknologi serta memfasilitasi pemasaran dengan menyelenggarakan pameran lokar maupun mengikuti pameran tingkat provinsi maupun pameran tingkat nasional serta pembinaan melalui misi dagang bagi produk yang berkualitas ekspor.

Pembinaan industri diarahkan pada sasaran semua jenis industri seperti industri Batik tulis, industri Alas kaki, Industri Kerajinan, Industri cetakan kue dari aluminium dan industri makanan dan minuman yang keberadaannya tersebar di wilayah Kelurahan di Kota Mojokerto

Jumlah pengrajin yang telah dibina pada tahun 2016 adalah 500 pengrajin dari 1.497 jumlah IKM atau sebesar 33,4 persen. Di tahun 2017 dan 2018 seiring dengan meningkatnya jumlah IKM, jumlah pengrajin yang dibina pun juga semakin bertambah yakni sebesar 35,29 persen dan 36,42 persen secara berturut-turut. Di tahun 2019, jumlah pengrajin yang dibina mengalami penurunan yakni sebesar 19,45 persen. Namun di tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan pembinaan pengrajin IKM yakni sebesar 43,71% dari jumlah IKM yang semakin meningkat sebesar 1144.

Tabel 2.159 : IKM di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pengrajin IKM yang dibina	500	530	550	318	500
Jumlah IKM	1.497	1.502	1.510	1.635	1144

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat

serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada tahun 2019, capaian persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD adalah 100%

Tabel 2.160 : Tersedianya dokumen perencanaan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90%	90%	100%	100%	100%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	90%	90%	100%	100%	100%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappedalitbang, 2021

2.1.3.4.2. Keuangan

a. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.161 : Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	2,28	0,73	0,83	0,787	0,78

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021

b. Penilaian Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Selama lima tahun terakhir, Kota Mojokerto berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP), ini menjadi tugas semua OPD di Kota Mojokerto untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan.

Tabel 2.162 : Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021

c. Persentase SiLPA terhadap APBD

Persentase SiLPA terhadap APBD merupakan proporsi SiLPA terhadap total APBD Kota Mojokerto. Persentase SiLPA terhadap APBD Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 16,93 persen, tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 3,77 persen. Tahun 2018 kembali meningkat sebesar 15,72 persen, berikut di tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 19,92 persen. Dan di tahun 2020 persentase SiLPA terhadap APBD turun menjadi 18,91 persen.

Tabel 2.163 : Persentase SiLPA terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase SiLPA terhadap APBD	16,93	3,77	15,72	19,92	18,91

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2021

d. Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi pendapatan Kota Mojokerto pada 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. 2017 dan 2019 sempat mengalami penurunan pendapatan, sementara pada tahun 2016, 2018, dan 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan menjadi penyumbang terbesar dalam PAD, hanya pada tahun 2020 yang mengalami penurunan cukup signifikan dikarenakan adanya pandemic covid sehingga pemerintah melakukan relaksasi pajak untuk beberapa sector. Adapun retribusi daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Berikut rincian dari pendapatan daerah Kota Mojokerto

Tabel 2.164 : Realisasi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
PENDAPATAN	806.772.000. 827,56	782.331.26 4.434,20	887.592.875 .418,26	885.966.038. 008,44	886.026.211. 545,94
Pendapatan Asli Daerah	152.462.202. 064,56	178.295.06 2.136,20	182.508.304 .195,27	192.695.566. 219,26	231.875.337. 605,94

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021

Sumber pendapatan terbanyak Kota Mojokerto berasal dari Dana Perimbangan dengan proporsi rata-rata tahun 2016 – 2020 mencapai lebih dari

60 persen dari total pendapatan daerah. Namun, jika melihat tren proporsi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2018 menggambarkan bahwa Kota Mojokerto telah berusaha meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak dan retribusi. Rincian proporsi realisasi pendapatan Kota Mojokerto dapat tersaji pada tabel di bawah ini

Tabel 2.165 : Proporsi Pendapatan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah	18,90	22,79	20,56	21,75	26,17
Dana Perimbangan	68,91	66,38	62,32	62,89	61,39
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	12,19	10,83	17,12	15,36	12,44
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	100	100	100	100	100

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021

Sedangkan realisasi belanja daerah Kota Mojokerto tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan fluktuasi. Di tahun 2016 realisasi Belanja Kota Mojokerto dalam 5 tahun terakhir menempati posisi tertinggi. Sedangkan tahun 2017 turun secara signifikan menjadi 739.086.252.867,78. Hal ini dikarenakan dana perimbangan dari pusat mengalami pengurangan. Di tahun 2018 jumlah belanja kota Mojokerto Kembali naik berikut di tahun 2019. Namun di tahun 2020 jumlah belanja Kembali mengalami penurunan akibat pandemic covid banyak sekali melakukan refocusing anggaran. Proporsi belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung didominasi pengeluaran oleh belanja pegawai, untuk belanja langsung di dominasi pengeluaran oleh belanja barang dan jasa.

Tabel 2.166 : Realisasi Belanja Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
BELANJA	944.717.143.505,53	739.086.252.867,78	808.163.334.616,20	852.084.096.739,42	804.407.047.101,88
Belanja Tidak Langsung	277.418.352.958,00	256.687.836.674,00	334.128.804.692,00	331.175.686.534,98	357.683.371.805,60
Belanja Langsung	667.298.790.547,53	482.398.416.193,78	474.034.529.924,20	520.908.410.204,44	446.723.675.296,28

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021

Tabel 2.167 : Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Langsung	71,90%	67,59%	58,66%	61,13%	55,53%
Belanja Tidak Langsung	28,10%	32,41%	41,34%	38,87%	44,47%

Sumber : BPKPD Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.4.3. Pengawasan

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di antaranya berisi beragam temuan dan rekomendasi kepada entitas pengelola keuangan negara yang diantaranya pada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2016 total temuan BPK sejumlah 11 dan rekomendasi BPK sebanyak 40, Tahun 2017 total temuan BPK sejumlah 13 dan rekomendasi BPK sebanyak 33, Tahun 2018 total temuan BPK sejumlah 15 dan rekomendasi BPK sebanyak 50. Pada Tahun 2019 terdapat 661 temuan dan rekomendasi sebanyak 563. Sementara di tahun 2020 persentase temuan BPK meningkat menjadi 720 dan rekomendasi sebesar 611.

Sedangkan untuk APIP Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2016 total temuan Inspektorat sejumlah 11 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 12, Tahun 2017 total temuan Inspektorat sejumlah 46 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 77 dan Tahun 2018 total temuan Inspektorat sejumlah 8 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 23. Pada tahun 2019 terdapat temuan sejumlah 215 dan rekomendasi sebanyak 209. Sedangkan tahun 2020 terdapat temuan sejumlah 242 dan rekomendasi sebesar 225.

Berikut ini adalah tabel dari capaian tidak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari BPK dan APIP Inspektorat Kota Mojokerto :

Tabel 2.168 : Temuan dan rekomendasi BPK dan APIP di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

INDIKATOR	CAPAIAN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Prosentase tindak lanjut temuan					
BPK	84,49%	85,02%	81,06%	85%	85%
APIP	100,00%	95,65%	75,00%	94%	89%
Jumlah temuan / Jumlah Rekomendasi					
BPK	11 / 40	13 / 33	15 / 50	661/563	720/611
APIP	11 / 12	46 / 77	8 / 23	215/209	242/225

Sumber : Inspektorat Kota Mojokerto, 2021

Persentase tindak lanjut BPK yang telah sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2016 sebanyak 84,49%, tahun 2017 sebanyak 85,02%, tahun 2018 sebanyak 81,06% sedangkan tahun 2019 dan 2020 memiliki persentase yang sama yakni 85 persen.

Sedangkan persentase tindak lanjut dari APIP Inspektorat Kota Mojokerto yang telah sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2016 sebanyak 100%, tahun 2017 sebanyak 95,65%, tahun 2018 sebanyak 75%, tahun 2019 sebesar 94%, dan tahun 2020 sebesar 89%.

2.1.3.4.4. Kepegawaian

a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan

penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang dilaksanakan antara lain berupa pendidikan dan pelatihan baik struktural, teknis maupun fungsional. Adapun data yang menunjukkan Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.169 : Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	60 -70 JP	60 -70 JP	60 -70 JP	70 JP	70 JP

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mojokerto, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah selama 60 sampai dengan 70 jam pelajaran. Hal ini berlaku pada setiap kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik struktural, teknis maupun fungsional. Maka dapat disimpulkan bahwa Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

b. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa seorang ASN dapat menduduki jabatan-jabatan struktural yang meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan pengawas apabila telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Adapun standar kompetensi jabatan disini terdiri atas kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Pendidikan dan pelatihan struktural (diklat kepemimpinan) sangat menunjang seorang ASN untuk dapat meningkatkan kompetensi manajerialnya. Adapun data ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.170 : Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	94,22%	0%	86,90%	0%	0,59%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mojokerto, 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 – 2020 terdapat fluktuasi jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural. Perkembangan ini disebabkan karena adanya promosi jabatan yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Untuk tahun 2017 dan 2019 jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural adalah 0 persen dikarenakan pada tahun tersebut tidak dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan struktural untuk pimpinan. Sementara di tahun 2020 terjadi refocusing anggaran sehingga pelaksanaan diklat struktural untuk pejabat ASN pun juga sangat terbatas.

c. Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 terdapat perubahan jumlah pemangku jabatan-jabatan pimpinan tinggi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.171 : Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	28	28	29	26	21

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mojokerto, 2021

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah pejabat pimpinan tinggi antara tahun 2016 sampai dengan 2018. Hal ini disebabkan karena adanya pengisian jabatan-jabatan pimpinan tinggi yang kosong yang dilaksanakan melalui seleksi terbuka. Dan pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan, karena adanya pejabat yang telah memasuki usia pensiun pada tahun tersebut.

d. Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 terdapat perubahan Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Jabatan administrasi sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas Jabatan Administrator dan pengawas. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.172 : Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	112	105	99	104	103

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mojokerto, 2021

e. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 terdapat perubahan Jumlah Pemangku Jabatan fungsional tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Jabatan fungsional tersebut terdiri dari jabatan fungsional di bidang pendidikan, kesehatan pertanian, keluarga berencana dan lain sebagainya. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.173 : Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.342	1.333	1.279	1.046	1.397

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mojokerto, 2021

f. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen. Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Data IPP yang tersedia baru tahun 2020 dikarenakan KASN belum menerapkan sistem aplikasinya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin.

- Kompetensi dapat didekati dengan data potensi dalam e-PUPNS dari unsur pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan teknis, dan pelatihan administratif.
- Kinerja didekati dengan data SKP yang dibuat secara daring (online) per tahun.
- Kompensasi (gaji dan tunjangan kinerja) didekati dengan daftar gaji dan tunjangan kinerja sesuai level jabatan dari hasil evaluasi jabatan.
- Disiplin pegawai didekati dengan data-data instansi pemerintah yang telah menerapkan organisasi modern (e government).

Tabel 2.174 : Indeks Profesionalitas ASN di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	-	-	-	-	63

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mojokerto, 2021

g. Sistem Merit

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem Merit merupakan indikator baru yang digunakan Kota Mojokerto mulai tahun 2021,

adapun capaian Sistem Merit Kota Mojokerto Tahun 2020 mendapat nilai 163 atau masuk dalam kategori buruk.

Tabel 2.175 : Sistem Merit di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Sistem Merit	-	-	-	-	163

Sumber : Komisi Aparatur Sipil Negara, 2021

2.1.3.4.5. Adminisrasi Pemerintahan

a. Persentase Pelayanan Keprotokolan

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

Tabel 2.176 : Persentase Pelayanan Keprotokolan di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pelayanan Keprotokolan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Mojokerto, 2019

Selama lima tahun terakhir persentase pelayanan keprotokolan menunjukkan capaian 100 % . Hal ini dilihat dari pelayanan Protokoler pada setiap kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah yaitu Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan suatu acara berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional.

b. Nilai SAKIP

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Pada tahun 2016 nilai SAKIP Pemerintah Kota Mojokerto adalah B, sampai dengan tahun 2019 nilainya masih stagnan di B.

Tabel 2.177 : Nilai SAKIP Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai SAKIP	B	B	B	B	B

Sumber : Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2021

c. Peringkat LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing. Selama tiga tahun yakni tahun 2016-2018, nilai LPPD Kota Mojokerto adalah sangat tinggi artinya pembangunan di Kota Mojokerto benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nilai LPPD tahun 2018 baru diterbitkan pada tanggal 25 April 2020, sementara nilai LPPD tahun 2019 dan 2020 belum muncul.

Tabel 2.178 : Peringkat LPPD Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Peringkat / Ranking LPPD Tingkat Nasional Kategori Kota	Sangat Tinggi Ranking 4 Nilai 3,3158	Sangat Tinggi Ranking 10 Nilai 3,0931	Sangat Tinggi Ranking 4 Nilai 3,3407	Sangat Tinggi Ranking 34 Nilai 3,1683	Sangat Tinggi Ranking 88

Sumber : Bag. Pemerintahan Setda Kota Mojokerto, 2019

d. Sekretariat DPRD

Salah satu fungsi dari Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi anggota DPRD Kota Mojokerto untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Pada tahun 2016, indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD mencapai 85 , mengalami peningkatan di sebesar 85 di tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 87 dan di tahun 2018 menjadi 90. Sedangkan pada tahun 2020 naik menjadi 94 persen Hal ini menandakan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Anggota DPRD mengalami penurunan.

Tabel 2.179 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	85	87	90	80	94

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2019

Alat – alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto terdiri dari Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi, Badan Kehormatan dan Pimpinan. Alat Kelengkapan DPRD mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan DPRD. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya alat kelengkapan DPRD menyusun rencana Kerja dan anggaran yang di tindaklanjuti dalam badan anggaran. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 rencana kerja tahunan setiap alat kelengkapan DPRD

Kota Mojokerto sudah tersedia atau sudah ada. Hal ini dapat di lihat dari jumlah rencana kerja tahunan setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto yang sudah terlaksana.

Tabel 2.180 : Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2021

Dalam melaksanakan program-program kerja DPRD agar dapat tersusun dan terintegrasi sesuai dengan fungsi DPRD yang memiliki tiga Fungsi yaitu Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan Fungsi Pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini sekretariat DPRD memantu memfasilitasi agara program-program kerja DPRD dapat tersusun dan terintegrasi melalui rapat dengar pendapat umum dan sidak yang sudah terlaksana dengan baik dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel 2.181 : Tersusun dan terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Tersusun dan terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2021

Dalam terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD yang meliputi Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran sekretariat DPRD. Dalam Hal ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sudah terintegrasi.

Tabel 2.182 : Terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan,	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD					

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2021

2.1.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan

Bahwa dikaitkan dengan berbagai persoalan dan perkembangan isu strategis, maka keberadaan dan peran penelitian dan pengembangan, semestinya dapat menjadi sangat penting dan strategis. Adapun hasil penelitian dan pengembangan kiranya dapat dijadikan rekomendasi kebijakan atas dasar *research policy* yang akan ditetapkan oleh para penyelenggara pemerintahan serta sebagai kebijakan strategis yang secara tepat mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat berdasarkan penelitian kebijakan. Adapun terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kota Mojokerto, berikut kami sajikan data tahun 2016 – 2020 :

Tabel 2.183 : Penyelenggaraan LITBANG Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Up Dating Penelitian	48 Judul	72 Judul	53 Judul	60 Judul	41 Judul
2	Implementasi rencana kelitbangan	9	9	4	13	4

Sumber : Bappedalitbang Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan tabel data diatas terlihat bahwa permasalahan dan kepentingan yang dimajukan untuk pertelaahan melalui kegiatan penelitian mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat animo dan perhatian dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk menuntaskan permasalahan berdasarkan analisis yang terencana dan terukur, dalam melayani kepentingan publik. cukup baik. Adapun untuk jumlah implementasi rencana kelitbangan terbaca statis, hal tersebut dikarenakan kemampuan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penelitian hanya cukup untuk jumlah sebagaimana tabel data diatas.

Tabel 2.184 : SPM Urusan LITBANG Tahun 2019-2020

No	Pelayanan	Indikator	2019	2019	2020	2020
1	Penelitian	Tersedianya hasil penelitian yang komprehensif	13	13	4	4
2	Diseminasi	Hasil Penelitian yang tersosialisasikan	13	10	3	3

Sumber : Bappedalitbang Kota Mojokerto, 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian dari indikator SPM berupa tersedia hasil penelitian yang komprehensif hanya mampu memenuhi target sebesar 50% dari Renja Kelitbangan. Dan begitu juga untuk penyelenggaraan sosialisasi hasil penelitian hanya dapat terpenuhi sebesar 66,66%

Bahwa tidak semua hasil dari up dating rencana penelitian dapat diwujudkan, dan hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Adapun perlu kami

sampaikan pula bahwa hasil daripada penelitian adalah bersifat informasi yang diperoleh dari analisa dan penelitian, sehingga dengan demikian :

1. Bahwa apabila dari rekomendasi hasil penelitian menyatakan perlu untuk ditindaklanjuti dengan suatu program kegiatan, maka kiranya akan nampak hasil penelitian secara positif aktif ;
2. Bahwa apabila dari rekomendasi hasil penelitian menyatakan tidak perlu untuk ditindaklanjuti dengan suatu program kegiatan, maka kiranya nampak hasil penelitian secara positif negatif ;

Adapun terkait dengan kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah, fungsi Balitbang adalah sebatas memfasilitasi, sehingga untuk program pengembangan hasil penelitian dan/atau inovasi perlu untuk dikomunikasikan lebih lanjut dengan PD yang lain (termasuk koordinasi dengan pihak III).

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat iartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula.

Tabel 2.185 : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	1.090.676	1.168.780	1.240.028	584.247	612.721

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Mojokerto tahun 2016 – 2018 terus mengalami peningkatan. Yang mana di tahun 2016 angka tersebut mencapai 1.090.676 di tahun 2018 menjadi 1.240.028. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 584.247. Hal ini juga terjadi di Provinsi Jawa Timur adanya tren penurunan perkapita per bulan. Di tahun 2020 pendapatan per kapita Kota Mojokerto sedikit mengalami kenaikan menjadi 612.721. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adalah adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, yang pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rata rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Mojokerto terus berada di atas Jawa Timur setiap tahunnya. Rata rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Mojokerto terus berada di atas Jawa Timur setiap tahunnya.

2.1.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Secara umum manusia selalu akan memenuhi kebutuhan hidupnya akan barang dan jasa. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, kelompok makanan dan non makanan. Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang non makanan tidak ada batasnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan/ kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan akan menurun, sebaliknya proporsi untuk non makanan semakin meningkat.

Tabel 2.186 : Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	58,31	55,85	54,90	55,36	55,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2021

Kalau diperhatikan komposisi persentase antara makanan dan non makanan penduduk Kota Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun (2016 - 2020) sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Kondisi ini memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya perbaikan ekonomi, maka pengeluaran untuk bukan makanan akan semakin tinggi dibanding pengeluaran untuk makanan.

Pada tahun 2020 proporsi pengeluaran penduduk Kota Mojokerto untuk non pangan sebesar 55,70 persen, relatif lebih besar dibanding untuk kebutuhan makanan. Terjadi fluktuasi pertumbuhan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Mojokerto, tahun 2016 - 2018 mengalami tren penurunan tetapi di tahun 2019 mengalami kenaikan, disusul tahun 2020 juga mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur, Kota Mojokerto masih berada di atas.

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.2.1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Tabel 2.187 : Angka Kriminalitas Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kriminalitas	18,9	24,3	28,1	20,2	16,2

Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018 - 2021 (diolah) , 2021

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, angka kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama satu tahun per 10.000 penduduk. Dalam rentang tahun 2016-2020 angka kriminalitas cenderung fluktuatif yaitu dari 18,9 di tahun 2016, naik menjadi 24,3 di tahun 2017, dan naik lagi menjadi 28,1 dan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 20,2. Ini berarti selama satu tahun terakhir terjadi penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas sebesar 20,2 menunjukkan bahwa terjadi sekitar 20 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya. Pada tahun 2020 angka kriminalitas menurun menjadi 16,2, artinya dalam kurun waktu tahun 2020 jumlah kriminalitas yang ada di Kota Mojokerto sebanyak 210 kasus.

2.1.4.2.2. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Semakin sedikit jumlah demonstrasi yang terjadi dalam suatu daerah, maka menunjukkan stabilitas politik yang terjaga.

Jumlah demonstrasi di Kota Mojokerto selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 Jumlah demonstrasi di Kota Mojokerto sebanyak 11 aksi, kemudian tahun 2017 naik sedikit menjadi 12 aksi. Sementara di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 6 aksi, dan 2019 turun Kembali menjadi 5 aksi. Sementara di tahun 2020 naik sedikit menjadi 7 aksi. Stabilitas keamanan di Kota Mojokerto cenderung stabil dan aman. Mengingat jumlah unjuk rasa di Kota ini cukup terkendali.

Tabel 2.188 : Jumlah Demonstrasi di Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah demonstrasi	11	12	6	5	7

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, 2021

2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.3.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Tahun 2015 merupakan awal diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Dalam menghadapi tantangan ini tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) harus disiapkan supaya tidak kalah dengan SDM dari negara Asean lainnya. Begitu juga Provinsi Jawa Timur tentunya juga tidak mau kalah dalam menyiapkan SDM yang ada. Salah satu mengukur potensi SDM di suatu wilayah adalah melihat dengan tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas SDM yang ada. Tingkat pendidikan penduduk yang digunakan sebagai ukuran adalah Sarjana (D4/S1 keatas), hal ini dikarenakan tingkat pendidikan D4/S1 keatas merupakan tingkatan tertinggi dari jenjang pendidikan.

Tabel 2.189 : Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio lulusan S1/S2/S3	838	851	871	887	907

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (diolah) , 2021

Dalam lima tahun terakhir (2016-2020) proporsi penduduk di Kota Mojokerto yang berpendidikan D4/S1 keatas semakin meningkat dari 838 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 907 per 10.000 penduduk di tahun 2020. Bila dilihat dari data tersebut, maka kualitas SDM di Kota Mojokerto semakin baik.

2.1.4.3.2. Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel 2.190 : Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio ketergantungan	42,79	42,69	42,54	43,98	44,29

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (diolah) , 2021

Pada tahun 2019, angka *dependency ratio* untuk Kota Mojokerto sebesar 43,98 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk usia non produktif. Di tahun 2020, angka rasio ketergantungan kembali meningkat menjadi 44,29. Yang artinya 100 penduduk usia produktif menanggung 44 orang non produktif. Idealnya angka *dependency ratio* menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2020, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.191

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain masih terdapat permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi;
2. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia;
3. Belum optimalnya tata kelola organisasi pemerintah;
4. Belum pulihnya ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan bertambahnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran;
5. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data DTKS;
6. Tuntutan atas inovasi layanan publik dan transformasi digital;
7. Belum meratanya infrastruktur perkotaan/perumahan;

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah. Permasalah penyelenggaraan urusan pemerinta daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 192 : Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Masih adanya guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4;- Masih adanya bangunan sekolah yang tidak layak;
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi- masih adanya kasus balita gizi buruk- masih adanya kasus balita stunting- masih adanya kasus TB
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">- Masih adanya genangan air sesaat di beberapa titik, hal ini ditunjukkan dengan persentase penanganan genangan air sebanyak 86%;- Masih adanya jalan yang kondisinya kurang baik yaitu sebanyak 8,4%;
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none">- Masih adanya kawasan permukiman kumuh;- Masih banyaknya PSU yang belum layak
5	Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Semakin meningkatnya persentase penduduk miskin;- Masih terdapat PMKS yang belum menerima bantuan.
6	Ketentraman dan ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none">- Masih adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang belum terselesaikan yakni sebesar 12,38%;

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
7	Tenaga Kerja	- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semakin meningkat
8	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	- Masih banyaknya angka kelahiran remaja perempuan;
9	Lingkungan Hidup	- Kurangnya keberadaan RTH di Kota Mojokerto; - Semakin rendahnya indeks tutupan lahan; - Indeks Kualitas Air masih rendah, yaitu 50
10	Administrasi Penduduk dan pencatatan sipil	- Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP elektronik/ NIK; - NIK pada DTKS tidak padan dengan NIK pada SIAK Dispendukcapil;
11	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	- Masih banyaknya penduduk usia subur yang belum menjadi peserta KB; - Semakin banyaknya angka kelahiran remaja
12	Perhubungan	- Rendahnya persentase kepemilikan KIR angkutan umum yaitu sebesar 21,65%; - Masih adanya rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang yaitu sebanyak 13,73% dari total rambu-rambu yang diperlukan;
13	Komunikasi dan Informatika	- Belum semua OPD memiliki website; - Belum terintegrasinya sistem informasi antar OPD
14	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	- Banyaknya koperasi yang tidak aktif; - Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM
15	Kepemudaan dan olahraga	- Masih rendahnya kualitas atlet; - Minimnya sarana dan prasarana olahraga - Minimnya pelatih yang bersertifikat.
16	Statistik	- belum optimalnya pengelolaan dan integrasi data statistik di lingkup pemerintah kota
17	Kebudayaan	- belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya lokal
18	Perpustakaan	- Masih rendahnya pengunjung perpustakaan.
19	Pariwisata	- Kurangnya destinasi pariwisata; - Potensi pariwisata yang sudah ada belum dioptimalkan dari segi pemanfaatan, pengelolaan maupun nilai jual kepada masyarakat; - Menurunnya PDRB sektor pariwisata karena dampak Covid-19
20	Perindustrian	- Untuk industri kecil maupun <i>home industry</i> masih terkendala oleh SDM dan permodalan; - Belum berkembangnya sektor ekonomi kreatif;
21	Administrasi Pemerintah	- nilai SAKIP tidak mengalami kenaikan
22	Perencanaan Pembangunan	- lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan. - Data perencanaan pembangunan masih belum lengkap dan update
23	Keuangan	- Belum mengoptimalkan kinerja pendapatan asli daerah terutama pajak dan retribusi; - Masih sangat bergantung pada dana perimbangan;
24	Kepegawaian	- Masih rendahnya Indeks Profesionalitas Pegawai - Masih rendahnya Sistem Merit

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok pokok kebijakan pembangunan umum Nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inova

e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
- Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur

f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- Pembangunan Rendah Karbon

g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Selain harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional, arah kebijakan ekonomi daerah juga harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi provinsi. Oleh karena itu perlu dipahami pokok pokok kebijakan pembangunan umum Provinsi Jawa Timur. landasan dalam pembangunan di Jawa Timur berpijak pada 6 (enam) strategi umum sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Jawa Timur 2019-2024. Enam strategi umum ini juga menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Jawa Timur 2019-2024. Enam strategi umum tersebut adalah:

1. Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan Spirit dalam Pembangunan
2. Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (uncertain future)
3. Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (Pengarutamaan Gender), perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses pembangunan (Right Based Development)
4. Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya (Development as Freedom)
5. Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama
6. Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis Information Communication Technology (ICT)

Keenam strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Jawa Timur 2019-2024, termasuk didalamnya menjadi arah bagi kebijakan ekonomi, sebagai kelanjutan dari pembangunan periode sebelumnya, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya (*affirmative*) kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak.

Arah Kebijakan Ekonomi Kota Mojokerto

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serangkaian kebijakan makro maupun mikro ekonomi telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto antara lain melalui strategi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan investasi

Peningkatan investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pertumbuhan investasi akan dipacu melalui :

- Percepatan waktu pemrosesan perijinan investasi; dan
- Percepatan waktu dan pengurangan jumlah prosedur untuk memulai usaha;

2. Meningkatkan kualitas kelembagaan serta produktivitas koperasi dan usaha mikro

Peningkatan kualitas kelembagaan serta produktivitas koperasi dan usaha mikro dipacu melalui :

- Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro;
- Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran koperasi dan usaha mikro; dan
- Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan usaha mikro.

3. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perikanan, dan peternakan

Peningkatan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perikanan dan peternakan dipacu melalui :

- Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan;
- Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan;
- Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan; dan
- Peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak.

4. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional

Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional dipacu melalui :

- Peningkatan perdagangan dan pengembangan pasar dalam negeri;
- Penggunaan produk lokal, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional;
- Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat;
- Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien; dan
- Peningkatan perlindungan konsumen.

5. Meningkatkan daya saing industri

Peningkatan daya saing industri dipacu melalui :

- Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri; dan
- Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif dan industri alas kaki).

6. Meningkatkan keunggulan, daya tarik dan promosi pariwisata

Peningkatan pengembangan pariwisata dipacu melalui :

- Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata; dan
- Peningkatan promosi pariwisata.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020

Ekonomi Kota Mojokerto pada tahun 2020 berkontraksi menjadi -3,69%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dipengaruhi oleh pandemi

Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian global dan Indonesia juga mengalami kontraksi karena adanya pembatasan kegiatan, yang secara langsung juga mengakibatkan lesunya industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata di Kota Mojokerto.

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu cara untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor atau sektor.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/ deflasi. Penghitungan PDRB yang berlaku saat ini sudah menggunakan metode baru dan mengalami perubahan tahun dasar yaitu menggunakan tahun dasar 2010. Berikut disajikan perkembangan nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3. 1: Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24 952,6	25 355,7	25 551,2	25 158,6	27 210,40
Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Industri Pengolahan	451 445,1	479 254,5	506 999,5	525 863,8	503 810,50
Pengadaan Listrik dan Gas	3 835,6	3 996,8	4 191,6	4 453,3	4 438,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 561,1	5 837,9	6 085,0	6 381,5	6 661,50
Konstruksi	455 974,7	483 704,0	511 849,4	541 446,0	507 533,10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 250 937,6	1 327 943,0	1 410 378,0	1 493 486,1	1 355 601,40
Transportasi dan Pergudangan	107 657,2	115 047,8	122 207,6	131 717,6	123 242,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	261 940,5	281 231,9	303 425,8	327 021,8	300 346,20
Informasi dan Komunikasi	604 073,1	644 050,1	685 621,5	735 246,5	792 049,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	315 463,6	325 381,6	340 463,9	355 622,7	355 686,80
Real Estate	119 383,6	123 842,6	128 755,6	133 952,3	138 337,60
Jasa Perusahaan	31 343,7	33 001,9	34 764,2	36 631,3	33 977,50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	192 780,7	199 252,2	208 050,2	216 931,6	211 685,20
Jasa Pendidikan	185 641,2	192 720,4	200 803,1	213 157,2	219 292,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50 010,6	52 714,5	55 684,8	59 021,0	63 777,60
Jasa Lainnya	160 825,9	167 110,0	174 401,0	184 587,1	157 814,00
PDRB	4 221 826,6	4 460 444,9	4 719 232,4	4 990 678,5	4 801 464,0

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2021

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir ini (2015-2019), berdasarkan *data series* dapat terlihat bahwa nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam setiap tahun menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Mojokerto mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Kenyataan ini memberikan indikasi nyata bahwa perekonomian Kota Mojokerto secara nominal terus meningkat.

Tabel 3. 3: Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36 242,8	37 964,1	39 566,0	39 888,7	43 570,90
Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Industri Pengolahan	607 057,6	669 352,0	734 546,3	776 431,7	749 658,10
Pengadaan Listrik dan Gas	3 896,1	4 448,0	4 766,0	5 124,0	5 113,90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 901,3	6 276,1	6 580,3	6 854,0	7 197,00
Konstruksi	590 293,6	635 252,4	675 545,2	711 455,2	672 366,70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 571 236,3	1 732 507,9	1 913 304,3	2 054 344,0	1 879 171,90
Transportasi dan Pergudangan	140 949,2	157 883,7	171 105,4	186 531,6	173 616,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	366 509,0	402 044,4	440 026,1	482 111,8	451 710,10
Informasi dan Komunikasi	634 136,3	692 159,0	737 483,2	794 651,6	856 829,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	454 837,7	484 930,2	522 589,7	554 573,2	552 938,20
Real Estate	151 339,6	160 951,1	174 732,6	185 375,7	193 995,70
Jasa Perusahaan	42 042,4	45 875,9	50 484,1	54 136,7	50 843,90
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	257 043,4	274 567,7	302 621,6	334 206,7	336 248,30
Jasa Pendidikan	251 738,3	266 872,9	282 483,1	304 143,4	318 422,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61 711,0	69 182,2	73 291,8	79 159,7	86 878,80
Jasa Lainnya	195 431,6	207 967,2	224 745,0	240 342,0	209 496,30
PDRB	5 370 366,4	5 848 234,7	6 353 870,7	6 809 330,0	6 588 057,70

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2021

Tabel 3. 4: Distribusi Persentase PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Persen)

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	0,65	0,62	0,59	0,66
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	11,30	11,45	11,59	11,40	11,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11
F	Konstruksi	10,99	10,86	10,67	10,45	10,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	29,26	29,62	29,90	30,17	28,52

Kategori	Sektor/Sub Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
H	Transportasi dan Pergudangan	2,62	2,70	2.70	2.74	2.64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,82	6,87	6.95	7.08	6.86
J	Informasi dan Komunikasi	11,81	11,84	11.64	11.67	13.01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,47	8,29	8.25	8.14	8.39
L	Real Estate	2,82	2,75	2.76	2.72	2.94
M,N	Jasa Perusahaan	0,78	0,78	0.79	0.79	0.77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial Wajib	4,79	4,69	4.78	4.91	5.10
P	Jasa Pendidikan	4,69	4,56	4.46	4.47	4.83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,18	1.16	1.16	1.32
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,64	3,56	3.55	3.53	3.18
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2021

Perkembangan jumlah PDRB Kota Mojokerto Tahun 2020 menunjukkan adanya kontraksi akibat pandemi COvid-19. Hampir semua sektor yang terkena dampak, namun yang lebih besar berdampak pada kategori Industri pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi, Transportasi dan Pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sedangkan sektor yang bertahan di tengah pandemi, bahkan mengalami pertumbuhan antara lain kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Sedangkan ditinjau dari sisi pengeluaran, Pada periode tahun 2016 – 2020 PDRB Kota Mojokerto atas dasar harga berlaku cenderung meningkat, yakni sebesar 5.370.366,4 juta rupiah (2016); 5.828.234,7 juta rupiah (2017); 6.333.226,0 juta rupiah (2018); 6.801.696,6 juta rupiah (2019); dan menurun menjadi 6.588.057,7 juta rupiah (2020). Penurunan ini bisa dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Terjadinya penurunan nilai tambah PDRB sisi produksi berarti terjadi juga penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Tabel 3.5: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,737,877.8	4.031.338,4	4.373.250,0	4.721.124,9	4.612.535,6
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	48,196.1	50.916,7	55.750,3	59.547,9	60.735,1
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	882,824.6	963,451.4	1.066.646,4	1.166.741,4	1.152.548,1
Pembentukan Modal Tetap Brute	1,923,615.1	2,089,301.7	2.292.881,8	2.421.753,8	2.335.302,0
Perubahan Inventori	733.4	620.1	666,5	675,6	248,8
Ekspor Barang dan Jasa	1,686,138.3	1,851,387.1	2.062.393,4	2.054.871,41	1.968.311,82
Impor Barang dan Jasa	2,909,018.8	3,183,780.8	3,502,717.6	3.623.018,43	3.541.623,74
PDRB	5,370,366.4	5.828.234,7	6.333.226,0	6.801.696,6	6.588.057,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2019

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa Selama lima tahun terakhir (2016-2020) PDRB pengeluaran Kota Mojokerto didominasi oleh 3 (tiga) komponen pengeluaran, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing komponen terhadap pembentukan PDRB Pengeluaran Kota Mojokerto tahun 2020.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Pengeluaran Kota Mojokerto pada tahun 2020 dihasilkan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu mencapai 70,01 persen (angka ini meningkat dari 69,60 persen di tahun 2016). Selanjutnya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 35,45 persen (menurun dari 35,82 persen di tahun 2016, disusul oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 17,49 persen (meningkat dari 16,44 persen di tahun 2016). Di antara ketiga komponen tersebut, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah kategori yang mengalami peningkatan kontribusi. Sedangkan komponen yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun setiap tahun.

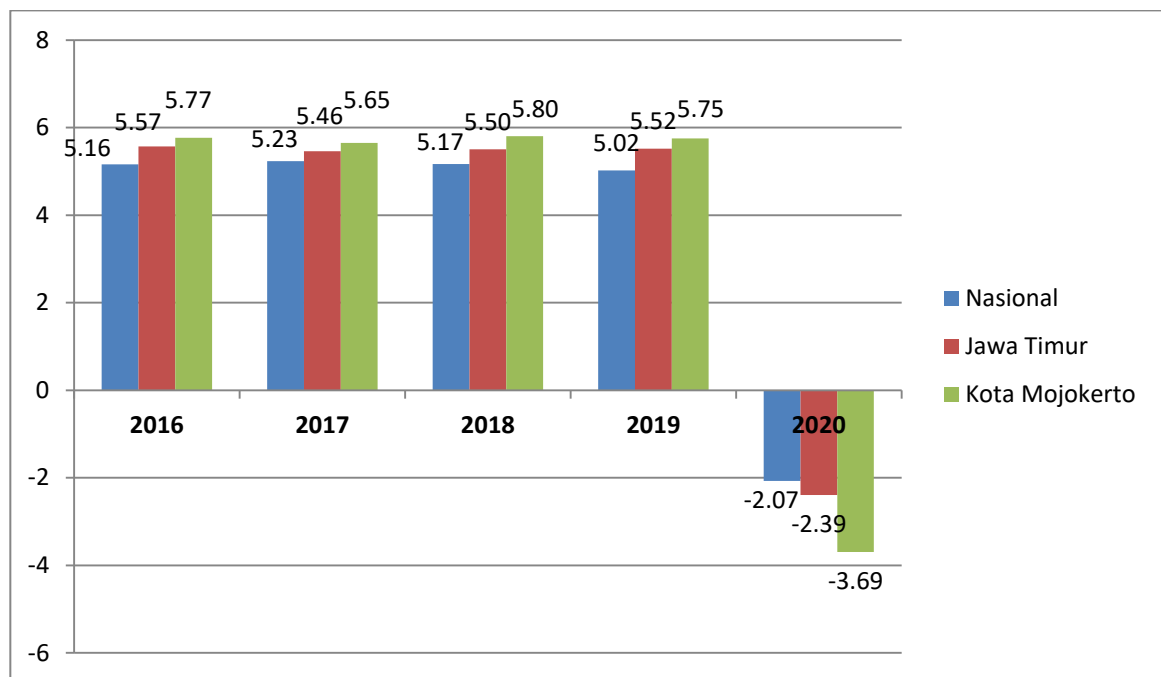
Sementara Net-Ekspor bernilai negatif mengindikasikan bahwa barang dan jasa domestik Kota Mojokerto yang diekspor ke luar wilayah atau ke luar negeri masih lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan domestik yang dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Yang berarti bahwa arus barang dan jasa Kota Mojokerto dalam posisi “defisit” atau bisa diartikan kondisinya kurang baik /kurang menguntungkan.

3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan tolok

ukur dari kemajuan perekonomian suatu daerah. Berikut akan dijelaskan perkembangan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2016-2020.



Gambar 3. 1: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2021

Selama tahun 2018-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami pelambatan dimana pada tahun 2018 sebesar 5,80%, naik menjadi 5,75% di tahun 2019, dan pada tahun 2020 melambat lagi menjadi -3,69%. Dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maka pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto berada dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga melambat menjadi -2,39% pada tahun 2020. Sedangkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 juga melambat menjadi -2,07%.

Pada tahun 2019, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto ditunjang oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi untuk beberapa sektor yaitu : sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, Konstruksi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Perusahaan.

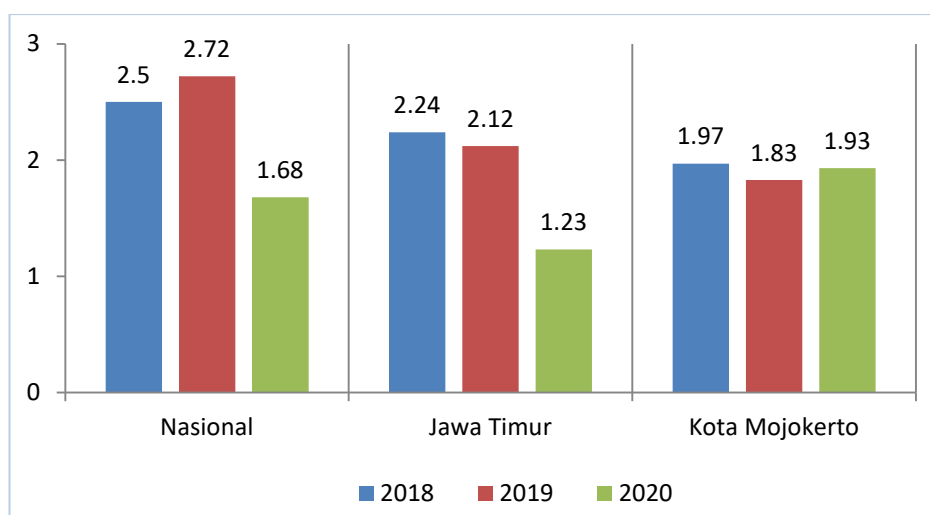
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk.

3.1.4 Inflasi

Tingkat inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Bila melihat pada rumus

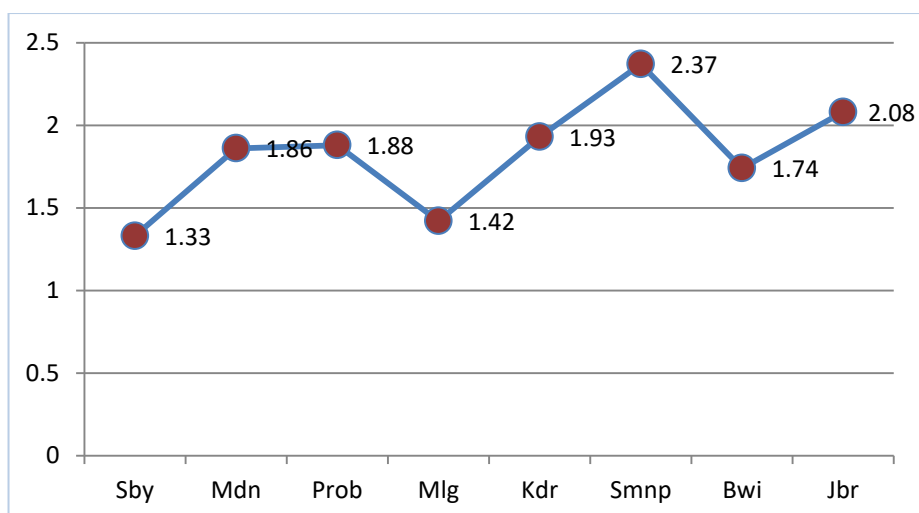
perhitungan inflasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), besar kecilnya inflasi disebabkan oleh adanya perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 7 kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/ jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian daerah. Dengan melihat data inflasi apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Di Jawa Timur ada 8 Kabupaten / Kota yang digunakan sebagai Kota Inflasi dari 82 Kabupaten / Kota secara Nasional, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk Kota Mojokerto, penghitungan inflasi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *Sister City* dengan Kota Inflasi. Pendekatan *sister city* yang dimaksud adalah menggunakan diagram timbang dengan kota inflasi yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama serta letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rujukan Kota Mojokerto dalam penghitungan inflasi adalah Kota Kediri.

Berikut disajikan laju inflasi Kota Mojokerto (*sister city* Kota Kediri) dibandingkan dengan laju propinsi Jawa Timur dan nasional serta perbandingan laju inflasi 8 Kabupaten/Kota sebagai Kota Inflasi di Jawa Timur.



Gambar 3. 2: Laju Inflasi Kota Mojokerto Tahun 2018-2020

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2021



Gambar 3. 3: Inflasi di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2020

Inflasi Kota Mojokerto pada tahun 2020 mencapai 1,93% atau mengalami kenaikan sebesar 0,10% dibandingkan pada tahun 2019. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan 8 Kabupaten/ Kota lainnya, inflasi yang terjadi di Kota Mojokerto pada tahun 2020 tergolong tinggi, dimana rata-rata inflasi di Jawa Timur hanya mencapai 1.44%. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021

Kondisi perekonomian Kota Mojokerto di Tahun 2021 diperkirakan mulai mengalami pertumbuhan. Hal ini seiring dengan tumbuhnya ekonomi global yang ditopang oleh Amerika Serikat, Tiongkok, Kawasan Eropa dan India. Di Indonesia, akselerasi program vaksin nasional dan disiplin penerapan protokol kesehatan Covid-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi.

Di Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto diproyeksikan sebesar 2,5 – 3,5 persen, sedangkan di tahun 2022 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 3,6 – 4,4 persen. Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kota Mojokerto akibat dari pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan beberapa langkah-langkah, antara lain :

1. Menjaga ketersediaan dan harga pangan serta melakukan fasilitasi kemandirian pangan bagi masyarakat
2. Memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto bagi warga yang terdampak dan terpapar
3. Memberikan stimulus pengurangan pajak retribusi
4. Melakukan fasilitasi pelatihan alih usaha/ketrampilan masyarakat
5. Melakukan fasilitasi pengembangan UMKM untuk pemasaran produk berbasis teknologi informasi

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kota Mojokerto serta melalui Pinjaman Daerah yang bersumber dari sumber dana yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan KPBU,

2. CSR/PKBL

Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan skema pembiayaan non-APBD yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan.

3. Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi

Infrastruktur (Persero) (PT SMI) memberikan fasilitas pinjaman PEN Daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi daerah-daerah dalam bentuk Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan. Program ini ditujukan untuk membiayai kegiatan/proyek pemerintah daerah yang terdampak atau mengalami *refocusing* anggaran karena Covid-19..

Kebijakan keuangan Kota Mojokerto Tahun 2021 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Mojokerto.

3.2.1 Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana tahun sebelumnya masih diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan Dana Perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Demikian juga dengan upaya optimalisasi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan berusaha untuk mendapatkan dana hibah, bantuan keuangan dan lain-lain dari pusat maupun provinsi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari :

1. Program bayar pajak pakai sampah berhadiah umroh. Bekerja sama dengan Bank Sampah di masing-masing kelurahan untuk membayar PBB bagi anggota Bank Sampah;
2. Pelayanan jemput bola pembayaran pajak dengan menggunakan *mobile android*;
3. Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk menindak Wajib Pajak yang menunggak pajak;
4. Melakukan pendataan obyek pajak PBB di 18 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon;
5. Pelayanan satu atap dengan membuka *Payment Point* Bank Jatim di BPPKA Kota Mojokerto, untuk memberi kemudahan kepada masyarakat;
6. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, baik yang baru maupun yang lama sudah mengalami perubahan;

7. Pengadaan aplikasi Pelayanan SIMPATDA, aplikasi SMS Center, aplikasi SMS gateway, dan aplikasi converter SIMPATDA ke SIMDA Pendapatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
8. Melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda serta sosialisasi program-program pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto yang dibiayai dari sektor pajak, seperti Lomba Poster untuk pelajar SD/MI dan SAMPE PD (Semarak Arek Mojokerto Peduli Pajak Daerah) untuk pelajar SMP/MTs dan SMA/MA/SMK;
9. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Perangkat Daerah penghasil;
10. Melakukan rekonsiliasi data retribusi parkir berlangganan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
11. Melaksanakan operasi penertiban terhadap reklame-reklame yang tidak membayar pajak reklame;
12. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (WP) daerah, khususnya WP-PBB dengan melaksanakan pelayanan langsung pembayaran PBB keliling kelurahan;
13. Melaksanakan kegiatan lomba pencapaian target PBB tingkat kelurahan dan Lomba Pencapaian PBB terbaik Tingkat Bank Sampah agar target PBB dapat tercapai;
14. Melaksanakan kegiatan Gebyar Hadiah PBB sebagai wujud pemberian penghargaan kepada wajib pajak;
15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah khususnya dari piutang pajak daerah;
16. Melaksanakan kegiatan monitoring, validasi dan kompilasi kegiatan BPHTB;
17. Pemusatan pembayaran BPHTB di *Payment Point* Bank Jatim yang ada di BPPKA Kota Mojokerto. Hal ini dilakukan untuk pemeriksaan data BPHTB dan tunggakan BPHTB;
18. Memberikan pembebasan denda PBB, untuk meningkatkan penerimaan dari piutang/tunggakan PBB.

Proyeksi pendapatan Tahun 2021 mengalami penyesuaian dari RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 terutama dari pendapatan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, hal ini berdasarkan data pendapatan 2 (dua) tahun ke belakang (2019-2020). Berikut disajikan realisasi dan proyeksi/target pendapatan Kota Mojokerto tahun 2018 – 2022.

**Tabel 3.6: Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mojokerto
Tahun 2019 – 2023**

NO	URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target APBD 2021	Proyeksi/ Target RKPD 2022	Proyeksi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	192,695,566,219.26	231,875,337,605.94	202,826,397,207.00	221,993,797,207.74	224,939,843,028.19
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	51,615,256,646.20	49,932,201,609.64	48,604,500,000.00	50,932,201,609.64	51,441,523,625.74
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9,897,775,510.59	10,894,179,924.50	10,160,971,925.00	11,394,179,924.50	11,508,121,723.75
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,656,906,866.76	3,474,822,398.20	4,815,282,000.00	4,815,282,000.00	4,815,282,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126,525,627,195.71	167,574,133,673.60	139,245,643,282.00	154,852,133,673.60	157,174,915,678.70
1.2	Pendapatan Transfer	678,111,291,792.00	637,434,403,940.00	646,814,493,974.00	562,035,440,210.00	566,449,109,112.00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	591,643,975,665.00	572,413,865,967.00	580,062,799,974.00	495,283,746,210.00	499,697,415,112.00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86,467,316,127.00	65,020,537,973.00	66,751,694,000.00	66,751,694,000.00	66,751,694,000.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15,159,179,997.18	16,716,470,000.00	20,045,899,950.00	20,045,899,950.00	20,045,899,950.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	15,159,179,997.18	16,716,470,000.00	-	20,045,899,950.00	20,045,899,950.00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	20,045,899,950.00	-	-
	Total Pendapatan	885,966,038,008.44	886,026,211,545.94	869,686,791,131.00	804,075,137,367.74	811,434,852,090.19

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

3.2.2 Belanja

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Kebijakan pengelolaan belanja diarahkan, sebagai berikut :

1. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
2. Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program priority);
5. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (performance based), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Tahun 2021;
6. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
7. Belanja daerah lainnya dalam rangka recovery dan penanganan dampak pandemi Covid-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir di Tahun 2022, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas yang telah direncanakan dapat difocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Berikut disajikan realisasi dan proyeksi/target belanja Kota Mojokerto tahun 2018 – 2022.

**Tabel 3.7: Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Mojokerto
Tahun 2019 – 2023**

NO	URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target APBD 2021	Proyeksi/ Target RKPD 2022	Proyeksi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Operasi	716,512,782,717.00	648,143,238,556.21	823,346,381,961.00	790,132,395,925.69	748,660,664,206.61
2.1.1	Belanja Pegawai	315,490,327,345.50	298,618,767,966.05	356,441,867,789.00	351,384,076,451.97	335,081,877,700.07
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	365,598,513,871.50	331,643,642,696.07	418,469,944,785.00	409,217,095,123.72	383,378,786,506.54
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	28,765,841,500.00	14,260,497,894.09	16,481,656,800.00	14,500,000,000.00	15,200,000,000.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6,658,100,000.00	3,620,330,000.00	31,952,912,587.00	15,031,224,350.00	15,000,000,000.00
2.2	Belanja Modal	134,616,621,172.42	113,437,780,600.21	218,263,236,005.00	210,259,229,765.31	194,605,255,189.58
2.3	Belanja Tidak Terduga	-	42,825,997,945.46	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
2.4	Belanja Transfer	954,692,850.00	-	-	-	-
	Total Belanja	852,084,096,739.42	804,407,017,101.88	1,042,609,617,966.00	1,000,891,625,691.00	943,765,919,396.19

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

*) belum audit BPK

3.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD BPRS dan penyertaan modal untuk BUMD baru serta defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

**Tabel 3.8: Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Mojokerto
Tahun 2019 – 2023**

NO	URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target APBD 2021	Proyeksi/ Target RKPD 2022	Proyeksi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	153,761,967,864.09	187,643,909,133.11	177,872,826,835.00	207,801,978,423.26	134,331,067,306.01
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	153,760,267,864.09	187,643,909,133.11	177,872,826,835.00	207,751,978,423.26	134,281,067,306.01
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	1,700,000.00	45,165,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	5,000,000,000.00	10,985,490,100.00	2,000,000,000.00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	5,000,000,000.00	10,985,490,100.00	2,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	153,761,967,864.09	187,643,909,133.11	172,872,826,835.00	196,816,488,323.26	132,331,067,306.01

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, 2021 (diolah)

*) belum audit BPK

3.2.4. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah membutuhkan hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, yang masing-masing telah dijelaskan sebelumnya. Adapun nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Mojokerto untuk tahun 2022 secara lebih jelas dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan	869,686,791,131.00	804,075,137,367.74
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	177,922,826,835.00	207,801,978,423.26
	Total Penerimaan	1,047,609,617,966.00	1,011,877,115,791.00
	Dikurangi:		
4	Belanja Tidak Langsung	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00	10,985,490,100.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1,042,609,617,966.00	1,000,891,625,691.00

Melihat pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Mojokerto pada tahun 2021 diketahui sebesar Rp. 1,042,609,617,966.00, pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1,000,891,625,691.00. Berdasarkan hasil pendanaan dan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Mojokerto tahun 2021 dan 2022, maka selanjutnya akan dilakukan alokasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja yang belum dialokasikan. Pengalokasian tersebut dilakukan dalam bentuk rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana sasaran pembangunan jangka menengah nasional yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka tujuan pembangunan dalam RPJMN IV tahun 2020-2024 telah disusun sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan beserta indikatornya telah ditampung dalam agenda pembangunan nasional.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN Tahun 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat, serta memiliki nilai strategis dan daya ungkit yang tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Proyek Prioritas Strategis ini menjadi fokus penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM dan RKP tahunannya untuk memastikan agar Proyek Prioritas Strategis dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien dan sebagai alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target pembangunan dalam RPJMN dapat dipantau dan dikendalikan.

Keberlanjutan pembangunan yang merata mengharuskan adanya integrasi linear antara tema pembangunan pusat, regional dan daerah. Arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2021 menekankan pada peningkatan dan pemerataan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rancangan RKPD Kota Mojokerto tahun 2021 tentunya harus memiliki lineartis tema dan arah pembangunan yang didasarkan pada Arah pembangunan Jawa Timur yang diadopsi dan disesuaikan dengan Tema Kepala Daerah.

Periode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021 merupakan tahun ketiga setelah penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto periode tahun 2018-2023. Prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Mojokerto tahun 2021 disusun berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun 2019, proyeksi pencapaian kinerja tahun 2020, program indikatif di tahun 2020 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari dokumen RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023. Telaah RPJPD Kota Mojokerto periode tahun 2005-2025, memberi arahan strategis berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMD sebelumnya (RPJMD ke-3, periode tahun 2014-2019) dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJM Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan telaah prioritas RPJMN 2020-2024 dan isu-isu kebijakan nasional.

Isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan pembangunan Kota Mojokerto terkonsentrasi pada hal-hal berikut ini: 1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; 2)

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan; 3) Penguatan Ketahanan Pangan Dan Daya Saing; 4) Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik; 5) Tata Ruang dan Infrastruktur Publik; 6) Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan yang Kondusif.

Arah pembangunan Kota Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2018-2023) pada dasarnya adalah proses perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing dalam bidang ekonomi, baik domestik maupun regional. Pembangunan Kota Mojokerto ke depan, diharapkan proses perubahan yang terjadi di masyarakat diharapkan tidak hanya terjadi pada aspek fisik, mental dan ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan masyarakat, kondisi sosial, budaya, kesehatan, pendidikan peningkatan budi pekerti yang luhur, wawasan kebangsaan, ketenagakerjaan, kependudukan, ketertiban, ketaatan pada norma-norma agama dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan. Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kota Mojokerto periode tahun 2018-2023 yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1: Penjabaran Visi

Pokok-pokok Visi	Penjabaran Visi
Visi: “Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera Dan Bermartabat”	
Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing	Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan serta daya saing pada produk-produk local Kota Mojokerto
Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri	Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; 2. Kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya 3. Kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari

Pokok-pokok Visi	Penjabaran Visi
	<p>luar daerah menjadi kecil</p> <p>4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi</p>
<p>Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis yang sehat</p>	<p>Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Mojokerto semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta HAM 2. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif 3. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis 4. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan; dan 5. Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
<p>Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil</p>	<p>Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, social, dan budaya, politik, hukum dan keamanan dengan tujuan, yaitu <i>Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.</i></p>
<p>Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur – Sejahtera</p>	<p>Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, semua anggota masyarakat Kota Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin</p>
<p>Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat</p>	<p>Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.</p>

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-2023 sebagai berikut:

- Misi 1.** Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Misi 2.** Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- Misi 3.** Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;
- Misi 4.** Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
- Misi 5.** Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
- Misi 6.** Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
- Misi 7.** Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kota Mojokerto yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran Misi I

Sebagai upaya pencapaian Misi 1 yaitu **Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan** maka tujuan pembangunan, yaitu : Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan, dengan indikator : Indeks pendidikan;
- b. Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan, dengan Indikator : Indeks Kesehatan;
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan Indikator : Indeks Pengeluaran per kapita

2. Tujuan dan Sasaran Misi II

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, Dan HAM** maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu Mewujudkan Masyarakat Taat Hukum, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah. Indikatornya : Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan
- b. Terciptanya kerukunan sosial di masyarakat. Indikatornya : Persentase konflik sosial yang terselesaikan

3. Tujuan dan Sasaran Misi III

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat** maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran Terwujudnya birokrasi yang bersih,

akuntabel, dan melayani. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan, sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP;
2. Opini BPK;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM;
5. Indeks SPBE
6. Indeks Manajemen Resiko;
7. Sistem Merit.

4. Tujuan dan Sasaran Misi IV

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sector-sector unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator :
 - 1) Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN);
 - 2) Pertumbuhan PDRB sektor Industri;
 - 3) Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan;
 - 4) Pertumbuhan sektor lainnya.
 - b. Meningkatnya industri pariwisata, dengan indikator:
 1. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata;
 - c. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indikator:
 - 1) Laju Inflasi
2. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan, dengan indikator:
 - 1) Indeks infrastruktur pekerjaan umum;
 - b. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak, dengan indikator :
 - 1) Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman
 - c. Meningkatkan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan indikator:
 - 1) Indeks infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator :
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

5. Tujuan dan Sasaran Misi V

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatahan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila**, maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu : Meningkatkan Kesalehan Sosial, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal, dengan indikator:
Jumlah apresiasi seni dan budaya

- b. Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama, dengan indikator : Persentase konflik SARA yang terselesaikan.

6. Tujuan dan Sasaran Misi VI

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Partispasi Masyarakat Melalui Pemberian Akses Dan Kesempatan Dalam Pembangunan** maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu : Meningkatkan akses masyarakat dalam pembangunan serta kesetaraan gender. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat, dengan indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- b. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator: Angka Kemiskinan
- c. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan indikator: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

7. Tujuan dan Sasaran Misi VII

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat** maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah : Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah, dengan sasaran : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Adapun indikatornya, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.

Tabel 4. 2: Linieritas Visi-Misi, tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama

VISI 2018-2023 Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera Dan Bermartabat							
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022	
1. Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan	T 1 Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	78,40	S 1 Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan;	Indeks Pendidikan	0,735	
				S 2 Meningkatkan Kualitas dan Akses Kesehatan;	Indeks Kesehatan	0,822	
				S 3 Meningkatkan daya beli masyarakat.	Indeks Pengeluaran Per Kapita	0,796	
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM	T 2 Mewujudkan masyarakat Taat Hukum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	94,5	S 4 Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	89%	
				S 5 Terciptanya kerukunan sosial di masyarakat	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100%	
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat	T 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	S 6 Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	Nilai SAKIP	BB	
					Opini BPK	WTP	
					IKM	81,26 – 88,30	
					Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	1	
					Indeks SPBE	3,42	
					Sistem Merit	Baik	
					Indeks Manajemen Resiko	2	
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri,	T 4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,6 – 4,4	S 7 Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor-sektor	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan	365.000.000.000	

VISI 2018-2023 Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera Dan Bermartabat

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022		
berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah				unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	PMDN			
					Pertumbuhan PDRB sektor Industri	1,5 – 1,9		
					Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	2,5 – 3,4		
					Pertumbuhan PDRB sektor lainnya	2,6 – 3,2		
				S 8	Meningkatnya industri pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	2,0	
				S 9	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laju Inflasi	1,9 – 2,1	
	T 5	Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur	86,06	S 10	Meningkatnya aksesibilitas ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	89,56%
					S 11	Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak	Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman	96,96%
					S 12	Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	92,60%
					S 13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	57,86
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan	T 6	Meningkatkan Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial	76,25	S 14	Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal	Jumlah apresiasi seni dan budaya	8

VISI 2018-2023 Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera Dan Bermartabat

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022		
masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila				S 15	Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	100%	
				S 16	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,6 – 6,0	
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan	T 7	Meningkatkan Akses Masyarakat Dalam Pembangunan serta kesetaraan gender	Indeks Gini	0,350	S 17	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,63 – 5,83
					S 18	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,50
						Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30	
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat	T 8	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Kapasitas Fiskal Daerah	386.000.000.000	S 19	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	30,777

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari analisis *top-down* dari level pusat, provinsi sampai dengan daerah. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bahwa amanat mandatori dari pusat maupun provinsi telah diakomodir oleh masing-masing daerah untuk mewujudkan pembangunan yang simultan dan integratif di segala level pemerintahan. Oleh karena itu, pada penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto di tahun 2022 ini pun perlu untuk mempertimbangkan prioritas dan sasaran nasional serta provinsi.

Sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan, dan;
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan, dan;
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui :

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama, dan;
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui :

- a. Pembangunan infrastuktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan, dan;
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastuktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Pada level provinsi, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaan 9 Program Kerja Nawa Bhakti Satya adalah sebagai berikut :

1. Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Jawa Timur cerdas dan sehat, pelayanan dasar berkualitas;
4. Membangun infrastruktur, pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;
5. Membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;

6. Memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
7. Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa;
8. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi;
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Berpedoman dan selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023, maka dirumuskan prioritas pembangunan Kota Mojokerto tahun 2022, sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi;
2. Penguatan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan dasar;
3. Pengembangan kawasan-kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata dengan meningkatkan keunggulan kompetitif wilayah;
4. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, koperasi, pasar tradisional, pariwisata dan usaha kreatif dengan menciptakan nilai tambah dan daya saing.
5. Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
6. Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pengintegrasian pelayanan publik berbasis teknologi informasi secara komprehensif.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim

4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, telah diseleralaskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024), mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan yang ada didokumen pembangunan jangka menengah, pembangunan nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagaimana Tabel 4.3 sampai dengan Tabel 4.8

Tabel 4.3 Keselarasan Kebijakan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2022

Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 (Tahun 2022)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
Penguatan Sumber Daya Manusia dan penyediaan infrastruktur untuk mendukung investasi dan pemerataan pembangunan yang	1. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan

Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 (Tahun 2022)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
berorientasi pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat	penggunaan teknologi informasi
	2. Penguatan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan dasar
	3. Pengembangan kawasan-kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata dengan meningkatkan keunggulan kompetitif wilayah
	4. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, koperasi, pasar tradisional, pariwisata dan usaha kreatif dengan menciptakan nilai tambah dan daya saing
	5. Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
	6. Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pengintegrasian pelayanan publik berbasis teknologi informasi secara komprehensif.
	7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Tabel 4.4 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2022

NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Pelayanan Dasar didukung Penguatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Tabel 4.6 Linieritas Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2022

Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022		Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2022	
PN1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	4	Peningkatan ketahanan ekonomi melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, koperasi, pasar tradisional, pariwisata dan usaha kreatif dengan menciptakan nilai tambah dan daya saing.

Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022		Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2022	
PN2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	3	Pengembangan kawasan-kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata dengan meningkatkan keunggulan kompetitif wilayah
PN3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,	3	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	1	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian NilaiNilai Budaya Lokal	5	Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
PN5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	2	Penguatan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan dasar
PN6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,	6	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	7	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim
PN7	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.	7	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	6	Perbaiki tata kelola pemerintahan melalui pengintegrasian pelayanan publik berbasis teknologi informasi secara komprehensif

Tabel 4.7 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Kota Mojokerto dengan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Indikator Sasaran Pembangunan	Target Kota Mojokerto Tahun 2022	Target Jawa Timur Tahun 2022	Target Nasional Tahun 2020-2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,6-4,4	5,78 – 5,80	5,4 – 6,0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,40	72,58 – 73,07	73,44 - 73,48
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,6 - 6,0	4,81 – 4,61	6,24 – 5,52
Tingkat Kemiskinan (%)	5,68 -5,88	10,76 – 10,47	8,5 – 9,0
Rasio Gini	0,350	0,3682-0,3677	0,376 – 0,378

Tabel 4. 8 Linearitas Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Terhadap Program Prioritas Kota Mojokerto Tahun 2022

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Peningkatan ketahanan ekonomi melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, koperasi, pasar tradisional, pariwisata dan usaha kreatif dengan menciptakan nilai tambah dan daya saing.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Koperasi, Usaha

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Pengembangan kawasan-kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata dengan meningkatkan keunggulan kompetitif wilayah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				Pengelolaan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSU dr. Wahidin Sudirohusodo; Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Puskesmas)
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSU dr. Wahidin Sudirohusodo; Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Puskesmas)				
Peningkatan Pelayanan BLUD					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
					Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Perempuan dan Keluarga Berencana
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	
				Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial,

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian NilaiNilai Budaya Lokal	Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
5	Memperkuat infrastruktur	Peningkatan Kemandirian	Penguatan infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum,

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	untuk mendukung daya saing ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan dasar	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
6	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pengintegrasian pelayanan publik berbasis teknologi informasi secara komprehensif	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyusunan Profil Kependudukan	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
Penataan Pendaftaran Penduduk					
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Pelayanan Pencatatan Sipil					
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika				
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika				
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika				
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
				Administrasi Tata Pemerintahan	
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	
				Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
				Administrasi Tata Pemerintahan	
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Peningkatan Kapasitas DPRD	
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
				Fasilitasi Tugas DPRD	
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Kota Mojokerto
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Mojokerto
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Mojokerto
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Mutasi dan Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan Kompetensi Teknis Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
7	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MOJOKERTO	PROGRAM/KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2019-2023, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022

Program dan kegiatan prioritas RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 serta RKP tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama di tahun 2022 dan mendukung target capaian prioritas nasional yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	143,326,079,580
2	RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO	167,976,450,328
3	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	94,612,296,704
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	151,204,010,440
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14,465,645,000
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	29,257,901,607
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7,882,750,000
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22,499,220,026
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,256,865,773
10	DINAS PERHUBUNGAN	15,711,372,369

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17,545,537,217
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	31,836,253,800
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	12,321,544,543
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	18,457,180,955
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6,161,799,405
16	SEKRETARIAT DAERAH	46,835,864,512
17	SEKRETARIAT DPRD	45,766,166,031
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	16,127,815,200
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	37,855,797,818
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19,154,475,367
21	INSPEKTORAT	7,923,673,550
22	KECAMATAN PRAJURIT KULON	25,350,712,210
23	KECAMATAN MAGERSARI	28,452,487,774
24	KECAMATAN KRANGGAN	25,427,783,438
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9,481,942,044
	TOTAL	1,000,891,625,691

Tabel 5.2 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		135,494,047,580				141,760,072,576		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian kinerja	100%	76,445,282,244			100%	79,854,941,406	
1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	240,000,000			100%	244,800,000	
1 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7 dokumen	140,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 dokumen	142,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun	6 laporan	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 laporan	102,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	72,879,482,244			100%	76,217,315,406	
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase gaji dan tunjangan yang dibayarkan	100 %	72,485,969,805	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	75,815,932,718	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	25 orang/transaksi	248,340,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 orang/transaksi	253,306,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pengelola keuangan sekolah yang terampil dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan	583 orang	145,172,439	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	583 orang	148,075,888	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	36,000,000			100%	36,720,000	
1 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 kegiatan	12,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	12,240,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 kegiatan	24,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	24,480,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu yang terpenuhi	100%	126,200,000			100%	128,724,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	400 potong	126,200,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400 potong	128,724,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	1,573,900,000			100%	1,605,378,000	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	24 paket	42,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 paket	42,840,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	24 paket	82,600,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 paket	84,252,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24 paket	20,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 paket	20,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	30000 paket	104,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30000 paket	106,080,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 paket	71,300,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 paket	72,726,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	48 paket	247,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 paket	251,940,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	125 kali 36 kali	932,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	125 kali 36 kali	950,640,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah lembaga yang dilakukan maintenance jaringan	10 lembaga	75,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 lembaga	76,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%	475,500,000			100%	485,010,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	110 unit	475,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110 unit	485,010,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terapan:	100%	708,200,000			100%	722,874,000	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air/PDAM dan internet	48 transaksi	240,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 transaksi	245,310,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	36 transaksi	468,200,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 transaksi	477,564,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	406,000,000			100%	414,120,000	
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	8000 liter 20 kali 22 transaksi	138,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8000 liter 20 kali 22 transaksi	140,760,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	74 unit	17,200,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	74 unit	17,544,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	30 unit	75,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 unit	77,316,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	3 paket	175,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 paket	178,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Kelulusan SD/MI Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A Guru SD yang memenuhi	100% 100% 100% 100% 98.13% 0.01% 100% 66.56% 50/10/000 100% 60.56% 94.51%	59,048,765,336			100% 100% 100% 100% 98.13% 0.01% 100% 66.56% 50/10/000 100% 60.56% 94.51%	61,905,131,170	
		APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%				100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%		
		APK PAUD Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A Persentase PAUD yang terakreditasi Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100% 100% 28.68% 72.79% 75.42%				100% 100% 28.68% 72.79% 75.42%		
		Angka kelulusan PNF Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	100% 100% 98.66% 49.57% 4%				100% 100% 98.66% 49.57% 4%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SD Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SD	18 kegiatan 12 kegiatan 12 dokumen	26,542,099,850			18 kegiatan 12 kegiatan 12 dokumen	27,728,221,264	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang kelas baru yang dibangun	5 ruang	1,416,250,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 ruang	1,733,490,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah lembaga yang ruang kelasnya perlu direhabilitasi Jumlah lembaga yang ruang Laboratorium Komputer perlu direhabilitasi	2 ruang 2 lembaga	552,138,400	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 ruang 2 lembaga	563,181,168	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah lembaga yang Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) perlu direhabilitasi	4 ruang	563,200,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 ruang	861,696,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah lembaga yang ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) perlu direhabilitasi	1 ruang	140,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 ruang	143,616,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah lembaga yang ruang perpustakaan perlu direhabilitasi	2 lembaga	269,825,600	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 lembaga	275,222,112	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah lembaga yang ruang Mushola perlu direhabilitasi Jumlah lembaga yang ruang toilet/jamban perlu direhabilitasi	2 ruang 6 ruang	361,838,400	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 ruang 6 ruang	448,207,584	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah lembaga yang Rumah Dinas KS, Guru/Penjaga Sekolah perlu direhabilitasi	5 ruang	674,564,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 ruang	688,055,280	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket meubeler yang diadakan	8 paket	484,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 paket	493,680,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah lembaga penerima perlengkapan siswa	61 lembaga	2,585,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	61 lembaga	2,636,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah lembaga yang perlu dilakukan pemeliharaan	10 lembaga	412,757,400	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 lembaga	421,012,548	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah paket pengadaan alat praktikum dan peraga	6 paket	385,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 paket	392,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga yang melaksanakan PPDB Jumlah lembaga yang menyelenggarakan ujian	71 lembaga 62 lembaga	437,182,495	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71 lembaga 62 lembaga	445,926,145	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang dilakukan monitoring dan evaluasi Jumlah lembaga yang melakukan evaluasi	62 lembaga 42 lembaga	140,601,600	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62 lembaga 42 lembaga	143,413,632	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lembaga yang melakukan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	71 lembaga	265,050,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71 lembaga	270,351,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase lembaga yang ditetapkan dan tertata kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	100 %	30,213,481	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	30,817,751	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi Prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima insentif peningkatan mutu pendidikan Prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima pelayanan	72 lembaga 100 % 100 %	11,512,382,049	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72 lembaga 100 % 100 %	11,742,629,690	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan manajerial sekolah	71 lembaga	214,884,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71 lembaga	219,181,680	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang menyediakan buku teks pelajaran Jumlah lembaga yang terpenuhi biaya	59 lembaga 67 lembaga	5,943,412,425	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	59 lembaga 67 lembaga	6,062,280,674	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah lembaga pengelola dana BOS	67 lembaga	153,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	67 lembaga	156,060,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	20,039,712,839				12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	21,460,618,206	
1 01 02 2.02 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhab	2 lembaga	186,050,605	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 lembaga	618,171,617	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	6 ruang	821,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 ruang	919,530,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket mebeler yang diadakan	10 paket	900,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 paket	918,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah lembaga penerima perlengkapan sekolah	1 lembaga	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 lembaga	612,111,111	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah lembaga penerima perlengkapan siswa	19 lembaga	2,900,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 lembaga	2,958,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah paket alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	3 paket	80,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 paket	81,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga peserta pelatihan peningkatan pembelajaran Jumlah lembaga yang melaksanakan PPDB Jumlah lembaga yang menyelenggarakan ujian	19 lembaga 21 lembaga 19 lembaga	336,888,465	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 lembaga 21 lembaga 19 lembaga	343,626,234	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lembaga yang melakukan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	21 lembaga	363,750,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 lembaga	371,025,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan pengelolaan data, pemetaan dan penataan guru dan tenaga kependidikan	6 kegiatan	156,227,780	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 kegiatan	159,352,336	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah dokumen kegiatan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Jumlah dokumen pengelolaan administrasi guru dan tenaga kependidikan Jumlah dokumen pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	12 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 15 kegiatan	5,949,867,501	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 15 kegiatan	6,068,864,851	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang terakreditasi Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu pendidikan Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan manajerial sekolah	1 lembaga 19 lembaga 21 lembaga	139,158,316	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 lembaga 19 lembaga 21 lembaga	141,941,482	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang menyediakan buku teks pelajaran jumlah lembaga yang terpenuhi biaya operasionalnya	20 lembaga 11 lembaga	8,073,020,172	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 lembaga 11 lembaga	8,234,480,575	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga pengelola dana BOS	20 lembaga	33,250,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 lembaga	33,915,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PAUD Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PAUD	16 kegiatan 6 kegiatan 8 kegiatan	10,090,560,000			16 kegiatan 6 kegiatan 8 kegiatan	10,292,371,200		
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung sekolah yang direhab	2 sekolah	942,250,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 sekolah	961,095,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03 05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah bangunan Sekolah PAUD yang dipelihara	2 sekolah	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 sekolah	102,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah meubeler siswa yang diadakan	4 macam	459,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 macam	468,180,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 01 02 2.03 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	2 macam	867,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 macam	884,340,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa yang diadakan	4 macam	710,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 macam	724,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah siswa penerima bantuan	400 siswa	190,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400 siswa	193,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat permainan edukatif yang diadakan	2 macam	357,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 macam	364,140,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah data usia 5-6 tahun yang belum bersekolah Jumlah kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan proses pembelajaran	18 data 5 kegiatan 132 lembaga	823,730,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 data 5 kegiatan 132 lembaga	840,204,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah data PAUD yang tersinkronisasi Jumlah lembaga yang melaksanakan proses akreditasi	1 data 60 lembaga	193,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 data 60 lembaga	196,860,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan data pemetaan dan penataan guru dan tenaga kependidikan Jumlah dokumen pelayanan administrasi kepegawaian guru dan tenaga kependidikan Jumlah dokumen peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Jumlah kegiatan jenjang PAUD dan PNF Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	3 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 kegiatan	4,684,580,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 kegiatan	4,778,271,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga yang mengikuti pengelolaan kelembagaan dan manajemen PAUD	132 lembaga	319,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	132 lembaga	325,380,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD penerima BOP TK Negeri	2 lembaga	445,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 lembaga	453,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jumlah kegiatan PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PNF/Kesetaraan	12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	2,376,392,647			12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	2,423,920,500	
1 01 02 2.04 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah perlengkapan pendidikan non formal	7 macam	176,475,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 macam	180,004,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan pendidikan non formal/kesetaraan Jumlah lembaga Madin yang terpenuhi biaya operasional Jumlah lembaga penerima bantuan pembelajaran KDK SMP	5 kegiatan 20 lembaga 20 lembaga	1,580,644,050	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 kegiatan 20 lembaga 20 lembaga	1,612,256,931	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan penguatan tripusat	12 kegiatan	336,773,597	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kegiatan	343,509,069	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen peningkatan kesejahteraan guru/tutor dan tenaga kependidikan jenjang PAUD/PNF Jumlah lembaga sekolah yang terpetakan dan tertata kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	12 dokumen 1 lembaga	192,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dokumen 1 lembaga	196,350,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga PNF/kesetaraan yang melaksanakan proses akreditasi Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan manajemen PNF/kesetaraan	4 lembaga 30 lembaga	80,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 lembaga 30 lembaga	81,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan dana BOP satuan pendidikan	2 kegiatan	10,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	10,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1,892,500,000				1,875,270,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase even/kegiatan pelestarian budaya Penyelenggaraan Festival/even seni dan budaya Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	46 kegiatan 4 10	1,745,000,000			46 kegiatan 4 10	1,779,900,000	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	22 kegiatan	230,000,000			22 kegiatan	234,600,000	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan seni budaya yang dilaksanakan	4 kegiatan	230,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 kegiatan	234,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelestarian Kesenian yang dilaksanakan	12 kegiatan	1,515,000,000			12 kegiatan	1,545,300,000	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan pelestarian kesenian yang dilaksanakan	12 kegiatan	1,325,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kegiatan	1,351,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	5 kegiatan	190,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 kegiatan	193,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	16 unit 1 unit	147,500,000			16 unit 1 unit	95,370,000	
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	7 unit	77,500,000			7 unit	79,050,000	
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dinilai Jumlah kegiatan Sosialisasi Cagar Budaya yang dilaksanakan Jumlah objek cagar budaya yang terdaftar	12 unit 1 kegiatan 16 unit	77,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 unit 1 kegiatan 16 unit	79,050,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	5 unit	70,000,000			5 unit	16,320,000	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	5 unit	60,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 unit	6,120,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 unit	10,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 unit	10,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			889,728,000				907,522,560	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/Paket B 96.56% Angka Partisipasi Sekolah 100% (APS) SMP/MTs/Paket B 100% Angka Kelulusan SMP/MTs 0.05% Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 100% SMP/MTs 80% Prosentase capaian SPM pendidikan dasar 31/10.000 76.19% Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik 98.60% Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah 76.19% Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A 98.60% Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	889,728,000			100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	907,522,560	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	816,768,000			12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	833,103,360	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang terpenuhi Biaya Operasional Sekolah	960 siswa	816,768,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	960 siswa	833,103,360	UPT SMP NEGERI 1
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang	12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	72,960,000			12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	74,419,200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasional KDK	608 siswa	72,960,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	608 siswa	74,419,200	UPT SMP NEGERI 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			745,920,000				764,568,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs SMP/MTs Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	745,920,000			100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	764,568,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	680,640,000			12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	697,656,000	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasional	800 siswa	680,640,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800 siswa	697,656,000	UPT SMP NEGERI 2
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang	12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	65,280,000			12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	66,912,000	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasional KDK	544 siswa	65,280,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	544 siswa	66,912,000	UPT SMP NEGERI 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			653,454,000				669,790,350	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs SMP/MTs Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	653,454,000			100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	669,790,350	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	599,814,000			12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	614,809,350	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasionalnya	705 siswa	599,814,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	705 siswa	614,809,350	UPT SMP NEGERI 3
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PNF/Kesetaraan	12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	53,640,000			12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	54,981,000	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasional KDK	447 siswa	53,640,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	447 siswa	54,981,000	UPT SMP NEGERI 3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			742,080,000				760,632,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	742,080,000			100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	760,632,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	680,640,000			12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	697,656,000	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasionalnya	800 siswa	680,640,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800 siswa	697,656,000	UPT SMP NEGERI 4
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang	12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	61,440,000			12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	62,976,000	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasional KDK	512 siswa	61,440,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	512 siswa	62,976,000	UPT SMP NEGERI 4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			710,480,400			728,242,410		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	710,480,400			100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	728,242,410	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	649,160,400			12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	665,389,410	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasionalnya	763 siswa	649,160,400	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	763 siswa	665,389,410	UPT SMP NEGERI 5
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang	12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	61,320,000			12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	62,853,000	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasional KDK	511 siswa	61,320,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	511 siswa	62,853,000	UPT SMP NEGERI 5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			630,962,400			646,736,460		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 80% Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	630,962,400			100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	646,736,460	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	576,842,400			12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	591,263,460	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasionalnya	678 siswa	576,842,400	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	678 siswa	591,263,460	UPT SMP NEGERI 6
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PNF/Kesetaraan	12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	54,120,000			12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	55,473,000	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasional KDK	451 siswa	54,120,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	451 siswa	55,473,000	UPT SMP NEGERI 6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			444,471,600					455,583,390
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 80% Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	444,471,600			100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	455,583,390	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	405,831,600			12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	415,977,390	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasionalnya	477 siswa	405,831,600	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	477 siswa	415,977,390	UPT SMP NEGERI 7
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang	12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	38,640,000			12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	39,606,000	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasional KDK	322 siswa	38,640,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	322 siswa	39,606,000	UPT SMP NEGERI 7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			563,683,200					577,775,280

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 80% Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	563,683,200			100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	577,775,280	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP Jumlah Pengelolaan	12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	513,883,200			12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	526,730,280	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasionalnya	604 siswa	513,883,200	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	604 siswa	526,730,280	UPT SMP NEGERI 8
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang	12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	49,800,000			12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	51,045,000	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasional KDK	415 siswa	49,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	415 siswa	51,045,000	UPT SMP NEGERI 8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			558,752,400				572,721,210	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs/Paket B APM SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 80% Prosentase capaian SPM pendidikan dasar Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	558,752,400			100% 96.56% 100% 100% 0.05% 100% 80% 31/10.000 76.19% 98.60%	572,721,210	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	513,032,400			12 kegiatan 8 kegiatan 12 dokumen	525,858,210	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasionalnya	603 siswa	513,032,400	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	603 siswa	525,858,210	UPT SMP NEGERI 9
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PNF/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PNF/Kesetaraan	12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	45,720,000			12 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan	46,863,000	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang terpenuhi biaya operasional KDK	381 siswa	45,720,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	381 siswa	46,863,000	UPT SMP NEGERI 9
TOTAL				143,326,079,580				149,718,914,236	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						170,917,321,511				
1	02	01		167,976,450,328				170,917,321,511					
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	167,976,450,328		100%	170,917,321,511				
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	32,258,001,481		100%	32,903,161,511			
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	32,258,001,481	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	32,903,161,511	RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	410,448,847		0%	0			
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan	433 Potong	410,448,847	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0	RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kenaikan pendapatan Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Jumlah Kegiatan Pendukung Survey Kepuasan Masyarakat	5% 95% 100% 2 keg	135,308,000,000			5% 95% 100% 2 keg	138,014,160,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pemenuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pendukung BLUD yang dilaksanakan	12 bulan	135,308,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Pendapatan dari BLUD	12 bulan	138,014,160,000	RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
			TOTAL				167,976,450,328				170,917,321,511		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				80,886,903,378				82,656,059,708	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA MOJOKERTO	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	44,323,771,374				100%	45,210,247,962	
1 02 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	247,652,098			100%	252,606,300	
1 02 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	142,371,218	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 dokumen	145,219,200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang disusun	2 dokumen	105,280,880	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	107,387,100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	34,839,943,436			100%	35,536,742,305	
1 02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 transaksi	34,592,083,436	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	35,283,925,105	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	247,860,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	252,817,200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	18,000,000			100%	18,360,000	
1 02 01	2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka penatausahaan aset	2 kali	18,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kali	18,360,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	48,600,000			100%	49,572,000	
1 02 01	2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah rakor/monev yang dilakukan untuk penatausahaan kepegawaian	8 kali	48,600,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	8 kali	49,572,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	583,650,000			100%	595,323,000	
1 02 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	234,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	2 paket	238,680,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	67,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	12 paket	68,850,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	38,250,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	12 paket	39,015,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	36,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	12 paket	36,720,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	120 kali 4 kali	207,900,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 kali 4 kali	212,058,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	4,148,925,840			100%	4,231,904,357	
1 02 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 transaksi	971,244,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	12 transaksi	990,668,880	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	3,177,681,840	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	12 transaksi	3,241,235,477	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	4,437,000,000			100%	4,525,740,000	
1 02 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	1500 liter 20 kali 90 transaksi	351,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1500 liter 20 kali 90 transaksi	358,020,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	10 unit	36,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	10 unit	36,720,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	2 paket	4,050,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	2 paket	4,131,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKI per 100.000 KH (target : kurang dari)	94.6	34,789,138,531			94.6	35,641,839,420	
		AKB per 1.000 KH (target : kurang dari)	4.22				4.22		
		Prevalensi stunting balita	18.4				16		
		Jumlah indikator Tatanan Kota Sehat yang terverifikasi	3				4		
		Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk	183.5				183.5		
		Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Mellitus per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun	183.5				183.5		
		Persentase kelurahan UCI	≥ 95				≥ 96		
		Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	6				6		
		Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)	6				6		
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial	90				90		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) pelayanan kesehatan sesuai standar	90%	5,293,143,488				5,356,000,000	
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	2 paket	730,665,723	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket	733,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah paket obat/kefarmasian yang diadakan	3 paket	1,906,030,397	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 paket	1,915,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket BHP (kefarmasian) yang diadakan	2 paket	2,464,647,368	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket	2,490,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan pemeliharaan IPAL dalam kondisi baik	6 UPT	91,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 UPT	93,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT pelayanan kesehatan yang membutuhkan pemeliharaan alkes/aldok/alat lab dalam kondisi baik	6 UPT	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 UPT	125,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	29,173,255,659			100	29,956,641,961	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100				100		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100				100		
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100				100		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100				100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
		Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100				100						
		Prevalensi wasting balita	7.5				7.3						
		Persentase kelurahan yang masyarakatnya sudah berperilaku STBM	33				44						
		Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan standar	100				100						
		Angka kesakitan penemuan penyakit Hipertensi per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun	320				360						
		Persentase Baduta mendapat Imunisasi Lanjutan	≥ 95				≥ 96						
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan UKM dan UKP rujukan	6				6						
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	prosentase ibu hamil resiko tinggi yang ditangani oleh tenaga kesehatan	20 %	157,976,339	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 %	170,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	prosentase pelayanan komplikasi kebidanan tertangani	80 %	34,975,648	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 %	35,975,648	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	prosentase pelayanan neonatal dengan komplikasi tertangani	80 %	6,666,184	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 %	6,661,847	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	prosentase pelayanan bayi paripurna	98 %	8,475,726	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	98 %	8,575,726	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan PKPR	6 puskesmas	95,201,775	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 puskesmas	96,201,775	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	528,644,262	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	570,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan santun lansia	6 puskesmas	401,679,004	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 puskesmas	402,679,004	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan yankes sesuai standar	100 %	628,290,783	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	650,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	665,780,643	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	679,096,255	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	166,891,788	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	189,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan standar	100 %	255,088,900	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	353,173,635	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko HIV mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar	100 %	516,952,505	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	527,291,555	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk usia < 15 th Persentase Penyelidikan Epidemiologi yang dilakukan < 24 jam kasus berpotensi KLB	2 orang 100 %	26,160,594	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 orang 100 %	27,160,594	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	cakupan balita kurus yang mendapat makanan tambahan cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat asi eksklusif cakupan ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	85 % 50 % 80 %	144,570,434	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85 % 50 % 80 %	145,570,434	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	prosentase jemaah haji yang diperiksa kebugaran prosentase pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok olahraga prosentase pengukuran kebugaran bagi anak sekolah dasar yang berumur 12 s/d 14 tahun prosentase Pos UKK yang terbentuk prosentase puskesmas dengan kesehatan kerja dasar prosentase puskesmas dengan kesehatan kerja	86 % 38 % 34 % 90 % 100 % 100 %	66,328,700	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	86 % 38 % 34 % 90 % 100 % 100 %	67,328,700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	prosentase akses air bersih prosentase KK yang akses ODF prosentase rumah sehat prosentase tempat pengolahan makanan (TPM) sehat prosentase TTU prioritas yang memenuhi syarat	92 % 99.3 % 76 % 71 % 65 %	792,762,245	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92 % 99.3 % 76 % 71 % 65 %	793,762,245	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan RS dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Jumlah Frekuensi Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) dan intervensinya Jumlah frekuensi pembinaan dan pengawasan pada penyehat tradisional (HATRA) Jumlah griya sehat di Kota Mojokerto Jumlah puskesmas melaksanakan program pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan standar Prosentase kelurahan yang memiliki ASMAN TOGA	6 dokumen 4 kali 2 kali 1 griya sehat 6 puskesmas 50 % 10 %	53,124,115	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 dokumen 4 kali 2 kali 1 griya sehat 6 puskesmas 50 % 10 %	55,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS Jumlah Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Jumlah PSC di Kota Mojokerto Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan penilaian (Validasi) aplikasi RS Online (SIRS) sesuai dengan standar Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan penilaian (Validasi) ASPAK Rumah Sakit sesuai dengan standar Kemenkes RI Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Mutu Pelayanan Rumah	5 dokumen 4 kali 0 PSC 6 RS 5 RS 6 RS	3,071,299,629	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 dokumen 4 kali 0 PSC 6 RS 5 RS 6 RS	3,132,725,621	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Bebas Jentik Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD	90 % 100 %	576,692,229	Kota Mojokerto, Kranggan,	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90 % 100 %	649,066,847	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan Jumlah FKTP Puskesmas yang melayani peserta yang tercover Asuransi Jaminan Kesehatan (UHC) Jumlah Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program JKN Jumlah Frekuensi Pembinaan FKTP dan FKTL yang melayani peserta yang tercover Asuransi Jaminan Kesehatan (UHC) Jumlah Penambahan Kuota Peserta Jaminan Kesehatan PBID (PBP dan BP Pemda) Jumlah penduduk yang tercover asuransi jaminan kesehatan dengan kepesertaan PBID (universal health coverage)	12 bulan 6 puskesmas 6 kali 4 kali 1000 jiwa 55000 jiwa	20,643,408,897	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 6 puskesmas 6 kali 4 kali 1000 jiwa 55000 jiwa	21,056,277,075	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah buku profil kesehatan yang disusun Jumlah data SPM yang divalidasi	1 buku 12 indikator	6,365,023	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 buku 12 indikator	6,492,800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah rapat koordinasi pengelola SIK Jumlah rapat penguatan internal pengelola SIK	2 kali 12 kali	182,350,064	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kali 12 kali	185,999,189	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi online	17 titik	134,024,297	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 titik	136,705,470	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/FT pada Jajaran Dinas Kesehatan Presentase fasyankes yang memenuhi standar SDM kesehatan	100% 100%	624,962,782	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan		100% 100%	646,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase tenaga kesehatan memiliki ijin praktik	96.20%	64,306,120	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96.20%	66,500,000	
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Prosentase tenaga kesehatan memiliki ijin praktik	96 %	64,306,120	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96 %	66,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	100%	285,084,891	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	289,000,000	
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen manajemen sumber daya manusia kesehatan yang tersusun	4 dokumen	31,298,439	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	32,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Fasyankes memberikan pelayanan kemitraan spesialisik dan dokter umum	7 fasyankes	247,322,530	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 fasyankes	250,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pembinaan jafbung di puskesmas dan labkesda	7 kali	6,463,922	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 kali	7,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kota	2 orang	275,571,771			2 orang	290,500,000	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nakes yang mengikuti peningkatan kompetensi nakes	35 nakes	275,571,771	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 nakes	290,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar	60%	378,458,364			60%	380,400,000	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Prosentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina untuk memenuhi tandar dan ketentuan	50%	24,791,272			50%	25,000,000	
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang dibina untuk memenuhi standar dan ketentuan	20 sarana	11,895,669	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 sarana	12,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen penyediaan dan pengelolaan Data perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	1 dokumen	12,895,603	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	13,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 sertifikat	38,279,697			1 sertifikat	38,400,000	
1 02 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Prosentase sarana distribusi alkes dan PKRT yang dibina dan memenuhi standar ketentuan	50 %	38,279,697	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 %	38,400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan	20 sertifikat	147,652,608			20 sertifikat	148,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana PIRT yang memenuhi persyaratan	70 %	147,652,608	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 %	148,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Prosentase rumah tangga yang bebas bahan berbahaya	50%	33,559,592			50%	34,000,000		
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sarana TPM yang memenuhi persyaratan	45 %	33,559,592	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 %	34,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga	30 sarana	134,175,195			30 sarana	135,000,000		
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Sarana Distribusi Makmin yang di SIDAK oleh TKP2MOI	40 lokasi	56,774,195	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 lokasi	57,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 04 2.06 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Reagen Kit untuk Mutu Makmin yang diadakan	1 paket	77,401,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	78,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	AKI per 100.000 KH AKB per 1.000 KH Prevalensi stunting balita Prosentase kelurahan dengan upaya pemberdayaan masyarakat	< 94.60 (2 ibu) < 4.22 (9 bayi) 18.4 100%	770,572,327			< 94.60 (2 ibu) < 4.22 (9 bayi) 18.4 100%	777,572,326		
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)	87%	410,463,843			87%	415,463,843		
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	prosentase institusi pendidikan dikaji PHBS yang memenuhi klasifikasi 4 prosentase pembinaan dan pengukuran tingkat perkembangan UKBM prosentase rumah tangga sehat yang dikaji PHBS	75 % 95 % 60 %	410,463,843	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75 % 95 % 60 %	415,463,843	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase program yang dilakukan upaya promotif	80%	360,108,484			80%	362,108,483		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	jumlah media penyuluhan promosi kesehatan	5 media	360,108,484	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 media	362,108,483	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK			1,564,811,574					1,601,227,802	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal untuk membangun kesadaran tentang kependudukan	5 sekolah	158,964,712			5 sekolah	162,144,005		
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan propinsi dalam rangka pengendalian penduduk	75%	67,288,446			75%	68,634,214		
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan	Jumlah buku materi SSK yang tersedia Jumlah SMP dan SD yang mendapat orientasi tentang sekolah siaga kependudukan	4 jenis buku 40 sekolah	21,908,750	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 jenis buku 40 sekolah	22,346,925	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 14 02 2.01 10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan Yang Terbentuk Jumlah SSK paripurna yang terbentuk	2 sekolah 1 sekolah	23,155,996	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 sekolah 1 sekolah	23,619,115	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	jumlah program / kegiatan Bangsa Kencana di kota Mojokerto yang terlaksanakan	1 kegiatan	22,223,700	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	22,668,174	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan pemetaan dan pendataan keluarga	70%	91,676,266			70%	93,509,791	
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	jumlah Buku Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tersusun	1 buku	62,570,800	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 buku	63,822,216	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Prosentase kelurahan yang dilaksanakan updating data RDK Prosentase terbentuknya rumah data paripurna	50 % 10 %	29,105,466	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 % 10 %	29,687,575	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Peningkatan Akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana	75%	844,795,278			75%	866,811,182	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase advokasi dan KIE yang diimplementasikan	100%	225,971,518			100%	235,610,947	
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBP sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE Program KKBP yang dilaksanakan	1 kegiatan	74,343,600	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	75,830,472	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	Jumlah Sarana KIE Program KIE yang tersedia	2 macam	22,909,149	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 macam	23,387,331	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBP yang dilaksanakan	4 kali	24,447,469	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 kali	30,036,418	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Rapat Koordinasi Kecamatan yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi Kelurahan yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dilaksanakan	6 kali 36 kali 5 kali	104,271,300	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 kali 36 kali 5 kali	106,356,726	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader IMP yang mendapat dukungan operasional dan aktif	100%	257,850,360			100%	263,007,367	
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang aktif dalam KIE program KKBP Prosentase Kader IMP yang mendapat dukungan operasional	175 kader 100 %	257,850,360	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	175 kader 100 %	263,007,367	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Persentase faskes termasuk jaringan dan jejaring yang terpenuhi kebutuhan alat dan obat kontrasepsinya	36% 100%	270,000,000			36% 100%	275,400,000	
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB MOW dan MOP Prosentase Peserta KB yang mengikuti Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	50 akseptor 100 %	202,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 akseptor 100 %	206,550,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Ayoman bagi peserta KB MKJP yang mengalami Komplikasi berat dan Kegagalan	12 orang	15,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 orang	15,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah monitoring ke faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	25 faskes	52,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 faskes	53,550,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Prosentase keterlibatan Instansi/Lembaga/Kelompok kegiatan dalam pelaksanaan Pembinaan dan pelayanan Ber KB	60%	90,973,400			60%	92,792,868	
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Prosentase kampung berkualitas yang mendapat dukungan operasional Prosentase Pokja Kampung Berkualitas yang aktif dalam pembinaan	100 % 65 %	90,973,400	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 % 65 %	92,792,868	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	100%	561,051,584			100%	572,272,615	
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah poktan yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga	5 poktan	561,051,584			5 poktan	572,272,615	
2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengurus dan pembina PIK - R yang mendapat pembekalan	180 orang	40,664,964	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	180 orang	41,478,263	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga yang mengikuti workshop peran orang tua / keluarga dalam penanganan pencegahan stunting Prosentase kader TRIBINA (BKB, BKR, BKL) yang mendapat pelatihan	150 orang 80 %	251,906,620	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 orang 80 %	256,944,752	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah bulan penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	12 bulan	268,480,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	273,849,600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	1,484,700,000			100%	1,520,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Biaya Operasional dan Pemeliharaan untuk mendukung Pelaksanaan Pelayanan BLUD	100 %	1,484,700,000			100 %	1,520,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan BLUD	1 puskesmas	1,484,700,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Pendapatan dari BLUD	1 puskesmas	1,520,000,000	UPT PUSKESMAS GEDONGAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKI per 100.000 KH AKB per 1.000 KH Prevalensi stunting balita Jumlah indikator Tatanan Kota Sehat yang terverifikasi Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Mellitus per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun	< 94.60 (2 ibu) < 4.22 (9 bayi) 18.4 3 indikator 183,5 (242 Kasus) 183,5 (242 Kasus)	254,940,200			< 94.60 (2 ibu) < 4.22 (9 bayi) 18.4 3 indikator 183,5 (242 Kasus) 183,5 (242 Kasus)	260,780,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Desa /Kelurahan yang mengalami kejadian Luar Biasa yang ditangani kurang dari 24 jam	100 %	0	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	0	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Prosentase Deteksi dini gangguan penglihatan melalui E-tumbling, E- chart Snellen chart dan pendengaran melalui tes suara, garpu tala pada minimal 40% penduduk	40 %	13,837,500	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 %	14,114,250	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase rumah yang bebas jentik di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun	95 %	0	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	95 %	0	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah pertemuan yang dilakukan di puskesmas guna peningkatan mutu pelayanan puskesmas	12 kali	59,952,693	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	61,151,747	UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,510,848,450				1,541,065,419	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	1,320,491,000			100%	1,346,900,820	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Biaya Operasional dan Pemeliharaan untuk mendukung Pelaksanaan Pelayanan BLUD	100 %	1,320,491,000			100 %	1,346,900,820	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Prosentase terpenuhinya biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas dan pemeliharaan gedung puskesmas	100 %	1,320,491,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Pendapatan dari BLUD	100 %	1,346,900,820	UPT PUSKESMAS MENTIKAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			190,357,450			< 94.60 (2 ibu) < 4.22 (9 bayi) 18.4 3 indikator 183,5 (242 Kasus) 183,5 (242 Kasus)	194,164,599	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Prosentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Prosentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Prevalensi wasting balita Prosentase kelurahan yang masyarakatnya sudah berperilaku STBM Prosentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan standar Angka kesakitan penemuan penyakit Hipertensi per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun Prosentase Baduta mendapat Imunisasi	100% 100% 100% 100% 100% 7.5% 33% 100% 320 (32.783 kasus) ≥ 95	190,357,450			100% 100% 100% 100% 100% 7.5% 33% 100% 320 (32.783 kasus) ≥ 95	194,164,599	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Prosentase pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %	3,056,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	3,117,120	UPT PUSKESMAS MENTIKAN
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Prosentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining	100 %	3,331,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	3,397,620	UPT PUSKESMAS MENTIKAN
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Prosentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	2,772,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	2,827,440	UPT PUSKESMAS MENTIKAN
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Prosentase ODGJ berat mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	17,548,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	17,898,960	UPT PUSKESMAS MENTIKAN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prosentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar	35 %	23,864,950	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 %	24,342,249	UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase kelurahan melakukan STBM sesuai standar	75 %	8,700,050	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75 %	10,440,060	UPT PUSKESMAS BLOOTO
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase masyarakat menerapkan PHBS	70 %	21,629,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 %	25,954,800	UPT PUSKESMAS BLOOTO
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional	Persentase penyehat tradisional mendapat pembinaan	100 %	1,368,850	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	1,642,620	UPT PUSKESMAS BLOOTO
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMJ)	Prosentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 %	2,954,100	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	3,544,920	UPT PUSKESMAS BLOOTO
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan khusus sesuai standar	100 %	7,599,200	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	9,119,040	UPT PUSKESMAS BLOOTO
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	100 %	15,016,450	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	18,019,740	UPT PUSKESMAS BLOOTO
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase kegiatan perbaikan/peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai standar	100 %	81,948,500	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	98,338,200	UPT PUSKESMAS BLOOTO
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,480,735,417				1,510,350,124	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	1,234,714,357			100%	1,259,408,644	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Biaya Operasional dan Pemeliharaan untuk mendukung Pelaksanaan Pelayanan BLUD	100 %	1,234,714,357			100 %	1,259,408,644	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhnya operasional dalam rangka pelayanan BLUD	100 %	1,234,714,357	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Pendapatan dari BLUD	100 %	1,259,408,644	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKI per 100.000 KH AKB per 1.000 KH Prevalensi stunting balita Jumlah indikator Tatanan Kota Sehat yang terverifikasi Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Mellitus per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun	< 94.60 (2 ibu) < 4.22 (9 bayi) 18.4 3 indikator 183.5 (242 Kasus) 183.5 (242 Kasus)	246,021,060			< 94.60 (2 ibu) < 4.22 (9 bayi) 18.4 3 indikator 183.5 (242 Kasus) 183.5 (242 Kasus)	250,941,480	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Prevalensi wasting balita Persentase kelurahan yang masyarakatnya sudah berperilaku STBM Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan standar Angka kesakitan penemuan penyakit Hipertensi per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun	100% 100% 100% 100% 100% 7.5% 33% 100% 320 (32.783 kasus) ≥ 95 100% 100% 100% 100% 100% 320 (32.783 kasus) ≥ 95	246,021,060			100% 100% 100% 100% 100% 7.5% 33% 100% 320 (32.783 kasus) ≥ 95	250,941,480	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PERSENTASE SISWA SD/MI KELAS 1 SAMPAI 9 MENDAPAT PENJARINGAN KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN BERKALA	100 %	849,120	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	866,102	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 15-59 TAHUN MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR	100 %	19,208,842	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	19,593,019	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 60 TAHUN KE ATAS MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR	100 %	3,398,340	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	3,466,307	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	PERSENTASE ODGJ BERAT MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR	100 %	5,744,600	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	5,859,492	UPT PUSKESMAS WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERCULOSIS SESUAI STANDAR	100 %	7,099,170	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	7,241,153	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	PERSENTASE ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV MENDAPATKAN PEMERIKSAAN HIV SESUAI STANDAR	100 %	1,441,350	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	1,470,177	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	PERSENTASE MASYARAKAT MENDAPAT Pelayanan KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA SESUAI STANDAR	35 %	11,454,300	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 %	11,683,386	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	PERSENTASE KELURAHAN MELAKSANAKAN STBM SESUAI STANDAR	100 %	29,797,902	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	30,393,860	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN PHBS SESUAI STANDAR	20 %	79,741,376	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 %	81,336,204	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional	PERSENTASE PENYEHAT TRADISIONAL MENDAPAT PEMBINAAN OLEH PETUGAS	50 %	12,864,620	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	50 %	13,121,912	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PERSENTASE KELUARGA RAWAN YANG MENDAPAT KUNJUNGAN SESUAI STANDAR	100 %	3,199,170	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	3,263,153	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR SESUAI STANDAR	100 %	4,324,050	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	4,410,531	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			3,494,600				3,564,492	UPT PUSKESMAS WATES
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Prosentase bulan terselenggaranya kegiatan dan rapat / koordinasi untuk mendukung operasional	100 %	63,403,620	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	64,671,692	UPT PUSKESMAS WATES
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			972,721,652				992,175,885		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKI per 100.000 KH AKB per 1.000 KH Prevalensi stunting balita Jumlah indikator Tatanan Kota Sehat yang terverifikasi Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Mellitus per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun	< 94.60 (2 ibu) < 4.22 (9 bayi) 18.4 3 indikator 183,5 (242 Kasus) 183,5 (242 Kasus)	972,721,652			< 94.60 (2 ibu) < 4.22 (9 bayi) 18.4 3 indikator 183,5 (242 Kasus) 183,5 (242 Kasus)	992,175,885	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Prevalensi wasting balita Persentase kelurahan yang masyarakatnya sudah berperilaku STBM Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan standar Angka kesakitan penemuan penyakit Hipertensi per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun Persentase Baduta mendapat Imunisasi	100% 100% 100% 100% 100% 7.5% 33% 100% 320 (32.783 kasus) ≥ 95 100% 100% 100% 100% 100% 7.5% 33% 100% 320 (32.783 kasus) ≥ 95	972,721,652			100% 100% 100% 100% 100% 7.5% 33% 100% 320 (32.783 kasus) ≥ 95	992,175,885	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	prosentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %	27,760,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	28,315,000	UPT PUSKESMAS KRANGGAN
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	prosentase deteksi dini faktor resiko PTM usia > 15 tahun	80 %	1,862,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 %	1,899,240	UPT PUSKESMAS KRANGGAN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	prosentase masyarakat yang mendapat pelayanan gizi masyarakat sesuai standart	100 %	26,400,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	26,928,000	UPT PUSKESMAS KRANGGAN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	prosentase kesehatan kerja dan olahraga pada sektor formal dan informal sesuai standart	80 %	7,204,900	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 %	7,348,998	UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	prosentase kelurahan yang melakukan STBM	80 %	16,259,800	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 %	16,584,996	UPT PUSKESMAS KRANGGAN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	prosentase masyarakat yang menerapkan PHBS	70 %	3,264,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 %	3,329,280	UPT PUSKESMAS KRANGGAN
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional	prosentase penyehat tradisional yang mendapat pembinaan	100 %	9,346,800	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	9,533,736	UPT PUSKESMAS KRANGGAN
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	prosentase terlaksananya kegiatan usaha kesehatan masyarakat pengembangan	80 %	5,464,500	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 %	5,573,790	UPT PUSKESMAS KRANGGAN
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	prosentase terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat terkait penyakit	100 %	4,548,500	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	4,639,470	UPT PUSKESMAS KRANGGAN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah bulan pelaksanaan operasional puskesmas	12 bulan	870,611,152	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	888,023,375	UPT PUSKESMAS KRANGGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			78,399,065				89,000,000		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			78,399,065				89,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	AKI per 100.000 KH < 94,60 (2 ibu) AKB per 1.000 KH < 4,22 (9 bayi) Prevalensi stunting balita Jumlah indikator Tatanan Kota Sehat yang terverifikasi Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Mellitus per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi) Persentase kelurahan UCI	< 94,60 (2 ibu) < 4,22 (9 bayi) 18,4 3 indikator 183,5 (242 Kasus) 183,5 (242 Kasus) 6 puskesmas 6 RS ≥ 95	78,399,065				89,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Prevalensi wasting balita Persentase kelurahan yang masyarakatnya sudah berperilaku STBM Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan standar Angka kesakitan penemuan penyakit Hipertensi per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun Persentase Baduta mendapat Imunisasi	100% 100% 100% 100% 7,5% 33% 100% 320 (32.783 kasus) ≥ 95 6 puskesmas	78,399,065				89,000,000	
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional pengelolaan obat dan bmkhp sesuai standar berdasarkan perencanaan	100 %	78,399,065	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	89,000,000	UPT GUDANG FARMASI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,314,996,308				1,341,296,233		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,314,996,308				1,341,296,233		
		AKI per 100.000 KH < 94,60 (2 ibu) AKB per 1.000 KH < 4,22 (9 bayi) Prevalensi stunting balita Jumlah indikator Tatanan Kota Sehat yang terverifikasi Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Mellitus per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun	< 94,60 (2 ibu) < 4,22 (9 bayi) 18,4 3 indikator 183,5 (242 Kasus) 183,5 (242 Kasus)					< 94,60 (2 ibu) < 4,22 (9 bayi) 18,4 3 indikator 183,5 (242 Kasus) 183,5 (242 Kasus)	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) pelayanan kesehatan sesuai standar	90%	1,017,582,403				1,037,934,050	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN			143,363,755,440				119,850,079,593		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	10,227,797,014			100%	10,432,352,800	
1 03 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	10 dokumen	25,000,000			10 dokumen	25,500,000	
1 03 01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	15,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 dokumen	15,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	4 dokumen	10,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	10,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	7,107,233,014			100%	7,249,377,800	
1 03 01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	6,887,233,014	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	7,024,977,800	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelola keuangan yang dibayarkan	12 bulan	210,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	214,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	10,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	10,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pajak barang milik daerah yang dibayarkan	1 transaksi	20,000,000			1 transaksi	20,400,000	
1 03 01	2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pajak barang milik daerah yang dibayarkan	1 transaksi	20,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 transaksi	20,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian dinas	100%	200,000,000			100%	204,000,000	
1 03 01	2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	77 stel	200,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	77 stel	204,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	1,273,000,000			100%	1,298,460,000	
1 03 01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didirikan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 paket	20,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 paket	20,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	25 paket	25,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 paket	25,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang diadakan	10 paket	5,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 paket	5,100,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	20 paket	200,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 paket	204,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	20 paket	46,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 paket	46,920,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan yang diadakan	10 paket	37,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 paket	37,740,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	120 kali	30,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 kali	30,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diadakan	100 kali 24 kali	910,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 kali 24 kali	928,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	242,000,000			100%	246,840,000	
1 03 01	2.07 05 Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang diadakan	10 paket	42,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 paket	42,840,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01	2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diadakan	10 unit	200,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 unit	204,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	855,564,000			100%	872,675,000	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan	12 bulan	200,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	204,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	655,564,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	668,675,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	505,000,000			100%	515,100,000	
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang diadakan Jumlah servis dan suku cadang kendaraan dinas yang diadakan Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	12500 liter 6 kendaraan 15 kendaraan	235,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12500 liter 6 kendaraan 15 kendaraan	239,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	10,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 unit	10,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	25 unit	60,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 unit	61,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 gedung	200,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 gedung	204,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase bangunan pengaman SDA dalam kondisi baik	100%	400,000,000			100%	400,000,000	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pintu air, stasiun pompa, rehabilitasi pintu air, rehabilitasi stasiun pompa dalam kondisi baik	23 unit	400,000,000			23 unit	400,000,000	
1 03 02 2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air yang dibangun	1 buah	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 buah	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 02 2.01 13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa yang dibangun	1 buah	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 buah	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 02 2.01 26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air yang dipelihara	2 buah	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 buah	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 02 2.01 28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa yang dipelihara	2 buah	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 buah	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	80 %	1,625,000,000			80 %	1,950,000,000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pembangunan spam jaringan perpipaan	80 %	1,625,000,000			80 %	1,950,000,000	
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR Air Minum yang tersambung Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	175 SR 100 prosentase	1,625,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	175 SR 100 prosentase	1,950,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	90 %	4,973,750,500			90 %	5,968,500,600	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100%	4,973,750,500			100%	5,968,500,600	
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan	2 dokumen	248,750,500	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	298,500,600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 05 2.01 03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah IPAL yang dibangun Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	15 unit 100 prosentase	4,725,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 unit 100 prosentase	5,670,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penurunan luaswilayah rawan genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)	100%	40,887,897,514				100%	41,631,078,865	
1 03 06	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan luaswilayah rawan genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)	100%	40,887,897,514				100%	41,631,078,865	
1 03 06	2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	proporsi panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	9 km	34,142,467,841	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 km	34,825,317,198	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 06	2.01 07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran yg direhabilitasi	11 km	3,728,829,968	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 km	3,728,829,968	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 06	2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah honorarium tenaga non ASN yang dibayar tepat waktu	12 bulan	3,016,599,705	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	3,076,931,699	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik dalam kondisibaik.	86.90 %	38,521,615,796				86.95 %	39,292,048,112	
1 03 09	2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas publik dalam kondisibaik.	86.90 %	38,521,615,796				86.95 %	39,292,048,112	
1 03 09	2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah fasilitas publik yang dibangun/ditingkatkan	5 gedung	38,521,615,796	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 gedung	39,292,048,112	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi mantap.	91.60%	45,452,694,616				91.70%	18,875,599,216	
1 03 10	2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kota dalam kondisi mantap.	30 km	45,452,694,616				30 km	18,875,599,216	
1 03 10	2.01 05 Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan	7 Km	29,941,339,099	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Km	3,054,016,588	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 10	2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dipelihara	15 km	9,377,250,629	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 km	9,564,795,642	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 10	2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan	jumlah peralatan dan alat berat yang dipelihara	11 unit	2,874,427,873	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 unit	2,931,916,430	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 10	2.01 12 Pembangunan Jembatan	jumlah jembatan yang dibangun/ditingkatkan	4 jembatan	2,772,356,475	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 jembatan	2,827,803,605	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 10	2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	jumlah jembatan yang dipelihara	24 jembatan	487,320,540	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 jembatan	497,066,951	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase terselesainya pembinaan pelatihan tenaga trampil konstruksi	100%	450,000,000				100%	459,000,000	
1 03 11	2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi.	60 orang	350,000,000				80 orang	357,000,000	
1 03 11	2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	jumlah penyedia jasa konstruksi yang dilatih	60 orang	350,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 orang	357,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 11	2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi tenaga kerja dan badan usaha yang disusun	1 dokumen	100,000,000				1 dokumen	102,000,000	
1 03 11	2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah dokumen informasi tenaga kerja dan badan usaha yang disusun	1 dokumen	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	102,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase tersusunnya dokumen tata ruang	100%	825,000,000				100%	841,500,000	
1 03 12	2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan tata ruang yang disusun	2 dokumen	575,000,000				2 dokumen	586,500,000	
1 03 12	2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang (review RDTR) yang disusun	1 dokumen	500,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	510,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12	2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen peraturan walikota yang disusun	1 dokumen	75,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	76,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12	2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	1 dokumen	250,000,000				1 dokumen	255,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang (RTBL) yang disusun	1 dokumen	250,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	255,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN				7,675,000,000				9,210,000,000	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase pengembangan perumahan	100%	600,000,000			100%	720,000,000	
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Pemeliharaan Rusunawa	1 unit rusunawa	600,000,000			1 unit rusunawa	720,000,000	
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Honorarium Tenaga Non AS yang dibayarkan tepat waktu Jumlah Gedung dan Sarana prasarana Rusunawa yang dipelihara	12 bulan 1 unit	600,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 1 unit	720,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang tertangani	100%	3,275,000,000			100%	3,930,000,000	
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang di rehabilitasi	136 unit	3,275,000,000			136 unit	3,930,000,000	
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	35 unit	3,275,000,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 unit	3,930,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum	100%	3,800,000,000			100%	4,560,000,000	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU perumahan		3,800,000,000				4,560,000,000	
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Sarpras dan Utilitas di Perumahan yang tersedia	22 unit	3,550,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22 unit	4,260,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah data Prasarana dan Sarana di Perumahan yang tersedia	1 data	250,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 data	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			165,255,000				198,306,000	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	80,255,000			100%	96,306,000	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi penyelesaian tanah garapan	3 perkara	80,255,000			3 perkara	96,306,000	
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah yg ditangani	3 perkara	80,255,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 perkara	96,306,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase penatagunaan tanah	50%	85,000,000			50%	102,000,000	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penatagunaan tanah	50%	85,000,000			50%	102,000,000	
2 10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lahan Yang Diadakan	2800 m2	85,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2800 m2	102,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TOTAL				151,204,010,440				129,258,385,593	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN				14,062,885,000						
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	12,435,399,000			14,344,133,260				
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100%	4,000,000		4,080,000				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	4,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	4,080,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	7,592,763,000			7,744,618,260			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	12 Transaksi	7,469,303,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	7,618,689,060	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 Transaksi	119,160,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	121,543,200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	4,300,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,386,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	150,000,000			153,000,000			
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	209 Potong	150,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	209 Potong	153,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	117,672,000			120,025,000			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	2,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	2,040,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	15 Paket	20,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Paket	20,400,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 Paket	3,500,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Paket	3,570,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	12,500,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	12,750,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	2 Paket	3,672,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	3,745,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	105 Kali 24 Kali	76,000,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105 Kali 24 Kali	77,520,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	4,179,200,000			4,262,784,000			
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon listrik air dan internet	12 Transaksi	54,200,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	55,284,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 Transaksi	4,125,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	4,207,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dengan baik	100%	391,764,000			399,599,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	10910 Liter 18 Unit 18 Transaksi	252,014,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10910 Liter 18 Unit 18 Transaksi	257,054,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	20 Unit	12,250,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	12,495,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara	750 m2	127,500,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	750 m2	130,050,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	100 %	1,156,643,000			100 %	1,179,768,000	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	509,243,000			100 %	519,420,000	
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Operasi Gabungan Penyakit Masyarakat Dalam Menciptakan Trantibmas	30 Kali	209,532,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Kali	213,720,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Petugas Linmas yang dibina tentang Pengamanan Lingkungan	216 Orang	18,472,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	216 Orang	18,841,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Bintek/Binsik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	12 Kali	28,798,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Kali	29,370,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Aparat Tim koordinasi pengendali dan Tim pelaksana Ketenteraman dan Ketertiban terpadu dalam rangka menciptakan Trantibmas yang honorariumnya dibayar tepat waktu	12 transaksi	230,441,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	235,049,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peralatan kerja penyelenggara trantib yang tersedia	23 Unit	22,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23 Unit	22,440,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengamanan dan Pengendalian Ketertiban Berdasarkan Perda dan Perwali	102 Hari	647,400,000			102 Hari	660,348,000	
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengamanan dan Pengendalian Ketertiban Berdasarkan Perda dan Perkada Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	36 Kali 5500 Orang	647,400,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Kali 5500 Orang	660,348,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	100	470,843,000			100	480,259,000	
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	240,450,000			100	245,259,000	
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	75,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	76,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	165,450,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	168,759,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	230,393,000			100	235,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penganggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%	75,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	76,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang 50 Orang	80,393,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang 50 Orang	82,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%	75,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	76,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN			402,760,000					410,815,000
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100 %	402,760,000					410,815,000
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	402,760,000					410,815,000
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang di Rawat dan Dipelihara	5 unit	202,960,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 unit	207,019,000	UPT PEMADAM KEBAKARAN
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase (%) Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Jumlah transaksi honor tunjangan petugas kebakaran dan non kebakaran yang dibayarkan Respon Time Rate Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	100% 12 transaksi 14 Menit	199,800,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100% 12 transaksi 14 Menit	203,796,000	UPT PEMADAM KEBAKARAN
TOTAL				14,465,645,000					14,754,948,260

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1 06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				27,615,949,607			
1 06 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,127,978,146			
			Persentase Penyediaan Keuangan Daerah	100%				100%	7,127,978,146	
1 06 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		83,964,055	100%	83,964,055	
1 06 01	2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (LKJIP, LPPD, PK, Renstra, Renja, Renja Perubahan, SOP)	6 dokumen	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 dokumen	28,964,055	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Aplikasi inovasi yang telah dibuat Jumlah dokumen profil yang telah disusun	1 aplikasi 1 dokumen	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 aplikasi 1 dokumen	55,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%			100%	5,102,117,711	
1 06 01	2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	4,886,611,447	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.02 02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	207,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan (Neaca, CALK,LRA, RKA,RKA-P,DPA,DPA-P)	5 dokumen	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 dokumen	8,506,264	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%			100%	89,665,500	
1 06 01	2.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaian khusus (batik/pakaian khas daerah)	45 Orang	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45 Orang	89,665,500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum	100%			100%	533,820,200	
1 06 01	2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik , peralatan instalasi listrik, komponen listrik dan elektronik	9 macam	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 macam	16,878,800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	46 macam	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	46 macam	31,287,700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	30 macam	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 macam	85,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, dan penggandaan yang tersedia	10 macam	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 macam	25,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 macam	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 macam	25,653,700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas rapat koordinasi , konsultasi ke luar daerah	12 bulan 12 bulan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 12 bulan	350,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100%	63,703,200	
1 06 01	2.07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	4 paket	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	63,703,200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100%	434,742,480	
1 06 01	2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	104,372,480	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01	2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan, petugas keamanan, sopir kantor Jumlah jasa kebersihan, petugas keamanan, sopir kantor yang terbayarkan honorariumnya	12 bulan 9 orang	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 9 orang	330,370,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	100%	819,965,000				100%	819,965,000	
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan yang telah dipelihara dan perijinannya	9 unit	190,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 unit	190,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang telah diperbaiki	5 jenis	19,965,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 jenis	19,965,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana prasarana daerah	3 gedung	610,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 gedung	610,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial	100%	612,780,000				100%	612,780,000	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100%	612,780,000				100%	612,780,000	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan PSM yang dilaksanakan	7 kegiatan	276,310,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 kegiatan	276,310,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Jumlah anggota TKSK yang aktif	3 orang	76,260,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 orang	76,260,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan KT yang dilaksanakan Jumlah PSKS yang aktif melakukan kegiatan jejaring pelaku usaha kesejahteraan sosial	3 kegiatan 40 orang	210,210,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan 40 orang	210,210,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang telah diberikan pelatihan	20 orang	50,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	50,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terlayani sesuai SOP Presentasi PMKS yang direhabilitasi	100% 100%	3,093,590,100				100% 100%	3,093,590,100	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti	100%	595,005,100				100%	595,005,100	
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Bulan pelaksanaan operasional Jumlah bulan pelayanan dan operasional rumah aman/shelter dan jumlah klien yang ditangani selama 12 bulan Jumlah penyediaan alat	12 bulan 40 klien 31 orang	370,204,900	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 bulan 40 klien 31 orang	370,204,900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS dan Tuna Sosial Lainnya yang mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial	316 orang	196,145,300	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		316 orang	196,145,300	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang mendapatkan rehabilitasi dan dikirim ke UPT	15 orang	28,654,900	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 orang	28,654,900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS	100%	2,498,585,000				100%	2,498,585,000	
1 06 04 2.02 04	Penyediaan Sandang	Jumlah bulan pelaksanaan operasional rumah peduli lansia dan jumlah pmks yang telah mendapat	12 bulan	2,145,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2,145,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang telah dibina mental, spiritual dan yang telah mendapat bantuan sosial	1095 orang	353,585,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1095 orang	353,585,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	5,375,127,000				100%	5,375,127,000	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data kemiskinan dan pengelolannya	100%	5,375,127,000				100%	5,375,127,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data PMKS, dan Data Kemiskinan Lainnya Jumlah PMKS yang telah mendapatkan monitoring dan evaluasi pada saat sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan sosial (fasilitasi PKH)	2 dokumen 2000 orang	525,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen 2000 orang	525,800,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pengelolaan sumber dana sosial, (Umdian Berhadiah/UGB), advokasibagi PMKS, Perlindungan dan Jaminan Sosial & Pengadaan sarana prasarana bantuan Usaha Ekonomi Produktif Jumlah Rumah Tangga Miskin yang menjadi penerima manfaat untuk program sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/Rastra/Raskin)	3 kegiatan 2500 kk	4,849,327,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 kegiatan 2500 kk	4,849,327,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%	10,906,494,137			100%	10,906,494,137	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam/ sosial	100%	10,164,834,137			100%	10,164,834,137	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya	12 kelurahan	10,164,834,137	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kelurahan	10,164,834,137	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan	100%	741,660,000			100%	741,660,000	
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah bulan tali asih anggota KSB yang terbayarkan Jumlah kegiatan kampung siaga bencana yang dilaksanakan	12 bulan 12 kegiatan	217,900,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 12 kegiatan	217,900,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah bulan pelaksanaan operasional pengiriman tenaga TAGANA Jumlah Petugas TAGANA yang mumpuni	12 bulan 36 orang	523,760,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 36 orang	523,760,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	499,980,224			100%	499,980,224	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional	100%	499,980,224			100%	499,980,224	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa pemeliharaan kebersihan TMP yang terbayarkan honorariumnya Jumlah Kegiatan Kepahlawanan yang dilaksanakan	9 orang 3 kegiatan	499,980,224	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 orang 3 kegiatan	499,980,224	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2 08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN		1,641,952,000				1,641,952,000	
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100%	741,952,000			100%	741,952,000	
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota	100%	200,000,000			100%	200,000,000	
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang strategi PUG	1 dokumen	200,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	200,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota	100%	70,000,000			100%	70,000,000	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi / Workshop yang dilaksanakan	6 kali 4 kali	70,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 kali 4 kali	70,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	100%	471,952,000			100%	471,952,000	
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan PERWOSI yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan PKK yang dilaksanakan Jumlah Sumber Daya Manusia yang telah diberikan pelatihan	3 kegiatan 11 kegiatan 60 orang	471,952,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 kegiatan 11 kegiatan 60 orang	471,952,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan perlindungan perempuan	100%	325,000,000			100%	325,000,000	
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	100%	225,000,000			100%	225,000,000	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pendampingan korban KDRT, TPPO, dan Pornografi Jumlah sekolah yang menjadi sasaran roadshow pencegahan kekerasan Jumlah talkshow tentang pencegahan kekerasan melalui radio	100 % 20 Sekolah 6 kali	225,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 % 20 Sekolah 6 kali	225,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota	100%	100,000,000			100%	100,000,000	
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pendampingan korban KDRT, TPPO, dan Pornografi Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan anggota P2T2A	100 % 4 kali	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 % 4 kali	100,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	1	175,000,000			1	175,000,000	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Persentase pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kab/kota	100%	175,000,000			100%	175,000,000	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Pembangunan Manusia Berbasis Gender	1 dokumen	175,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	175,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%	400,000,000			100%	400,000,000	
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	100%	400,000,000			100%	400,000,000	
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan dunia usaha yang berpartisipasi	4 kelompok	400,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 kelompok	400,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TOTAL				29,257,901,607				29,257,901,607	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			6,878,250,000				6,884,250,000	
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang dipelihara/ dimanfaatkan dengan baik	100%	6,473,250,000				6,479,250,000	
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Dilaksanakan	100%	4,200,000				4,200,000	
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 Dok	2,200,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dok	2,200,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kaporan capaian kinerja SKPD yang disusun	4 Dok	2,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dok	2,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase capaian kinerja DKPP	100%	5,142,250,000				5,143,250,000	
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang terbayarkan tepat waktu	450 Org	5,000,750,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450 Org	5,000,750,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelola keuangan yang dibayarkan	12 Transaksi	140,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Transaksi	141,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	4 Dok	1,500,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dok	1,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	100%	100,000,000				100,000,000	
2 09 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	200 Potong	100,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Potong	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100%	298,000,000				298,000,000	
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	6,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Paket	6,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket ATK yang disediakan	12 Paket	29,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	29,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	40,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	40,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	16,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Paket	16,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 Paket	13,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	13,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	34 kali	14,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34 kali	14,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	36 kali 30 kali	180,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36 kali 30 kali	180,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	100%	60,000,000				65,000,000	
2 09 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	8 Unit	60,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Unit	65,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	100%	610,800,000				610,800,000	
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, Listrik, Air dan Internet	48 Transaksi	140,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48 Transaksi	140,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	192 Transaksi	470,800,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	192 Transaksi	470,800,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan PD	100%	258,000,000				258,000,000	
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah service kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	4000 Liter 14 kali 31 Transaksi	86,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4000 Liter 14 kali 31 Transaksi	86,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	26 Unit	22,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26 Unit	22,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	3 Paket	150,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Paket	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	80%	245,000,000				80%	245,000,000	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase pemanfaatan lahan pekarangan	80%	115,000,000				80%	115,000,000	
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Dokumen PPH Ketersediaan Jumlah peserta Bimtek budidaya Toga Jumlah peserta Bimtek kampung sayur	1 Dok 100 Org 30 Org	90,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dok 100 Org 30 Org	90,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah sambang KWT yang dilaksanakan	25 Kali	25,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Kali	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Konsumsi pangan asupan gizi perkapita/tahun	90%	130,000,000				90%	130,000,000	
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Festival yang diikuti Jumlah peserta pelatihan olahan hasil pertanian dan B2SA	4 Event 115 Org	130,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Event 115 Org	130,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Data Informasi Pangan	85%	80,000,000				85%	80,000,000	
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan yang disusun	1 dokumen	80,000,000				1 dokumen	80,000,000	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan beras Jumlah dokumen peta kerawanan pangan yang disusun	4 Ton 1 Dok	80,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Ton 1 Dok	80,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sampel aman pangan	66%	80,000,000				66%	80,000,000	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan sampling produk aman pangan	10 lokasi	80,000,000				10 lokasi	80,000,000	
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah honor Tim Satgas Ketahanan Pangan Jumlah Monitoring pangan segar yang dilaksanakan	78 Org 3 Kali	80,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78 Org 3 Kali	80,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			160,000,000				160,000,000		
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi ikan Persentase peningkatan jumlah anggota Pokdakan	3 % 3 %	160,000,000				3 % 3 %	160,000,000	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air Tawar	90%	160,000,000				90%	160,000,000	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN yang dilatih dalam berbudidaya ikan air tawar	40 Org	60,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Org	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah bibit ikan yang dibudidayakan di kolam Demplot Jumlah POKDAKAN yang dilatih dalam budidaya Lobster Air tawar	1 Demplot 40 Org	100,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Demplot 40 Org	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			844,500,000				844,500,000		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	90%	553,500,000				90%	553,500,000	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Petani yang mendapatkan sarana pertanian	25 POKTAN	553,500,000				25 POKTAN	553,500,000	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah petani yang mendapatkan sarana pertanian	25 Poktan	553,500,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Poktan	553,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sarana yang digunakan	90%	51,000,000			90%	51,000,000	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang digunakan	44 Unit	51,000,000			44 Unit	51,000,000	
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah eremuan yang diselenggarakan	12 Kali	51,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Kali	51,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kasus penyakit hewan yang ditangani Persentase peningkatan produksi daging dari 8 jenis	80 % 3 %	240,000,000			80 % 3 %	240,000,000	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa medik veteriner jumlah produksi daging dari 8 jenis	90 % 2.200.000 kg	160,000,000			90 % 2.200.000 kg	160,000,000	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kandang percontohan yang terbangun Jumlah pembinaan kesehatan hewan yang dilaksanakan Jumlah pengadaan obat-obatan UPT Puskesmas Jumlah pengadaan unggas untuk percontohan Jumlah Vaksinasi hewan yang dilaksanakan	4 Unit 48 Kali 1 Paket 20 Ekor 2 kegiatan	160,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit 48 Kali 1 Paket 20 Ekor 2 kegiatan	160,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknik kesehatan masyarakat veteriner	90%	80,000,000			90%	80,000,000	
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kegiatan pembinaan pemotongan hewan kurban Jumlah pembinaan unit usaha hewan dan produk hewan Jumlah sampel bahan asal hewan yang di uji	1 Kegiatan 12 Kali 110 Sampel	80,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Kegiatan 12 Kali 110 Sampel	80,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
TOTAL				7,882,750,000				7,888,750,000	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	11							22,499,220,026	
2	11	01						14,093,650,144	
2	11	01	2.01					2,611,636	
2	11	01	2.01	01				2,611,636	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02					10,881,937,637	
2	11	01	2.02	01				10,633,627,557	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	02				245,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	05				2,710,080	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05					281,881,869	
2	11	01	2.05	02				81,881,869	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05	09				200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06					312,399,842	
2	11	01	2.06	01				5,589,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	02				24,725,816	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	04				4,942,702	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	05				52,196,252	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	06				13,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	09				211,445,472	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07					119,802,069	
2	11	01	2.07	10				119,802,069	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08					1,444,896,101	
2	11	01	2.08	01				412,925,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	02				110,377,411	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihan yang dibayarkan tepat waktu	12 kegiatan	921,593,290	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kegiatan	921,593,290	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	100%	1,050,120,990			100%	1,050,120,990	
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah transaksi pembayaran BBM, administrasi kendaraan operasional dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas	28 transaksi	922,702,140	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 transaksi	922,702,140	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	9 kegiatan	18,315,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 kegiatan	18,315,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 paket	109,103,850	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket	109,103,850	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air	81,64 50,12	280,662,692			81,73 50,18	280,662,692	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air	81,64 50,12	280,662,692			81,73 50,18	280,662,692	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik pantau pengujian limbah padat dan limbah cair Jumlah titik pantau pengujian udara emisi dan ambient	55 titik 8 titik	136,662,692	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55 titik 8 titik	136,662,692	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah lingkungan yang masuk dalam kategori proklamasi pratama	1 RW	144,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 RW	144,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	27,16	2,482,204,191			27,17	2,482,204,191	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lahan	27,16	2,482,204,191			27,17	2,482,204,191	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kegiatan pemeliharaan taman	12 kegiatan	2,482,204,191	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kegiatan	2,482,204,191	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia	100 %	153,847,320			100 %	153,847,320	
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia	100 %	153,847,320			100 %	153,847,320	
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jenis dokumen lingkungan yang tersedia	2 dokumen	153,847,320	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	153,847,320	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yg memenuhi kriteria Adiwiyata	100 %	297,000,000			100 %	297,000,000	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sekolah yg memenuhi kriteria Adiwiyata	100 %	297,000,000			100 %	297,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan pendampingan lingkungan hidup	3 kegiatan	297,000,000				3 kegiatan	297,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengaduan yang tertangani	100 %	44,831,120				100 %	44,831,120	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Prosentase pengaduan yang tertangani	100 %	44,831,120				100 %	44,831,120	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	dokumen pengaduan fisik lingkungan hidup	4 pengaduan	44,831,120	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 pengaduan	44,831,120	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang dikelola	97,85%	5,147,024,559				97,96%	5,147,024,559	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Prosentase sampah yang dikelola	97,85%	5,147,024,559				97,96%	5,147,024,559	
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan sampah TPA Jumlah pemeliharaan sarana prasarana TPA	6 paket 2 kegiatan	411,911,999	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 paket 2 kegiatan	411,911,999	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader berseri yang terlatih dalam pengelolaan persampahan Jumlah transaksi pembayaran tenaga kebersihan dan persampahan sebanyak 135 orang yang tepat waktu	60 orang 12 transaksi	3,994,900,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 orang 12 transaksi	3,994,900,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana	60 kegiatan	740,212,560	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 kegiatan	740,212,560	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL				22,499,220,026					22,499,220,026	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI				5,256,865,773	5,832,684,721					
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketersediaan administrasi perkantoran	90%	3,939,346,778		90%	4,333,318,486				
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja tepat waktu	100%	94,610,916	100%	104,072,008				
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8 dokumen	5,610,916	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 dokumen	6,172,008	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pegawai aparatur Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen 4 dokumen	89,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen 4 dokumen	97,900,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	2,700,669,267		100%	2,970,773,194			
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	24 transaksi	2,566,239,387	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 transaksi	2,822,863,326	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	133,416,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	146,757,600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	2 dokumen	1,013,880	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	1,152,268	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah ketersediaan seragam kerja kantor	33 potong	53,053,882				33 potong	58,359,300	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	33 potong	53,053,882	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 potong	58,359,300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan perkantoran yang tersedia	85%	340,237,668				85%	374,261,435	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	4,368,150	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	4,804,965	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	47 paket	53,660,524	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47 paket	59,026,576	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	7,473,695	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 paket	8,221,065	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 paket	90,154,379	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 paket	99,169,817	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60 paket	9,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 paket	9,900,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	200 kali 24 kali	175,580,920	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 kali 24 kali	193,139,012	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan sarana kerja yang memadai	1 unit	348,002,417				1 unit	382,802,658	
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	1 unit	27,252,054	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	29,977,259	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah ketersediaan komputer kantor dan jaringan jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang di sediakan	4 unit 1 unit	320,750,363	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 unit 1 unit	352,825,399	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah belanja operasional kantor yang terbayar tepat waktu	12 bulan	311,506,920				12 bulan	342,657,612	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	5940 jam	243,378,120	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5940 jam	267,715,932	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	36 transaksi	35,128,800	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 transaksi	38,641,680	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	24 transaksi	33,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 transaksi	36,300,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah sarana kerja yang layak	49 unit	91,265,708				49 unit	100,392,279	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	2340 liter 4 kali 1 transaksi	39,135,342	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2340 liter 4 kali 1 transaksi	43,048,876	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang memadai	48 unit	52,130,366	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 unit	57,343,403	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0,98 98%	611,655,505				0,98 98%	672,821,056	
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan	100 % 7500 dokumen	611,655,505				100 % 7500 dokumen	672,821,056	
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi	5000 dokumen	529,364,975	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5000 dokumen	582,301,473	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah wajib KTP pemula yang terekam	1000 orang	82,290,530	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 orang	90,519,583	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah Rasio Bayi berakte kelahiran Cakupan penerbitan akte kelahiran	0,91 1 100%	195,837,524				0,91 1 100%	215,421,276	
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang terfasilitasi Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang terfasilitasi	100% 3000 dokumen	195,837,524				100% 3000 dokumen	215,421,276	
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang terfasilitasi	1500 dokumen	157,245,630	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1500 dokumen	172,970,193	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah percepatan penerbitan akta pencatatan sipil melalui inovasi pelayanan	500 dokumen	38,591,894	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 dokumen	42,451,083	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	prosentase OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	70% 100%	163,046,970				70% 100%	193,364,400	
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih dan Inovasi Pelayanan Adminduk	85%	25,569,300				85%	26,080,600	
2 12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD Yang Melakukan Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	32 OPD	25,569,300	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 OPD	26,080,600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyediaan Informasi Pelayanan Publik	85%	126,261,670				85%	155,843,800	
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Pada Kelurahan dan OPD	12 kali	37,150,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 kali	37,893,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	jumlah media penyediaan informasi pelayanan adminduk	4 media	89,111,670	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 media	117,950,800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase pemanfaatan data	100%	11,216,000				100%	11,440,000	
2 12 04 2.04 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan OPD Pengguna Hak Akses	32 OPD	11,216,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 OPD	11,440,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase profil data kependudukan	100%	346,978,996				100%	417,759,503	
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	penyediaan hak akses OPD	85%	346,978,996				85%	417,759,503	
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Jumlah Penyediaan Data kependudukan Online Jumlah Personil Penyedia Data Kependudukan Online	2 macam 1 macam 2 orang	267,906,148	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 macam 1 macam 2 orang	337,105,303	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	jumlah profil kependudukan	2 macam	79,072,848	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 macam	80,654,200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TOTAL				5,256,865,773				5,832,684,721		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : **DINAS PERHUBUNGAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15			15,711,372,369				16,267,065,953			
2	15	01		7,721,618,248				7,852,118,248			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran belanja perangkat daerah	97%			97%			
				Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%			100%			
				Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%			100%			
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun	100%	3,655,364	100%	3,655,364		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	13 dokumen	2,881,364	13 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun	8 dokumen	774,000	8 dokumen	774,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	100%	5,096,991,084	100%	5,106,991,084	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	24 transaksi	4,916,991,084	24 transaksi	4,916,991,084	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	175,000,000	12 transaksi	185,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	3 dokumen	5,000,000	3 dokumen	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	136,000,000	100%	150,000,000	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	255 potong	136,000,000	255 potong	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi	100%	609,000,000	100%	669,000,000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	17,000,000	12 paket	18,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	12 paket	25,000,000	12 paket	26,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	8,000,000	12 paket	9,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	35,000,000	12 paket	38,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengerjaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	173,000,000	13 paket	185,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	46,000,000	12 paket	48,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	200 kali 36 kali	305,000,000	200 kali 36 kali	345,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	300,750,000	100%	296,150,000	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel kantor	2 paket	84,600,000	2 paket	80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	19 unit	216,150,000	19 unit	216,150,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	1,067,600,000	100%	1,069,600,000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 transaksi	170,000,000	12 transaksi	172,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	897,600,000	12 transaksi	897,600,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	507,621,800	100%	556,721,800	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	4500 liter 14 kali 14 transaksi	119,312,800	4500 liter 14 kali 14 transaksi	119,312,800	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	65 unit	39,809,000	65 unit	39,809,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	3 paket	348,500,000	3 paket	397,600,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase layanan angkutan darat Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis Rasio ijin trayek	96.43 0.00049 98.31 32% 80% 20% 5% 32% 32% 100% 0.0003	7,989,754,121			96.43 0.00049 98.31 32% 80% 20% 5% 32% 32% 100% 0.0003	8,414,947,705		
2 15 02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi di bidang LLAJ yang dilaksanakan	23 kegiatan	485,000,000			23 kegiatan	485,000,000	
2 15 02	2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lalu lintas yang disusun	3 dokumen	300,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	2.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan	20 kali	185,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri		20 kali	185,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah eksisting sarana dan prasarana perlengkapan jalan terpasang	5365 titik	2,445,858,000			5365 titik	2,553,254,000	
2 15 02	2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang terpasang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Jumlah titik yang terpasang cermin tikungan Jumlah titik yang terpasang pagar pengaman jalan Jumlah titik yang terpasang penerangan jalan umum (PJU) Jumlah titik yang terpasang rambu-rambu lalu lintas	3 titik 17 titik 1 titik 20 titik 104 titik	805,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri		3 titik 17 titik 1 titik 20 titik 104 titik	865,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah sarana dan prasarana angkutan jalan	1 unit 25 unit	61,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri		1 unit 25 unit	61,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang berfungsi	88.38 %	1,579,858,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	88.38 %	1,627,254,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik pelayanan parkir yang tertib	96 titik	1,691,935,700			96 titik	1,726,535,700	
2 15 02	2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah petugas parkir (jukir) di tepi jalan umum Jumlah titik pelayanan parkir di tepi jalan umum	144 orang 96 titik	1,691,935,700	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	144 orang 96 titik	1,726,535,700	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan orang/barang yang diberi pelayanan pengujian dan pelayanan pengadministrasian	4150 kendaraan	492,308,800			4150 kendaraan	615,386,100	
2 15 02	2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan orang/barang yang diuji Jumlah uji kir angkutan umum	4075 kendaraan 562 kendaraan	316,073,200	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4075 kendaraan 562 kendaraan	395,091,600	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor dan alat pendukung yang terkalibrasi	15 unit	176,235,600	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 unit	220,294,500	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian LLAJ	357 kali	999,651,621			357 kali	1,034,771,905	
2 15 02	2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan keselamatan LLAJ Jumlah penertiban LLAJ yang dilaksanakan Jumlah pengawasan LLAJ yang dilaksanakan Jumlah titik penertiban LLAJ Jumlah titik pengawasan LLAJ	900 orang 22 kali 317 kali 8 titik 106 titik	999,651,621	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	900 orang 22 kali 317 kali 8 titik 106 titik	1,034,771,905	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sheet pelayanan Angkutan Sekolah Gratis	130,980 seat	1,875,000,000			130,980 seat	2,000,000,000	
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah Layanan angkutan sekolah gratis Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	1800647 penumpang g 9200 kali 1800647 orang 1800647 orang	1,875,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1800647 penumpang g 9200 kali 1800647 orang 1800647 orang	2,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
TOTAL				15,711,372,369				16,267,065,953	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN						13,200,402,661				
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	8,586,563,923			9,213,648,922				
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	10,000,000		10,000,000				
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renja, Renstra, RKA, RKAP, Renja P, RKA, RKAP, Renja P)	5 Dokumen	5,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan (CALK, DPA, DPAP, LKJIP)	4 Dokumen	5,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	4,890,584,152			100%	5,370,257,547		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	12 Bulan	4,702,883,752	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	5,173,172,127	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan Honorarium pengelola keuangan yang dibayarkan tepat waktu	100 Persen	187,700,400	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	197,085,420	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	102,645,660			100%	104,698,573		
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	75 potong	102,645,660	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75 potong	104,698,573	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	589,325,678			100%	601,112,192		
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 macam	5,096,938	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 macam	5,198,877	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	83 macam	22,805,435	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83 macam	23,261,544	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 macam	5,301,960	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 macam	5,407,999	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 macam	9,945,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 macam	10,143,900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman untuk tamu kunjungan	12 bulan	7,135,364	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	7,278,071	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dapat difasilitasi	12 bulan	539,040,981	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	549,821,801	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	1,725,817,454			100%	1,760,333,803		
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan	6 macam	62,746,320	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 macam	64,001,246	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan	7 macam	1,663,071,134	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 macam	1,696,332,557	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	1,144,834,627			100%	1,241,423,328		
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pembayaran rekening telepon, listrik dan internet (daring) yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	223,684,524	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	228,158,215	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah kegiatan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	3 kegiatan	921,150,103	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 kegiatan	1,013,265,113	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	123,356,352			100%	125,823,479		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional dan pajak kendaraan yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan	12 bulan	106,986,372	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	109,126,099	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan peralatan kerja yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan	12 bulan	16,369,980	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	16,697,380	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	4,862,184,783			87	215,839,519		
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	4,862,184,783			100%	215,839,519		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 16 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Pengaduan yang di tindak lanjuti Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk PPID	250 kali 28 unit kerja	145,435,116	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250 kali 28 unit kerja	159,978,627	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan media branding Kota Mojokerto	12 bulan	400,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan		0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kegiatan Pemerintah Kota yang diberitakan melalui media massa	12 bulan	2,950,967,038	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan		0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Kegiatan dialog Pemerintah kota Mojokerto dengan masyarakat	12 bulan	200,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan		0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Fasilitas komunikasi digital yang terlayani	12 bulan	600,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan		0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan KIM yang di fasilitasi Jumlah Pengguna Layanan Telecenter Palapa yang di fasilitasi	2 kali 6000 pengguna	50,782,629	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kali 6000 pengguna	55,860,892	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 09	Manajemen Komunikasi Krisis	Terpenuhinya pelayanan komunikasi dan informasi dalam kondisi krisis	100 %	200,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %		0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Sumber Daya Manusia dalam bidang komunikasi publik yang mengikuti diklat	10 orang	65,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 orang		0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kerjasama dengan pengelola media sosial	12 bulan	100,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan		0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Alat kerja pendukung komunikasi dan informasi yang tersedia	12 bulan	150,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan		0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	3,4	3,428,103,837			3,5	3,770,914,220	
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD/Unit Kerja yang menggunakan layanan Internet Gratis dari Dinas Kominfo	100%	3,428,103,837			100%	3,770,914,220	
2 16 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Rencana Induk TIK dan SPBE	1 dokumen	317,522,327	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	349,274,560	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Prosentase alokasi server untuk sistem informasi dan pelayanan publik OPD Pemerintah Kota Mojokerto yang menjadi tanggung jawab Diskominfo Kota Mojokerto	100 Persen	459,072,349	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	504,979,583	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pemerintahan Daerah dan perangkat daerah yang dibangun/dikembangkan kan oleh Diskominfo Kota Mojokerto	7 macam aplikasi	428,958,762	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 macam aplikasi	471,854,638	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Ketersediaan titik hotspot internet untuk masyarakat dan jaringan internet untuk semua OPD	204 titik	2,222,550,399	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	204 titik	2,444,805,439	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			458,302,287				572,877,858	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	458,302,287			87	572,877,858	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data statistik sesuai kebutuhan	80%	458,302,287			90%	572,877,858	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data statistik yang dihimpun	4 dokumen	363,626,787	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 dokumen	454,533,483	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20 02 2.01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah pengelola data statistik yang bersertifikat	7 orang	52,175,500	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 orang	65,219,375	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah unit kerja yang mengelola data statistik sektoral terintegrasi	53 unit kerja	42,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53 unit kerja	53,125,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			210,382,387				231,420,625	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks SPBE	3,4	210,382,387			3,5	231,420,625	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengamanan informasi dan jaringan	80%	210,382,387			80%	231,420,625	
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Analisa Keamanan System Informasi pada Perangkat Daerah	100 %	144,698,747	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	159,168,621	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah	35 OPD	65,683,640	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 OPD	72,252,004	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TOTAL				17,545,537,217				14,004,701,144	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,		3,650,628,000			3,650,628,000					
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan ketentuan perundang-undangan	73%	237,583,000			73%	237,583,000			
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM koperasi, LKM yang mengikuti pelatihan dan koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya	78%	237,583,000			78%	237,583,000		
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi, LKM yang mengikuti pelatihan dan koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya	300 orang	237,583,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300 orang	237,583,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	80%	100,000,000			80%	100,000,000		
2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan KSP/USP koperasi yang sehat, citra dan kredibilitas dalam pengelolaan koperasi.	25%	100,000,000			25%	100,000,000		
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai peraturan perundang - undangan	50 koperasi	35,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 koperasi	35,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan KSP/USP koperasi yang sehat dan sesuai peraturan perundang - undangan	100 koperasi	65,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 koperasi	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan omzet koperasi	17.50%	482,379,000			17.50%	482,379,000		
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Fasilitas Pendirian Badan Hukum Koperasi	70%	482,379,000			70%	482,379,000		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan tata kelola manajemen koperasi	100 orang	482,379,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 orang	482,379,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan omzet usaha koperasi	17.50%	545,666,000			17.50%	545,666,000		
2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi	65%	545,666,000			65%	545,666,000		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi Jumlah SDM koperasi yang mendapat Pelatihan Ketrampilan	200 orang 150 orang	545,666,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 orang 150 orang	545,666,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan produktivitas usaha mikro	3%	935,000,000			3%	935,000,000		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pemberdayaannya	880 usaha mikro	935,000,000			880 usaha mikro	935,000,000	
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah updating database UMKM	500 UMKM	50,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 UMKM	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pembiayaannya Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan manajemen keuangan Jumlah usaha mikro yang difasilitasi sarana dan prasarananya	150 usaha mikro 200 usaha mikro 149 usaha mikro	85,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 usaha mikro 200 usaha mikro 149 usaha mikro	85,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan usaha	30 usaha mikro	800,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 usaha mikro	800,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan usaha mikro	12%	1,350,000,000			12%	1,350,000,000	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan	1120 usaha mikro	1,350,000,000			1120 usaha mikro	1,350,000,000	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksinya	1120 usaha mikro	1,350,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1120 usaha mikro	1,350,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	17,266,073,600			100%	17,266,073,600
3 30 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	25,000,000			100%	25,000,000	
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 dokumen	17,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 dokumen	17,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	8,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 dokumen	8,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	100%	7,685,900,000			100%	7,685,900,000	
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 transaksi	7,450,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 transaksi	7,450,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	235,900,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 transaksi	235,900,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian	100%	191,600,000			100%	191,600,000	
3 30 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	71 potong	156,600,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	71 potong	156,600,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	35,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 orang	35,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran	100%	1,613,500,000			100%	1,613,500,000	
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	12 paket	111,300,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 paket	111,300,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	4,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 paket	4,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	313,100,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 paket	313,100,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	190,200,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 paket	190,200,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	22,900,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 paket	22,900,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 kali	68,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 kali	68,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	24 kali 12 kali	904,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 kali 12 kali	904,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1,150,000,000			100%	1,150,000,000	
3 30 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	2 unit	575,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 unit	575,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel kantor	120 unit	105,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120 unit	105,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	23 unit	470,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23 unit	470,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran	100%	3,599,873,600			100%	3,599,873,600	
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 transaksi	950,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 transaksi	950,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	2,649,873,600		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 transaksi	2,649,873,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	100%	3,000,200,000			100%	3,000,200,000	
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas	10 unit 6000 liter 12 kali	150,200,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 unit 6000 liter 12 kali	150,200,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	15 unit	100,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 unit	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan (pengerukan walet) Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 paket 1 paket	2,750,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket 1 paket	2,750,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi pedagang	100%	4,900,000,000			100%	4,900,000,000	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pembangunan sarana dan prasarana pasar	100%	4,800,000,000			100%	4,800,000,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah prasarana perdagangan yang dibangun/renovasi	1 paket	4,750,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	4,750,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta sosialisasi Transaksi Digital	50 pedagang	50,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 pedagang	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	85%	100,000,000			85%	100,000,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta pembinaan usaha pedagang Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	50 orang 50 orang	100,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 orang 50 orang	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok	100%	220,000,000			100%	220,000,000	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pedagang dan gudang penyimpanan barang pokok yang dipantau	100%	160,000,000			100%	160,000,000	
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pedagang barang pokok dan penting yang di monitoring	4 kali	100,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 kali	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah gudang penyimpanan barang pokok dan penting yang dipantau	4 kali	60,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 kali	60,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	80%	60,000,000			80%	60,000,000	
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan Operasi Pasar Jumlah penyelenggaraan Pasar Murah	4 kali 1 kali	60,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 kali 1 kali	60,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omzet penjualan para pedagang/ perusahaan Kota Mojokerto	15%	100,000,000			15%	100,000,000	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah	Prosentase mengikuti temu dagang bagi perdagangan antar pulau	90%	100,000,000			90%	100,000,000	
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah peserta fasilitasi Temu Bisnis (Misi Dagang)	50 orang	50,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 orang	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 05 2.01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah peserta pembinaan/pelatihan perdagangan	5 kali	50,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 kali	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	85%	1,220,552,200			85%	1,220,552,200	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat metrologi yang sesuai dengan standart	100%	1,220,552,200			100%	1,220,552,200	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan operasional tera/tera ulang alat UTPP	3 kecamatan	100,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 kecamatan	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah kalibrasi alat metrologi Jumlah peserta sosialisasi metrologi Jumlah kendaraan metrologi Jumlah peralatan metrologi (Lab)	1 paket 300 orang 1 unit 1 paket	1,120,552,200		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket 300 orang 1 unit 1 paket	1,120,552,200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan omset usaha mikro	9.35%	1,079,000,000			9.35%	1,079,000,000	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penyediaan informasi data perdagangan	80%	1,079,000,000			80%	1,079,000,000	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah promosi usaha mikro	7 kali	865,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 kali	865,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran usaha mikro	415 usaha mikro	200,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	415 usaha mikro	200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Up dating data perdagangan	1 dokumen	14,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	14,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3,400,000,000				3,400,000,000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	18%	2,675,000,000			18%	2,675,000,000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi IKM	40%	2,675,000,000			40%	2,675,000,000	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta Bussines Matching bagi IKM Kota Mojokerto Jumlah produk IKM yang dikemas ulang/repacking Jumlah dokumen kajian (Kajian Pengembangan Industri di Wilayah Kota Mojokerto)	50 orang 25 produk 1 dokumen	525,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 orang 25 produk 1 dokumen	525,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah gedung yang direnovasi Jumlah peserta fasilitasi pendampingan Manajemen Marketing bagi IKM Kota Mojokerto Jumlah peserta pelatihan pengembangan desain kemasan bagi IKM Kota Mojokerto Jumlah peserta penerapan teknologi industri bagi IKM Kota Mojokerto (Digital Marketing bagi IKM Kota Mojokerto) Jumlah produk yang diikuti penguatan produk unggulan IKM Kota	1 paket 40 orang 30 orang 100 orang 30 produk	1,600,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket 40 orang 30 orang 100 orang 30 produk	1,600,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta peningkatan ketrampilan IKM Industri Kreatif (Alas Kaki, Batik, Mamin dan Kerajinan/Craft) Jumlah peserta peningkatan ketrampilan Kewirausahaan/ Industri Kreatif Mojobatik festival	100 orang 100 orang 1 kegiatan	475,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 orang 100 orang 1 kegiatan	475,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 02 2.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Kajian akademisi evaluasi pelaksanaan Perda RPIK	1 dokumen	75,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang telah menerapkan standarisasi produk	80%	375,000,000			80%	375,000,000	
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang telah menerapkan standarisasi produk	80%	375,000,000			80%	375,000,000	
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi perizinan Jumlah IKM yang mendapat pendampingan standarisasi produk	30 IKM 30 IKM	200,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 IKM 30 IKM	200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan koordinas Jumlah peserta sosialisasi tentang IUI	1 kegiatan 30 IKM	175,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 kegiatan 30 IKM	175,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang difasilitasi dalam e-commerce	83%	350,000,000			83%	350,000,000	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	83%	350,000,000			83%	350,000,000	
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data yang di update Jumlah data yang divalidasi	1 kegiatan 1 dokumen	175,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 kegiatan 1 dokumen	175,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah aplikasi yang di upgrade Jumlah penyusunan Profil Industri	1 kegiatan 1 kegiatan	175,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 kegiatan 1 kegiatan	175,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TOTAL				31,836,253,800				31,836,253,800	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2 07				767,652,153				790,681,717		
2 07 03				528,476,538				544,330,834		
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan tenaga kerja yang produktif	45%	528,476,538				30%	544,330,834	
2 07 03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi	40 orang	528,476,538			40 orang	544,330,834	
2 07 03	2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berdasarkan Kompetensi	288 orang	528,476,538	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	288 orang	544,330,834	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 07 04				103,090,515				98.35%	106,183,230	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	97.95%	103,090,515				98.35%	106,183,230	
2 07 04	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	350 orang	103,090,515			350 orang	106,183,230	
2 07 04	2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	350 orang	103,090,515	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350 orang	106,183,230	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 07 05				136,085,100				80%	140,167,653	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang tertangani	80%	136,085,100				80%	140,167,653	
2 07 05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesama dengan perjanjian Bersama	10 kasus	136,085,100			10 kasus	140,167,653	
2 07 05	2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi ketenagakerjaan Jumlah dokumen rekomendasi upah minimum Kota Mojokerto Jumlah Kasus perselisihan yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan	1 dokumen 1 dokumen 12 kasus	136,085,100	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen 1 dokumen 12 kasus	140,167,653	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18				11,553,892,390				12,057,984,985		
2 18 01				10,299,118,899				10,612,968,291		
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP Nilai SAKIP	Memadai BB					Memadai A		
2 18 01	2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	13,959,050			100%	14,377,822	
2 18 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja	10 dokumen	10,734,300	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 dokumen	11,056,329	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	3 dokumen	3,224,750	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	3,321,493	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	5,521,681,492			100%	5,687,331,937	
2 18 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 transaksi	5,353,626,292	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	5,514,235,081	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi pembayaran honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	168,055,200	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	173,096,856	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	94,287,722			100%	100,649,492	
2 18 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	190 potong	50,473,418	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	190 potong	55,520,759	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	35 orang	43,814,304	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 orang	45,128,733	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	1,043,785,162			100%	1,076,441,403	
2 18 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	19,181,243	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	21,099,367	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	12 paket	89,366,566	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	92,047,563	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	52,438,379	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 paket	54,011,531	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	152,910,067	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	157,497,369	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	12,397,215	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	12,769,131	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah umlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	450 kali 9 kali	717,491,692	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450 kali 9 kali	739,016,442	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	478,598,485			100%	492,956,439	
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel kantor	1 paket	200,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	3 unit	48,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 unit	49,955,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	7 unit	230,098,485	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 unit	243,001,439	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	2,582,023,826			100%	2,659,484,541	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	36 transaksi	993,271,826	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 transaksi	1,023,069,981	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	1,588,752,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	1,636,414,560	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	564,783,162			100%	581,726,657	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	5100 liter 36 kali 5 transaksi	121,892,040	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5100 liter 36 kali 5 transaksi	125,548,801	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	164 unit	29,550,420	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	164 unit	30,436,933	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi i gedung kantor	1 paket	413,340,702	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	425,740,923	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	2	168,902,072			2	326,569,134	
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kebijakan daerah pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang tersedia	25%	0			25%	150,000,000	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Raperda pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang tersusun	1 dokumen	0	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi potensi investasi	100%	168,902,072			100%	176,569,134	
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM daerah Kab/ Kota	1 dokumen	80,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	85,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen updating pengembangan potensi investasi	1 dokumen	88,902,072	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	91,569,134	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	10%	292,500,000			15%	301,275,000	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pameran promosi penanaman modal yang diikuti	100%	292,500,000			100%	301,275,000	
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi Promosi PM yang dikembangkan Jumlah peserta Duta investasi yang dikirimkan	1 aplikasi 2 orang	112,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 aplikasi 2 orang	115,875,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi secara online dan offline yang diikuti	2 kegiatan	180,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	185,400,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM	84.5	499,708,591			85	514,699,847	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kasus perizinan yang diselesaikan sesuai SOP Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu	95% 90%	499,708,591			95% 90%	514,699,847	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi perizinan yang dikembangkan	1 aplikasi	88,576,626	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 aplikasi	91,233,925	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah permohonan yang diproses	260 objek ijin	277,226,545	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	260 objek ijin	285,543,340	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penanganan masalah perizinan yang ditangani	16 kali	86,925,420	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 kali	89,533,182	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Asesatif Daerah	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	10 kali	46,980,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 kali	48,389,400	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terantau di tingkat Kabupaten/Kota	365 Milyar	232,000,000			370 Milyar	238,960,000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kenaikan jumlah masyarakat/pengusahaan yang memahami tentang penanaman modal Prosentase jumlah laporan penanaman modal yang tersampaikan secara tepat waktu	100% 100%	232,000,000			100% 100%	238,960,000	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan penanaman modal yang disajikan	12 laporan	81,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	83,430,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Masyarakat dan pengusaha yang mendapat pemahaman dan asistensi tentang Penanaman Modal	100 masyarakat/pengusaha	18,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 masyarakat/pengusaha	18,540,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dimonev	50 perusahaan	133,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 perusahaan	136,990,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	100 %	61,662,828			100 %	63,512,713	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Persentase Tersesainya data dan informasi yang terintegrasi	100 %	61,662,828			100 %	63,512,713	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah dokumen perizinan yang terdigitalisasi	20000 lembar	61,662,828	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20000 lembar	63,512,713	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
TOTAL				12,321,544,543				12,848,666,702	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif			
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN				15,752,180,955				
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	6,592,180,955		100%	6,592,180,955		
2	19	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	2 Dokumen	4,346,955	2 Dokumen	4,346,955		
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	4,346,955	2 Dokumen	4,346,955	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah keuangan perangkat daerah yang tercukupi	12 bulan	3,344,050,000	12 bulan	3,344,050,000		
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Transaksi	3,205,828,000	12 Transaksi	3,205,828,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 Transaksi	138,222,000	12 Transaksi	138,222,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tercukupi	12 bulan	90,000,000	12 bulan	90,000,000		
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	58 Potong	90,000,000	58 Potong	90,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	12 bulan	614,900,000	12 bulan	614,900,000		
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Macam	36,900,000	13 Macam	36,900,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam ATK yang disediakan	36 Macam	20,000,000	36 Macam	20,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah macam bahan logistik kantor yang disediakan	22 Macam	148,600,000	22 Macam	148,600,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Macam	35,000,000	6 Macam	35,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan yang disediakan	12 Bulan	174,200,000	12 Bulan	174,200,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	24 Kali 36 Kali	200,200,000	24 Kali 36 Kali	200,200,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	17 Unit	250,000,000	17 Unit	250,000,000		
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	17 Unit	250,000,000	17 Unit	250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	12 bulan	1,686,884,000	12 bulan	1,686,884,000		
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Transaksi	500,000,000	12 Transaksi	500,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 Transaksi	1,186,884,000	12 Transaksi	1,186,884,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	602,000,000	12 bulan	602,000,000		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	5000 Liter 4 Kali 7 Transaksi	127,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5000 Liter 4 Kali 7 Transaksi	127,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah transaksi pemeliharaan peralatan dan mesin	24 Transaksi	75,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Transaksi	75,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara	1 Paket	400,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	400,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase OKP yang aktif	77 %	2,335,000,000				2,335,000,000	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti / diselenggarakan	4 kegiatan	2,135,000,000				2,135,000,000	
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang diikuti	1 Kegiatan	250,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kader yang dibina dan difasilitasi	40 Orang	275,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Orang	275,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah mahasiswa berprestasi yang tidak mampu dan mendapatkan beasiswa	50 Orang	620,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	620,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kegiatan Pemuda yang diikuti	2 Kegiatan	350,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	350,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta yang Lolos Seleksi dan dilatih	80 Peserta	640,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Peserta	640,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan	1 kegiatan	200,000,000				200,000,000	
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan	1 Kegiatan	200,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga		6,825,000,000				6,825,000,000	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara/dibangun	10 unit	2,885,000,000				2,885,000,000	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana olahraga yang dipelihara dan dimanfaatkan Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3 Lokasi 7 Lokasi	2,885,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Lokasi 7 Lokasi	2,885,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti/diselenggarakan	5 kegiatan	920,000,000				920,000,000	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	3 Kejuaraan	320,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Kejuaraan	320,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Kejuaraan Olahraga yang diikuti	2 Kegiatan	600,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	600,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif			
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatih yang Bersertifikat Jumlah data olahraga	52 Pelatih 3 jenis	190,000,000				52 Pelatih 3 jenis	190,000,000		
2 19 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pelatih yang Bersertifikat	52 Pelatih	140,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Pelatih	140,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03 2.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah data olahraga	3 Jenis	50,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabor yang dibina	25 cabor	2,520,000,000				25 cabor	2,520,000,000		
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabor yang dibina	25 Cabor	2,520,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			25 Cabor	2,520,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga yang diselenggarakan	5 kegiatan	310,000,000				5 kegiatan	310,000,000		
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga rekreasi	3 Kegiatan	210,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kegiatan	210,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Kejuaraan olahraga tradisional	2 Kegiatan	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	100,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3 26 02				2,705,000,000					2,705,000,000		
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pengunjung even wisata	12.000 orang	1,315,000,000				12.000 orang	1,315,000,000		
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah even wisata yang diselenggarakan	6 Kegiatan	1,190,000,000				6 Kegiatan	1,190,000,000		
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan daya tarik wisata yang dilaksanakan	6 Kegiatan	1,190,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Kegiatan	1,190,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Jumlah Pokdarwis yang dibentuk	1 Dokumen 18 kelurahan	125,000,000				1 Dokumen 18 kelurahan	125,000,000		
3 26 02 2.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan	1 Dokumen	75,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	75,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdarwis yang dibentuk	18 Kelurahan	50,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Kelurahan	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kontribusi jasa usaha pariwisata	11.000.000.000 Rupiah	920,000,000				11.000.000.000 Rupiah	920,000,000		
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	4 jenis	920,000,000				4 jenis	920,000,000		
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Promosi	2 Media	200,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Media	200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah tampilan even di luar kota	4 Even	530,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Even	530,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Aplikasi tersusun Jumlah Buku Informasi Pariwisata yang disusun	1 Aplikasi 2 Buku	90,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Aplikasi 2 Buku	90,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama pariwisata yang dilaksanakan	2 Kerjasama	100,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kerjasama	100,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	80 %	470,000,000				80 %	470,000,000		
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang bina	80%	470,000,000				80%	470,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah difasilitasi yang dilaksanakan Jumlah Duta Wisata yang dilatih Jumlah Peserta Pelatihan	12 Bulan 20 Duta Wisata 36 Orang	470,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan 20 Duta Wisata 36 Orang	470,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TOTAL				18,457,180,955				18,457,180,955	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERPUSTAKAAN	100%	5,768,756,820			6,337,437,901				
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	4,869,479,382		5,348,232,719				
2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	5,755,600		6,311,160				
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10	5,755,600	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10	6,311,160	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	3,763,765,303		4,140,141,833				
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12	3,654,729,703	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	4,020,202,673	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12	104,280,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	114,708,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5	4,755,600	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5	5,231,160	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	86,266,552		94,893,552				
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	216	68,766,552	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	216	75,643,552	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	5 Orang	17,500,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Orang	19,250,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	284,388,196		312,827,015				
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	1 Paket	1,499,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	1,648,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	12 Paket	15,859,600	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	17,445,560	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	39,502,543	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	43,452,797	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12,633,453	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	13,896,798	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 Paket	14,701,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	16,171,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang diselenggarakan	28 kali 12 kali	200,192,600	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28 kali 12 kali	220,211,860	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang disediakan	100%	160,745,443		176,819,987				
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan alat mebel	1 Paket	62,804,743		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	69,085,217	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor lainnya yang disediakan	10 Unit	97,940,700	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	107,734,770	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100%	381,401,375		419,541,513				
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12	72,485,135	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	79,733,649	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12	308,916,240	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	339,807,864	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	187,156,913		197,697,659				
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan Dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan Dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan Dinas yang dibayarkan	6589 Liter 12 Kali 11 Transaksi	92,894,546	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6589 Liter 12 Kali 11 Transaksi	102,184,001	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	60 unit	12,512,909		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 unit	13,764,200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi i gedung kantor	1 Paket	81,749,458	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	81,749,458	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	167 unit 45.000 orang 47.438 eksemplar 4 orang	851,372,278			167 unit 45.000 orang 47.438 eksemplar 4 orang	936,509,506	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	167,200,825			100%	183,920,908	
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	40 Unit	48,673,007	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Unit	53,540,308	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang disediakan Jumlah layanan nerustakaan elektronik	1000 Eksemplar 1 unit	118,527,818	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1000 Eksemplar 1 unit	130,380,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	45000 orang	684,171,453			45000 orang	752,588,598	
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah jenis layanan perpustakaan yang dilaksanakan dengan baik Jumlah lomba tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang dilaksanakan dengan baik Jumlah publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca yang dilaksanakan dengan baik	4 Jenis 1 Kegiatan 1 Kali	664,171,453	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Jenis 1 Kegiatan 1 Kali	730,588,598	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perpustakaan yang dibangun/dipelihara dengan baik	2 Unit	20,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	100%	47,905,160			100%	52,695,676	
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	1 dokumen	47,905,160			1 dokumen	52,695,676	
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah daftar naskah kuno yang tersedia dengan baik Jumlah naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik	1 Dokumen 1 Dokumen	47,905,160	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen 1 Dokumen	52,695,676	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			393,042,585				432,346,843	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola dengan baik Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Jumlah arsiparis Jumlah diklat kearsipan yang diikuti	100% 65% 4 orang 1 kali	370,800,885			100% 65% 4 orang 1 kali	407,880,973	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah instansi yang diawasi Jumlah instansi yang dilakukan Audit Kearsipan Internal	58 instansi 20 instansi	31,040,192			58 instansi 20 instansi	34,144,211	
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Instansi yang diawasi Jumlah Instansi yang dilakukan Audit Kearsipan Internal	58 Instansi 20 Instansi	31,040,192	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	58 Instansi 20 Instansi	34,144,211	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dikelola dengan baik Jumlah arsip yang diselamatkan	10.000 lembar 10.000 lembar	203,310,143			10.000 lembar 10.000 lembar	223,641,157	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang dikelola dengan baik Jumlah arsip yang diselamatkan	1000 Lembar 1000 Lembar	203,310,143	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1000 Lembar 1000 Lembar	223,641,157	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional yang dilaksanakan dengan baik Persentase kegiatan pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah yang dilaksanakan	100% 100%	136,450,550			100% 100%	150,095,605	
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui UKA	Jumlah informasi dan daftar arsip yang disediakan	5000 lembar	109,610,770	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5000 lembar	120,571,847	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Instansi yang dibina Jumlah unit kearsipan yang dilakukan supervisi pendampingan di BUMD	58 Instansi 1 BUMD	26,839,780	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	58 Instansi 1 BUMD	29,523,758	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase naskah sumber arsip yang disediakan dengan baik	100%	22,241,700			100%	24,465,870	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2 24 04 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah daftar arsip yang bersifat tertutup	3 Daftar	22,241,700			3 Daftar	24,465,870	
2 24 04 2.01 02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar arsip yang bersifat tertutup	3 Daftar	22,241,700	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Daftar	24,465,870	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TOTAL				6,161,799,405				6,769,784,744	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					3,069,298,084	3,130,684,041				
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%		2,089,944,935		100%	2,131,743,831			
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		1,998,764,872		100%	2,038,740,168		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan yang dibayarkan	12 transaksi	1,595,784,739	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	1,627,700,433	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	400,281,381	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	408,287,008	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4 dokumen	2,698,752	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	2,752,727	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%		39,108,779			100%	39,890,954	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	35 paket	7,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 paket	7,140,000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	20,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 paket	20,400,000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	3,772,779	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	3,848,234	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	1 paket	1,836,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	1,872,720	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 kali	3,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	3,060,000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	12 kali	3,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	3,570,000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan	100%		28,800,000			100%	29,376,000	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	28,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	29,376,000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%		23,271,284			100%	23,736,709	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	12 transaksi	18,271,284	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	18,636,709	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	10 unit	5,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 unit	5,100,000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Sangat Tinggi		979,353,149			Nilai Sangat Tinggi	998,940,210	
4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Dokumen Pelaporan disusun tepat waktu	100%		704,705,433			100%	718,799,540	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen profil kelurahan Tingkat Kota yang disusun	1 dokumen	241,488,579	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	246,318,350	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Penamaan Rupabumi alam dan buatan yang dibakukan	200 buah	90,308,568	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 buah	92,114,739	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun tepat waktu (LPPD, LKPJ, SPM)	3 dokumen	372,908,286	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	380,366,451	BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
4 01 02 2.04	Fasilitas Kerjasama Daerah	Presentase KSB yang ditindaklanjuti dengan PKS	100%	274,647,716			100%	280,140,670	
4 01 02 2.04 01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah KSB yang disusun	11 KSB	274,647,716	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 KSB	280,140,670	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				2,244,650,151			2,244,650,151	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1,767,339,246			100%	1,767,339,246	
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	4,615,000			100%	4,615,000	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Renja, Renstra, RKA dan DPA)	4 dokumen	2,874,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	2,874,000	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (LPPD, LKPJ, LKJIP) yang disusun	3 dokumen	1,741,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	1,741,000	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	1,364,662,539			100%	1,364,662,539	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 transaksi	1,282,975,904			12 transaksi	1,282,975,904	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelola keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	79,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	79,500,000	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 dokumen	2,186,635	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	2,186,635	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	192,474,545			100%	192,474,545	
4 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kelurahan Sadar Hukum yang difasilitasi	4 Kelurahan	192,474,545	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kelurahan	192,474,545	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	166,284,640			100%	166,284,640	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 tahun	4,776,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun	4,776,000	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (penanganan Covid-19)	1 tahun	23,837,200	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun	23,837,200	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 tahun	137,671,440	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun	137,671,440	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	39,302,522			100%	39,302,522	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah suku cadang yang disediakan Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang	2450 liter 3 kali 1 tahun 2 transaksi	33,302,522	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2450 liter 3 kali 1 tahun 2 transaksi	33,302,522	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	2 macam	6,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 macam	6,000,000	BAGIAN HUKUM
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	477,310,905				477,310,905	
4 01 02 2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Permasalahan Hukum yang terfasilitasi	100%	477,310,905				477,310,905	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda, Perwali dn Kepwali yang ditetapkan	428 produk	348,248,554	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	428 produk	348,248,554	BAGIAN HUKUM
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum yang diberikan (pidana/perdata/tata usaha negara)	3 perkara	64,741,820	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 perkara	64,741,820	BAGIAN HUKUM
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Perda dan Perwali yang diunggah dalam JDIH	62 prokum	64,320,531	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62 prokum	64,320,531	BAGIAN HUKUM
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				2,635,008,014			2,635,008,014	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1,754,334,243				100%	1,754,334,243	
4 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	1,699,622,280				100%	1,699,622,280	
4 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	12 Transaksi	1,353,605,280	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	1,353,605,280	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang	12 Transaksi 12 Transaksi	346,017,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi 12 Transaksi	346,017,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	14,558,272				100%	14,558,272	
4 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	12 Paket	12,722,272	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	12,722,272	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 Paket	1,836,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	1,836,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	40,153,691				100%	40,153,691	
4 01 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	2000 liter 4 kali 1 Transaksi 12 Transaksi	25,424,891	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2000 liter 4 kali 1 Transaksi 12 Transaksi	25,424,891	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	12 Unit	14,728,800	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	14,728,800	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	100%	880,673,771				100%	880,673,771	
4 01 03	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian daerah yang disusun	100%	669,030,771				100%	669,030,771	
4 01 03	2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah kebijakan terkait BUMD dan BLUD Jumlah Kebijakan Terkait BUMD dan BLUD Jumlah laporan monev BUMD dan BLUD Jumlah Laporan Monev BUMD dan BLUD Jumlah peserta sosialisasi mengerti informasi promosi BUMD Jumlah Peserta Sosialisasi Mengerti Informasi Promosi	2 kebijakan 3 Kebijakan 3 laporan 3 Laporan 150 orang 150 Orang	345,306,851	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kebijakan 3 Kebijakan 3 laporan 3 Laporan 150 orang 150 Orang	345,306,851	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 03	2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kebijakan terkait pengendalian dan distribusi perekonomian Jumlah Kebijakan Terkait Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 kebijakan 4 Kebijakan	162,617,682	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kebijakan 4 Kebijakan	162,617,682	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 03	2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Kebijakan Terkait Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Monev Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Peserta Sosialisasi Mengetahui Informasi Kebijakan Ekonomi Mikro Kecil	3 Kebijakan 2 Laporan 150 Orang	161,106,238	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari		3 Kebijakan 2 Laporan 150 Orang	161,106,238	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 03	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan sumber daya alam yang disusun	100%	211,643,000				100%	211,643,000	
4 01 03	2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah kebijakan bidang sumber daya alam Jumlah laporan monev hemat energi Jumlah peserta sosialisasi mengerti informasi jaringan gas bumi	1 kebijakan 1 laporan 300 orang	211,643,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kebijakan 1 laporan 300 orang	211,643,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				3,116,181,742				3,116,181,742	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	2,493,181,742				100%	2,493,181,742	
4 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	2,315,225,105				100%	2,315,225,105	
4 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang ddbayar tepat waktu	12 transaksi	1,863,717,105	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	1,863,717,105	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pemenuhan perjalanan dinas yang disediakan Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang	12 bulan 12 transaksi	451,508,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 12 transaksi	451,508,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	61,108,273			100%	61,108,273	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan untuk penanganan Covid-19 Jumlah paket ATK yang disediakan	6 paket 2 paket	57,508,273	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket 2 paket	57,508,273	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	3,600,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	3,600,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	54,390,909			100%	54,390,909	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	54,390,909	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	54,390,909	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	62,457,455			100%	62,457,455	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang	3360 liter 6 kali 2 transaksi	49,782,455	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3360 liter 6 kali 2 transaksi	49,782,455	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	49 unit	12,675,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 unit	12,675,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara tender	100%	623,000,000			100%	623,000,000	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan yang ditetapkan	100%	151,000,000			100%	151,000,000	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan yang ditetapkan	1 PERWALI	151,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 PERWALI	151,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara tender	100%	472,000,000			100%	472,000,000	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara tender	70 paket	203,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 paket	203,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Layanan Pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan Jumlah pengadaan barang jasa yang dilakukan secara elektronik	125 layanan 400 paket	124,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	125 layanan 400 paket	124,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pendampingan / konsultasi pengadaan barang / jasa	12 layanan	145,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 layanan	145,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH			2,486,597,482				2,486,597,482	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	2,486,597,482			100%	2,486,597,482	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	1,657,608,894			100%	1,657,608,894	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah transaksi gaji dan tunjangan yang diproses	12 transaksi	1,226,932,394	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 transaksi	1,226,932,394	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibawakan	12 transaksi	429,676,500	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	429,676,500	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	34,618,603			100%	34,618,603	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket ATK yang disediakan	1 paket	4,786,239	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	4,786,239	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket logistik kantor yang disediakan	1 paket	28,032,364	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	28,032,364	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	1,800,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	1,800,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100%	27,360,000			100%	27,360,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	27,360,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	27,360,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase bsrang milik daerah yang dipelihara	100%	31,754,727			100%	31,754,727	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	jumlah BBM kendaraan dinas yang dibayarkan jumlah servis kendaraan jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	2340 liter 4 kali 1 transaksi	25,354,727	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2340 liter 4 kali 1 transaksi	25,354,727	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	2 macam	6,400,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 macam	6,400,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), persentase unit layanan yang memiliki nilai SKM minimal baik (78), persentase LKJIP OPD yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%, 91%, 100%	735,255,258			100%, 91%, 100%	735,255,258	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah laporan Anjab dan Abk, Evjab dan SKJ jumlah perda dan perwali yang disusun	9 dokumen 2 dokumen	215,608,697	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 dokumen 2 dokumen	215,608,697	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah dokumen tata laksana jumlah pelayanan publik yang mengikuti kompetisi	3 dokumen 2 proposal	266,352,870	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen 2 proposal	266,352,870	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RB yang dilaksanakan	4 kali	73,194,133	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 kali	73,194,133	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah pelayanan publik yang dievaluasi	3 Perangkat Daerah	8,994,110	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Perangkat Daerah	8,994,110	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	jumlah LKJIP PD yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	25 PD	171,105,448	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 PD	171,105,448	BAGIAN ORGANISASI
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				16,765,386,179			16,765,386,179	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	16,765,386,179			100%	16,765,386,179	
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	4,292,182			100%	4,292,182	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen 4 dokumen	2,549,454	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen 4 dokumen	2,549,454	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 dokumen	1,742,728	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1,742,728	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	5,326,393,166			100%	5,326,393,166	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	12 transaksi	4,757,328,767	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari		12 transaksi	4,757,328,767	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	567,463,490	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	567,463,490	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 dokumen	1,600,909	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	1,600,909	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	318,540,994			100%	318,540,994	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaan	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	500 potong	282,826,785	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari		500 potong	282,826,785	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	30 orang	35,714,209	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 orang	35,714,209	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	3,251,775,561			100%	3,251,775,561	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	112,704,225	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	112,704,225	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	4 paket	200,136,236	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	200,136,236	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16 paket	350,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 paket	350,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pannondaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 paket	196,020,500	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	196,020,500	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	24 paket	115,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 paket	115,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	365 kali	912,007,400	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	365 kali	912,007,400	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	300 kali 300 kali	1,365,907,200	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 kali 300 kali	1,365,907,200	BAGIAN UMUM

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	1,912,133,788				100%	1,912,133,788	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	1 unit	650,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	650,000,000	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel kantor	5 paket	179,626,369	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 paket	179,626,369	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	50 unit	582,507,419	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 unit	582,507,419	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	500,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	500,000,000	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	2,914,223,264				100%	2,914,223,264	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 transaksi	900,356,040	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	900,356,040	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah transaksi sewa dekorasi, kursi, sound	12 transaksi	415,627,224	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	415,627,224	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	1,598,240,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	1,598,240,000	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	1,835,207,224				100%	1,835,207,224	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaran dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	18292 liter 75 kali 12 transaksi	828,161,200	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18292 liter 75 kali 12 transaksi	828,161,200	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	50 unit	115,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 unit	115,000,000	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	50 unit	81,250,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 unit	81,250,000	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	3 paket	460,796,024	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 paket	460,796,024	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	5 paket	350,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 paket	350,000,000	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100%	849,380,000				100%	849,380,000	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah transaksi Gaji dan Tunjangan KDH dan Wa KDH	12 transaksi	174,166,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	174,166,000	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan KDH dan Wakil KDH yang disediakan	2 potong	75,214,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 potong	75,214,000	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Operasional KDH/Wa KDH yang disediakan	12 kali	600,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	600,000,000	BAGIAN UMUM	
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100%	353,440,000				100%	353,440,000	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga KDH dan Waki KDH yang difasilitasi	12 kali	353,440,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	353,440,000	BAGIAN UMUM	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				4,714,076,517				4,808,358,043	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	95%	4,714,076,517				95%	4,808,358,043	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	3,090,505,376				100%	3,152,315,482	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang	12 bulan 12 transaksi	2,807,709,896	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 12 transaksi	2,863,864,093	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan, jumlah bulan pemenuhan kebutuhan biaya perjalanan	12 bulan 12 bulan	282,795,480	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 12 bulan	288,451,389	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	16,283,097				100%	16,608,758	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah paket ATK yang disediakan	1 tahun 1 paket	8,366,364	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun 1 paket	8,533,691	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	7,916,733	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	8,075,067	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	29,040,000			100%	29,620,800	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan terbayarnya honorarium pengemudi secara tepat waktu Jumlah transaksi pembayaran honor jasa	12 bulan 12 transaksi	29,040,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 12 transaksi	29,620,800	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	73,268,910			100%	74,734,288	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dina yang dipelihara secara berkala Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan, Jumlah BBM kendaran dinas yang disediakan, Jumlah servis kendaraan	1 unit 1 tahun	0	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit 1 tahun	0	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	53,468,910	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	54,538,288	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	1 tahun 20 unit	19,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun 20 unit	20,196,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah	100%	1,504,979,134			100%	1,535,078,715	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	keprotokolan persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi protokol	1 tahun 100 persen	323,642,484	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun 100 persen	330,115,333	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan persentase ketersediaan materi/bahan komunikasi pimpinan daerah	100 persen 100 persen	718,110,251	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen 100 persen	732,472,456	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	persentase kegiatan pimpinan daerah yang didokumentasikan	100 persen	463,226,399	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	472,490,926	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								11,804,666,343
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,305,726,435
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	1,168,374,157			100%	1,168,374,157	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 transaksi	1,052,842,837	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	1,052,842,837	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	115,531,320	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	115,531,320	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	56,102,040			100%	56,102,040	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	4 Paket	13,809,780	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	13,809,780	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	34,336,260		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	34,336,260	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	3 paket	7,956,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 paket	7,956,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	30,800,000			100%	30,800,000	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	30,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 transaksi	30,800,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	50,450,238			100%	50,450,238	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	12 transaksi	28,683,438	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	28,683,438	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	12 bulan	21,766,800	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	21,766,800	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100%	10,498,939,908			100%	10,498,939,908	
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	100%	10,498,939,908			100%	10,498,939,908	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Forum Keagamaan yang difasilitasi	9 kegiatan	3,750,374,908	Kota Mojokerto, Magersari, Balansari		9 kegiatan	3,750,374,908	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Proposal hibah yang diverifikasi secara benar dan tepat waktu	30 proposal	5,870,037,553	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 proposal	5,870,037,553	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	15 kegiatan	878,527,447	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 kegiatan	878,527,447	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TOTAL				46,835,864,512				46,991,531,995	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	02		SEKRETARIAT DPRD						41,289,530,001				
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	25,201,900,915			100%	20,651,392,885			
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	3,598,913,400			100%	3,774,110,710		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	12 transaksi	3,440,650,200	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	3,612,682,710	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	158,263,200	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	161,428,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	58,000,000			100%	60,000,000		
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	126 potong	58,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	126 potong	60,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	1,773,346,800			100%	1,791,771,800		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 transaksi	12,995,600	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 transaksi	12,995,600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	20 paket	94,103,700	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 paket	94,103,700	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 paket	230,664,900	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 paket	230,664,900	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	368,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	386,925,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	49,995,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	49,995,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	12 kali	1,017,087,600	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	1,017,087,600	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	4,610,000,000			100%	10,000,000		
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel kantor	2 paket	3,994,000,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	1 paket	500,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dapat dipenuhi sesuai kebutuhan	5 unit	16,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 unit	10,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan tambah daya listrik dapat dipenuhi	1 paket	100,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	327,568,000			100%	330,568,000		
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	24 transaksi	160,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 transaksi	163,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	24 transaksi	167,568,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 transaksi	167,568,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	862,543,010			100%	565,774,370		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	15600 liter 12 kali 16 transaksi	419,241,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15600 liter 12 kali 16 transaksi	419,241,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah transaksi pemeliharaan peralatan dan mesin kantor yang dibayarkan	18 transaksi	79,750,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 transaksi	79,750,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 paket	348,560,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	51,791,360	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan	2 paket	14,992,010	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket	14,992,010	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	100%	13,556,527,700			100%	13,704,166,000		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD yang diavarkan	Jumlah transaksi representasi dan tunjangan DPRD yang diavarkan	12 transaksi	13,309,166,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	13,409,166,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	125 stel	197,361,700	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	125 stel	245,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	25 orang	50,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 orang	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100%	415,002,005			100%	415,002,005	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dapat difasilitasi sesuai kebutuhan	12 kali	415,002,005	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	415,002,005	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi	100%	20,564,265,116			100%	20,638,137,116	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100%	1,881,473,000			100%	1,881,473,000	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dapat difasilitasi sesuai jadwal	2 kali	326,677,550	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kali	326,677,550	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Raperda inisiatif DPRD yang difasilitasi	3 kali	1,297,408,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 kali	1,297,408,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Penyusunan Tata Tertib DPRD yang difasilitasi sesuai kebutuhan	1 kali	257,387,450	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kali	257,387,450	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang difasilitasi	100%	510,098,750			100%	510,098,750	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	100,734,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kali	100,734,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	100,734,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kali	100,734,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	104,446,500	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kali	104,446,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah pembahasan APBD Perubahan yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	104,446,500	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kali	104,446,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	99,737,750	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kali	99,737,750	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	100%	287,313,636			100%	287,313,636	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	8 kali	11,057,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 kali	11,057,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi sesuai kebutuhan	8 kali	11,057,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 kali	11,057,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi sesuai kebutuhan	8 kali	11,057,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 kali	11,057,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	254,142,636	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kali	254,142,636	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	100%	957,069,430			100%	957,069,430	
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah peserta bimbingan teknis DPRD yang difasilitasi sesuai kebutuhan	50 orang	454,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 orang	454,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah transaksi Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang diavarkan	12 transaksi	305,069,430	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	305,069,430	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah transaksi pembayaran honor Tenaga Ahli Fraksi	12 transaksi	198,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	198,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	100%	955,932,300			100%	1,002,182,300	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dapat disampaikan tepat waktu	1 dokumen	30,932,300	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	30,932,300	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan sesuai jadwal	3 kali	925,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 kali	971,250,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi	100%	15,972,378,000			100%	16,000,000,000	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang dapat difasilitasi	33 kali	15,972,378,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 kali	16,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
			TOTAL	45,766,166,031				41,289,530,001	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5 01			PERENCANAAN						14,362,360,800	15,401,009,613
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	10,346,066,800				100%	11,140,605,688	
5 01 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun	100%	5,000,000				100%	5,000,000	
5 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	2 Dokumen	5,000,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	100%	7,989,030,000				100%	8,775,429,488	
5 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	26 Transaksi	7,833,486,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	26 Transaksi	8,616,835,488	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Transaksi Honor Pengelolaan Keuangan yang dibayarkan	12 Transaksi	152,544,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	155,594,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	100,500,000				100%	98,200,000	
5 01 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	130 Potong	50,500,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	130 Potong	48,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	42 orang	50,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42 orang	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi	100%	1,169,700,000				100%	1,193,094,000	
5 01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	9,800,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	9,996,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket ATK yang disediakan	12 Paket	28,800,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	29,376,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	56,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	57,120,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	19,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Paket	19,380,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan yang disediakan	12 Paket	60,200,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	61,404,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang diselenggarakan	300 Kali 36 Kali	995,900,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 Kali 36 Kali	1,015,818,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	246,437,000				100%	220,225,000	
5 01 01	2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	2 Unit	60,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel Kantor	3 Paket	85,600,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	87,312,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang disediakan	4 Unit	72,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	103,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	3 Unit	28,837,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	29,413,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	545,580,000				100%	553,041,600	
5 01 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Transaksi Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet	12 Transaksi	147,500,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	147,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Transaksi Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Transaksi	398,080,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	406,041,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	289,819,800				100%	295,615,600	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang disediakan Jumlah Servis Kendaraan Dinas Jumlah Transaksi Pajak Kendaraan Dinas yang	4000 Liter 12 Kali 11 Transaksi	82,143,800	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4000 Liter 12 Kali 11 Transaksi	83,786,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	5 Unit	32,076,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	32,717,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	3 Paket	175,600,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	179,112,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	1,287,583,500			100 %	1,446,762,675	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun	3 dokumen	540,000,000			3 dokumen	669,300,000	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD yang disepakati	1 Dokumen	215,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	219,300,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	2 Dokumen	325,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	450,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data pembangunan	100 %	360,000,000			100 %	378,000,000	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data Perencanaan Pembangunan secara Spasial Jumlah Dokumen Data Perencanaan Pembangunan	1 Data Layer 1 Dokumen	360,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Data Layer 1 Dokumen	378,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib pelaporan kegiatan	100 %	387,583,500			100 %	399,462,675	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monev Dana DAK dan Dana APBD lainnya	1 Dokumen	130,994,375	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	135,044,094	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan evaluasi capaian kinerja	32 PD	256,589,125	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32 PD	264,418,581	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	90%	2,728,710,500			90%	2,813,641,250	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	1,083,851,000			100%	1,132,605,250	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	12 Laporan	496,125,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	520,931,250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	1 Dokumen	152,430,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	167,673,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	208,046,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	212,206,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia	2 Dokumen	227,250,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	231,795,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan dan laporan monev bidang perekonomian dan SDA	100%	891,000,000			100%	912,100,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian yang disusun	2 Dokumen	190,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	193,800,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	4 Laporan	116,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	118,300,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan bidang sumber daya alam yang disusun	1 Dokumen	435,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	450,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang sumber daya alam	2 Laporan	150,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan monev bidang infrastruktur yang disusun	100%	753,859,500			100%	768,936,000	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur yang disusun	3 Dokumen	645,709,500	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	658,623,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	3 Laporan	108,150,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	110,313,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1,765,454,400				1,800,762,700	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan	100%	1,765,454,400			100%	1,800,762,700	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian yang ditindaklanjuti	100%	451,079,500			100%	460,100,400	
5 05 02 2.01 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disusun	1 Dokumen	178,528,500	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	182,099,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Pemerintahan Umum yang disusun	2 Dokumen	207,170,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	211,313,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Updating Data Penelitian/Kajian	1 Dokumen	65,381,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	66,688,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti	100%	392,062,900			100%	399,904,100	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Aspek- aspek Sosial disusun	2 Dokumen	184,670,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	188,363,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Pariwisata yang disusun	1 Dokumen	207,392,900	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	211,540,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti	100%	635,162,000			100%	647,865,200	
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Bidang Pekerjaan Umum yang disusun	2 Dokumen	635,162,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	647,865,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang di diseminasikan	100%	287,150,000			100%	292,893,000	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Judul Penelitian/Kajian yang di Diseminasikan	8 Judul	287,150,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Judul	292,893,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TOTAL				16,127,815,200				17,201,772,313	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5 02			KEUANGAN						37,855,797,818	39,025,174,694
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	32,194,803,643				100%	32,547,033,762	
5 02 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	22,683,672,348				100%	22,910,509,072	
5 02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	22,134,083,475	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	22,355,424,310	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	12 Bulan	544,539,150	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	549,984,542	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 Dokumen	5,049,723	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	5,100,220	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100%	50,229,900				100%	50,732,199	
5 02 01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset/tanah yang PBBnya dibayar tepat waktu	1 Tahun	50,229,900	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	50,732,199	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	1,154,825,325				100%	1,206,077,335	
5 02 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	18 Jenis	19,857,795	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Jenis	20,056,373	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	12 Bulan	91,861,020	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	92,779,630	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	12 Bulan	152,835,978	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	154,364,338	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	25 Jenis	164,780,363	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Jenis	184,920,185	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	46,434,518	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	46,898,863	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum kantor yang disediakan dan Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	12 Bulan	679,055,651	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	707,057,946	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	263,686,775				100%	266,323,642	
5 02 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	5 Jenis 5 Jenis	263,686,775	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Jenis 5 Jenis	266,323,642	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	100%	7,824,091,188				100%	7,890,212,100	
5 02 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	7,380,927,188	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	7,442,616,460	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	443,164,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	447,595,640	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dengan baik	100%	218,298,107				100%	223,179,414	
5 02 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 Unit	110,538,945	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	111,644,334	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	12 Jenis	83,714,668	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Jenis	84,551,815	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	24,044,494	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	26,983,265	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP		2,686,218,081			WTP	2,884,243,209	
5 02 02	2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun dan tepat waktu	100%	835,444,288				100%	937,554,143	
5 02 02	2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disusun dan tepat waktu	2 Dokumen	148,625,278	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	166,790,589	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS yang disusun dan tepat waktu	2 Dokumen	121,277,111	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	136,099,869	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan Perda APBD dan rancangan Perwali penjabaran APBD yang disusun dan tepat waktu	2 Dokumen	287,467,439	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	322,602,347	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan Perda P- APBD dan rancangan Perwali penjabaran P- APBD yang disusun dan tepat waktu	2 Dokumen	278,074,460	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mojokerto, Magersari,	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	312,061,338	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelayanan pengelolaan perbendaharaan daerah	100%	549,366,816			100%	616,511,648	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Dana Transfer yang diproses sesuai regulasi yang berlaku	60 Laporan	255,833,501	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mojokerto, Magersari,	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Laporan	287,102,039	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Penatausahaan/Pengelolaan Kas yang diproses sesuai peraturan yang berlaku	440 Dokumen	75,092,947	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mojokerto, Magersari,	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	440 Dokumen	84,270,974	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah rancangan juknis pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	110,326,930	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mojokerto, Magersari,	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	123,811,333	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan penatausahaan keuangan	24 OPD	108,113,438	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 OPD	121,327,302	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100%	296,406,977			100%	315,127,418	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-Transfer	Jumlah PD yang melaksanakan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan	24 PD	117,514,697	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 PD	124,936,678	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Jumlah dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban yang disusun	84 Dokumen	178,892,280	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	84 Dokumen	190,190,740	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana	100%	1,005,000,000			100%	1,015,050,000	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana	1 Tahun	1,005,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	1,015,050,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	90 %	1,749,743,696			90 %	2,176,713,351	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	90 %	1,749,743,696			90 %	2,176,713,351	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	3 Dokumen	489,677,406		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	494,574,180	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	24 Laporan	9,838,904	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	9,937,293	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset tanah yang tersertifikat	15 Sertifikat	505,994,044	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Sertifikat	1,203,846,874	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang direvaluasi	4 Jenis	506,535,953	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Jenis	285,772,379	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah data aset daerah yang diupdate	5 Data	237,697,389	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Data	182,582,625	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	1,225,032,398			100 %	1,417,184,372	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	100 %	1,225,032,398			100 %	1,417,184,372	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Analisa, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	1 Laporan	321,317,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	407,691,026	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah laporan pendapatan daerah yang disusun	12 Laporan	345,184,118		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	500,541,627	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak daerah yang dilakukan pendataan	1 Laporan	280,900,235		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	254,419,237	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase piutang pajak tertagih	10 %	277,631,045	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	254,532,482	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TOTAL				37,855,797,818				39,025,174,694	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5 03			KEPEGAWAIAN						16,937,563,795	17,913,114,485
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	A 100%	14,275,963,795			A 100%	14,962,114,485		
5 03 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100%	4,500,000			100%	4,500,000		
5 03 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	2,250,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2,250,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun	4 Dokumen	2,250,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	2,250,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	12,057,363,795				12,660,414,485		
5 03 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	240 Transaksi	11,887,299,795	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	240 Transaksi	12,481,664,785	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	96 Transaksi	168,714,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96 Transaksi	177,149,700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	4 Dokumen	1,350,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	1,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%	22,050,000				26,000,000		
5 03 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	98 Potong	22,050,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan		98 Potong	26,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	1,123,550,000				1,147,700,000		
5 03 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Macam	6,500,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Macam	7,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam ATK yang disediakan	25 Macam	63,900,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Macam	75,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah macam Bahan Logistik kantor yang disediakan	14 Macam	34,200,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Macam	40,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah macam Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Macam	110,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Macam	115,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Bahan Bacaan yang disediakan	12 Bulan	13,950,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	16,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang diselenggarakan	80 Kali 12 Kali	895,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 Kali 12 Kali	894,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	126,000,000				135,000,000		
5 03 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dilaksanakan	5 Unit	126,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	135,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100%	607,500,000				658,500,000		
5 03 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Air dan Internet Kantor	48 Transaksi	92,700,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan		48 Transaksi	108,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	156 Transaksi	514,800,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	156 Transaksi	550,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	335,000,000				330,000,000		
5 03 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM Kendaraan Dinas yang disediakan Jumlah Servis Kendaraan Dinas Jumlah transaksi Pajak Kendaraan Dinas yang dilaksanakan sesuai ketentuan	4960 Liter 12 Kali 5 Transaksi	80,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4960 Liter 12 Kali 5 Transaksi	80,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan sesuai ketentuan	12 Kali	55,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Kali	70,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan sesuai rencana	3 Paket	200,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Paket	180,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit	Baik	2,661,600,000				2,951,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kenaikan ASN	Jumlah ASN pensiun yang diproses dan usulan Formasi ASN yang diajukan	320 orang	1,188,000,000			320 orang	1,310,000,000	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen formasi kebutuhan PNS, CPNS dan PPPK	3 dokumen	18,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mojokerto, Kranggan,	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	25,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta Seleksi CPNS dan PPPK yang diproses	3000 orang	1,000,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3000 orang	1,100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah permohonan Kartu Pegawai dan Permohonan Pensiun yang diproses	152 orang	115,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	152 orang	120,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang divalidasi	12 dokumen	55,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dokumen	65,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi, Mutasi, Kenaikan Pangkat	516 orang	585,450,000			516 orang	695,000,000	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi Mutasi	100 orang	175,950,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 orang	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diproses	500 orang	40,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 orang	45,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Seleksi terbuka	16 orang	369,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 orang	450,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Aparatur yang telah dilakukan Pemetaan Kompetensi	20%	640,800,000			20%	678,500,000	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Aparatur yang mengikuti assessment Kompetensi	300 orang	585,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300 orang	620,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah pengajuan ijin belajar, tugas belajar serta penyesuaian ijazah PNS yang diproses	170 orang	55,800,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	170 orang	58,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rata-rata nilai kinerja aparatur	90	247,350,000			90	267,500,000	
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang telah dilakukan analisis atas kesenjangan kinerja	2800 orang	94,500,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2800 orang	110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan atas capaian kinerja	10 Orang	13,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Orang	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah data kehadiran dan disiplin yang dikelola	2800 data	125,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2800 data	125,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Rekomendasi Penjatihan Sanksi Pelanggaran Disiplin yang diterbitkan	8 Rekomendasi	14,850,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Rekomendasi	17,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		2,216,911,572				2,285,000,000	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun	10 %	2,216,911,572			10 %	2,285,000,000	
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	250,411,572			100%	285,000,000	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	100 orang	250,411,572	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 orang	285,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase PNS yang mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	1,966,500,000			100%	2,000,000,000	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan prajabatan	196 orang	1,966,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung		196 orang	2,000,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TOTAL				19,154,475,367			20,198,114,485		

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif			
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6 01			INSPEKTORAT DAERAH						7,923,673,550	7,622,225,069	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat Kapabilitas APIP IKM Inspektorat Indeks Manajemen Resiko Inspektorat	A Level 3 82,9 Level 1	7,335,282,325				A level 3 83,4 Level 2	7,022,066,025		
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	18,055,000				100%	23,032,989		
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 dokumen	11,027,500	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 dokumen	15,682,035	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun	4 dokumen	7,027,500		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dokumen	7,350,954	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai standar	100%	4,440,577,397				100%	4,575,376,575		
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai standar	13 transaksi	4,200,752,171	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 transaksi	4,305,770,975	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan dan lembur pegawai yang dibayarkan tepat waktu dan sesuai standar	36 transaksi	237,397,726	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 transaksi	266,505,600	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1 Dokumen	2,427,500		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3,100,000	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai standar	100%	314,390,470				100%	320,241,072		
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	2 macam	21,860,370	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 macam	21,860,370	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah jam pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	80 jam 20 orang	292,530,100	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 jam 20 orang	298,380,702	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai standar	100%	592,400,750				100%	544,258,939		
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 macam	7,777,685	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 macam	7,933,238	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam ATK yang disediakan kantor yang terpenuhi	63 macam	57,735,641	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		63 macam	58,890,400	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan kebutuhan bahan logistik kantor yang terpenuhi Jumlah macam bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan 47 macam	100,853,297	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan 47 macam	102,870,362	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 macam	30,371,400	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 macam	30,978,828	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kegiatan yang kebutuhan materialnya terpenuhi	4 kegiatan	45,662,727	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 kegiatan	46,575,981	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	40 kali 24 kali	350,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 kali 24 kali	297,010,130	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	1,267,912,096				100%	850,000,000		
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	1 unit	425,000,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	0	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor yang disediakan	30 macam	842,912,096	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 macam	850,000,000	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai standar	100%	385,481,000				100%	387,481,000		
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan	113,826,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	115,826,000	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	271,655,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 transaksi	271,655,000	INSPEKTORAT	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	100%	316,465,612				100%	321,675,450	
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang dipadukan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah pemeliharaan / service kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	2500 liter 4 kali 10 kendaraan	69,725,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2500 liter 4 kali 10 kendaraan	70,000,000		INSPEKTORAT
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	29 peralatan	26,374,750	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29 peralatan	26,902,250		INSPEKTORAT
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan untuk pemeliharaan gedung kantor	4 pekerjaan	220,365,862	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 pekerjaan	224,773,200		INSPEKTORAT
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB	88%	298,083,935				100%	304,045,614	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	88%					89%		
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	95%					95%		
		Maturitas SPIP	level 3					level 3		
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	jumlah kegiatan pengawasan (penjaminan kualitas) yang dilakukan sesuai PKPT dan standar audit	24 kegiatan	298,083,935				24 kegiatan	304,045,614	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan kinerja	7 kegiatan	89,456,700	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 kegiatan	91,245,834		INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan keuangan, perencanaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan	17 kegiatan	124,899,005	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 kegiatan	127,396,985		INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ADIP	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	30 rekomendasi	83,728,230	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 rekomendasi	85,402,795		INSPEKTORAT
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK	1	290,307,290				1	296,113,430	
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan WBK/WBBM	25%	290,307,290				25%	296,113,430	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan asistensi pembangunan reformasi birokrasi kepada Perangkat Daerah	3 kegiatan	79,451,590	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 kegiatan	81,040,620		INSPEKTORAT
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi	4 kegiatan	210,855,700	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 kegiatan	215,072,810		INSPEKTORAT
TOTAL				7,923,673,550				7,622,225,069		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan	1 paket	12,847,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	13,103,940	KECAMATAN PRAJURIT KULON
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan Kerja yang dilaksanakan	6 paket	17,901,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	18,259,020	KECAMATAN PRAJURIT KULON
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas Jumlah paket rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2 paket 1 paket	1,075,207,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket 1 paket	1,096,711,140	KECAMATAN PRAJURIT KULON
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	501,388,966			100%	511,416,746	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	501,388,966			100%	511,416,746	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun	1 dokumen	32,394,890	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	33,042,788	KECAMATAN PRAJURIT KULON
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Jumlah paket kegiatan pemberdayaan Masyarakat	2 kegiatan 0 paket	417,836,531	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kegiatan 0 paket	426,193,262	KECAMATAN PRAJURIT KULON
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Lomba - Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	3 lomba	51,157,545	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 lomba	52,180,696	KECAMATAN PRAJURIT KULON
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	80,000,000			100%	81,600,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	12 kegiatan	80,000,000			47 kegiatan	81,600,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	12 kegiatan	80,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kegiatan	81,600,000	KECAMATAN PRAJURIT KULON
7		UNSUR KEWILAYAHAN							
7 01		KECAMATAN		2,648,109,600				2,648,109,600	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	428,314,300			100%	428,314,300	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang memenuhi	100%	203,918,400			100%	203,918,400	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi pembayaran honorarium pengelola keuangan,RT/RW dan Premi BPJS yang dilaksanakan tepat waktu	36 transaksi	203,918,400	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 transaksi	203,918,400	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	45,417,400			100%	45,417,400	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	1,288,500	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	1,288,500	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	4 paket	9,435,200	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	9,435,200	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 paket	5,245,300	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	5,245,300	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak, Penggandaan yang disediakan	4 paket	6,423,900	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	6,423,900	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan Referensi Bahan Bacaan dan Iklan kantor yang disediakan	12 paket	1,836,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	1,836,000	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket penyediaan Makan Minum Kantor yang disediakan	12 paket	21,188,500	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	21,188,500	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah yang disediakan	1 paket	3,000,000			1 paket	3,000,000	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	3,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	3,000,000	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah transaksi jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	108 transaksi	75,983,400			108 transaksi	75,983,400	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Internet dan Listrik	Jumlah transaksi Pembayaran Listrik, Telepon, Air, Internet dan pemasangan PDAM yang dibayar tepat waktu	60 transaksi	22,127,400	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 transaksi	22,127,400	KELURAHAN SURODINAWAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanan, sopir dan premi BPJS yang dibayar tepat waktu	48 transaksi	53,856,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 transaksi	53,856,000	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	61 paket	99,995,100			61 paket	99,995,100	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas, Jabatan	Jumlah paket Kendaraan Dinas/ Operasional yang dirawat secara berkala	44 paket	52,639,400	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44 paket	52,639,400	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan	1 paket	2,692,800	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	2,692,800	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan Kerja yang dilaksanakan	14 paket	7,415,400	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 paket	7,415,400	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas Jumlah paket rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket 1 paket	37,247,500	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket 1 paket	37,247,500	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,209,795,300			100%	2,209,795,300	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,209,795,300			100%	2,209,795,300	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun	1 dokumen	13,388,600	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	13,388,600	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	15 paket	2,196,406,700	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 paket	2,196,406,700	KELURAHAN SURODINAWAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	10,000,000			100%	10,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	4 kegiatan	10,000,000			4 kegiatan	10,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	4 kegiatan	10,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 kegiatan	10,000,000	KELURAHAN SURODINAWAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN			2,391,093,158				2,391,093,158	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	398,876,444			100%	398,876,444	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	162,506,400			100%	162,506,400	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi pembayaran honorarium pengelola keuangan, BOP RT/RW dan Premi BPJS yang dilaksanakan tepat waktu	36 transaksi	162,506,400	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kelurahan Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 transaksi	162,506,400	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	50,168,348			100%	50,168,348	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	1,260,312	Kota Mojokerto, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket	1,260,312	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 paket	15,727,380	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	15,727,380	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 paket	6,240,258	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	6,240,258	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak, Penggandaan yang disediakan	12 paket	3,818,018	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	3,818,018	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan Referensi Bahan Bacaan dan iklan kantor yang disediakan	12 paket	1,836,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	1,836,000	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket penyediaan Makan Minum Kantor yang disediakan	12 paket	21,286,380	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	21,286,380	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah yang disediakan	1 paket	16,898,989			1 paket	16,898,989	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	16,898,989	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	16,898,989	KELURAHAN PRAJURITKULON

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah transaksi jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	48 transaksi	94,245,501				48 transaksi	94,245,501	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi Pembayaran Listrik, Telepon, Air dan Internet yang dibayar tepat waktu	36 Transaksi	13,461,501	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Transaksi	13,461,501	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanan dan premi BPJS yang dibayar tepat waktu	12 Transaksi	80,784,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Transaksi	80,784,000	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	209 paket	75,057,206				209 paket	75,057,206	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah paket Kendaraan Dinas/ Operasional yang dirawat secara berkala	184 paket	53,966,976	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		184 paket	53,966,976	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan Kerja yang dilaksanakan	24 paket	10,900,230	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 paket	10,900,230	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung, pemeliharaan rumah dinas, rehab gedung serta bangunan lainnya yang dilaksanakan	1 paket	10,190,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	10,190,000	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,974,574,423				100%	1,974,574,423	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,974,574,423				100%	1,974,574,423	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun	1 dokumen	15,435,454	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	15,435,454	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	12 paket	1,959,138,969	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 paket	1,959,138,969	KELURAHAN PRAJURITKULON
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	17,642,291				100%	17,642,291	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	12 kegiatan	17,642,291				12 kegiatan	17,642,291	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	12 kegiatan	17,642,291	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 kegiatan	17,642,291	KELURAHAN PRAJURITKULON
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN				2,475,116,984				2,475,116,984	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	361,774,943				100%	361,774,943	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	163,320,000				100%	163,320,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi pembayaran honorarium pengelola keuangan, BOP RT/RW dan Premi BPJS yang dilaksanakan tepat waktu	36 transaksi	163,320,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		36 transaksi	163,320,000	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	30,757,509				100%	30,757,509	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	3 paket	1,878,600	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 paket	1,878,600	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	3 paket	8,573,700	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 paket	8,573,700	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	3,627,900	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 paket	3,627,900	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak, Penggandaan yang disediakan	12 paket	3,858,900	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 paket	3,858,900	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan Referensi Bahan Bacaan dan Iklan kantor yang disediakan	12 paket	1,800,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 paket	1,800,000	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket penyediaan Makan Minum Kantor yang disediakan	6 paket	11,018,409	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 paket	11,018,409	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah yang disediakan	2 paket	22,228,961				2 paket	22,228,961	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan Mebeler kantor	1 paket	6,677,660	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 paket	6,677,660	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	15,551,301	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 paket	15,551,301	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah transaksi jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	73 transaksi	96,078,647			73 transaksi	96,078,647	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi Pembayaran Listrik, Telepon, Air dan Internet yang dibayar tepat waktu	37 transaksi	16,878,647	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	37 transaksi	16,878,647	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanan dan premi BPJS yang dibayar tepat waktu	36 transaksi	79,200,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	36 transaksi	79,200,000	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	25 paket	49,389,826			25 paket	49,389,826	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah paket Kendaraan Dinas/ Operasional yang dirawat secara berkala	12 paket	35,225,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 paket	35,225,000	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan Kerja yang dilaksanakan	12 paket	6,130,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 paket	6,130,000	KELURAHAN BLOOTO
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengecatan Gedung Kantor	1 paket	8,034,826	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 paket	8,034,826	KELURAHAN BLOOTO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,101,234,587			100%	2,101,234,587	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,101,234,587			100%	2,101,234,587	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun	1 dokumen	17,408,500	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	17,408,500	KELURAHAN BLOOTO
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	12 paket	2,083,826,087	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 paket	2,083,826,087	KELURAHAN BLOOTO
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	12,107,454			100%	12,107,454	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	6 kegiatan	12,107,454			6 kegiatan	12,107,454	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	6 kegiatan	12,107,454	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 kegiatan	12,107,454	KELURAHAN BLOOTO
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01 01	KECAMATAN			1,894,148,400				1,894,148,400	
7 01 01 2.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	361,612,000			100%	361,612,000	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	174,360,000			100%	174,360,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi pembayaran honorarium pengelola keuangan, RT/RW dan Premi BPJS yang dilaksanakan tepat waktu	36 Transaksi	174,360,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Transaksi	174,360,000	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	44,164,000			100%	44,164,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	2,046,900	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Paket	2,046,900	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Paket	10,358,900	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	10,358,900	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	5,682,200	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Paket	5,682,200	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak, Penggandaan yang disediakan	16 Paket	3,978,300	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Paket	3,978,300	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan Referensi Bahan Bacaan dan Iklan kantor yang disediakan	12 Paket	1,836,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	1,836,000	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket penyediaan Makan Minum Kantor yang disediakan	24 Paket	20,261,700	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Paket	20,261,700	KELURAHAN MENTIKAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah transaksi jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	73 transaksi	71,570,700			73 transaksi	71,570,700	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi Pembayaran Listrik, Telepon, Air, Internet dan pemasangan PDAM yang dibayar tepat waktu	37 Transaksi	17,714,700	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	37 Transaksi	17,714,700	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanan dan premi BPJS yang dibayar tepat waktu	36 Transaksi	53,856,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Transaksi	53,856,000	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	33 paket	71,517,300			33 paket	71,517,300	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah paket Kendaraan Dinas/ Operasional yang dirawat secara berkala	25 Paket	52,126,800	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Paket	52,126,800	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan Kerja yang dilaksanakan	6 paket	9,317,400	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	9,317,400	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung, pemeliharaan rumah dinas, rehab gedung serta bangunan lainnya yang dilaksanakan	2 Paket	10,073,100	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	10,073,100	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,525,156,400			100%	1,525,156,400	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,525,156,400			100%	1,525,156,400	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun	1 Dokumen	13,441,300	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	13,441,300	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	73 Paket	1,511,715,100	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	73 Paket	1,511,715,100	KELURAHAN MENTIKAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	7,380,000			100%	7,380,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	1 Kegiatan	7,380,000			1 Kegiatan	7,380,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	1 Kegiatan	7,380,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	7,380,000	KELURAHAN MENTIKAN
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN			1,319,405,500				1,319,405,500	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	269,497,500			100%	269,497,500	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	115,178,400			100%	115,178,400	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi pembayaran honorarium pengelola keuangan, BOP RT/RW dan Premi BPJS yang dilaksanakan tepat waktu	36 Transaksi	115,178,400	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Transaksi	115,178,400	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	31,612,200			100%	31,612,200	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	1,037,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	1,037,000	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	6 Paket	10,063,200	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Paket	10,063,200	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	2,611,800	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	2,611,800	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak, Penggandaan yang disediakan	12 Paket	3,919,600	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	3,919,600	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan Referensi Bahan Bacaan dan Iklan kantor yang disediakan	12 Paket	1,836,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	1,836,000	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket penyediaan Makan Minum Kantor yang disediakan	36 Paket	12,144,600	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Paket	12,144,600	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah yang disediakan	2 paket	8,690,800			2 paket	8,690,800	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan Mebel kantor	1 Paket	6,690,800	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	6,690,800	KELURAHAN KAUMAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	2,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	2,000,000	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah transaksi jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	73 transaksi	76,164,700			73 transaksi	76,164,700	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi Pembayaran Listrik, Telepon, Internet dan Pemasangan PDAM yang dibayar tepat waktu	37 Transaksi	19,164,700	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	37 Transaksi	19,164,700	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanan dan premi BPJS yang dibayar tepat waktu	36 Transaksi	57,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Transaksi	57,000,000	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	39 paket	37,851,400			39 paket	37,851,400	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket Kendaraan Dinas/ Operasional yang dirawat secara berkala	20 Paket	21,304,600	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Paket	21,304,600	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan Kerja yang dilaksanakan	17 Paket	6,356,200	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Paket	6,356,200	KELURAHAN KAUMAN
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan Pavingisasi dan pagar mojobahitan yang dilaksanakan	2 Paket	10,190,600	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	10,190,600	KELURAHAN KAUMAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,047,742,700			100%	1,047,742,700	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,047,742,700			100%	1,047,742,700	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun	1 Dokumen	8,345,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	8,345,000	KELURAHAN KAUMAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	73 Paket	1,039,397,700	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	73 Paket	1,039,397,700	KELURAHAN KAUMAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	2,165,300			100%	2,165,300	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	6 kegiatan	2,165,300			6 kegiatan	2,165,300	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	6 Kegiatan	2,165,300	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Kegiatan	2,165,300	KELURAHAN KAUMAN
7 01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN			2,766,648,368				2,775,382,816	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	403,853,500			100%	411,930,848	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	186,627,400			100%	190,359,948	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi pembayaran honorarium pengelola keuangan, RT/RW dan Premi BPJS yang dilaksanakan tepat waktu	36 transaksi	186,627,400	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 transaksi	190,359,948	KELURAHAN PULOREJO
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	28,900,700			100%	29,478,900	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1,564,200	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	1,595,500	KELURAHAN PULOREJO
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	4 paket	8,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	8,160,000	KELURAHAN PULOREJO
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	2,403,700	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 paket	2,451,800	KELURAHAN PULOREJO
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak, Penggandaan yang disediakan	12 paket	4,014,500	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	4,094,800	KELURAHAN PULOREJO
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan Referensi Bahan Bacaan dan Iklan kantor yang disediakan	12 paket	1,836,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	1,872,800	KELURAHAN PULOREJO
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket penyediaan Makan Minum Kantor yang disediakan	24 paket	11,082,300	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 paket	11,304,000	KELURAHAN PULOREJO

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah yang disediakan	1 paket	25,000,000				1 paket	25,500,000	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan Mebeler kantor	1 paket	25,000,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	25,500,000	KELURAHAN PULOREJO
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah transaksi jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	60 transaksi	97,618,600				60 transaksi	99,571,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi Pembayaran Listrik, Telepon, Air dan Internet yang dibayar tepat waktu	36 transaksi	16,834,600	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 transaksi	17,171,300	KELURAHAN PULOREJO
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanan dan premi BPJS yang dibayar tepat waktu	24 transaksi	80,784,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 transaksi	82,399,700	KELURAHAN PULOREJO
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	108 paket	65,706,800				108 paket	67,021,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah paket Kendaraan Dinas/ Operasional yang dirawat secara berkala	45 paket	50,334,500	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 paket	51,341,200	KELURAHAN PULOREJO
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan Kerja yang dilaksanakan	62 paket	5,182,300	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		62 paket	5,286,000	KELURAHAN PULOREJO
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung yang dilaksanakan	1 paket	10,190,000	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	10,393,800	KELURAHAN PULOREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,349,165,368				100%	2,349,549,868	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,349,165,368				100%	2,349,549,868	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun	1 dokumen	19,221,900	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	19,606,400	KELURAHAN PULOREJO
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah paket kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	229 paket	2,329,943,468	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		229 paket	2,329,943,468	KELURAHAN PULOREJO
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	13,629,500				100%	13,902,100	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	1 kegiatan	13,629,500				1 kegiatan	13,902,100	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	1 kegiatan	13,629,500	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	13,902,100	KELURAHAN PULOREJO
TOTAL				25,350,712,210					25,576,128,163	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : **KECAMATAN MAGERSARI**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
7			UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01		KECAMATAN										
7	01	01		10,819,587,081				10,819,587,081					
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	10,027,857,081		100%	10,027,857,081				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8,965,740,381	100%	8,965,740,381				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	12 Transaksi	8,787,954,381	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	8,787,954,381	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 Transaksi	177,786,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	177,786,000	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	118,607,422		100%	118,607,422			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	46 Potong	118,607,422	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	46 Potong	118,607,422	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	366,724,700		100%	366,724,700			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	5,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	5,000,000	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	12 Paket	25,200,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	25,200,000	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	8,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	8,500,000	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	9,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	9,500,000	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 Paket	1,800,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	1,800,000	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	24 Kali 12 Kali	316,724,700	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Kali 12 Kali	316,724,700	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	95,000,000		100%	95,000,000			
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	12 Paket	95,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	95,000,000	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	273,184,776		100%	273,184,776			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Transaksi	90,124,776	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	90,124,776	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kanto	12 Transaksi	183,060,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	183,060,000	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	208,599,802		100%	208,599,802			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	2292 Liter 4 Kali 4 Transaksi	50,326,290	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2292 Liter 4 Kali 4 Transaksi	50,326,290	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	54 Unit	32,118,012	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54 Unit	32,118,012	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi i gedung kantor	12 Paket	126,155,500	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	126,155,500	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	716,730,000		100%	716,730,000			
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	716,730,000		100%	716,730,000			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPd yang disusun	1 Dokumen	55,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	55,000,000	KECAMATAN MAGERSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan Jumlah Kegiatan Organisasi Perempuan yang Fasilitasi Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang difasilitasi Jumlah Lembaga dan Organisasi masyarakat	6 Kegiatan 9 Kegiatan 1 KUBE 4 Kegiatan	546,730,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Kegiatan 9 Kegiatan 1 KUBE 4 Kegiatan	546,730,000	KECAMATAN MAGERSARI
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Lomba - Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	2 Lomba	115,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Lomba	115,000,000	KECAMATAN MAGERSARI
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	75,000,000			100%	75,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	75,000,000			100%	75,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	12 Kegiatan	75,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Kegiatan	75,000,000	KECAMATAN MAGERSARI
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN								
7 01 01				3,518,010,400				3,234,820,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	837,240,400			100%	554,050,000	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	283,190,400			100%	0	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 Transaksi	283,190,400	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	0	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	16,500,000			100%	16,500,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	52 potong	16,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	52 potong	16,500,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	74,250,000			100%	74,250,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	5,000,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	5,000,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket ATK yang disediakan	12 bulan	25,200,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	25,200,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	8,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	8,500,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	4 paket	9,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	9,500,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan yang disediakan	12 paket	1,800,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	1,800,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang di Bayarkan Jumlah Rapat Koordinasi	6 kali 12 kali	24,250,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 kali 12 kali	24,250,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	200,000,000			100%	200,000,000	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan		200,000,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200,000,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	137,000,000			100%	137,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Transaksi Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air, Internet, penambahan Daya Listrik dan Pemasangan PDAM	12 transaksi	57,800,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	57,800,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pembayaran Petugas Kebersihan, Penjaga yang dibayarkan Tepat Waktu	12 dokumen	79,200,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dokumen	79,200,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	126,300,000			100%	126,300,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Transaksi Pajak, BBM dan Service yang disediakan	12 bulan	90,350,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	90,350,000	KELURAHAN KEDUNDUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Dipelihara	10 unit	15,950,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 unit	15,950,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 paket	20,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	20,000,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,672,070,000			100%	2,672,070,000	
7 01 03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,672,070,000			100%	2,672,070,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPd yang disusun	1 dokumen	16,750,000	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	16,750,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Dokumen Kader Motivator yang Honorariumnya di Bayar Tepat Waktu Jumlah FestivalPHBN yang Diikuti dan diselenggarakan Jumlah Hibah yang Diterima Masyarakat (orang/lembaga) Jumlah Kegiatan LPM yang di Fasilitasi Jumlah Kegiatan Organisasi Perempuan yang Terfasilitasi Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang di Fasilitasi Jumlah Lembaga da Organisasi Masyarakat Kelurahan yang Terfasilitasi Jumlah Lomba-lomba Kelurahan yang dilaksanakan	12 dokumen 4 kegiatan 1 lembaga 6 kegiatan 12 kegiatan 12 kelompok 6 lembaga 4 lomba/kegiatan 1 posko	2,655,320,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dokumen 4 kegiatan 1 lembaga 6 kegiatan 12 kegiatan 12 kelompok 6 lembaga 4 lomba/kegiatan 1 posko	2,655,320,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	8,700,000			100%	8,700,000	
7 01 04	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	8,700,000			100%	8,700,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	12 bulan	8,700,000	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	8,700,000	KELURAHAN KEDUNDUNG
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN			1,370,961,409				1,370,961,409	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	596,853,364			100%	596,853,364	
7 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	72,120,000			100%	72,120,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelola keuangan yang dibawakan	12 transaksi	72,120,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	72,120,000	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	21,414,364			100%	21,414,364	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapanannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	5 potong	21,414,364	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 potong	21,414,364	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	47,719,000			100%	47,719,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	5,005,100	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 paket	5,005,100	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	40 paket	14,403,400	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 paket	14,403,400	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15 paket	4,230,500	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 paket	4,230,500	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	40 paket	2,100,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 paket	2,100,000	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	1,980,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	1,980,000	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	800 kali	20,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800 kali	20,000,000	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	56,000,000			100%	56,000,000	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Gedung Kantor	4 paket	56,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 paket	56,000,000	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	156,600,000			100%	156,600,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 transaksi	12,600,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	12,600,000	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	144,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	144,000,000	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	243,000,000			100%	243,000,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	7 transaksi	35,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 transaksi	35,000,000	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	8 unit	8,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 unit	8,000,000	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung LKK yang dibangun Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 unit 1 paket	200,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit 1 paket	200,000,000	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	739,108,045			100%	739,108,045	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	739,108,045			100%	739,108,045	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun	2 dokumen	12,300,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	12,300,000	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah dokumen Kader Motivator yang honorariumnya dibayar tepat waktu Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan Jumlah Hibah Yang diterima Masyarakat (orang/lembaga) Jumlah jenis Kegiatan bidang kesehatan dan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan Jumlah kegiatan Organisasi Perempuan yang difasilitasi Jumlah Kelompok Usaha Bersama Jumlah keluarga yang menerima santunan uang duka Jumlah Lembaga dan Organisasi masyarakat Kelurahan yang difasilitasi	12 dokumen 4 jenis 12 lembaga 4 jenis 1 lembaga 30 kelompok 36 keluarga 5 lembaga 12 kegiatan	726,808,045	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dokumen 4 jenis 12 lembaga 4 jenis 1 lembaga 30 kelompok 36 keluarga 5 lembaga 12 kegiatan	726,808,045	KELURAHAN GEDONGAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	35,000,000				35,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	35,000,000				35,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	3 kegiatan	35,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 kegiatan	35,000,000	KELURAHAN GEDONGAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN			2,298,524,838				2,298,524,838	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			710,524,838				710,524,838	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	76,104,000			100%	76,104,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi honor pengelola yang di Bayarkan	12 Transaksi	76,104,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	76,104,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	14,400,000			100%	14,400,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	42 potong	14,400,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42 potong	14,400,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	58,834,107			100%	58,834,107	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	12 paket	4,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	4,000,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	12 paket	15,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	15,000,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	11,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	11,000,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6,755,107	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 paket	6,755,107	KELURAHAN BALONGSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	2,079,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	2,079,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	12 kali	20,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	20,000,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	90,000,000			100%	90,000,000	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	8 paket	90,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 paket	90,000,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	314,354,800			100%	314,354,800	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 paket	14,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	14,500,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 Transaksi	299,854,800	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	299,854,800	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	156,831,931			100%	156,831,931	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah transaksi pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	12 paket	70,831,931	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	70,831,931	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	7 paket	6,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 paket	6,000,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	1 paket	80,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	80,000,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,578,000,000			100%	1,578,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,578,000,000			100%	1,578,000,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun	1 dokumen	17,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	17,000,000	KELURAHAN BALONGSARI
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Dokumen Kader Motivator yang	12 dokumen 8	1,561,000,000	Kota Mojokerto, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana	12 dokumen 8	1,561,000,000	KELURAHAN BALONGSARI KELURAHAN BALONGSARI
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	10,000,000			100%	10,000,000	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	10,000,000			100%	10,000,000	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah koordinasi pengendalian ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	1 paket	10,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	10,000,000	KELURAHAN BALONGSARI
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN								
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	2,714,176,092			100%	2,714,176,092	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	156,560,000			100%	156,560,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah BOP RT RW Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 Bulan 12 TRansaksi 12 Bulan	156,560,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan 12 TRansaksi 12 Bulan	156,560,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	14,000,000			100%	14,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	14 Potong	14,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Potong	14,000,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	112,200,000			100%	112,200,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	11,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	11,000,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	12 Bulan	27,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	27,000,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	30,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	30,000,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	21,200,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	21,200,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 Bulan	3,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	3,000,000	KELURAHAN MAGERSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	20,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	20,000,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	88,000,000			100%	88,000,000	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	12 Bulan	88,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	88,000,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	198,600,000			100%	198,600,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	27,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	27,000,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor Jumlah Transaksi Premi Asuransi	12 Bulan 12 Bulan	171,600,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan 12 Bulan	171,600,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	240,062,363			100%	240,062,363	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	64,762,363	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	64,762,363	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	1 Tahun	10,300,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Tahun	10,300,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi i gedung kantor	1 Keg	165,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Keg	165,000,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,896,753,729			100%	1,896,753,729	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,896,753,729			100%	1,896,753,729	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPd yang disusun	1 Kegiatan	21,400,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	21,400,000	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Dokumen Kader Motivator yang honorariumnya dibayar tepat waktu (laporan) Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan Jumlah Hibah Yang diterima Masyarakat (orang/lembaga) Jumlah Kegiatan LPM yang difasilitasi kegiatannya Jumlah Kegiatan Organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi Jumlah Kegiatan Organisasi Perempuan yang Fasilitasi Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang difasilitasi Jumlah Keluarga yang Menerima Santunan Uang	12 Bulan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Kegiatan	1,875,353,729	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Kegiatan	1,875,353,729	KELURAHAN MAGERSARI
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	8,000,000			100%	8,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	8,000,000			100%	8,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	1 Kegiatan	8,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	8,000,000	KELURAHAN MAGERSARI
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				4,287,360,044			4,287,360,044	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	948,860,044			100%	948,860,044	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	431,893,440			100%	431,893,440	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	431,893,440	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	431,893,440	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	39,269,945			100%	39,269,945	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	39 potong	39,269,945	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	39 potong	39,269,945	KELURAHAN WATES

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	82,390,303				100%	82,390,303	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	6,094,600	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 paket	6,094,600	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	12 paket	27,942,222	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 paket	27,942,222	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	9,878,900		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	9,878,900	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah macam barang cetakan, penggandaan yang disediakan	8 macam	12,297,581		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 macam	12,297,581	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 Paket	1,980,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	1,980,000	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	12 kali	24,197,000	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 kali	24,197,000	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	93,821,270				100%	93,821,270	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	7 unit	93,821,270	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 unit	93,821,270	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	117,218,796				100%	117,218,796	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Transaksi	30,098,796		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Transaksi	30,098,796	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 transaksi	87,120,000	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 transaksi	87,120,000	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	184,266,290				100%	184,266,290	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	12520 liter 30 kali 12 transaksi	134,887,000	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12520 liter 30 kali 12 transaksi	134,887,000	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	12 unit	10,920,250	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 unit	10,920,250	KELURAHAN WATES
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 paket	38,459,040	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	38,459,040	KELURAHAN WATES
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	3,328,500,000				100%	3,328,500,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	3,328,500,000				100%	3,328,500,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPd yang disusun	1 Dokumen	35,000,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	35,000,000	KELURAHAN WATES
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti Jumlah kube yang menerima bantuan manfaat untuk pengembangan usaha Jumlah Laporan bantuan sosial yang derahkan ke masyarakat biopori dan timbangan bank sampah Jumlah Laporan dan organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi Jumlah Laporan hibah yang di serahkan kepada masyarakat Jumlah Laporan Kegiatan Covid 19 Jumlah Laporan pengelola kegiatan yang honorinya dibayarkan tepat waktu Jumlah Laporan santunan Uang duka di wilayah kelurahan wates Jumlah Posandu Balita dan Lansia	5 dokumen 25 dokumen 52 laporan 5 lembaga 1 laporan 60 laporan 48 laporan 100 laporan 10 dokumen	3,293,500,000	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 dokumen 25 dokumen 52 laporan 5 lembaga 1 laporan 60 laporan 48 laporan 100 laporan 10 dokumen	3,293,500,000	KELURAHAN WATES
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	10,000,000				100%	10,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	10,000,000				100%	10,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	1 kegiatan	10,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	10,000,000	KELURAHAN WATES
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN			3,443,867,910					3,443,867,910	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	734,590,950				100%	734,590,950	
7 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	172,180,800				100%	172,180,800	
7 01 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	172,180,800	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	172,180,800	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	19,091,150				100%	19,091,150	
7 01 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	50 potong	19,091,150	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 potong	19,091,150	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	47,719,000				100%	47,719,000	
7 01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5,005,100	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	5,005,100	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	12 paket	14,403,400	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	14,403,400	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	4,230,500	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	4,230,500	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	2,100,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	2,100,000	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	1,980,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	1,980,000	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	12 kali	20,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	20,000,000	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	56,000,000				100%	56,000,000	
7 01 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	8 paket	56,000,000			8 paket	56,000,000	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	156,600,000				100%	156,600,000	
7 01 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	24 transaksi	12,600,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 transaksi	12,600,000	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	24 transaksi	144,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 transaksi	144,000,000	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	283,000,000				100%	283,000,000	
7 01 01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	4780 liter 14 kali 12 transaksi	49,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4780 liter 14 kali 12 transaksi	49,000,000	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	9 unit	8,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 unit	8,000,000	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Jumlah paket pemeliharaan tempat parkir kantor yang tersedia	2 gedung 1 paket	226,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 gedung 1 paket	226,000,000	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,673,626,960				100%	2,673,626,960	
7 01 03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,673,626,960				100%	2,673,626,960	
7 01 03	2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPd yang disusun	1 dokumen	16,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	16,000,000	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan Jumlah kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang difasilitasi Jumlah Lembaga dan Organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi Jumlah Organisasi Perempuan yang kegiatannya Fasilitasi Jumlah paket operasional dan honor petugas posko Covid-19 Kelurahan yang dibayarkan Jumlah paket sarana prasarana kelurahan yang dibangun Jumlah transaksi honor kader motivator yang dibayarkan Jumlah transaksi honor petugas dan pendamping kegiatan yang dibayarkan	4 kali 30 kelompok 5 1 lembaga 12 kali 10 paket 12 transaksi 36 transaksi 60 transaksi	2,657,626,960	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 kali 30 kelompok 5 1 lembaga 12 kali 10 paket 12 transaksi 36 transaksi 60 transaksi	2,657,626,960	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	35,650,000			100%	35,650,000	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	35,650,000			100%	35,650,000	
7 01 04 2.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Jumlah paket pengadaan seragam linmas yang	2 kali 1 paket	35,650,000	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kali 1 paket	35,650,000	KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
TOTAL				28,452,487,774				28,169,297,374	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto**

Nama PD : **KECAMATAN KRANGGAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
7			UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01		KECAMATAN										
7	01	01		12,710,661,688				12,710,661,688					
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	11,892,015,226		100%	11,892,015,226				
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	16,000,000		100%	16,000,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan RKA yang disusun	3 dokumen	10,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	10,000,000	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	6,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	8,492,383,961			100%	8,492,383,961		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibawarkan	12 Transaksi	8,340,423,961	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	8,340,423,961	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibawarkan	12 Transaksi	141,960,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	141,960,000	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang diproses	8 Dokumen	10,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	125,000,000			100%	125,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ongkos jahit yang disediakan Jumlah pakaian Baju Putih yang disediakan Jumlah pakaian Batik Matahari yang disediakan Jumlah pakaian Batik Mojo yang disediakan Jumlah pakaian Olah Raga yang	184 potong 92 potong 92 potong 92 potong 92 potong	125,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	184 potong 92 potong 92 potong 92 potong 92 potong	125,000,000	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	461,073,665			100%	461,073,665		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 buah	17,423,364	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 buah	17,423,364	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam ATK yang disediakan	4 paket	67,449,800			4 paket	67,449,800	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah macam peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	5,000,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 paket	5,000,000	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	20 macam	20,093,547	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 macam	20,093,547	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 macam	38,683,091	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 macam	38,683,091	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 macam	15,902,636	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 macam	15,902,636	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 kali	296,521,227	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	66 kali	296,521,227	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	333,000,000			100%	333,000,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 transaksi	88,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	88,000,000	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 transaksi	245,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	245,000,000	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	2,464,557,600			100%	2,464,557,600		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Pemerintahan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat secara berkala	1 unit	40,707,600	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	40,707,600	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 macam	23,850,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 macam	23,850,000	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor yang direhabilitasi dan dipelihara secara berkala	2 gedung	2,400,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 gedung	2,400,000,000	KECAMATAN KRANGGAN
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	758,646,462			100%	758,646,462		
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	758,646,462			100%	758,646,462		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	60,000,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	60,000,000	KECAMATAN KRANGGAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah evaluasi dana kelurahan yang dilaksanakan Jumlah Festival peringatan hari besar yang diikuti Jumlah keluarga yang mendapat santunan uang duka Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi kegiatannya Jumlah sosialisasi dana kelurahan yang dilaksanakan Jumlah transaksi	1 kegiatan 4 Kegiatan 60 keluarga 6 Lembaga 1 kegiatan 12 transaksi	618,646,462	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kegiatan 4 Kegiatan 60 keluarga 6 Lembaga 1 kegiatan 12 transaksi	618,646,462	KECAMATAN KRANGGAN
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Lomba-Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	2 kegiatan	80,000,000	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	80,000,000	KECAMATAN KRANGGAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	60,000,000			100%	60,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS dengan 3 Pilar yang dilaksanakan	100%	60,000,000			100%	60,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan	12 Koordinasi	60,000,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Koordinasi	60,000,000	KECAMATAN KRANGGAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN			3,264,205,033				3,264,205,033	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	632,600,654			100%	632,600,654	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	293,940,000			100%	293,940,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	293,940,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	293,940,000	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	44,482,453			100%	44,482,453	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	3,369,999	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	3,369,999	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket atk yang disediakan	6 paket	9,205,045	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 paket	9,205,045	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	3,542,636	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	3,542,636	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6,627,273	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	6,627,273	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	1,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	1,800,000	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	12 kali	19,937,500	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	19,937,500	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	169,496,728			100%	169,496,728	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 transaksi	55,096,728	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	55,096,728	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 transaksi	114,400,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	114,400,000	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	124,681,473			100%	124,681,473	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	12 transaksi	70,732,873	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	70,732,873	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	3 unit	5,104,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 unit	5,104,000	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	12 paket	48,844,600	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	48,844,600	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,626,114,379			100%	2,626,114,379	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,626,114,379			100%	2,626,114,379	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	14,860,091	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	14,860,091	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah evaluasi dana kelurahan yang dilaksanakan Jumlah Festival peringatan hari besar yang diikuti Jumlah keluarga yang mendapat santunan uang duka Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi kegiatannya Jumlah sosialisasi dana kelurahan yang dilaksanakan Jumlah transaksi beasiswa/ fdkr	1 kegiatan 4 Kegiatan 60 keluarga 6 Lembaga 1 kegiatan 12 transaksi	2,611,254,288	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kegiatan 4 Kegiatan 60 keluarga 6 Lembaga 1 kegiatan 12 transaksi	2,611,254,288	KELURAHAN KRANGGAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	5,490,000			100%	5,490,000	
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS dengan 3 Pilar yang dilaksanakan	100%	5,490,000			100%	5,490,000	
7 01 04 2.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan	12 Koordinasi	5,490,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Koordinasi	5,490,000	KELURAHAN KRANGGAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN			3,278,244,956				3,590,072,544	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	561,785,055			100%	601,966,652	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	240,360,000			100%	264,396,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pengelola kegiatan yang honorinya dibayarkan tepat waktu	12 transaksi	240,360,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	264,396,000	KELURAHAN MIJI
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	46,349,370			100%	49,213,660	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	6 Macam	2,263,600	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Macam	2,263,600	KELURAHAN MIJI
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bahan atk	31 Macam	11,425,366	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31 Macam	11,425,366	KELURAHAN MIJI
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	16 Macam	2,217,500	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 Macam	2,217,500	KELURAHAN MIJI
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Macam	5,705,454	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Macam	6,275,999	KELURAHAN MIJI
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	1,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	1,800,000	KELURAHAN MIJI
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi SKPD yang	12 kali 7 kali 12 kali	22,937,450	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kali 7 kali 12 kali	25,231,195	KELURAHAN MIJI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	142,262,610				100%	142,262,610	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	12 Transaksi	27,862,610	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Transaksi	27,862,610	KELURAHAN MIJI
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Transaksi	114,400,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Transaksi	114,400,000	KELURAHAN MIJI
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	132,813,075				100%	146,094,382	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan	11 Unit	50,685,091	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	55,753,600	KELURAHAN MIJI
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	4 Macam	4,382,500	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Macam	4,820,750	KELURAHAN MIJI
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara secara berkala	1 Unit	77,745,484	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	85,520,032	KELURAHAN MIJI
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	2,711,453,901				100%	2,982,599,292	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	2,711,453,901				100%	2,982,599,292	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang	4 Dokumen	15,844,863	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	17,429,350	KELURAHAN MIJI
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarpras kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	7 Kegiatan	1,418,110,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Kegiatan	1,559,921,000	KELURAHAN MIJI
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	12 Kegiatan	1,277,499,038	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kegiatan	1,405,248,942	KELURAHAN MIJI
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	5,006,000				100%	5,506,600	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS dengan 3 Pilar yang dilaksanakan	100%	5,006,000				100%	5,506,600	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan	2 Kegiatan	5,006,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	5,506,600	KELURAHAN MIJI
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN				2,078,264,671				2,118,839,119	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	537,870,688				100%	547,637,256	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	219,000,000				100%	223,380,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Transaksi administrasi pelaksanaan tugas ASN yang diproses	12 bulan	219,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	223,380,000	KELURAHAN MERI
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	73,440,100				100%	74,828,472	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	1 paket	4,021,500		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	4,021,500	KELURAHAN MERI
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah macam alat tulis kantor yang tersedia	40 macam	13,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 macam	13,260,000	KELURAHAN MERI
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	20 macam	4,329,600		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 macam	4,416,192	KELURAHAN MERI
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 macam	3,655,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 macam	3,728,100	KELURAHAN MERI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 macam	1,800,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 macam	1,836,000	KELURAHAN MERI
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 kali	46,634,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	47,566,680	KELURAHAN MERI
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	10,000,000			100%	10,200,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor yang terpenuhi	1 unit	10,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	10,200,000	KELURAHAN MERI
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	115,805,588			100%	118,121,700	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 transaksi	30,005,588		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	30,605,700	KELURAHAN MERI
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 transaksi	85,800,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	87,516,000	KELURAHAN MERI
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	119,625,000			100%	121,107,084	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat secara berkala	15 unit	74,104,200	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 unit	75,586,284	KELURAHAN MERI
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	8 unit	8,605,100	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 unit	8,605,100	KELURAHAN MERI
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor yang direhabilitasi dan dipelihara secara berkala	1 gedung	36,915,700			1 gedung	36,915,700	KELURAHAN MERI
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,534,629,583			100%	1,565,322,175	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	1,534,629,583			100%	1,565,322,175	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang	2 Kegiatan	19,832,050		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan	20,228,691	KELURAHAN MERI
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah evaluasi dana kelurahan yang dilaksanakan Jumlah Festival peringatan hari besar yang diikuti Jumlah keluarga yang mendapat santunan uang duka Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi kegiatannya Jumlah sosialisasi dana kelurahan yang dilaksanakan Jumlah transaksi honorarium fdkr	1 kegiatan 4 Kegiatan 60 keluarga 6 Lembaga 1 kegiatan 12 transaksi	576,181,550		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kegiatan 4 Kegiatan 60 keluarga 6 Lembaga 1 kegiatan 12 transaksi	587,705,181	KELURAHAN MERI
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat Jumlah pemberdayaan masyarakat	1 tahun 12 bulan	938,615,983	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun 12 bulan	957,388,303	KELURAHAN MERI
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	5,764,400			100%	5,879,688	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS dengan 3 Pilar yang dilaksanakan	100%	5,764,400			100%	5,879,688	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan	12 Koordinasi	5,764,400		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Koordinasi	5,879,688	KELURAHAN MERI
7 01	KECAMATAN			1,524,815,956				1,555,174,108	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	611,958,513			100%	624,059,517	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	162,480,000			100%	165,729,600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Transaksi administrasi pelaksanaan tugas ASN yang diproses Jumlah Transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan Jumlah transaksi honor pengelola yang	12 transaksi 12 transaksi 12 transaksi	162,480,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi 12 transaksi 12 transaksi	165,729,600	KELURAHAN SENTANAN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	71,744,100			100%	72,964,246	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik Jumlah paket komponen instalasi listrik kantor yang disediakan Jumlah paket komponen instalasi listrik / PDAM	3 paket 12 paket 12 paket	2,783,200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 paket 12 paket 12 paket	2,838,864	KELURAHAN SENTANAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	10,737,300	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	10,737,300	KELURAHAN SENTANAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	5,228,100	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 paket	5,332,662	KELURAHAN SENTANAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	4,724,500	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	4,819,000	KELURAHAN SENTANAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 paket	1,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 paket	1,836,000	KELURAHAN SENTANAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 kali	46,471,000		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	47,400,420	KELURAHAN SENTANAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	136,175,913			100%	138,899,431	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	12 transaksi	20,975,913	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	21,395,431	KELURAHAN SENTANAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 transaksi	115,200,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 transaksi	117,504,000	KELURAHAN SENTANAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	241,558,500			100%	246,466,240	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat secara berkala Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat	2 unit 3 unit	39,117,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 unit 3 unit	39,899,340	KELURAHAN SENTANAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1 paket	6,270,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	6,395,400	KELURAHAN SENTANAN
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara secara berkala	1 paket	196,171,500	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	200,171,500	KELURAHAN SENTANAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	893,146,843			100%	911,009,779	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	893,146,843			100%	911,009,779	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang	2 dokumen	9,812,100	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	10,008,342	KELURAHAN SENTANAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarpras kelurahan	1 paket	306,529,500	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	312,660,090	KELURAHAN SENTANAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	1 paket 1 paket	576,805,243	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket 1 paket	588,341,347	KELURAHAN SENTANAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	19,710,600			100%	20,104,812	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS dengan 3 Pilar yang dilaksanakan	100%	19,710,600			100%	20,104,812	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan	12 kali	19,710,600	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 kali	20,104,812	KELURAHAN SENTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
7													
7			UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01		KECAMATAN										
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1,385,891,212 384,380,633			100%	1,413,609,036 392,068,246			
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	140,520,000		100%	143,330,400			
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Transaksi administrasi pelaksanaan tugas ASN yang diproses yang dilaksanakan Jumlah Transaksi administrasi pelaksanaan tugas ASN yang diproses yang dilaksanakan	12 Transaksi 12 Transaksi	140,520,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Transaksi 12 Transaksi	143,330,400	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	47,877,753		100%	48,835,308			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5,141,091	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	5,243,913	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	1 paket	13,227,254	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	13,491,799	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	4,374,362	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	4,461,849	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	7,178,546	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	7,322,117	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	1 paket	1,800,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	1,836,000	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	10 kali	16,156,500	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 kali	16,479,630	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	10,000,000			100%	10,200,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara Jumlah unit peralatan kantor yang disediakan	8 unit 1 unit	10,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 unit 1 unit	10,200,000	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	89,287,243			100%	91,072,988		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Transaksi 12 Transaksi 12 Transaksi	31,687,243	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi 12 Transaksi 12 Transaksi	32,320,988	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 Transaksi	57,600,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	58,752,000	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	96,695,637			100%	98,629,550		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	8 transaksi	26,695,637	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 transaksi	27,229,550	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 macam	5,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 macam	5,100,000	KELURAHAN JAGALAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi i gedung kantor	1 paket	65,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 paket	66,300,000	KELURAHAN JAGALAN
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	980,105,033			100%	999,707,133		
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	980,105,033			100%	999,707,133		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	14,982,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	15,281,640	KELURAHAN JAGALAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarpras kelurahan		248,341,160		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		253,307,983	KELURAHAN JAGALAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lomba-Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	2 kegiatan	716,781,873		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kegiatan	731,117,510	KELURAHAN JAGALAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	21,405,546			100%	21,833,657	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS dengan 3 Pilar yang dilaksanakan	100%	21,405,546			100%	21,833,657	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan	12 Koordinasi	21,405,546		[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	12 Koordinasi	21,833,657	KELURAHAN JAGALAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				1,185,699,922			1,220,628,037	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	454,789,111			100%	463,684,893	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	142,119,996			100%	144,962,396	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Transaksi administrasi pelaksanaan tugas ASN yang diproses Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang	12 Transaksi 12 Transaksi	142,119,996	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Transaksi 12 Transaksi	144,962,396	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	58,896,200			100%	60,074,124	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	5 Komponen 4 Paket	3,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Komponen 4 Paket	3,570,000	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket ATK yang disediakan	5 Paket	8,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Paket	8,160,000	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Macam 4 Paket	4,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Macam 4 Paket	4,590,000	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	5,966,200	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Paket	6,085,524	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	12 Paket	1,980,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Paket	2,019,600	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 kali	34,950,000		[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 kali	35,649,000	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Daerah yang disediakan	100%	10,000,000			100%	10,000,000	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	1 Unit	10,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	10,000,000	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	112,560,222			100%	114,811,426	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Transaksi	54,960,222	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	56,059,426	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	12 Transaksi	57,600,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Transaksi	58,752,000	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	131,212,693			100%	133,836,947	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan Jumlah servis kendaraan dinas Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang	2500 liter 9 kali 9 transaksi	28,667,636	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2500 liter 9 kali 9 transaksi	29,240,989	KELURAHAN PURWOTENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	15 Unit	12,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	12,240,000	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 Paket	90,545,057	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	92,355,958	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%	702,910,811			100%	728,383,144	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%	702,910,811			100%	728,383,144	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang	1 Dokumen	7,500,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	7,650,000	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarpras kelurahan	1 Kegiatan	135,895,300	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	138,613,206	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah festival dan Peringatan Hari Besar Nasional yang diikuti dan diselenggarakan Jumlah kegiatan organisasi perempuan yang terfasilitasi Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat	5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Lembaga	559,515,511	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Lembaga	582,119,938	KELURAHAN PURWOTENGAH
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	28,000,000			100%	28,560,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS dengan 3 Pilar yang dilaksanakan	100%	28,000,000			100%	28,560,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan Jumlah Pakaian Anggota Linmas yg terpenuhi	1 Kegiatan 30 Paket	28,000,000	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan 30 Paket	28,560,000	KELURAHAN PURWOTENGAH
TOTAL				25,427,783,438				25,873,189,565	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Mojokerto

Nama PD : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
8													
8	01		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9,481,942,044		0			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		4,569,843,555		100%	0			
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program yang disusun	8 Dokumen	37,130,500		8 Dokumen	0			
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8 Dokumen	37,130,500	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	3,194,110,850		100%	0			
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN dibayarkan Tepat Waktu	12 Bulan	3,020,274,390	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Keuangan Yang Honorariumnya dibayarkan Tepat Waktu	12 Bulan	170,870,400	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1 dokumen	2,966,060	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	75 potong	38,344,980			75 potong	0		
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	75 potong	38,344,980	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	75 potong	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	535,745,064			100%	0		
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	8,866,760	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat Tulis Kantor Yang disediakan Jumlah Kebutuhan Komputer dan Kelengkapannya	12 bulan 12 bulan	84,093,406	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 12 bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Yang disediakan	12 bulan	44,286,350	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	12 Bulan	31,119,496	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Perundang - undangan yang dibaca/dimanfaatkan	12 bulan	16,607,080	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan Minuman Kantor Yang disediakan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rapat Koordinasi	12 bulab 12 bulan	350,771,972	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulab 12 bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	72,053,500			100%	0		
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang tersedia	21 unit	72,053,500	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening telepon, internet, PDAM, petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	241,516,050			12 bulan	0		
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Internet dan PDAM yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	79,948,050	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	12 bulan	161,568,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pekerjaan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan gedung yang dilaksanakan sesuai rencana	95%	450,942,611			95%	0		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	12 Bulan	156,194,650	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	12 Bulan	31,620,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi asil Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara	1 unit	263,127,961	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi	5,04 %	947,060,322			5,04 %	0	
8 01 02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembinaan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan	49 kali	947,060,322			49 kali	0	
8 01 02	2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jumlah pendidikan wawasan kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, bhineka tunggal Ika dan sejarah kebangsaan Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan	9 kali 14 kali 15 kali	947,060,322	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 kali 14 kali 15 kali	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase LSM/Ormas/Parpol yang aktif	69,49 %	877,470,097			69,49 %	0	
8 01 03	2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol dan Parpol yang dibina.	9 parpol 20 kali	877,470,097			9 parpol 20 kali	0	
8 01 03	2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina (bantuan keuangan 9 parpol), verifikasi bantuan keuangan Parpol Jumlah pemantauan perkembangan politik Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat dan generasi muda	3 Kegiatan 8 laporan 8 kali	877,470,097	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan 8 laporan 8 kali	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM/Ormas yang aktif	69,49 %	300,818,843			69,49 %	0	
8 01 04	2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM/Ormas yang dibina dan dimonitoring	26 kali	300,818,843			26 kali	0	
8 01 04	2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah forum diskusi Ormas Jumlah jambore Ormas Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring	14 kali 2 kali 10 kali	300,818,843	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 kali 2 kali 10 kali	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase konflik SARA yang ditangani	100 %	638,951,302			100 %	0	
8 01 05	2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pelaksanaan pekerjaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	23 kali	638,951,302			23 kali	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Hibah FKUB Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan	1 kali 14 kali 8 kali	638,951,302	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kali 14 kali 8 kali	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani	100 %	2,147,797,925			100 %	0	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	79 kali	2,147,797,925			79 kali	0	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	umlah pembinaan FKDM, FKDD, pengamanan wilayah, pelatihan intelijen dan Rakor Tim Pora	29 kali	1,283,442,975	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29 kali	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Rakor Tim Verifikasi Hibah dan Rakor Tim Penanganan Konflik Sosial	14 kali	399,354,950	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 kali	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Silaturahmi Forkopimda	36 kali	465,000,000	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 kali	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL				9,481,942,044				-	

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Target Capaian Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Daerah Kota Mojokerto tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 1: Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Uraian	Satuan	Target	Capaian
			2022	2020
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,40	78,04
2.	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	%	89%	87,62%
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	B
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,6-4,4	-3,69
5.	Indeks Infrastruktur	Indeks	86,06	84,52
6.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	76,25	76,20
7.	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,329
8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,30	93,26
9.	Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	386.000.000.000	n/a

Adapun Target Indikator Sasaran Tahun 2022 beserta capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6. 2: Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022

NO	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Capaian 2020	Target 2022
1	2	3	6	8
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai maksimum dan minimum komponen : 1. AHH 2. Angka Melek Huruf 3. Rata-rata Lama Sekolah 4. Konsumsi per kapita	78,04	78,40
1.2	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	<i>Jumlah pelanggaran perda yang ditangani dibagi Jumlah perda dikali 100%</i>	87,62%	89%
1.3	Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	B	BB

NO	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Capaian 2020	Target 2022
1	2	3	6	8
1.4	Pertumbuhan Ekonomi	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$	-3,69	3,6-4,4
1.5	Indeks Kesalehan Sosial		76,20	76,25
1.6	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$	0,329	0,350
1.7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3[(X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis})]$	93,26	93,30
1.8	Kapasitas Fiskal Daerah		n/a	386.000.000. 000
1.9	Indeks Infrastruktur	$30\% \times \text{Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum} + 30\% \times \text{Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman} + 20\% \times \text{Indeks Infrastruktur LLAJ} + 20\% \times \text{IKLHD}$	84,52	86,06
B	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar			
1.1	Pendidikan			
1.1.1	Indeks pendidikan	$I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$	0,730	0,735
1.2	Kesehatan			
1.2.1	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	0,820	0,822
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.3.1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	<i>(Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap + Persentase Penurunan Luas Wilayah Rawan Genangan + Persentase Fasilitas Publik Dalam Kondisi Baik) dibagi 3</i>	80	89,56%
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1.4.1	Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman	<i>(Prosentase penurunan kawasan kumuh + Prosentase rumah dengan akses sanitasi yang layak + Prosentase rumah yang mendapat akses air minum yang layak) dibagi 3</i>	91,32	96,96%
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1.5.1	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan	<i>Jumlah pelanggaran perda yang ditangani dibagi Jumlah perda dikali 100%</i>	87,62%	89%
1.5.2	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	<i>Jumlah konflik SARA yang ditangani dibagi jumlah konflik SARA yang terjadi dikali 100%</i>	n/a	100%
1.5.3	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	<i>Jumlah konflik sosial yang ditangani dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100%</i>	n/a	100%
1.6	Sosial			
1.6.1	Angka Kemiskinan	$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$	6,24	5,63 -5,83
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
2.1	Tenaga Kerja			
2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<i>Jumlah pengangguran dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%</i>	6,74	5,6-6,0
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<i>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</i>	90,59	91,50
2.3	Pangan			

NO	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Capaian 2020	Target 2022
1	2	3	6	8
3.2.2	Indeks Pengeluaran Per Kapita	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{maks}) - \ln(PPP_{min})}$	0,793	0,796
2.4	Lingkungan Hidup			
2.4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	57,73	57,83
2.5	Perhubungan			
2.5.1	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	<i>Indeks Infrastruktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	91,6	92,60
2.6	Komunikasi dan Informatika			
2.6.1	Indeks SPBE		n/a	3,40
2.7	Penanaman Modal			
2.7.1	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)		352.530.00 0.000	365.000.00 0.000
2.7.2	Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya	<i>Rata-rata pertumbuhan PDRB selain sektor perdagangan, perindustrian dan pariwisata</i>	-0,21	2,6-3,2
2.8	Kebudayaan			
2.8.1	Jumlah apresiasi seni dan budaya		0	8
3	Fokus Layanan Urusan Pilihan			
3.1	Pariwisata			
3.1.1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	<i>Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata dibagi jumlah PDRB dikali 100%</i>	-8,16	2,0%
3.2	Perdagangan			
3.2.1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	<i>Jumlah kontribusi PDRB dari Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dibagi jumlah PDRB dikali 100%</i>	-9,2	2,5-3,4
3.2.2	Laju Inflasi	$\{[(1 + \Delta Inf1)(1 + \Delta Inf2)(1 + \Delta Inf3)]^{1/t} - 1$	1,93	1,9-2,4
3.3	Perindustrian			
3.3.1	Pertumbuhan PDRB sektor Industri	<i>Jumlah kontribusi PDRB dari Kategori Industri Pengolahan dibagi jumlah PDRB dikali 100%</i>	-3,55	1.5-1,9
4	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
4.1	Keuangan			
4.1.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Pendapatan Asli Daerah dibagi (Bantuan Pusat, + Bantuan Provinsi + Pinjaman)</i>	35,61	30,777
4.2	Kepegawaian			
4.2.1	Indeks Profesionalitas ASN		Rendah	Tinggi
4.2.2	Sistem Merit		Buruk	Baik
4.3	Pengawasan			
4.3.1	Opini BPK	<i>Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah</i>	WTP	WTP
4.3.2	Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		0	1
4.3.3	Indeks Manajemen Resiko		1	2
4.4	Sekretariat Daerah			
4.4.1	Nilai SAKIP	<i>Nilai SAKIP</i>	B	BB
4.4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<i>Nilai IKM seluruh PD dibagi Jumlah PD</i>	84,35	81,26- 88,30

BAB VII

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2022, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022;
- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Mojokerto Tahun 2022;
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun 2022;
- d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

